BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR **4** TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa visi dan misi Bupati Pohuwato dan wakil Bupati Pohuwato terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan diselaraskan dengan RTRW, RPJMD Provinsi serta RPJMN;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati Pohuwato adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pohuwato sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pohuwato dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Pohuwato.

21. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati Pohuwato dan wakil Bupati Pohuwato.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
27. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
29. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
33. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
34. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
37. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
38. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati Pohuwato serta target pembangunan nasional.
39. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
40. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di

masa yang akan datang.

41. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
42. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
43. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
44. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
45. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
46. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
47. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
48. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
49. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
50. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
51. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
52. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
53. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari

serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

54. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
55. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
56. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
57. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
58. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
59. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
60. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
61. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
62. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
63. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki

hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan Tahun 2020.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Gorontalo dan RTRW.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berfungsi sebagai :

a. Landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah jangka 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahuh 2021 sampai dengan 2026.
b. Pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Periode RPJMD.
c. Pedoman dalam Penyusunan RKPD sesuai Periode RPJMD.
d. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD
e. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Periode RPJMD

Pasal 4

1. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

   Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;

Bab IV : Permasalahan Dan Isu Srategis Daerah;

Bab V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bab IX : Penutup.

2. Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021- 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

1. Bupati Pohuwato melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD;
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
   a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
   b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
   a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
   c. hasil rencana pembangunan daerah.
4. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh BAPPPEDA/BAPERLITBANG.

Pasal 6

BAPPPEDA/BAPERLITBANG dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

1. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
   b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
   c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
2. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
3. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJMD 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pohuwato dan RPJMD Provinsi Gorontalo serta mengacu pada RPJMN.

Pasal 9

Jika pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan pada tahun 2024, maka dokumen RPJMD ini masih tetap berlaku dan menjadi pedoman bagi penjabat bupati dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal , 24 Agustus 2021
BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 24 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ZUKRI SUROTINOJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR **235**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (**4** / **17** 2021)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR **4** TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Pohuwato, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisiPohuwatof; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisi Pohuwato adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati Pohuwato dan Wakil Bupati Pohuwato terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu : persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR **199**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasa-Nyalah rangkaian proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026 dapat di susun dengan baik, lancar dan sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Penyusunan RPJMD ini tidak luput dari kontribusi dan dukungan banyak pihak, terutama oleh Kepala Baperlitbang dan tim penyusun RPJMD Kabupaten Pohuwato, ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, para pimpinan OPD beserta jajaran, unsur perguruan tinggi, masyarakat, pemuda, mahasiswa dan insan pers serta lebih khusus kepada Burung Indonesia yang telah memfasilitasi bimbingan teknis (Bimtek) RPJMD berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana, kerjasama dengan Badan Kebijakan Fiscal Kementerian Keuangan RI (BKF) dan staf Ahli Kemendagri.

Semoga dokumen RPJMD ini dapat bermanfaatan sebagaimana tujuannya yakni menjadi acuan dan pedoman dalam percepatan pembangunan di Bumi Panua tercinta.

Marisa, Agustus 2021

SAIPUL A MBUINGA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK ix
DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen 9
1.4. Maksud dan Tujuan 14
1.5. Sistematika Penulisan 15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **18**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 19
2.2. Aspek Kesejaheraan Masyarakat 79
2.3. Aspek Pelayanan Umum 101
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 145

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH **160**
3.1. Kinerja Keuangan Daerah 160
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 167
3.3. Kerangka Pendanaan 171

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH **177**
4.1. Permasalahan Pembangunan 177
4.2. Isu Strategis 202

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 215
5.1. Visi 215
5.2 Misi 216
5.3 Tujuan dan Sasaran..... 217
5.4 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Pohuwato, RPJPD Provinsi Gorontalo dan RPJMN 2020 - 2024 226

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 232
6.1. Strategi..... 232
6.2 Arah Kebijakan..... 239

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 296
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 296
7.2. Program Perangkat Daerah 296

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 337

BAB IX PENUTUP 333

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan Kategori Pedalaman	22
Tabel 2.2	Jumlah Desa/ Kelurahan Ketegori Terpencil	23
Tabel 2.3	Jumlah Desa/ Kelurahan di Kawasan Pesisir	24
Tabel 2.4	Jumlah Desa/ Kelurahan di Kawasan Pegunungan	25
Tabel 2.5	Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Pohuwato	27
Tabel 2.6	Struktur dan Karakteristik Geologi Kabupaten Pohuwato	28
Tabel 2.7	Potensi Kandungan Geologi Kabupaten Pohuwato	29
Tabel 2.8	Nama dan Panjang Sunga-sungai di Kabupaten Pohuwato	30
Tabel 2.9	Jumlah Curah Hujan, hari Hujan dan rata-rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Pohuwato	32
Tabel 2.10	Arah Angin Terbanyak, Kecepatan dan Arah Angin Saat Kecepatan Maksima Menurut Bulan di Kabupaten Pohuwato	32
Tabel 2.11	Suhu Udara, Kelembaban Udara dan Tekanan Udara Rata-rataMenurut Bulan Di Kabupaten Pohuwato	33
Tabel 2.12	Arahan Peruntukan dan Komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Pohuwato	39
Tabel 2.13	Lebar Sempadan Petani	45
Tabel 2.14	Luas Hutan Mangrove Kabupaten Pohuwato Tahun 2020	51
Tabel 2.15	Luasan Penutupan Lahan di Kabupaten Pohuwato	52
Tabel 2.16	Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Pohuwato	53
Tabel 2.17	Luas Panen dan Produksi Padi 2016 s.d 2020	54
Tabel 2.18	Luas Panen dan Produksi Jagung Tahun 2016 s/d 2020	55
Tabel 2.19	Luas Panen Ubi Kayu dan Ubi Jalar	56
Tabel 2.20	Luas Panen dan Produksi Kelapa dan kakao	57
Tabel 2.21	Luas Panen Karet, Cengkeh dan Kopi	58
Tabel 2.22	Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2020	59
Tabel 2.23	Produksi Sayur-sayuran Tahun 2020	60
Tabel 2.24	Jumlah Populasi Ternak Besar dan Kecil (Ruminansia)	61
Tabel 2.25	Perkembangan Ternak Unggas 2020	62
Tabel 2.26	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	63
Tabel 2.27	Jenis dan Produksi Perikanan Tangkap	63
Tabel 2.28	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	64
Tabel 2.29	Obyek Wsata di Kabupaten Pohuwato	65
Tabel 2.30	Struktur dan Karakteristk Geolog Kabupaten Pohuwato	66

Tabel 2.31	Potensi Kandungan Geologi Kabupaten Pohuwato	67
Tabel 2.32	Luas Kawasan Hutan	67
Tabel 2.33	Bencana Alam Tahun 2018-2020	71
Tabel 2.34	Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato (jiwa)	78
Tabel 2.35	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di anut	78
Tabel 2.36	Distribusi PDRB-ADHB Menurut Lapangan Usaha	81
Tabel 2.37	Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha	81
Tabel 2.38	Perkembangan Kemisikinan	84
Tabel 2.39	Capaian AKB Kabupaten Pohuwato	90
Tabel 2.40	Perkembangan AKI Kabupaten Pohuwato	91
Tabel 2.41	Angka Melek Huruf Kabupaten Pohuwato 2019	93
Tabel 2.42	Perkembangan APM/APK Kabupaten Pohuwato	94
Tabel 2.43	APS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	95
Tabel 2.44	Persentase Penduduk Usia 7 -24 Tahun berdasarkan status sekolah	96
Tabel 2.45	APM Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019	96
Tabel 2.46	Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2020	97
Tabel 2.47	Tingkat Pengangguran Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2020	99
Tabel 2.48	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Pohuwato	99
Tabel 2.49	Seni, Budaya dan Olahraga Perkecamatan Tahun 2020	100
Tabel 2.50	Jumlah Sekolah, Murid, Rasio Murid dan Guru Taman Kanak-kanak Negeri/ Swasta Kabupaten Pohuwato	102
Tabel 2.51	Sekolah Raudatul Athfal (RA)/TK dibawah Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato Tahun 2020	103
Tabel 2.52	Jumlah Sekolah, Murid, Rasio Murid dan Guru Sekolah Dasar Kabupaten Pohuwato	103
Tabel 2.53	Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI)/SD dibawah Kementerian Agama Kab. Pohuwato Tahun 2019	104
Tabel 2.54	Jumlah Sekolah, Murid, Rasio Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama/SMP Kabupaten Pohuwato	105
Tabel 2.55	Sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts)/SMP dibawah Kementerian Agama Kab. Pohuwato	106
Tabel 2.56	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pohuwato	107
Tabel 2.57	Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2020	108
Tabel 2.58	Data panjang Jalan di Kabupaten Pohuwato	109
Tabel 2.59	Kondisi Jalan Menurut Kecamatan Tahun 2019	110
Tabel 2.60	Irgasi Berdasarkan Status Kewenangan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2020	110
Tabel 2.61	Pencapaan Air Minum dan Sanitasi	111
Tabel 2.62	Pencapaian Air Minum dan Sanitasi Per Kecamatan	112

Tabel 2.63	Status Kepemilikan Rumah Tahun 2020	113
Tabel 2.64	Persentase Rumah Belum Layak/Sehat Tahun 2020	114
Tabel 2.65	Persentase Kekumuhan Per Kecamatan	114
Tabel 2.66	Kondisi Kriminalitas 2016-2020	115
Tabel 2.67	Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Pohuwato	116
Tabel 2.68	Bencana Banjir Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 - 2020	117
Tabel 2.69	Jumlah DTKS Per Kecamatan	119
Tabel 2.70	Target dan realisasi PMKS Penerma Bantuan	119
Tabel 2.71	Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin	120
Tabel 2.72	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Menurut Klarifikasi Industri Kabupaten Pohuwato Tahun 2019	120
Tabel 2.73	Kasus KDRT dan Anak	121
Tabel 2.74	Ketersediaan Pangan	122
Tabel 2.75	Penguatan Cadangan Pangan	122
Tabel 2.76	Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2020	123
Tabel 2.77	Luas Tanah dan Bangunan Bersertifikat Tahun 2020	124
Tabel 2.78	Luas Tanah dan Bangunan Bersertifikat Per Kecamatan Tahun 2020	124
Tabel 2.79	Fasilitas Persampahan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020	125
Tabel 2.80	Kondsii Penanganan Sampah	125
Tabel 2.81	Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan	126
Tabel 2.82	Informasi status air sungai di Kabupaten Pohuwato Tahun 2020	127
Tabel 2.83	Realisasi Adminduk	128
Tabel 2.84	Status IDM KabupatenPohuwato 2016 dan 2020	128
Tabel 2.85	Rekapan Jumlah Permodalan BUMDES yang disalurkan Melalui BUMDES kepada Masyarakat Tahun 2019	129
Tabel 2.86	Faslitas Umum KB Tahun 2020	132
Tabel 2.87	Fasilitas Umum Perhubungan	132
Tabel 2.88	Akses Transportasi Pada Desa Terpencil	133
Tabel 2.89	Perkembangan Data Kenderaan Kabupaten Pohuwato	134
Tabel 2.90	Perkembangan Akses Komunkasi	135
Tabel 2.91	Investor Kabupaten Pohuwato	136
Tabel 2.92	Data Perizinan Kabupaten Pohuwato 2020	137
Tabel 2.93	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pohuwato	140
Tabel 2.94	Jumlah Rumah Makan dan Restoran per Kecamatan Tahun 2020	141
Tabel 2.95	Jumlah Pedagang Kabupaten Pohuwato Tahun 2019	142
Tabel 2.96	Jumlah Pasar di Kabupaten Pohuwato	143
Tabel 2.97	Total Produktivitas Daerah	150
Tabel 2.98	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kenderaan	151

Tabel 2.99	Jumlah Orang/barang yang terangkut	151
Tabel 2.100	Jumlah orang/barang di Pelabuhan	152
Tabel 2.101	Luas Wilayah Produktif	152
Tabel 2.102	Kondisi Perbankan di Kabupaten Pohuwato	153
Tabel 2.103	Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Pohuwato	153
Tabel 2.104	Daya, Produksi dan Distribusi Listrik Kabupaten Pohuwato	156
Tabel 2.105	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Pohuwato	156
Tabel 2.106	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon Tahun 2020	157
Tabel 2.107	Rasio Tenaga Kerja PNS	159
Tabel 3.1	Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 –2020 Kabupaten Pohuwato	162
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pohuwato	166
Tabel 3.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan AparaturKabupaten Pohuwato	167
Tabel 3.4	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pohuwato	168
Tabel 3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pohuwato	169
Tabel 3.6	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pohuwato	170
Tabel 3.7	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 – 2026	173
Tabel 3.8	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato	175
Tabel 3.9	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato	176
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	219
Tabel 5.2	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026	222
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Pohuwato 2021 – 2026	235
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato 2021 – 2026 disertai Pagu Indikatif	264
Tabel 7.1	Indikasi Program Beserta Kebutuhaan Pendanaan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026	297
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026	330
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Sasaran Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026	331

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1	Presentase luas wilayah kecamatan	20
Grafik 2.2	Luas Kecamatan dan Jumlah Desa	21
Grafik 2.3	Kunjungan Wisata di Kabupaten Pohuwato	66
Grafik 2.4	Persentase Luas Hutan Perkecamatan	68
Grafik 2.5	Frekuansi Banjir Perkecamatan Tahun 2020	71
Grafik 2.6	Sebaran Ancaman Krisis Aid Di kabupaten Pohuwato	76
Grafik 2.7	Perkembangan PDRB Kabupaten Pohuwato	79
Grafik 2.8	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pohuwato	79
Grafik 2.9	PDRB Perkapita Kabupaten Pohuwato	82
Grafik 2.10	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita	82
Grafik 2.11	Persentase Kemiskinan	84
Grafik 2.12	IPM Kabupaten Pohuwato 2016-2020	85
Grafik 2.13	Gini Ratio Provinsi Gorontalo	86
Grafik 2.14	Inflasi Provinsi Gorontalo	86
Grafik 2.15	Perkembangan Stunting Kabupaten Pohuwato	87
Grafik 2.16	Persentase Stunting pada BADUTA di Kabupaten Pohuwato	88
Grafik 2.17	Sebaran Stunting Per Kecamatan Tahun 2019	89
Grafik 2.18	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pohuwato	91
Grafik 2.19	RLS dan HLS Kabupaten Pohuwato	93
Grafik 2.20	Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pohuwato	97
Grafik 2.21	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020	106
Grafik 2.22	Jumlah Rumah Sehat Kabupaten Pohuwato	111
Grafik 2.23	Perkembangan Jumlah DTKS	117
Grafik 2.24	Cakupan Peserta KB AKtif	129
Grafik 2.25	Jumlah Rumah Makan dan Restoran	138
Grafik 2.26	Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Per Kapita	143
Grafik 2.27	Pengeluaran Konsumsi Pangan RT Perkapita Perbulan Per Kategori (Rp)	144
Grafik 2.28	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	145
Grafik 2.29	Nilai Tukar Petani	146
Grafik 2.30	Jumlah Pelanggan Menurut Kecamatan	152
Grafik 3.1	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	163
Grafik 3.2	Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016-2020	164
Grafik 3.3	Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020	164

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 - 2026	4
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
Gambar 1.3	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Anggaran	11
Gambar 2.1	Peta Administrasi	21
Gambar 2.2	Peta Kawasan Rawan Bencana	70
Gambar 2.3	Peta Sebaran Rawan Longsor	73
Gambar 2.4	Peta Sebaran Bencana Gempa dan Stunami	74
Gambar 2.5	Peta Krisis Air Kabupaten Pohuwato	75
Gambar 5.1	Keterkaitan misi RPJPD dan Misi RPJMD Kabupaten Pohuwato 2021 – 2026	227
Gambar 5.2	Korelasi RPJPD Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 dengan RPJMD Pohuwato Tahun 2021 – 2026	228
Gambar 5.3	Korelasi Misi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 - 2026	230

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendifinisikan RPJMD sebagaimana pasal 263 ayat 3 yakni penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya dipertegas lagi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 12 ayat 2 yakni definisi RPJMD seperti tersebut diatas hanya ditambahkan penyusunan berpedoman pada RTRW. Dokumen RPJMD yang telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah akan menjadi pedoman bagi kepala daerah yang telah dilantik untuk menjalankan pembangunan daerah.

Pelantikan kepala daerah hasil pemilihan langsung kepala daerah pada bulan Desember tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 Feberuari tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.75-375 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dalam keputusan tersebut ditetapkan selaku Bupati adalah **Saipul A. Mbuinga** dan wakil bupati **Suharsi Igirisa, S.IP, M.Si**., untuk periode jabatan sesuai dengan regulasi berlaku. Sejak mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati, pasangan ini terus mensosialisasikan visi dan misinya, dimana setelah dilantik visi dan misi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan RPJMD. Proses Penyusunan RPJMD sebagaimana Permendagri 86 tahun 2017 pasal 16 ayat 1 yakni: a)

persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan; d) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan perda RPJMD.

Sebagai perwujudan amanah tersebut Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2, bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas kerja satuan perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rangkaian penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 dimulai dengan penyusunan rancangan RPJMD teknokraktik pada tahun 2020 beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Setelah pelantikan kepala daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka penyusunan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD, kesepakatan rancangan awal RPJMD dengan Lembaga DPRD, pengajuan konsultasi rancangan awal RPJMD ke Provinsi, Pelaksanaan forum perangkat daerah RPJMD, musrenbang RPJMD dan terakhir ranperda dan penetapan perda RPJMD. Adapun proses secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato sebagaimana dijelaskan diatas berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 – 2025, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato 2012 - 2032, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021 serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 - 2021

Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program- program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga fungsional yang bertugas untuk hal tersebut dengan melibatkan Civitas Akademisi (perguruan tinggi) selaku tim ahli.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(Stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas – Bawah *(top- down)* dan Bawah – Atas *(Bottom -UP)* pendekatan ini dilaksanakan berdasarkan jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato telah melalui berbagai tahapan analisis sektoral, jejaring aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 - 2026

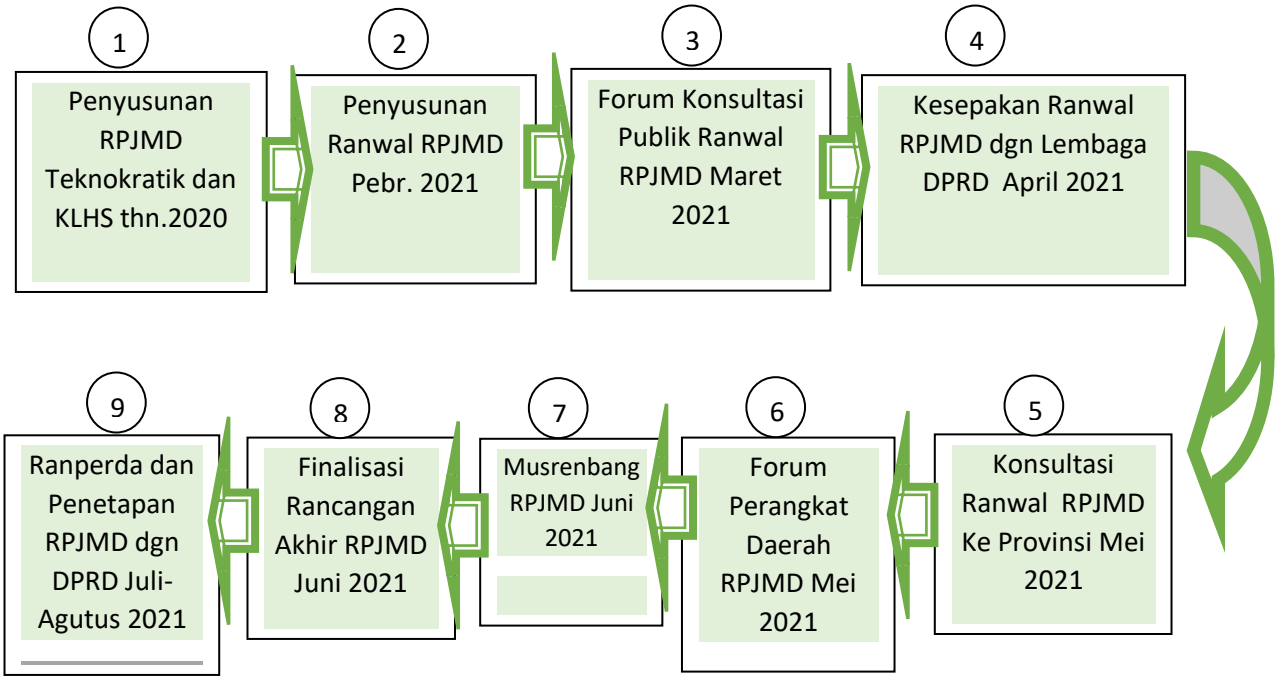

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 1 November 2017

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ditetapkan tanggal 4 januari 2018 5.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 ditetapkan tanggal 17 Januari 2020
19. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ditetapkan tanggal 17 November 2020.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 25 September 2019.

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditetapkan tanggal 18 Oktober 2019
25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 – 2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan akan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga perlu adanya sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan lain yang relevan. Adapun hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato merupakan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Periode Pembangunan tahun 2021-2026.
b. Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Gorontalo sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Pohuwato.
c. Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021-2026 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada periode yang sama.
d. Dokumen RPJMD menjadi dasar gambaran pelaksanaan kegiatan dan tugas serta struktur kelembagaan yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan RPJMD.
e. Penjabaran operasional tahunan Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato.

f. Penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap OPD Kabupaten Pohuwato.

Hubungan RPJMD Kabupaten Pohuwato dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

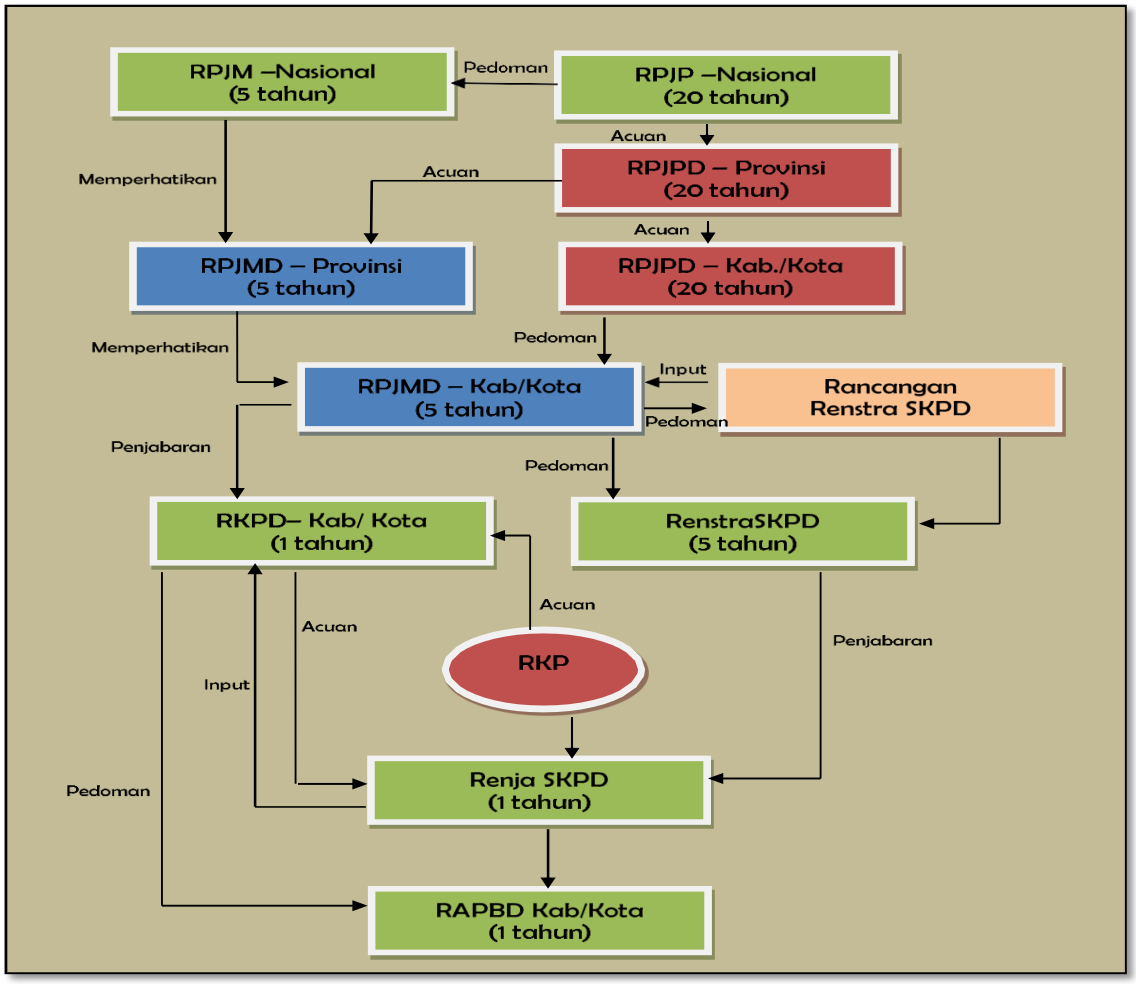

Secara garis besar, RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen

perencanaan dan dokumen penganggaran dapat ditunjukkan sesuai Gambar 1.3 berikut:

Gambar I.3.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Anggaran

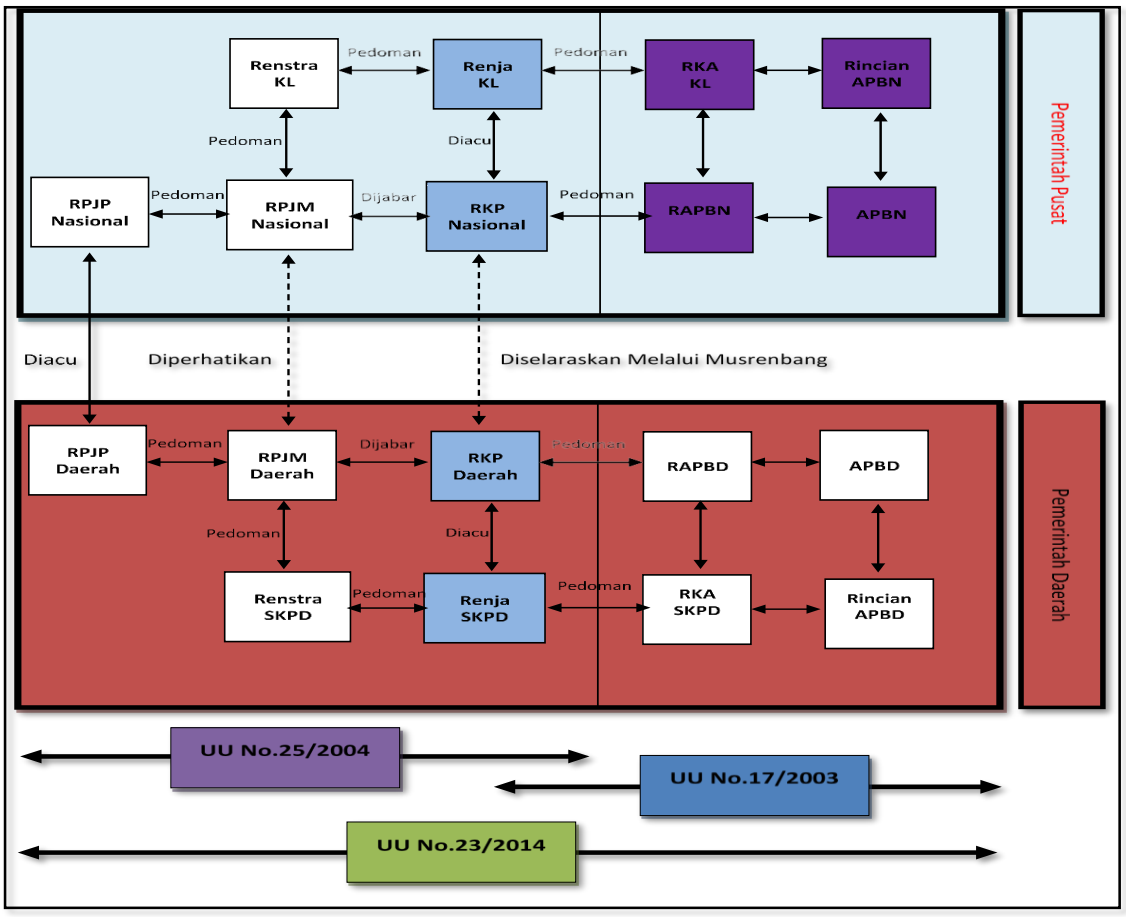

Dengan melihat gambar di atas, dalam rangka untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan:

a. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Pohuwato

RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 tahap terakhir (keempat). RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan

lanjutan dari tahap empat dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Pohuwato tahun 2025.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahap keempat ini, berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026.

b. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra PD Kabupaten Pohuwato

Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan pondasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Pohuwato dituangkan di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang secara kelembagaan harus berjalan secara efektif dan efisien.

Bupati Pohuwato dan Wakil Bupati terpilih nantinya bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati/Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Secara hierarki, staf/eselon 4 (kepala seksi/kepala subbagian/fungsional) akan berfokus pada pencapaian output, eselon 3 (kepala bidang/kepala bagian) pada outcome, eselon 2 (kepala dinas/kepala badan) pada *impact* dan kemudian memberikan benefit pada tingkat kabupaten dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan daerah.

c. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik, kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Pohuwato yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

d. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Pohuwato

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Pohuwato, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional.

Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pohuwato dalam RPJMD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

e. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus mempedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

f. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Gorontalo

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Gorontalo sekurang- kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Gorontalo untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

a. Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026 adalah memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.
b. Sebagai arah dan kebijakan pembangunan daerah Jangka Menengah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026.

c. Sebagai tolak ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d. Sebagai instrument pengendalian dan pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
e. Sebagai pedoman pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran pembangunan tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato
b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
c. Merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah;
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen RPJMD ini disajikan sebagai adalah pada bab I Pendahuluan memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya pada bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan. Kemudian pada bab III Gambaran Keuangan Daerah; Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2025.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah disajikan pada Bab IV dimana disini memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pohuwato dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah. Pada bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; memberikan gambaran tentang Visi, Misi Kepala Daerah. Serta memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 – 2026. Selanjutnya bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah; memberikan gambaran tentang arah kebijakan serta program – program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai selama 2021 - 2026. Pada Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah; memberikan gambaran

tentang kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kemudian pada bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; memberikan gambaran tentang rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah melaui indikator kinerja utama yang terukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penyelenggaran pemerintahan daerah. Terakhir pada bab IX Penutup; memberikan gambaran tentang Pedoman transisi serta gambaran tentang kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara historis Kabupaten Pohuwato juga dikenal dengan nama BUMI PANUA. Nama ini telah melekat sedemikian luas dikawasan Provinsi Gorontalo bahkan nasional. Munculnya nama ini tidak lain karena Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah yang memiliki Kawasan Cagar Alam Panua (Maleo) yang lokasinya berada di dalam kota. Cagar Alam Panua memiliki sejarah yang kompleks sejak jaman kolonial. Kawasan ini merupakan habitat terbesar Maleo di Sulawesi. Bahkan nama "Panua" sendiri diambil dari bahasa Gorontalo yang berarti "maleo". Karena begitu banyaknya maleo, sebuah desa yang berbatasan langsung dengan cagar alam ini dinamakan Desa Maleo. Cagar Alam Panua ditetapkan untuk melindungi daerah peneluran Maleo yang dapat ditemui di sepanjang kawasan pantai di kawasan ini (Dokumen Perencanaan Blok Cagar Alam Panua, 2014).

Burung maleo yang dikenal dengan PANUA tersebut adalah burung yang unik, memiliki tubuh kecil seperti ayam tetapi besar telurnya 3 – 5 kali lipat dari telur ayam. Karena keunikan ini maka burung panua ditetapkan menjadi burung endemik pulau sulawesi. Diera tahun 80 an burung ini terdapat banyak serta mudah dilihat langsung di Kabupaten Pohuwato khususnya disepanjang jalan trans Sulawesi yang melintas cagar alam tersebut, bahkan telurnya pun masih sangat banyak di jumpai. Karena memiliki populasi panua yang banyak dan mudah dijumpai dikawasan ibukota maka daerah Pohuwato juga dikenal sebagai daerah BUMI PANUA.

Kabupaten Pohuwato memiliki potensi sumber daya alam alam yang tinggi mulai dari hasil laut, pertanian perkebunan, kehutanan, bahan tambang dan jasa lingkungan sebagai asset pembangunan daerah yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Informasi kondisi geografi daerah mencakup karakteristik wilayah dan lokasi, topografi, geologi, hidrologi, pengunaan lahan, yang secara detil akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup :

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo memiliki wilayah seluas 4.244,31 Km^2 (424.431 ha) atau sebesar 36,77% dari total luas Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo pada tahun 2003 (UU Nomor 6 Tahun 2003). Secara administrasi hingga tahun 2021 terdiri dari 101 desa, 3 kelurahan, 1 UPT dan 13 (tiga belas) kecamatan. Adapun nama-nama kecamatan sebagai berikut :

1) Kecamatan Popayato
2) Kecamatan Popayato Barat
3) Kecamatan Popayato Timur
4) Kecamatan Lemito
5) Kecamatan Wanggarasi
6) Kecamatan Marisa
7) Kecamatan Patilanggio
8) Kecamatan Buntulia
9) Kecamatan Duhiadaa
10) Kecamatan Randangan
11) Kecamatan Taluditi
12) Kecamatan Paguat
13) Kecamatan Dengilo

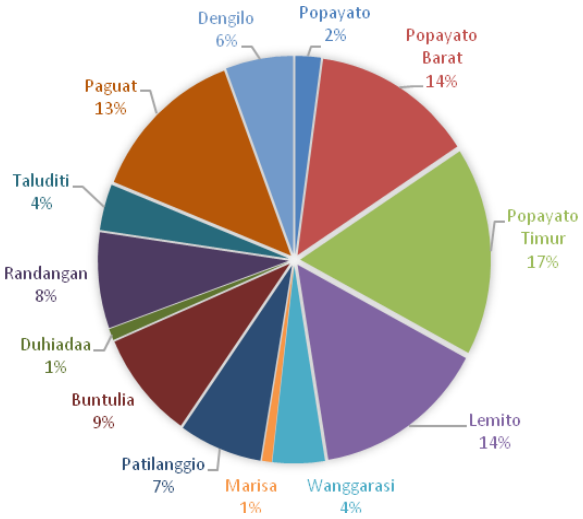

Grafik 2.1. Presentase luas wilayah kecamatan

Adapun luas masing-masing kecamatan dapat dilihata pada grafik 2.1, selanjutnya peta kabupaten Pohuwato sebagaimana pada gambar 2.1

Selanjutnya batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Pohuwato yakni :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah);
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo.

Gambar 2.1 : Peta Administrasi

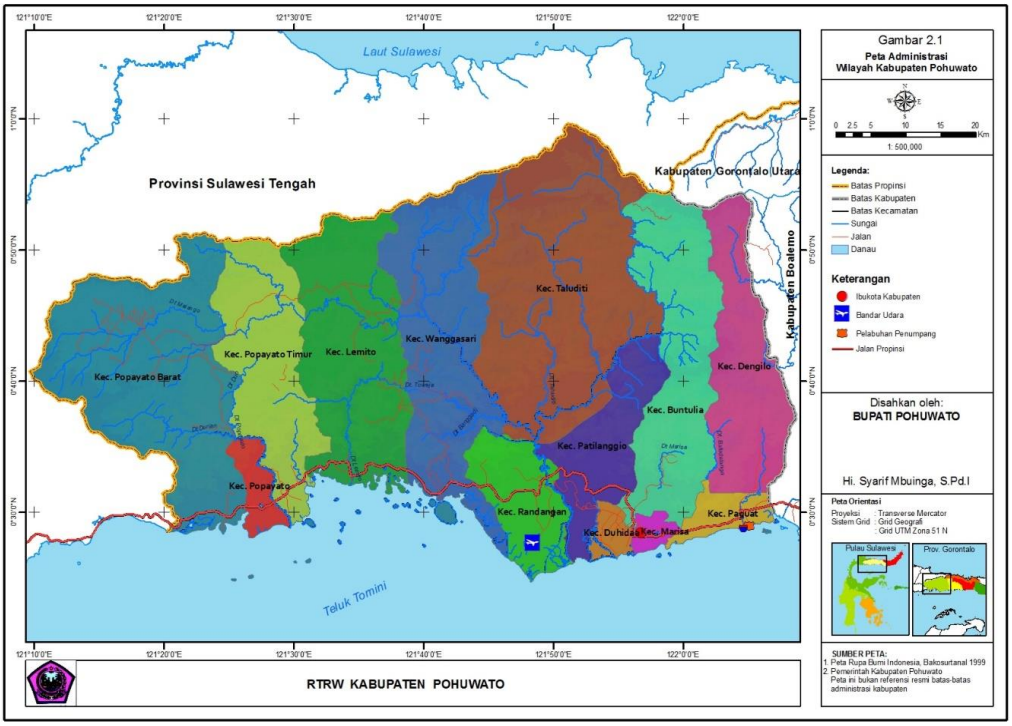

Sumber : RTRW Kabupaten Pohuwato tahun 2012

Grafik 2.2 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa

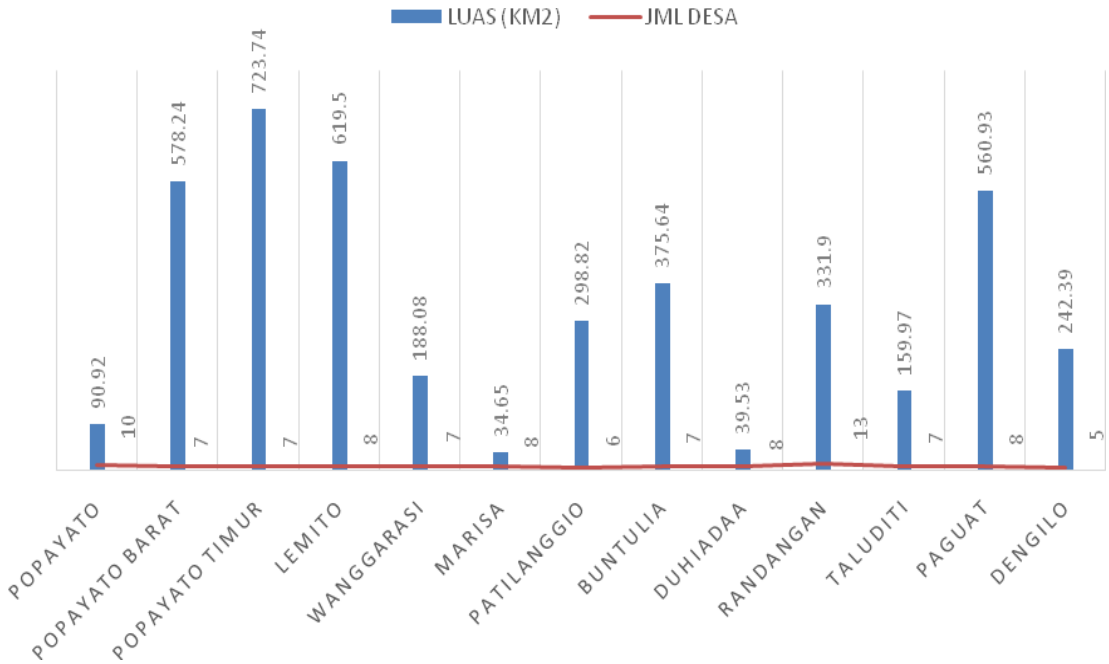

Sumber : Kabupaten Pohuwato dalam angka tahun 2021

2. Letak dan kondisi geografis

a) Posisi geografis

Kabupaten Pohuwato secara geografis terletak antara 0^o 22'-0^o 57' Lintang Utara dan 121^o 23'-122^o 19' Bujur Timur. Selanjutnya secara geomorfologis merupakan wilayah tiga dimensi, yakni dataran, perbukitan/pegunungan dan perairan (laut Teluk Tomini).

b) Kondisi/kawasan

Kondisi atau kawasan Kabupaten Pohuwato dapat dipilah dalam beberapa kategori yakni sebagai berikut :

(1) Kawasan pedalaman

Adapun kawasan desa yang masuk kategori kawasan pedalaman memiliki kriteria letak yang jauh dari pusat ibukota kecamatan dan pantai. Dari kriteria tersebut, maka desa yang masuk dalam kawasan pedalaman disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan Ketegori Pedalaman

No	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Tunas Harapan Bukit Tingki Torosiaje Torosiaje Jaya Bumi Bahari
2	Popayato Barat	Persatuan Tunas Jaya
3	Popayato Timur	Kelapa Lima Tahele Londoun Bunto
4	Lemito	Lomuli Lemito Utara
5	Wanggarasi	Bukit Harapan Bohusami Lembah Permai Tuweya

6	Taluditi	Puncak Jaya Mekarti Jaya Malango Kalimas Tirto Asri UPT Sandalan
7	Buntulia	Hulawa Karya Indah
8	Dengilo	Karangetan Padengo Karya Baru
9	Randangan	Sarimurni Siduwonge Ayula
	Jumlah	31 Desa

(2) Terpencil

Adapun kriteria desa terpencil adalah sebagai berikut :

- Akses transportasi sulit dan dan jarang
- Akses kesehatan dan Pendidikan sulit,
- Terdapat dua dusun atau lebih yang sulit mengakses dua poin diatas.

Mengacu pada kriteria tersebut, maka desa terpencil di Kabupaten Pohuwato adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan Ketegori Terpencil

No.	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Torosiaje
2	Popayato Barat	-
3	Popayato Timur	Kelapa Lima
4	Lemito	Lomuli
5	Wanggarasi	Bukit Harapan Bohusami Lembah Permai Tuweya

6	Taluditi	Puncak Jaya Mekarti Jaya Malango Kalimas Tirto Asri UPT Sandalan
7	Randangan	Ayula Siduwonge
8	Patilanggio	-
9	Buntulia	Hulawa
10	Duhiadaa	Moottilango
11	Marisa	-
12	Paguat	-
13	Dengilo	Karangetan Karya Baru Padengo
	Jumlah	19 Desa

(3) Pesisir

Desa/kelurahan yang masuk dalam kawasan pesisir di Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Pesisir

No	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Torosiaje Bumi Bahari Torosiaje Jaya Trikora Popayato
2	Popayato Barat	Molosipat Utara Molosipat Dudewulo
3	Popayato Timur	Milangodaa Bunto
4	Lemito	Babalonge Lemito Utara Lemito Wanggarasi Barat Suka Damai
5	Wanggarasi	Yipilo Wonggarasi Timur Limbula
6	Taluditi	-

7	Randangan	Siduwonge Patuhu Pelambane Imbodu
8	Patilanggio	Manawa
9	Buntulia	-
10	Duhiadaa	Bulili Mootilango
11	Marisa	Pohuwato Pohuwato Timur Palopo
12	Paguat	Maleo Kelurahan Libuo Buhu Jaya Kelurahan Pentadu Bumbulan Bunuyo Kemiri Molamahu
13	Dengilo	-
	Jumlah	36 Desa/Kelurahan

(4) Pegunungan

Jarak daerah pegunungan terletak relative dekat dengan pesisir, sehingga jika terjadi banjir dan longsor memberi dampak yang sangat cepat.

Untuk desa yang sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan pegunungan di Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Pegunungan

No	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Dambalo Bukit Tingki
2	Popayato Barat	Tunas Jaya Butungale
3	Popayato Timur	Marisa Kelapa Lima
4	Lemito	Lomuli
5	Wanggarasi	Bukit Harapan Bohusami Lembah Permai Tuweya
6	Taluditi	Puncak Jaya

		Mekarti Jaya Malango Pancakarsa 1 Pancakarsa 2 Kalimas Tirto Asri UPT Sandalan
7	Randangan	Manunggal Karya
8	Patilanggio	Balayo Dudepo Iloheluma
9	Buntulia	Hulawa
10	Duhiadaa	-
11	Marisa	Bulangita Teratai
12	Paguat	Maleo Buhu Jaya
13	Dengilo	Karangetan KaryaBaru Padengo
	Jumlah	31 Desa

(5) Kepulauan

Untuk desa yang masuk dalam kawasan kepulauan hanya ada satu desa yakni Desa Torosiaje Kecamatan Popayato.

2. Topografi

Secara lengkap kondisi topografi mencakup:

a) Kemiringan/kelerengan lahan

Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pohuwato didominasi daerah hamparan *datar* (0-8%) yakni sebesar 30,2%, disusul dengan kelerengan*agak curam* (15-25%) sebesar 25,8%, lalu dengan kelerengan*curam* (25-40%) sebesar 20,8%. Hamparan lahan dengan kelerengan datar (0-8%) dominan berada di bagian selatan dan barat Kabupaten Pohuwato, sementara daerah dengan kelerengan agak curam (15-25%) sampai curam (>40%) lebih tersebar di bagian timur dan

utara wilayah ini. Adapun klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Pohuwato

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Persentase (%)
A	0 – 8 (datar)	30,2
B	8 – 15 (landai)	19,5
C	15 – 25 (agak curam)	25,8
D	25 – 40 (curam)	20,8
E	> 40 (sangat curam)	3,7
Jumlah		100

Sumber : RTRW Kabupaten Pohuwato

b) Ketinggian lahan

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum bertopografi variatif, yakni 0-200 m dpl tersebar di daerah pesisir Teluk Tomini dominan meliputi wilayah Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, Paguat dan Randangan. Sementara wilayah dengan topografi dominan pada ketinggian 200-500 m dpl tersebar pada wilayah Kecamatan Lemito dan Popayato Timur. Selain itu kondisi topografi wilayah 500-1.000 m dpl dominan tersebar di wilayah Kecamatan Popayato dan Taluditi. Sedangkan wilayah Kecamatan Popayato Barat sebagian wilayahnya berada pada topografi 1.000-1.500 m dpl terutama areal yang berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong.

Kondisi kelerangan di lahan wilayah pegunangan yang curam menjadi rentan akan resiko longsor dan banjir jika tidak dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

3. Geologi

Secara lengkap kondisi geologi yang akan dijelaskan adalah :

a) Struktur dan karakteristik

Berdasarkan hasil penelitian geologi lingkungan kawasan pertambangan daerah Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan oleh Komarudin Rustam pada tahun 2011 dengan institusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa struktur geologi sebagaimana disajikan pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Struktur dan Karakteristik Geologi Kabupaten Pohuwato

No	Struktur dan Karakterstik	Lokasi
1	Batuan malihan Secara umum batuan ini mengalami pemalihan lemah hingga sedang, batuannya terutama sakis hijau. Formasi batuan ini berumur mesozoitikum	Kecamatan Popayato Barat
2	Batuan sedimen, formasi Randangan Susunannya berupa konglomerat, batu pasir, batu lanau dan batu lumpur	Kecamatan Randangan dan Patilanggio
3	Batuan sedimen, fromasidolokapa Formasinya membentuk perbukitan terjal. Susunannya berupa batu pasir, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuftapii, aglomerat, breksi gunung api dan lava andesit hingga basal	Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Buntulia dan Kecamatan Paguat
4	Batuan sedimen, endapan sungai tua tersusun dari perselingan batu pasir, batu pasir konglomerat dan konglomerat	Kecamatan Duhiadaa, Marisa dan Kecamatan Buntulia
5	Batuan gunung api, batuan terobosan dan endapan permukaan	Tersebar disemua kecamatan

b) Potensi kandungan

Adapun potensi kandungan Geologi di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel 2.6 tersebut, disajikan pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Potensi Kandungan Geologi Kabupaten Pohuwato

No	Jenis	Potensi	Lokasi
1	Sirtu	13.313.250 (M^3)	Sungai Popayato, Lemito, Randangan, Marisa dan sungai Bumbulan
2	Batu Andesit	13.350.810(M^3)	Kecamatan Buntulia dan Randangan
3	Batu Dasit	24.227.775(M^3)	Kecamatan Buntulia dan Paguat
4	Batu Granodiorit	1.279.299.750(M^3)	Kecamatan Buntulia, Marisa dan Kecamatan Paguat
5	Batu Granit	1.064.226.900(M^3)	Kecamatan Popayato, Popayato Barat dan Kecamatan Popayato Timur
6	Toseki	10.771.431(M^3)	Kecamatan Lemito, Wanggarasi, Randangan dan Kecamatan Taluditi
7	Emas	-	Kecamatan Dengilo, Taluditi, Popayato Barat, Buntulia dan Kecamatan Patilanggio

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011

4. Hidrologi

Untuk hidrologi, secara detail mencakup:

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Pohuwato mempunyai beberapa DAS, seperti DAS Randangan, DAS Popayato yang kesemuanya bermuara ke Teluk Tomini. Sungai Randangan merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Pohuwato yakni memiliki panjang aliran ±110 km, lalu sungai Malango dengan panjang aliran 91,5 km, kemudian sungai Popayato dengan panjang aliran 40,6 km.

DAS Randangan meliputi wilayah seluas ± 290.000 ha dengan panjang sungai utama 95,8 km. Mayoritas (sekitar 80%) dari wilayah DAS Randangan ini

berada pada daerah dengan topografi berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan/kelerengan>40%. Sementara untuk DAS Popayato meliputi wilayah seluas ± 80.000 ha dengan panjang sungai utama 40,6 km. Sebagian besar wilayah DAS Popayato ini berada pada daerah dengan topografi datar dan berbukit, dimana banyak terdapat permukiman, perkebunan dan pertanian lahan basah dan lahan kering.

b) Sungai, danau dan rawa

Seperti yang dijelaskan pada poin a, DAS tersebut mencakup beberapa sungai sebagaimana disajikan pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8
Nama dan Panjang Sungai-sungai di Kabupaten Pohuwato

No	Nama Sungai	Panjang Aliran (Km)	Daerah Yang Dilalui
1	Popayato	40,6	Popayato, Popayato Barat,
2	Lemito	26,4	PopayatoTimur
3	Malango	91,5	Lemito
4	Randangan	95,8	Lemito, Wanggarasi,Randangan Randangan, Patilanggio, Duhiadaa
5	Marisa	38,0	Buntulia, Marisa
6	Paguat	17,3	Dengilo, Paguat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pohuwato

Sementara itu, untuk danau yang ada hanya danau Delo yang ada di Kecamatan Marisa dan Danau Telaga Biru di Kecamatan Popayato, sisanya terdapat danau-danau yang masih masuk kategori rawa. Untuk luasan rawa hingga tahun 2021 seluas 2.377 ha.

c) Debit

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masuk dalam WS Randangan yaitu sebanyak 14 (empat belas) DAS. DAS terbesar yaitu DAS Randangan

(2.513,84 km2), sedangkan DAS terkecil yaitu DAS Wonggarasi (31,25 km2). Sungai Randangan memiliki panjang ± 110 km, dengan kedalaman bervariasi antara 1 m sampai dengan 5 m dan mempunyai debit maksimum sebesar 354 m3/det sedangkan debit minimum sebesar 8,94 m3/det.

5. Klimatologi, antara lain :

Gambaran keadaan iklim di Indonesia hanya dikenal ada dua musin, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September, dimana arus anginnya berasal dari Australia dan tidak mengandung uap air sehingga berakibat musim kemarau. Sedang musim penghujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret disebabkan oleh arus angin banyak berasal dari Asia dan samudra Pasifik yang banyak mengandung uap air sehingga berakibat pada terjadinya musinpenghujan. Akan tetapi keadaan seperti ini setiap tahunnya berubah setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November.

Kabupaten Pohuwato memiliki curah hujan yang beragam dan sangat variatif dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus angin. Oleh karena itu, jumlah curah hujan sangat beragam tersebut ditentukan oleh bulan dan stasiun sebagai pusat yang menjadi titik pengamatan. Jumlah curah hujan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 rata-rata berkisar antara 6,7 mm sampai 330,00 mm. Lebih rinci keadaan curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran matahari akan diuraikan melalui tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9
Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan Di Kabupaten Pohuwato

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	74,5	9	41
Februari	45,9	6	65
Maret	83,0	7	63
April	330,7	13	53
Mei	51,4	9	63
Juni	119,1	13	44
Juli	25,6	5	41
Agustus	6,7	3	84
September	0,0	-	89
Oktober	129,9	13	71
November	8,2	3	83
Desember	173,8	12	63

Sumber : Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020

Selanjutnya untuk keadaan angin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 melalui pantauan stasiun pengamat hampir merata setiap bulannya berkisar antara 2 sampai 3 meter/detik. Secara jelas keadaan angin di Kabupaten Pohuwato akan diuraikan pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10
Arah Angin Terbanyak, Kecepatan dan Arah Angin Saat Kecepatan Maksimal Menurut Bulan Di Kabupaten Pohuwato

Bulan	Kecepatan Angin (knots)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	-	2	10	-	1007,5	-
Februari	-	2	10	-	1009,3	-
Maret	-	2	6	-	1007,9	-
April	-	2	11	-	1007,0	-
Mei	-	2	11	-	1007,5	-
Juni	-	2	8	-	1006,9	-
Juli	-	3	11	-	1007,9	-
Agustus	-	4	11	-	1007,8	-
September	-	4	14	--	1009,0	--
Oktober	-	3	12	-	1007,3	-
November	-	3	12	-	1007,0	-
Desember	-	2	11	-	1006,8	-

Sumber : *Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020*

Suhu udara disuatu tempat sangat ditentukkan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai, pada tahun 2019 suhu udara di Kabupaten Pohuwato rata-rata berkisar antara 25,3^{0}C sampai 28,1^{0}C.

Untuk kelembaban udara di Kabupaten Pohuwato relatif tinggi pada tahun 2019 kelembaban relatif antara 64% sampai dengan 93%. Untuk lebih detail keadaan suhu udara, kelembaban udara dan tekanan udara dapat disajikan melalui tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11
Suhu Udara, Kelembaban Udara dan Tekanan Udara Rata-rataMenurut Bulan Di Kabupaten Pohuwato

Bulan	Suhu (˚C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22,3	25,3	33,4	80	93	100
Februari	20,3	24,6	28,7	54	73	99
Maret	21,2	27,6	35,0	40	79	98
April	21,3	27,0	36,4	38	80	100
Mei	22,9	27,8	34,4	52	85	100
Juni	21,7	27,4	33,6	50	83	100
Juli	20,6	26,8	33,4	54	82	99
Agustus	19,7	27,7	34,0	45	73	93
September	17,0	26,8	35,4	34	64	92
Oktober	20,0	28,1	36,2	36	73	98
November	20,2	27,5	35,8	38	75	94
Desember	22,2	27,5	35,8	50	80	98

Sumber : *Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020*

6. Penggunaan lahan

Berdasarkan peta tutupan lahan Propinsi Gorontalo, jenis tutupan lahan di Pohuwato berbeda-beda. Tutupan lahan di didominasi oleh hutan sekunder lahan kering. Tutupan lahan ini dapat disaksikan langsung di lapangan dimana perbukitan yang mengelilingi didominasi oleh hutan sekunder. Sebaran hutan sekunder terbesar terdapat di hutan produksi

a) Kawasan budidaya

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN; PP/26/2008) menetapkan salah satu kawasan andalan nasional berada di Kabupaten Pohuwato, yakni kawasan andalan Marisa untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan. Nilai strategis nasional dari sebuah kawasan andalan meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

a.1. Rencana peruntukan kawasan hutan produksi

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT)

Sebagaimana definisi daripada hutan yang tertuang dalam UU/41/1999 tentang Kehutanan, adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka keberadaan hutan produksi terbatas memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya air, selain hutan lindung.

Sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo yang telah menetapkan bahwa Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas ± 84.458,615 Hektar. Hutan produksi terbatas ini merupakan kawasan yang memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan tanam.

- Kawasan hutan produksi tetap

Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentangn Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo yang telah menetapkan bahwa Hutan Produksi Tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas ± 41.916,289 ha.

- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialih fungsikan.

Dalam Kepmenhut Nomor SK.433/Menhut-II/2009 menetapkan hutan produksi yang dapat dikonversi di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas 69.678 ha.

a.2. Rencana peruntukan kawasan pertanian

Dengan adanya klasifikasi kesesuaian lahan diharapkan perlakuan yang akan diberikan kepada lahan dapat diarahkan sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya, sehingga daya dukungnya dapat dipelihara dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan lestari.

Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan berbasis pada pendekatan yang direkomendasikan oleh FAO (1976) yang kriteria-kriterianya telah dimodifikasi oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian lahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kelas S1; sangat sesuai (*highly suitable*), yaitu lahan yang tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
- Kelas S2; cukup sesuai (*moderate suitable*), yaitu lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas-pembatas ini akan mengurangi produksi, keuntungan dan peningkatan yang diperlukan.
- Kelas S3; sesuai marginal (*marginally suitable*), yaitu lahan dengan pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan sehingga akan mengurangi banyak produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.
- Kelas N1; tidak sesuai pada saat ini (*currenly not suitable*), merupakan lahan yang memiliki pembatas yang serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
- Kelas N2; tidak sesuai permanen (*permanently not suitable*), merupakan lahan yang mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan yang berlanjut pada lahan tersebut.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan,

perikanan dan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi utama antara lain :

1) menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan,
2) sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya,
3) membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

a.3. Rencana peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan

- Kawasan pertanian lahan basah

Kawasan tanaman pangan lahan basah merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Rencana pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Duhiadaa, Taluditi, Randangan, Dengilo, Patilanggio dan Buntulia. Dimana luas areal pertanian lahan basah potensial keseluruhan adalah 41.212 ha atau sebesar 9,71% dari luas wilayah kabupaten.

Untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Pohuwato, sebagaimana hasil analisis kesesuaian lahan maka diperlukan beberapa masukan untuk peningkatan kesesuaian lahan serta peningkatan produktifitas lahan seperti pengembangan bendungan sungai Randangan sebagai sumber pengairan irigasi teknis. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Pohuwato seperti terlihat pada tabel 2.14.

- Kawasan pertanian lahan kering

Kawasan tanaman pangan lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan tahunan.

Pengembangan kegiatan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Pohuwato tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 11.616 ha. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering terlihat pada tabel 2.12.

a.4. Rencana peruntukan kawasan tanaman tahunan/perkebunan

Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/ perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan di wilayah Kabupaten Pohuwato diarahkan pada beberapa kawasan potensial pengembangan komoditi tanaman tahunan meliputi kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, panili dan kemiri serta buahan-buahan seperti durian, jeruk dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato. Untuk kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian 200-400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif diarahkan pada areal dengan ketingggian >400 m dpl.

Tabel 2.12
Arahan Peruntukan dan Komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Pohuwato

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering		Perkebunan	
		Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas
1	Popayato	1.119	01A	954	02B	2.130	03C
2	Pop. Barat	1.627	01A	632	02B	2.433	03C
3	Pop. Timur	1.264	01A	1.371	02B	2.613	03C
4	Lemito	514	-	1.987	02B	2.500	03C
5	Wanggarasi	807	01A	150	02B	3.357	03C
6	Marisa	0	-	0	-	1.700	03C
7	Patilanggio	5.652	-	1.102	02B	9.425	03C
8	Buntulia	2.710	01A	408	02B	1.891	03C
9	Duhiadaa	7.124	-	217	02B	595	03C
10	Randangan	8.852	01A	527	02B	5.977	03C
11	Taluditi	6.503	01A	1.630	02B	13.016	03C
12	Paguat	1.598	01A	1.635	02B	1.451	03C
13	Dengilo	3.442	01A	1.003	02B	1.393	03C
Jumlah		41.212		11.616		48.481	

Sumber : - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pohuwato
- Hasil Analisis Kesesuaian Lahan
Keterangan : 01A = Padi
02B = Jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, sayuran
03C = Kelapa dalam, kopi, kakao, mete, cengkeh, panili, kemiri, kelapasawit, durian, mangga, jeruk

a.5. Rencana peruntukan kawasan peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak.

Rencana pengembangan kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Pohuwato berada di wilayah Kecamatan Randangan, Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Kecamatan Taluditi dan Dengilo. Wilayah ini dalam beberapa aspek sesuai dengan karakteristik budidaya kegiatan peternakan hewan besar dan tempat penggembalaan, dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya.

a.6. Rencana peruntukan kawasan perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya.

Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pohuwato dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : 1) budidaya laut, 2) budidaya payau dan 3) budidaya air tawar.

Arahan pengembangan komoditas perikanan mencakup : a) komoditas perikanan budidaya payau berupa udang windu, bandeng dan kepiting bakau, b) komoditas perikanan budidaya laut berupa rumput laut, kerapu, dan kerang mutiara, c) komoditas budidaya air tawar berupa ikan mas dan ikan nila, dll. Pertimbangan arahan pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang tinggi dan telah berkembang di masyarakat, serta pangsa pasarnya sangat prospek.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pohuwato, maka sebarannya lebih diarahkan di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Randangan, Wanggarasi, Duhiadaa, Marisa, dan Paguat, dengan total areal seluas ± 5.520,27 ha.

Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Teluk Tomini yang membentang dari timur sampai barat kearah laut lepas sejauh menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pohuwato lebih diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama persediaan air tawar yang cukup, seperti pada wilayah Kecamatan Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Radangan, Paguat, Popayato Barat dan Dengilo.

Untuk lebih mengembangkan kegiatan perikanan secara berkelanjutan dan terpadu sehingga memberikan nilai ekonomis lebih tinggi kepada masyarakat secara luas di Kabupaten Pohuwato, maka dikembangkan pula kawasan minapolitan dengan menetapkan Kecamatan Lemito sebagai minapolis. Minapolis Lemito akan didukung oleh kawasan-kawasan yang meliputi Popayato Barat, Popayato, Popayatao Timur, Wanggarasi, Randangan, Duhiadaa, Marisa, Paguat dan Dengilo.

a.7. Rencana peruntukan kawasan pertambangan

Pengembangan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Pohuwato untuk golongan bahan galian C terdapat dibeberapa lokasi yang dilintasi sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil seperti sungai Randangan, sungai Popayato, sungai Malango, sungai Lemito, sungai Marisa dan sungai Paguat. Lokasi-lokasi tambang bahan galian C tersebut berada di Kecamatan Randangan, Popayato, Lemito, Marisa dan Paguat.

Sementara untuk potensi bahan tambang golongan B, terdapat di wilayah Kecamatan Buntulia, Patilanggio, Taluditi, Popayato Barat dan Paguat berupa mineral emas. Sementara untuk mineral lainnya berupa andesit tersebar di Kecamatan Marisa, Buntulia dan Taluditi. Bahan tambang golongan golongan B lainnya berupa toseki terdapat di wilayah Kecamatan Patilanggio, Wanggarasi, Paguat dan Randangan. Mineral berupa andesit terdapat di wilayah Kecamatan Marisa, Buntulia dan Taluditi. Jika telah dilakukan eksplorasi bahan tambang tersebut hendaknya mempertimbangkan matang mengenai dampaknya terhadap lingkungan sekitar, mengingat wilayah Kabupaten Pohuwato banyak terdapat sungai-sungai yang airnya banyak

dimanfaatkan sebagai air bersih penduduk, pun air baku PDAM, juga digunakan untuk mengairi lahan-lahan pertanian, sehingga kualitasnya perlu dijaga dari limbah penambangan.

Kegiatan penambangan mineral di Kabupaten Pohuwato utamanya emas, umumnya dilakukan masyarakat setempat tanpa izin atau dikenal sebagai ”penambangan emas tanpa izin” (PETI). Yang menjadi permasalahan adalah sebagian dari lokasi penambangan tersebut terletak di kawasan hutan suaka alam atau hutan lindung. Guna meminimalisir dampak buruk yang lebih luas, terutama terhadap lingkungan yang pada akhirnya terhadap masyarakat sendiri, diperlukan kebijakan pengendalian yang arif dari segenap *stakeholders* terhadap kegiatan PETI ini. Hingga akhir Tahun 2020 pemerintah daerah terus berjuang adanya penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di beberapa kecamatan di Kabupaten Pohuwato.

b) Kawasan lindung

b.1. Rencana pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan-kawasan tersebut dalam perlindungan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, pengisi air, sumber air dan penjaga kesuburan tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di wilayah Kabupaten Pohuwato berupa Hutan Lindung. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Pohuwato ditetapkan dengan

kriteria antara lain *a)*kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45%, *b)* kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut, *c)* kawasan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi dan *d)* kawasan yang mempunyai nilai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/ 11/1980.

Hutan lindung yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK.433/Menhut-II/2009 adalah seluas 137.605 ha atau sebesar 32,42% dari luas wilayah Kabupaten Pohuwato (luas wilayah kabupaten 424.431 ha). Ketetapan ini akan menjadi dasar dalam pemantapan kawasan areal hutan lindung di Kabupaten Pohuwato dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi ekologis kawasan hutan lindung tersebut, serta mengembangkan keterpaduan program konservasi kawasan hutan lindung lintas instansi terkait. Namun demikian luasan kawasan hutan lindung ini akan berkurang seiring adanya kebijakan pemerintah pusat terkait TORA (Tanah obyek Reformas Agraria) yang hingga tahun 2021 terus berproses serta adanya alih fungsi hutan lindung di kawasan Bandara di Kecamatan Randangan.

Hasil *overlay* peta menunjukkan bahwa sebaran hutan lindung di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara pada areal lahan yang bertopografi 500– 1.500 m dpl dengan tingkat kelerengan sebagian besar berada pada kelas lereng 25 – 40%. Hutan lindung dengan karakteristik areal tersebut umumnya tersebar pada wilayah Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, Buntulia, Lemito, Patilanggio, Popayato, Popayato Timur dan Popayato Barat. Hasil *overlay* dengan peta tutupan lahan menunjukkan bahwa sebagian areal hutan lindung telah mengalami bukaan

vegetasi yang cukup luas, seperti menjadi tegalan, semak belukar, terutama pada wilayah Kecamatan Taluditi dan Wanggarasi.

b.2. Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat

➢ Sempadan pantai

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai berfungsi memberikan pelindungan terhadap wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Mengacu pada ketetapan sempadan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, dengan pengecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Mencermati kecenderungan, intensitas serta potensi kawasan pantai menjadi kawasan yang menarik untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman maupun non permukiman (perdagangan, jasa komersial, industri, dan sejenisnya), maka pengaturan terhadap sempadan pantai lebih fleksibel sesuai dengan bentuk pantai, kondisi fisik pantai dikaitkan dengan rencana pemanfaatannya. Dengan mengacu pada karakteristik tipologi pantai di

wilayah Kabupaten Pohuwato dikaitkan dengan ketentuan lebar sempadan pantai, serta hasil *overlay* peta penggunaan lahan, maka kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pohuwato yang panjangnya sekitar 160 km adalah seluas ± 3.300 ha. Lebih jelasnya mengenai pengaturan sempadan pantai di Kabupaten Pohuwato seperti terlihat pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Lebar Sempadan Pantai

No	Jenis Aktivitas	Bentuk Pantai	Kondisi Fisik Pantai	Lebar Sempadan (M)
1.	Kawasan Permukiman	Landai dengan gelombang < 2 m	Stabil dengan pengendapan	30
			Stabil tanpa pengendapan	50
			Labil dengan pengendapan	50
			Labil tanpa pengendapan	75
		Landai dengan gelombang > 2 m	Stabil dengan pengendapan	50
			Stabil tanpa pengendapan	75
			Labil dengan pengendapan	75
			Labil tanpa pengendapan	100
2.	Kawasan Non Permukiman	Landai dengan gelombang < 2 m	Stabil dengan pengendapan	100
			Stabil tanpa pengendapan	150
			Labil dengan pengendapan	150
			Labil tanpa pengendapan	200
		Landai dengan gelombang > 2 m	Stabil dengan pengendapan	150
			Stabil tanpa pengendapan	200
			Labil dengan pengendapan	200
			Labil tanpa pengendapan	250
		Curam dengan gelombang <2 m	Stabil	200
			Labil	250
		Curam dengan gelombang >2 m	Stabil	250
			Labil	300

Sumber : Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang, Departemen PU

➢ Sempadan sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Upaya ini dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria dari sempadan sungai yakni :

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepian sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepian sungai.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta dikaitkan dengan karakteristik pemanfaatan areal sekitar sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pohuwato, maka areal sempadan sungai di Kabupaten Pohuwato adalah seluas ± 2.032,82 ha.

Di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat beberapa sungai besar yang memiliki badan sungai yang cukup panjang seperti sungai Randangan dengan panjang aliran 95,8 km, dimana sungai ini melintasi dua provinsi. Sungai ini juga telah

ditetapkan dalam RTRWN sebagai Wilayah Sungai (WS) Randangan yang melintasi Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian interkoneksitas antara daerah hulu dan daerah hilir sungai sangat penting dalam menjaga kestabilan kontuinitas debit air sungai tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga fungsi lindung daerah aliran sungai di daerah hulu, utamanya di wilayah bagian utara Kecamatan Wanggarasi dan Kecamatan Taluditi di daerah hulu sungai tersebut.

b.3. Rencana pengembangan kawasan suaka alam dan cagar budaya

- Kawasan suaka alam

Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

Kawasan suaka alam berfungsi memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman biota, jenis ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam RTRWN (PP/26/2008) telah menetapkan Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang yang berada di Kabupaten Pohuwato sebagai Kawasan Lindung Nasional. Sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK.433/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kabupaten Pohuwato, telah menetapkan kawasan suaka alam/pelestarian alam keseluruhan di Kabupaten Pohuwato yakni seluas 40.013 ha. Kawasan suaka alam yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato berupa cagar alam yakni Cagar Alam

Panua seluas 36.837,73 ha dan Cagar Alam Tanjung Panjang seluas 3.175,27 ha.

Optimalisasi fungsi perlindungan Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang berpotensi terdegradasi akibat kegiatan budidaya berupa kegiatan penambangan emas, perambahan hutan untuk kegiatan pertanian dan kegiatan pengambilan kayu bakau pada kawasan cagar alam tersebut. Hal-hal tersebut merupakan ancaman yang sedang berlangsung (aktif) pada tingkat yang cukup merisaukan, baik dilihat dari segi luas, maupun dari dampaknya, misalnya tingkat kekeruhan air sungai yang tangkapan airnya pada daerah aliran sungai dimana kegiatan eksplorasi tersebut berlangsung. Diantara ketiga kegiatan tersebut yang menjadi ancaman terhadap upaya konservasi kawasan suaka alam tersebut, yang paling merisaukan adalah kegiatan penambangan emas rakyat, yang dalam nama lokal disebut sebagai kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang telah berlangsung puluhan tahun dan sulit dikendalikan. Kegiatan pembukaan lahan-lahan pertanian baru maupun pengambilan kayu, meski dengan skala pengrusakan yang relatif lebih kecil, juga merupakan kegiatan yang perlu dikendalikan.

Penggunaan lahan kawasan cagar alam Panua lebih didominasi oleh hutan yakni sebesar 98,67%, lainnya berupa semak belukar, tegalan/ladang dan tambak. Sementara untuk penggunaan lahan kawasan cagar alam Tanjung Panjang lebih didominasi oleh jenis penggunaan sebagai areal hutan bakau yakni sebesar 61,38%, lainnya berupa tambak, rawa, tegalan/ladang, semak belukar dan kebun.

- Kawasan suaka alam laut

Kawasan suaka alam laut merupakan daerah perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, gugusan karang dan atol yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

Kawasan suaka alam berfungsi melindungi keaneka ragaman biota, jenis ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kawasan perlindungan laut, terdiri atas antara lain :

- Kawasan suaka alam laut dan suaka marga satwa laut dan perairan dengan kriteria :
  - Memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya.
  - Merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa.
  - Merupakan tempat hidup dan perkembang biakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.
  - Memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi.
  - Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
  - Memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- Taman wisata alam dan taman wisata alam laut dengan kriteria :
  - Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan langka.
  - Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

- Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam, dan
- Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

- Kawasan pantai berhutan bakau

Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Kawasan pantai berhutan bakau berfungsi melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta sebagai pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian diarahkan untuk pengembangan kawasan hutan mangrove sejalan dengan tujuan daripada penetapan sempadan pantai. Kawasan hutan mangrove ditetapkan berdasarkan persebaran hutan mangrove saat ini ditambah dengan areal-areal yang dinilai layak dan sebaiknya ditumbuhi mangrove. Pengembangan kawasan hutan mangrove ini, selain dikaitkan dengan upaya konservasi, juga dalam rangka melindungi budidaya kegiatan tambak di daerah belakang kawasan hutan mangrove tersebut. Adapun luas magrove di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Luas Hutan Mangrove Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Potensial	Kondisi Baik (Ha)	Yang Sdh Jadi Tambak (Ha)
1	Dengilo	-	-	-
2	Paguat	606,88	447,96	158,92
3	Duhiadaa	1.634,20	655,21	978,99
4	Buntulia	-	-	-
5	Patilanggio	1.052,86	716,07	336,79
6	Randangan	4.508,31	2.468,49	2.039,82
7	Taluditi	-	-	-
8	Wanggarasi	3.120,38	836,44	2.283,94
9	Popayato Barat	1.075,62	568,03	507,59
10	Popayato	903,77	229,82	673,95
11	Popayato Timur	716,02	715,70	0,32
12	Marisa	518,59	320,15	198,44
13	Lemito	1.464,04	963,15	500,89
Jumlah		**15.600,67**	**7.921,02**	**7.679,65**

Sumber : KLHS Tahun 2020

- Tutupan lahan

Sumber daya lahan wilayah Kabupaten Pohuwato cukup mampu mewadahi berbagai kegiatan, baik untuk kegiatan lindung maupun kegiatan budidaya. Luas lahan yang ada mencakup keseluruhan wilayah administratif Kabupaten Pohuwato. Tutupan hutan yang berada pada daerah pegunungan dan daerah aliran sungai merupakan potensi penyimpan air dan karbon sebagai pelindung kehidupan bagi masyarakat yang berada dibawahnya. Adapun luas penutupan lahan secara detail dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15. Luasan Penutupan Lahan di Kabupaten Pohuwato

No	Kelas Penutupan Lahan Citra Resolusi Sedang	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Hutan Lahan Kering Primer	109,090.02	109,090.02	109,244.44	109,237.02	109,237.02
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	219,104.03	218,634.71	220,020.33	219,493.95	219,372.31
3	Hutan Mangrove Primer	747.24	552.18	546.21	934.80	934.80
4	Hutan Mangrove Sekunder	5,876.40	4,278.33	4,291.50	2,967.88	2,940.55
5	Hutan Rawa Sekunder	2.74	-	-	-	-
6	Semak/ Belukar	16,860.12	16,936.27	14,741.83	13,600.88	12,318.09
7	Perkebunan	21,468.78	22,607.38	22,629.00	22,567.76	23,137.76
8	Pemukiman	2,334.54	2,224.35	2,544.54	2,554.85	2,571.12
9	Lahan Terbuka	881.88	935.94	269.45	205.42	1,162.82
10	Tubuh Air	1,353.67	1,311.37	1,183.24	1,107.48	1,105.28
11	Semak Belukar Rawa	637.12	656.22	656.22	576.04	576.04
12	Pertanian Lahan Kering	5,849.24	5,482.43	6,099.84	5,994.76	5,844.82
13	Pertanian Lahan Kering Campur	38,863.99	39,178.99	39,080.82	40,973.72	41,070.38
14	Sawah	3,997.75	4,118.95	4,419.03	4,360.45	4,339.26
15	Tambak	7,912.53	9,222.02	9,532.92	10,772.86	10,771.17
16	Pertambangan	-	-	66.91	66.91	66.91
17	Rawa	391.65	391.65	348.00	399.85	366.32
18	No Data	615.05	365.93	312.49	172.13	172.13
	Total Luas (Ha)	**435,986.75**	**435,986.75**	**435,986.75**	**435,986.75**	**435,986.75**

Sumber : BPKH XV Gorontalo Tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan, tutupan hutan yang paling dominan di Kabupaten Pohuwato adalah hutan lahan kering primer dan sekunder. Tutupan hutan lahan kering sekunder juga mempunyai luas yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya. Tutupan lahan hutan kering primer dan sekunder umumnya berada pada kawasan hutan lindung dan CA Panua. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pohuwato mempunyai kawasan hutan.

Semak belukar banyak dijumpai di wilayah perbatasan antara hutan dan bukan hutan dan umumnya merupakan areal pertanian lahan kering yang telah lama tidak diolah sehingga ditumbuhi semak belukar, atau sering juga ditemui semak belukar dibiarkan tumbuh bersama tanaman buah-buahan atau tanaman perkebunan seperti kelapa. Perkebunan di wilayah perencanaan menempati areal sekitar 21.468,44 ha. Perkebunan tersebar setempat-setempat hampir di semua

wilayah kecamatan. Beberapa perkebunan kelapa sawit juga berdekatan dengan kawasan hutan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Potensi Lahan

Wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki banyak potensi untuk bisa dikelola menjadi kekuatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum potensi tersebut tergambar dari pengunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Pohuwato

PenggunaanLahan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Sawah Yang Diolah	3.900,00	3.900	3.900	3.228
Sawah Yang Belum Diolah	2.785,00	1.833	1.833	2.368
Tegalan/Kebun	40.803,00	48.151	48.151	50.128
Lading/Huma	15.495,00	17.755	17.755	15.646
Penggembalaan/Padang Rumput	1.100,00	878	878	1.483
Rawa Yang TidakDitanami	-	-	-	-
Hutan Negara, Tambak, Kolam/Tebat/Empang	223.252,00	204.125	204.125	220.080
Lahan Kering Yang Sementara Tidak Diusahakan	21.073,00	20.873	20.873	23.766
Hutan Rakyat/TanamanKayu-kayuan	20.851,00	20.446	20.446	44.786
Perkebunan	21.648,00	23.455	23.455	28.402
Lain-lain	73.523,00	83.014	83.014	34.543
Jumlah	424.430,00	424.430	424.430	424.430

Sumber :DinasPertanian 2020

Pada tabel 2.16 tersebut nampak bahwa untuk pertanian lahan basah komoditi yang dikembangkan adalah tanaman padi sawah, dimana pada tahun 2019 luasannya 3.228 Ha, menurun dibanding tahun 2018 seluas 3.900 Ha. Sementara itu sawah yang belum diolah bertambah dari 1.833 Ha tahun 2018 menjadi 2.368 ha. Kemudian tegalan atau kebun meningkat menjadi 50.128 Ha, demikian juga dengan pengembaan/padang rumput, tambak, lahan kering dan perkebunan. Untuk penggunaan lain-lain tahun 2019

menurun menjadi 34.543 ha di banding tahun 2018 seluar 83.014 ha. Berbagai jenis luasan lahan tersebut secara detil pengunaannya dijelaskan berikut ini.

2.1.2.2. Potensi Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Pohuwato mencakup lahan basah dan lahan kering. Untuk lahan basah fokus komoditi padi, sedangkan untuk lahan kering fokus tanaman jagung, padigogo, umbia-umbian, tanaman perkebunan dan hortikultura.

a. Padi

Tanaman padi merupakan tanaman yang sudah membudaya di Masyarakat. Dari tanaman ini pasokan beras untuk daerah bahkan daerah sekitarnya dapat di penuhi. Adapun perkembangan produksi padi sawah seperti pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Luas panen dan Produksi Padi 2016 s/d 2020

KECAMATAN	PADI	
	LUAS PANEN (Ha)	**PRODUKSI (Ton)**
Popayato	50,00	151,25
Popayato Barat	409	1.908,80
Popayato Timur	34	111,11
Lemito	-	-
Wanggarasi	95	334,88
Marisa	-	-
Patilanggio	682	4.154,74
Buntulia	596	3.484,81
Duhiadaa	2.404	12.459,93
Randangan	270	1.181,79
Taluditi	1.323	6.011,71
Paguat	274	1.477,13
Dengilo	926	5.434,69
JUMLAH 2020	**7.063**	**36.710,86**
2019	**6.818**	**36.378,38**
2018	11.625	53.867
2017	10.041	50.966
2016	7.417	46.092

Sumber :DinasPertanian, 2020

Berdasarkan tabel 2.17 nampak bahwa penghasil padi terbesar adalah kecamatan duhiadaa, kemudian Patilanggio dan Taluditi. Jika dibandingkan produksi dari tahun ketahun, maka tampak cenderung menurun hal ini disebabkan karena luasan panen yang juga berkurang. Luasan panen berkurang disebabkan gagal panen dan beberapa petani melaksanakan alih komoditi.

b. Jagung

Tanaman jagung juga merupakan tanaman yang sudah membudaya di masyarakat Gorontalo khususnya Pohuwato. Tanaman ini terdapat diseluruh Kecamatan. Adapun luas panen dan produksinya sebagaimana tabel 2.18.

Tabel 2.18
Luas panen dan Produksi Jagung Tahun 2016 s/d 2020

KECAMATAN	JAGUNG	
	LUAS PANEN (Ha)	**PRODUKSI (Ton)**
Popayato	5.411	27.747,61
Popayato Barat	6.281	25.595,08
Popayato Timur	7.657	38.399,86
Lemito	7.017	30.376,59
Wanggarasi	7.307	35.446,26
Marisa	3.041	13.866,96
Patilanggio	8.594	49.733,48
Buntulia	4.017	17.481,98
Duhiadaa	589	2.387,22
Randangan	10.178	59.978,95
Taluditi	11.923	61.474,99
Paguat	6.083	31.911,42
Dengilo	6.556	34.864,81
JUMLAH 2020	**84.654**	**429.265,19**
2019	**87.102**	**428.200,13**
2018	95.807 95.807	484.766
2017	104.510 104.510	464.033
2016	67.471	373.361

Sumber :Dinas Pertanian, 2020

Berdasarkan tabel 2.18 nampak bahwa produksi jagung tahun 2020 meningkat jika dibanding tahun 2019. Produksi jagung tertinggi terdapat di Kecamatan Taluditi, sedangkan yang terendah di Kecamatan Duhiadaa.

c. Umbi-umbian

Tanaman umbi-umbian merupakan salah satu sumber karbohidrat yang bisa mensubsidi kebutuhan beras sebagai makanan pokok. Adapun gambaran produksi umbi-umbian di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel 2.19.

Tabel 2.19
Luas Panen Ubi Kayu dan Ubi Jalar

KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	
	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Popayato	0	0
Popayato Barat	0	0
Popayato Timur	1	1
Lemito	0	0
Wanggarasi	0	0
Marisa	0	0
Patilanggio	1	3
Buntulia	1	0
Duhiadaa	0	0
Randangan	0	0
Taluditi	0	2
Paguat	0	0
Dengilo	1	1
2019	**4**	**7**

Sumber :BPS, 2020

Tanaman ubi kayu dan ubi jalar produksinya masih kecil dan belum merata di kecamatan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi dan manfaat tanaman ini kemasyarakat sebagai salah satu makanan sumber karbohidrat yang bisa menggantikan posisi beras, sagu dan jagung. Sehingga sebagian besar tanaman ini belum dikembangkan secara massiv oleh masyarakat dan dianggap usaha atau tanaman sambilan saja. Kedepan komoditi ini berpotensi dikembangkan berbarengan

dengan tanaman jagung, coklat dan kelapa atau optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan,

d. Tanaman perkebunan

1) Tanaman Kelapa dan Kakao.

Luas panen dan produksi Kelapa dan kakao sebagaimana disajikan pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Luas panen dan Produksi Kelapa dan kakao

KECAMATAN	KELAPA		KAKAO	
	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)
Popayato Barat	1.812	2.808,6	198	217,8
Popayato	1.797	2.785	-	-
Popayato Timur	2.072,5	3.212,4	77	73,7
Lemito	1.884	2.826,0	51	56,1
Wanggarasi	1.423	2.134,5	115	104,5
Taluditi	547	847,9	3.181	2.593,80
Randangan	2.702	4.188,1	293	233,2
Patilanggio	1.958	3.034,90	67	73,7
Buntulia	1.093	1.639,5	-	-
Duhiadaa	1.087	1521,8	-	-
Marisa	1.000	1.400,0	-	-
Paguat	1.286	1.993,30	-	-
Dengilo	897,5	1346,25	5	5,5
TAHUN 2020	**19.559**	**29.739**	**3.987**	**3.358**
Tahun 2019	17.338	29.821	6.045	7.859
Tahun 2018	17,3	29,75	5.986	7.782
Tahun 2017	17,17	28,89	5.803	7.753
Tahun 2016	16.99	28.76	5.716	7.627

Sumber :Dinas Pertanian Tahun 2020

Tanaman kelapa merupakan tanaman perkebunan yang terdapat diseluruh Kecamatan. Karena tanaman ini adalah tanaman tahunan yang memilki

konsistensi dalam produksinya sehingga jumlah produksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung stabil. Namun tantangan komoditi ini ada pada perluasan bangunan baik bangunan rumah, perkantoran, pertokoan, dll sehingga banyak pohon ditebang dan berdampak pada jumlah produksi. Potensi komoditi ini bukan hanya pada buah, tetapi hampir semua unsurnya bisa bermanfaat, sehingga sangat membantu percepatan roda perekonomian daerah.

Selanjutnya untuk kakao dari 13 kecamatan yang ada, hanya berkembang di 8 kecamatan, dan produksi yang tertinggi berada di kecamatan Taluditi. Tingkat produksi kakao mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, penyebabnya salah satunya adalah adanya peremajaan tanaman kakao. Selanjutnya untuk tanaman perkebuanan lainnya seperti tanaman Kopi, Cengkeh dan Karet dimana perkembangan luas panen dari ketiga komoditi tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Luas panen Karet, Cengkeh dan Kopi

KECAMATAN	Luas Panen (Ha)		
	Karet	Cengkeh	Kopi
Popayato	0	0	7
Popayato Barat	0	0	8
Popayato Timur	0	0	9
Lemito	0	0	2
Wanggarasi	0	0	7
Marisa	0	0	0
Patilanggio	0	0	0
Buntulia	0	0	0
Duhiadaa	0	0	0
Randangan	5	5	5,14
Taluditi	0	0	31
Paguat	0	0	0
Dengilo	0	0	0
2020	**0**	**0**	**69,14**

Sumber : PohuwatoDalam Angka, 2020

Ketiga jenis tanaman sebagaimana tabel 2.21 merupakan tanaman potensial yang cocok dikembangkan didaerah daerah dengan topografi pegunungan seperti di Kecamatan Taluditi, sebagaian Kecamatan Wanggarasi, Sebagian Kecamatan Dengilo, Sebagian Kecamatan Paguat, Sebagian Kecamatan Lemito, Sebagian Kecamatan Popayato Timur dan Sebagian Kecamatan Buntulia. Hingga tahun 2020 luas panennya belum ada data kecuali untuk kopi. Ditingkat lapangan, tanaman cengkeh dan karet sudah ada dikembangkan masyarakat, tapi masih dalam skala kecil, masih uji coba, dan ada yang belum panen. Tanaman lain yang juga dikembangkan masyarakat adalah jambu mete. Konsep pengembangan *mix farming* (pertanian campuran) yang akan diarahkan pada lahan diatas kemiringan 15 persen akan berkontribusi dalam peningkatan produksi tanaman ini dan tentu dampaknya diharapkan bisa meningkatnya tutupan lahan dan kerusakan sedimen tanah.

e. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura atau tanaman jenis buah-buahan dan sayuran banyak yang dibudidayakan di Pohuwato. Beberapa jenis yang dominan, produksinya sebagaimana disajikan pada tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura
Tahun 2020

KECAMATAN	Produksi (Kuintal)				
	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya
Popayato	240	0	0	297	139
Popayato Barat	900	17.700	93	547	0
Popayato Timur	180	19	0	416	135
Lemito	720	0	366	444	202
Wanggarasi	508	42	65	98	0
Marisa	458	0	26	110	31
Patilanggio	1272	8	29	586	491
Buntulia	450	400	0	1682	125

Duhiadaa	95	0	0	224	72
Randangan	156	0	144.669	776	137
Taluditi	169	26756	5570	715	133
Paguat	135	4	0	242	59
Dengilo	0	99	15	172	75
2020	**5283**	**45.028**	**150.833**	**6309**	**1599**

Sumber :PohuwatoDalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel 2.22 nampak bahwa untuk buah-buahan jenis di atas rata-rata dikembangkan diseluruh kecamatan, walaupun produksinya belum optimal. Namun dengan strategi peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan kedepan, maka produksinya ini masih bisa dimaksimalkan. Selanjutnya untuk hortikultura jenis sayuran, perkembangan produksinya sebagaimana disajikan pada tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23.
Produksi Sayur-SayuranTahun 2020

KECAMATAN	Produksi (Kuintal)				
	B.Merah	**Cabai**	**Tomat**	**Petsai**	**B.Putih**
Popayato	0	1283	0	0	0
Popayato Barat	0	2303	183	0	0
Popayato Timur	0	2357	476	0	0
Lemito	0	1189	148	0	0
Wanggarasi	0	841	0	0	0
Marisa	0	2414	212	0	0
Patilanggio	0	6054	329	0	0
Buntulia	0	1079	180	0	0
Duhiadaa	0	481	86	0	0
Randangan	1700	3225	143	44	0
Taluditi	258	11529	477	34	0
Paguat	149	388	701	0	0
Dengilo	0	712	0	0	0
2020	**2107**	**33.855**	**2.935**	**78**	**0**

Sumber :PohuwatoDalam Angka, 2021

Berdasar kantabel 2.23 di atas nampak bahwa untuk komoditi tomat dan cabe, sebagian besar dikembangkan diseluruh kecamatan, sedangkan untuk bawang merah, dan pitsai hanya ada dibeberapa kecamatan. Bawang putih belum ada produksinya namun komoditi ini berpotensi dikembangkan kedepan.

2.1.2.3. Potensi Peternakan

a. Ternak Besar dan Kecil (Ruminansia)

Jenis ternak besar di Pohuwato terdiri dari ternak sapi, kuda, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan babi.. Keadaan populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24
Jumlah Populasi Ternak Besar dan Kecil (Ruminansia)

KECAMATAN	JumlahTernak (ekor)				
	Sapi Perah	Sapi Potong	Kuda	Kambing	Babi
Popayato	0	2862	0	1935	654
Popayato Barat	0	1988	0	916	529
Popayato Timur	0	2763	0	795	2066
Lemito	0	2537	0	733	606
Wanggarasi	0	1374	0	492	319
Marisa	0	1254	2	1251	229
Patilanggio	0	2880	0	633	0
Buntulia	0	1913	0	0	0
Duhiadaa	0	2527	0	1896	0
Randangan	0	6972	0	1675	1016
Taluditi	5	2706	0	954	556
Paguat	0	2699	0	1406	0
Dengilo	0	1766	0	1351	403
2020	**0**	**34241**	**2**	**14836**	**6378**

Sumber :PohuwatoDalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel 2.24 nampak bahwa untuk ternak sapi perah hanya terdapat dikecamatan Taluditi, itu pun jumlahnya hanya 5 ekor. Namun fakta ini menunjukkan bahwa ternak sapi perah boleh dikembangkan diwilayah ini. Selanjutnya untuk ternak kuda terdapat di kecamatan marisa, ternak babi sebagian besar berkembang di kecamatan-kecamatan, demikian pula dengan ternak sapi potong dan ternak kambing.

Pengembangan jenis ternak ini berpotensi kedepan karena dapat diintegrasikan dengan pengembangan komoditi jagung, kelapa dan coklat serta tanaman lainnya.

b. Ternak Unggas

Ternak unggas yang berkembang di kabupaten Pohuwato terdiri dari ayam dan itik. Adapun perkembangan jenis ternak ungas tersebut sebagaimana pada tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Perkembangan Ternak Unggas Tahun 2020

KECAMATAN	Ayam Kampung	AyamPetelur	AyamPedaging	Itik	Itik Manila
Popayato	11.182	0	0	475	0
Popayato Barat	8.394	0	0	446	626
Popayato Timur	9.681	0	0	519	0
Lemito	13.638	0	0	433	437
Wanggarasi	13.638	0	0	513	477
Marisa	25.248	2400	0	1151	571
Patilanggio	49.518	0	0	949	867
Buntulia	41.026	1000	0	1545	571
Duhiadaa	15.424	0	0	2069	1074
Randangan	64.804	7000	0	1071	826
Taluditi	28.405	0	0	2134	953
Paguat	43.029	0	0	963	561
Dengilo	43.029	0	0	964	564
2019	**367.177**	**10400**	**0**	**1032**	**7408**

Sumber : BPS,2020

Dari tabel 2.25 nampak bahwa unggas yang telah dikembangkan diseluruh Kecamatan adalah ayam kampung, itik dan itik manila.

2.1.2.4. Potensi Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Pohuwato, dimana dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada diwilayah pesisir. Pencaharian masyarakat disektor ini terdiri dari dua yakni pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

a. Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26
Perkembangan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya

KECAMATAN	PERIKANAN TANGKAP		PERIKANAN BUDIDAYA	
	RTP	Produksi (Ton)	RTP	Produksi (Ton)
Popayato Barat	202	697	291	2.203.492
Popayato	377	1.345	116	1.795.120
Popayato Timur	71	726	99	270.000
Lemito	211	1.660	398	2.520.802
Wanggarasi	90	1.444	93	1.950.000
Taluditi	-	-	234	1.270
Randangan	147	281	832	8.201.805
Patilanggio	38	368	99	1.746.330
Buntulia	24	-	82	-
Duhiadaa	214	3.169	247	1.621.300
Marisa	457	9.224	81	-
Paguat	533	7.235	305	1.376.480
Dengilo	-	-	174	1.350
Tahun 2020	**2.364**	**26.148**	**3.051**	**21.687**
Tahun 2019	2.288	25.518	3.051	28.747
Tahun 2018	2.288	23.746	3.051	28.677
Tahun 2017	2.212	21.785	3.051	31.870
Tahun 2016	2,088	18,564	3,052	22,234

Sumber :LapTah DinasPerikanan, 2020

Berdasarkan tabel 2.26 tersebut nampak bahwa untuk perikanan tangkap jumlah produksi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan jumlah RPT (Rumah Tangga Perikanan) tahun 2020 sebanyak 2.2364 orang. Selanjutnya untuk perikanan budidaya jumlah produksi tahun 2020 sebanyak 21.687, mengalami penurunan dibanding tahun 2019, dengan jumlah RTP sebanyak 3.052 orang.

Tabel 2.27.
Jenisdan Produksi Perikanan Tangkap

KECAMATAN	Jenis dan jmlproduksi ikan (ton)				
	Cakalang	**Tongkol**	**Tuna**	**Udang**	**Lainnya**
Popayato	121,77	368,39	51,60	6,19	2.331,27
Popayato Barat	95,97	289,97	40,24	5,16	1.832,35
Popayato Timur	52,63	158,91	21,67	4,13	1.005,41
Lemito	97,00	293,06	40,24	5,16	1.852,85
Wanggarasi	55,72	170,27	24,77	3,10	1.068,44
Marisa	239,40	725,44	101,13	11,35	4.593,10
Patilanggio	49,53	150,66	20,64	2,06	956,26

Buntulia	-	-	-	-	-
Duhiadaa	58,82	180,58	24,77	3,10	1.140,55
Randangan	66,04	199,16	27,86	3,10	1.258,71
Taluditi	-	-	-	-	-
Paguat	240,44	730,59	102,16	12,38	4.623,22
Dengilo	-	-	-	-	-
2019	**1.077,32**	**3.267,04**	**455,07**	**55,72**	**20.662,17**

Sumber : BPS Pohuwatotahun 2020

Berdasarkan tabel 2.27 nampak bahwa jenis ikan tangkap yang dominan diperoleh nelayan adalah ikan tongkol, kemudian ikan cakalang, ikan tuna dan udang, serta jenis lainnya. Selanjutnya untuk perikanan budidaya, sebaran jumlah rumah tangga perkecamatan dapat dilihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya

KECAMATAN	JumlahRumahTangga					Total Jumlah
	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	
Popayato	30	189	0	0	0	219
Popayato Barat	10	183	0	0	0	193
Popayato Timur	40	30	0	0	0	70
Lemito	5	110	10	0	0	125
Wanggarasi	0	87	10	0	0	97
Marisa	1	0	0	0	51	52
Patilanggio	0	40	10	0	20	70
Buntulia	-	-	-	-	-	-
Duhiadaa	0	72	28	0	10	110
Randangan	0	362	0	0	0	362
Taluditi	0	0	30	0	0	30
Paguat	35	96	10	0	0	141
Dengilo	0	0	30	0	0	30
2019	121	1149	128	0	51	1449

Sumber : BPS Pohuwatotahun 2020

Berdasarkan tabel 2.28, nampak bahwa untuk jenis budidaya ikan air tawar melalui kolam belum masiv dilaksanakan diseluruh kecamatan, padahal ikan air tawar mudah dikembangkan dan merupakan sumber protein hewani yang sangat baik. Jumlah

rumah tangga penambak dan budidaya air laut serta jaring apung yang masih dominan dikembangkan dikecamatan-kecamatan.

2.1.2.5. Potensi Pariwisata

Dengan topografi wilayah yang terdiri dari pesisir dan pegunungan, Kabupaten Pohuwato sangat berpotensi untuk mengembangkan potensi wisata alam dan laut. Wisata pantai, bawah laut dan alam pegunungan Kabupaten Pohuwato sementara ini masih dalam tahap pengembangan sebagaimana tabel 2.29 dibawah ini.

Tabel 2.29.
Obyek Wisata di KabupatenPohuwato

Jenis Obyek	5 DTW Unggulan	4 DTW Berkembang	16 DTW Rintisan
Wisata Alam	The Best Destination: - Pantai Libuo (Libuo) - Eco Tourism Taluditi	- Pantai Tanjung Maleo - Pantai Lalape - Air Terjun Lomuli - Pulau Lahe - Pulau Molombunae dan Kima	- Pantai Tanjung Bajo - Cagar Alam Panua - Pantai Bulili - Danau Delo - Danau Embung - Danau Telaga - Air Terjun Makarti Jaya - Air Terjun Karya Baru - Air Terjun Wanggarasi - Pulau Olinggobe - Pulau Maruangi - Pulau Pasigiogo
Wisata Budaya	The Best Destination: - Desa Wisata Torosiaje (Popayato) - Desa Wisata Banuroja (Randangan)	- Kampung Tua Paguat	- Masjid Keramat Wanggarasi - Islamic Center Buntulia
Minat Khusus	- Pantai Pohon Cinta (Marisa)	- Kolam Renang	- Wisata Pertanian Sawah

Sumber : RIPDA Tahun 2019

Disamping data sebagaimana tabel 2.29 tersebut, melalui pemerintah desa, sudah banyak destinasi wisata baru yang dibuat hingga tahun 2021 sehingga potensi-potensi wisata ini hanya tinggal dikoneksikan sehingga para pengunjung wisata ke Pohuwato bisa tingga lebih lama.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas terkait, merilis angka kunjungan tahun 2019 sejumlah 38.767 dengan rincian untuk wisatawan nusantara sejumlah 38.696 dan manca negara sejumlah 71 wisatawan. Namun saat pandemic covid 19 melanda Indonesia tahun 2020, jumlah kunjungan turun drastis, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik Berikut.

Grafik 2.3 :Kunjungan Wisata Pohuwato

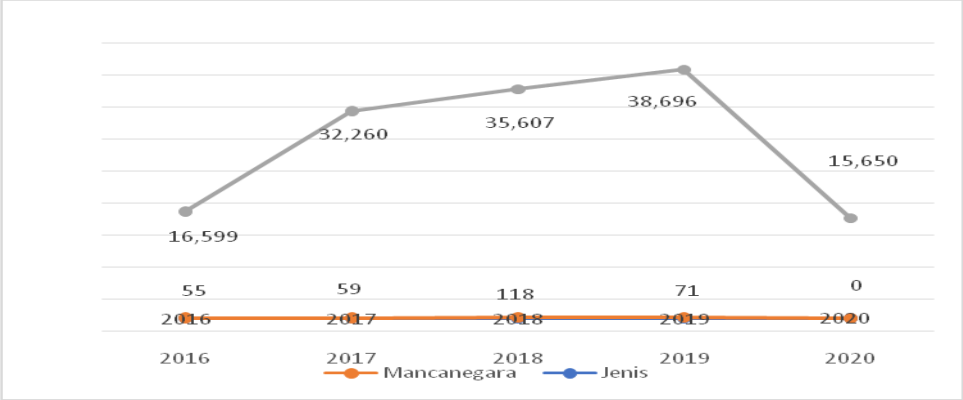

2.1.2.6. Potensi Pertambangan

Pertambangan di Kabupaten Pohuwatoterdiri dari berbagai ragam jenis dan potensi, seperti emas, perak, tembaga, batu gamping *(limestone)*, toseki, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, feldspar dan lempung *(clay)* mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian geologi lingkungan kawasan pertambangan daerah Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan oleh institusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa struktur geologi sebagaimana disajikan pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 2.30
Struktur dan Karakteristik Geologi Kabupaten Pohuwato

No	Struktur dan Karakterstik	Lokasi
1	Batuan malihan Secara umum batuan ini mengalami pemalihan lemah hingga sedang, batuannya terutama sakis hijau. Formasi batuan ini berumur mesozoitikum	Kecamatan Popayato Barat
2	Batuan sedimen, formasi Randangan Susunannya berupa konglomerat, batu pasir, batu lanau dan batu lumpur	Kecamatan Randangan dan Patilanggio
3	Batuan sedimen, fromasidolokapa Formasinya membentuk perbukitan terjal. Susunannya berupa batu pasir, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuftapii, aglomerat, breksi gunung api dan lava andesit hingga basal	Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Buntulia dan Kecamatan Paguat
4	Batuan sedimen, endapan sungai tua tersusun dari perselingan batu pasir, batu pasir konglomerat dan konglomerat	Kecamatan Duhiadaa, Marisa dan Kecamatan Buntulia
5	Batuan gunung api, batuan terobosan dan endapan permukaan	Tersebar disemua kecamatan

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011

Tabel 2.31
Potensi Kandungan Geologi Kabupaten Pohuwato

Jenis	Potensi	Lokasi
Sirtu	13.313.250 (M^3)	Sungai Popayato, Lemito, Randangan, Marisa dan sungai Bumbulan
Batu Andesit	13.350.810(M^3)	Kecamatan Buntulia dan Randangan
Batu Dasit	24.227.775(M^3)	Kecamatan Buntulia dan Paguat
Batu Granodiorit	1.279.299.750(M^3)	Kecamatan Buntulia, Marisa dan Kecamatan Paguat
Batu Granit	1.064.226.900(M^3)	Kecamatan Popayato, Popayato Barat dan Kecamatan Popayato Timur
Toseki	10.771.431(M^3)	Kecamatan Lemito, Wanggarasi, Randangan dan Kecamatan Taluditi
Emas	-	Kecamatan Dengilo, Taluditi, Popayato Barat, Buntulia dan Kecamatan Patilanggio

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011

2.1.2.7. Potensi Kehutanan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Balai Pemantapan Kawasan hutan XV Gorontalo, bahwa kondisi hutan di Kabupaten Pohuwato berdasarkan peta rupabumi Indonesia tahun 2016 secara total seluas 435.987,94 hektar. Adapun luas Kawasan hutan di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Luas Kawasan Hutan (Ha)

Kecamatan	Total	APL	CA	HL	HP	HPK	HPT
Buntulia	50.214,00	5.651,32	13.835,23	12.451,91	1.230,83	1.931.47	15.113,24
Dengilo	36.487,05	2.398,41	11.277,49	5.366,56	12.639,70	1.282,11	3.522,77
Duhiadaa	3.687,75	3.643,61	-	44,14	-	-	-
Lemito	45.946,53	20.404,71	-	9.034,84	12.769,30	280,64	3.457,04
Marisa	2.881,63	1.975,22	649,49	-	-	256,92	-
Paguat	78,01	78,01	-	-	-	-	-
Patilanggio	23.247,27	7.699,35	8.865,12	3.406,10	-	58,85	3.212,84
Popayato	6.296,70	3.732,12	-	1.121,76	-	-	1.442,82
Popayato Barat	70.324,86	27.351,94	-	31.445,03	2.425,21	1.166,64	7.936,04
Popayato Timur	40.162,34	18.570,47	-	7.036,77	8.199,62	498,10	5.857,38
Randangan	18.158,33	12.020,97	1.625,69	1.988,79	818,73	1.704,14	-
Taludit	83.049,93	9.204,68	1.952,41	41.311,43	649,19	1.831,14	28.100,80
Wanggarasi	55.458,52	11.661,51	1.502,54	23.377,03	2.743,71	1.512,23	14.661,50
Total	**435.987,94**	**124.392,34**	**39.707,97**	**136.584,38**	**41.476,29**	**10.522,52**	**83.304,44**

Sumber : BPKH XV Gorontalo Thn 2017, berdasarkan Peta RB Thn 2016

Dilihat dari presentasi luasan hutan masing-masing kecamatan, Taluditi memiliki luasan terluas yakni 19 persen atau 83.049 hektar dan Kecamatan Paguat yang terkecil seluas 78 hektar. Lebih detail disajikan pada grafik 2.4 dibawah ini.

Grafik. 2.4.
Persentase Luas Hutan Perkecamatan

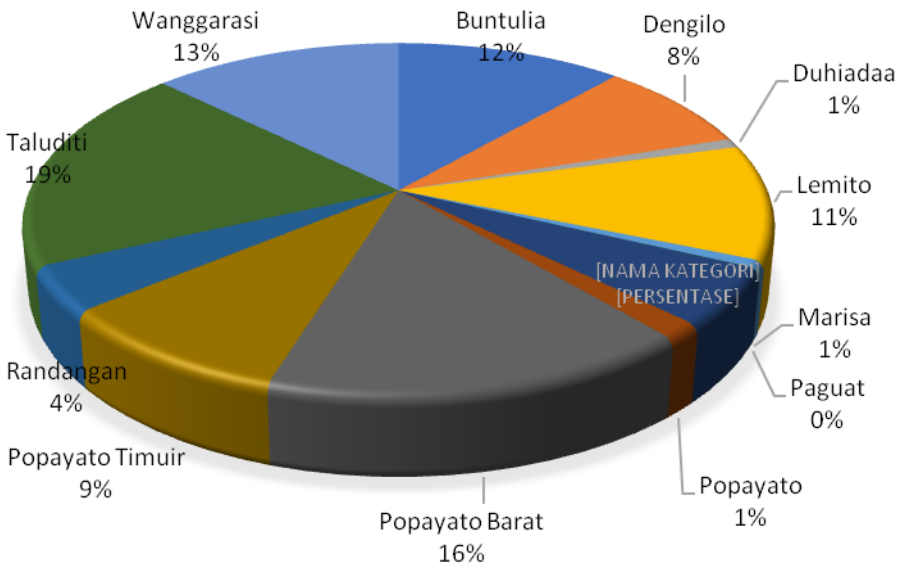

Sumber :Tabel/Grafik : BPKH 2017

2.1.2.8. Potensi keanekaragaman hayati

Kabupaten Pohuwato memiliki keragaman hayati tinggi. Hasil survey oleh Burung Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 telah mencatat 172 jenis burung, 64 jenis diantaranya endemis sulawesi, mamalia 24 jenis, herpetofauna 50 jenis, udang air tawar tiga jenis, dan tumbuhan sebanyak 349 jenis. Di wilayah ini terdapat jenis-jenis burung terancam punah secara global (*Globally Threatened Species* - GTS) yang tercatat yaitu maleo senkawor *Macrocephalon maleo* (genting/Endangered - EN), kakatua-kecil jambul-kuning *Cacatua sulphurea* (kritis/*Critically Endangered* - CR), mandar muka-biru *Gymnocrex rosenbergii* (rentan/*Vulnarable* - VU), kangkareng sulawesi *Rhabdotorrhinus exarhatus* (VU), dan julang sulawesi *Rhyticeros cassidix* (VU).

Selain jenis burung bentang alam Pohuwato juga merupakan habitat terbaik dari jenis-jenis mamalia terancam punah secara global. Beberapa diantaranya sangat ikonik bagi Sulawesi, seperti babirusa sulawesi *Babyrousa celebensis* (VU), anoa dataran-rendah *Bubalus depressicornis* (EN), anoa dataran-tinggi *Bubalus quarlessi* (EN), monyet-hitam gorontalo *Macaca hecki* (VU), tarsius sulawesi *Tarsius tarsier* (VU), dan kuskus-beruang sulawesi *Ailurops ursinus* (VU).

Karna potensi keanekaragaman hayatai inilah sejak tahun 2014, salah satu blok hutan Pohuwato di wilayah Taluditi, Wonggarasi dan Dengilo telah ditetapkan oleh Lembaga konservasi *BirdLife International* sebagai daerah penting bagi burung dan keanekaragaman hayati atau *Important Bird and Biodiversity Area* (IBA ke-228) dan dalam kajian Profil Ekosistem Wallacea, termasuk dalam Kawasan kunci keanekaragaman hayati atau *Key Biodiversity Area* (KBA).

2.1.2.9. Potensi Industri, Perdagangan dan Investasi

Sektor industri kecil dan menengah merupakan urat nadi perekonomian yang senantiasa memperoleh perhatian pemerintah daerah. Salah satu pertimbangannya

adalah sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Berdasarkan data BPS Pohuwato tahun 2020, jumlah perusahaan industri yang ada di Kabupaten Pohuwato adalah sebanyak 2.416 perusahaan yang mampu menyerap tenaga sebanyak 5.109 orang.

Selanjutnya untuk jenis perdagangan terdapat Jumlah Pedagang besar sebanyak 345, Pedagang menengah 574, Jumlah Kios sebanyak 5260 kios dan Jumlah warung sebanyak 1257 warung.

Untuk menunjang kegiatan ekonominya, masyarakat kabupaten Pohuwato menggunakan pasar sebagai sarana untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa dimana hingga tahun 2020 terdapat 17 pasar.

Selanjutnya untuk perkembangan investasi terdapat 15 investor di Kabupaten Pohuwato hingga tahun 2020 dengan kalisifikasi 5 PMA (Penanaman Modal Asing) dan 10 PMDN (Penanaman Modal Dalam negeri).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012-2032 menyebutkan bahwa kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Pohuwato menurut prioritas penanganannya meliputi antara lain berupa kawasan rawan banjir, tsunami, dan kawasan rawan gempa bumi (sangat rendah).

Kabupaten Pohuwato terdapat dua zona rawan gempa bumi (sangat rendah) yaitu tergolong sangat rendah terdapat di wilayah Kecamatan Lemito, dan Popayato. Sedangkan yang tergolong rendahterdapat di wilayah Kecamatan Randangan, Taluditi, Patilanggio, Marisa dan Paguat.

Sementara untuk kawasan rawan bencana alam banjir di Kabupaten Pohuwato lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam, seperti kondisi fisik topografi, alur aliran air, curah hujan yang tinggi, peresapan air yang rendah, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pendangkalan muara sungai. Daerah-daerah yang diidentifikasi merupakan daerah rawan bencana alam banjir, meliputi wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan hilir sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yang meliputi Kecamatan Taluditi, Marisa, Duhiadaa, Randangan, Dengilo, Paguat, Lemito, Popayato Timur, Popayato dan Popayato Barat. Berikut pada gambar 2.2 disajikan peta kawasan rawan Bencana.

Gambar 2.2.
Peta Kawasan Rawan Bencana

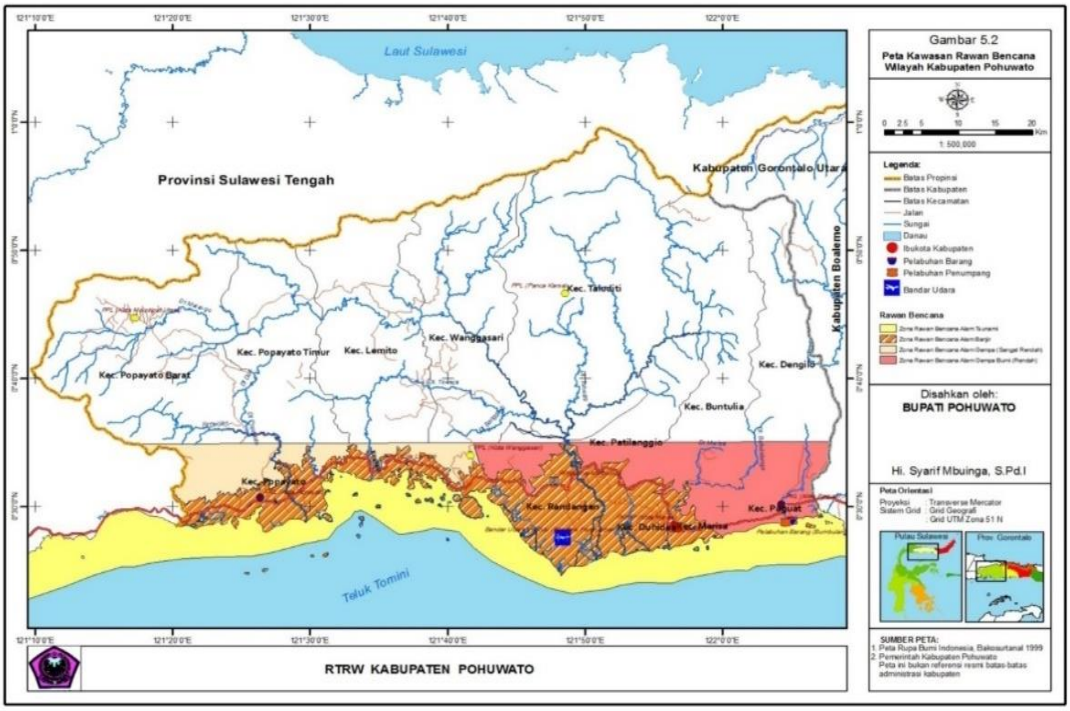

Selanjutnya Untuk data bencana sepanjang tahun 2018 - 2019 adalah disajikan pada tabel 2.33 sebagai berikut.

Tabel 2.33.
Bencana Alam Tahun 2018 – 2020

NO	BULAN	LOKASI	JENIS BENCANA
1	Januari	Paguat,Lemito,Wanggarasi,Marisa	Banjir,PuttingBeliung
2	Februari	Desa Popaya Kec. Dengilo	Banjir
		Desa Soginti Kec. Paguat	Banjir
		Desa Buhu Jaya Kec. Paguat	Banjir
3	April	Buntulia,Marisa,Patilanggio,Taluditi	Banjir
3	Mei	Desa PadengoKec, Pop. Barat	Banjir
		Desa Dudewulo Kec. Pop. Barat	Banjir
4	Nopember	Kecamatan Duhiadaa	Banjir
		Kecamatan Buntulia	Banjir

Sumber : BPBD Pohuwato 2020

Berdasarkan Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2020 bahwa frekuensi banjir yang terjadi disetiap kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik. 2.5
Frekuansi Banjir Perkecamatan Tahun 2020

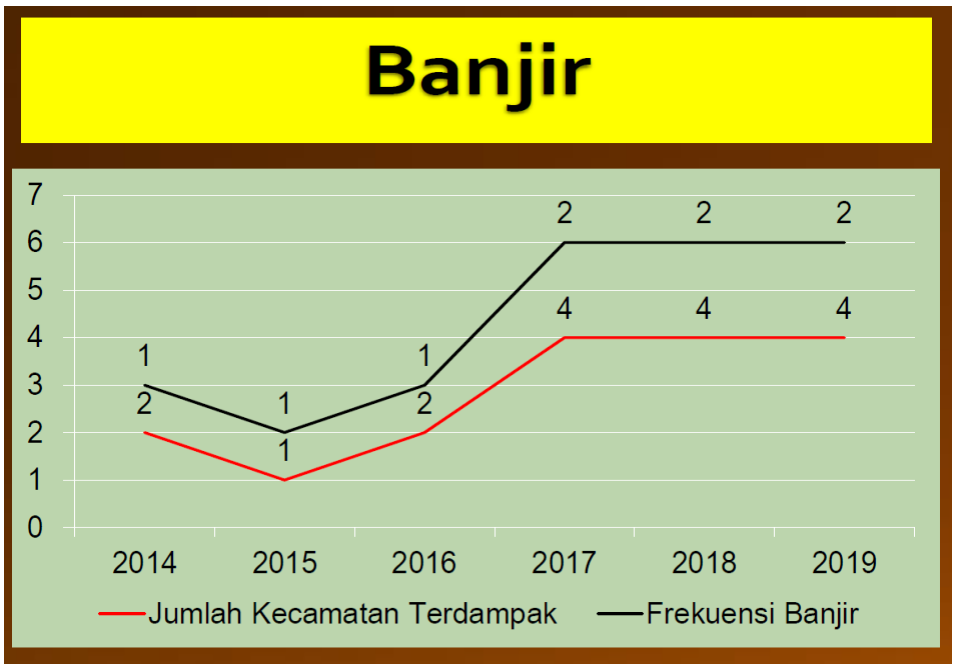

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Pohuwato 2020

Berdasarkan grafik 2.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggal 19 September 2020, banjir menerjang 4 kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Buntulia dan Patilanggio. Akibat banjir tersebut, sebanyak 2.874 jiwa atau 940 kepala keluarga (KK) terdampak. Rinciannya Desa Manawa, Patilanggio 54 KK/198 jiwa dan Desa Sipatana, Buntulia sebanyak 100 KK/244 Jiwa. Untuk Kecamatan Duhiadaa ada tiga desa terdampak banjir yakni Desa Buntulia Barat sebanyak 44 KK/185 jiwa, Desa Buntulia Jaya 40 KK/195 jiwa, dan Desa Buntulia Selatan 381 KK/904 jiwa. Sementara Kecamatan Marisa terdapat dua desa terdampak banjir yakni Desa Botubilotahu 70 KK/253 jiwa dan Desa Teratai 251 KK/895 jiwa.
2. Tanggal 16 Juni 2019, banjir melanda 4 kecamatan yaitu: Paguat, Wonggarasi, Taluditi dan Patilanggio. Total warga yang terdampak mencapai 1270 jiwa
3. Tanggal 5 Mei 2019, banjir menerjang kecamatan Paguat dan Popayato Barat. Sedikitnya 30 unit ruma terendam banjir dengan jumlah warga yang terdampak banjir mencapa 100 jiwa.
4. Tanggal 1 Mei 2018 Banjir melanda Kecamatan Popayato. Sedikitnya 20 rumah terendam banjir
5. Tanggal 5 Juni 2017, banjir melanda 4 kecamatan yaitu: Taluditi, Randangan, Patilanggio dan Wonggarasi. Warga yang terdampak berjumlah 4000 jiwa

Selanjutnya untuk Kawasan yang rawan longsor dapat dilihat sebarannya pada gambar 2.5. berikut ini. Berdasarkan gambar 2.5 tersebut, sebaran Kawasan rawan longsor di Kabupaten Pohuwato terdapat pada :

1. Wilayah yang rawan longsor di Kabupaten Pohuwato terdapat di wilayah Bagian Utara Pohuwato terutama sepanjang kelompok hutan Gunung Tentolomatinan, wilayah utara Cagar Alam Panua
2. Berdasarkan wilayah Administrasi, Wilayah yang rawan longsor meliputi Kecamatan Paguat, Kecamatan Taluditi, Kecamatan Popayato dan Kecamatan Wonggarasi
3. Wilayah-wilayah yang rawan longsor juga terdapat pada wilayah-wilayah PETI dan atau pertambangan rakyat
4. Beberapa lokasi penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit juga mempunyai resiko terjadinya bencana longsor

Gambar 2.3
Peta Sebaran Rawan Longsor

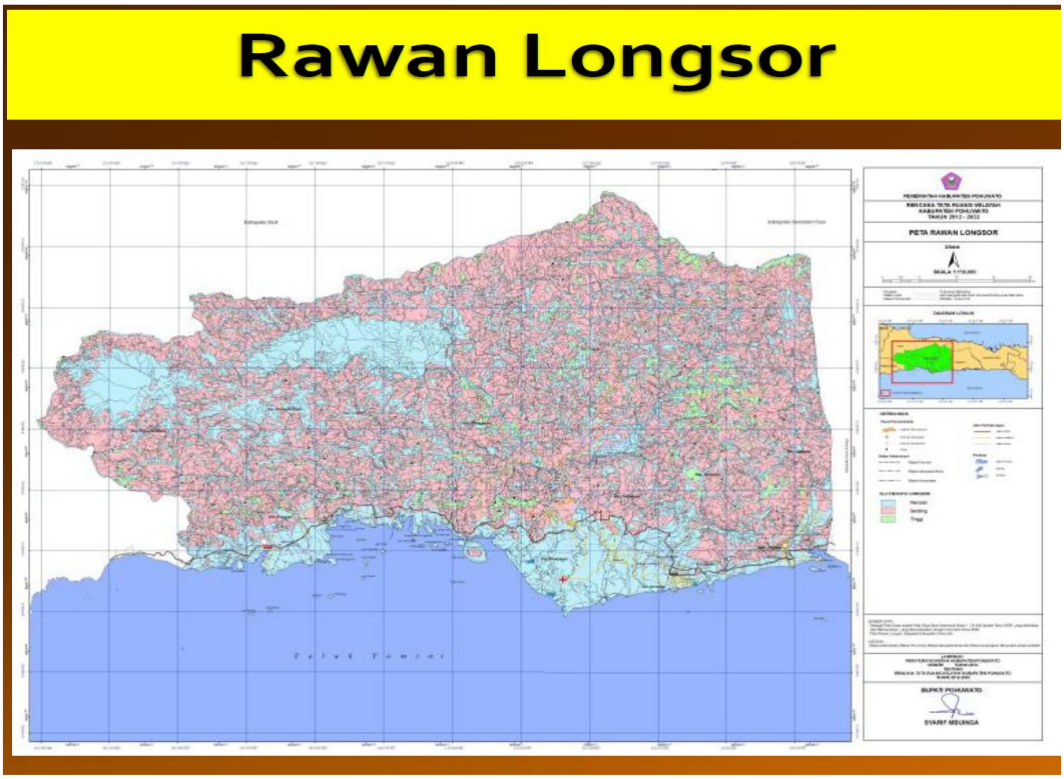

Sumber : Dok. KLHS RPJMD Tahun 2020

Bencana lain yang mengintip Kabupaten Pohuwato adalah gempa dan tsunami. Adapun sebaran ancaman bencana ini sebagaimana pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
Peta Sebaran Bencana Gempa dan Stunami

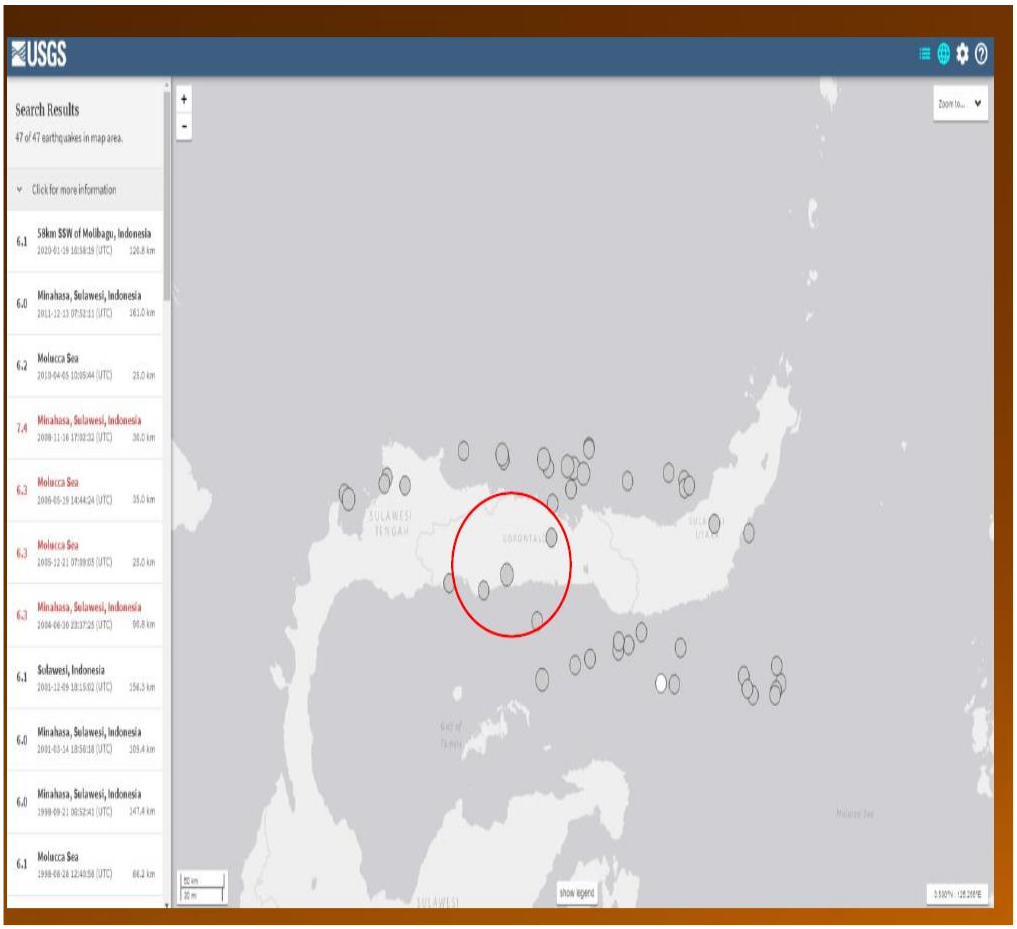

Sumber : Dok. KLHS RPJMD Kabupaten Pohuwato 2020

Berdasarkan gambar 2.4 tersebut diatas secara detail lokasi ancaman gempa dan tsunami di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Patahan Bumi Aktif, memanjang dari arah Kec. Dengilo, Buntulia, Taluditi, dan Wanggarasi.
2. Kawasan Rawan Gempa Bumi Tinggi di Kec: Lemito, PopayatoTimur, Popayato, dan Popayato Barat.

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami: Pentadu, Libuo, Molamahu, Lemito, Dudewulo, Milangoda

Berdasarkan buku wilayah Gempa Indonesia yang disusun oleh Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017, sesar aktif di Pulau Sulawesi mencapai 46 sesar aktif termasuk sesar Daratan Gorontalo. Sesar Gorontalo bergerak sekitar 11 mm/tahun), dibagian tengah ada sesar Palukoro yang bergerak paling aktif sekitar 41-45 mm/tahun. Dibandingkan dengan sesar lain di Pulau Sulawesi, sesar Gorontalo mempuyai sesar gerak yang paling kecil, namun demikian memiliki potensi energi besar yang dapat memicu gempa besar. Potensi gempa besar di Gorontalo sangat mungkin terjadi mengingat sebaran sesar mengelompok di Utara Pulau Sulwesi (Pusat Studi Gempa Nasional: Buku Peta dan Sumber Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017. Bencana lain yang juga penting diantisipasi adalah adanya krisis air di Kabupaten Pohuwato. Peta sebaran krisis air sebagaimana pada gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Krisis Air Kabupaten Pohuwato

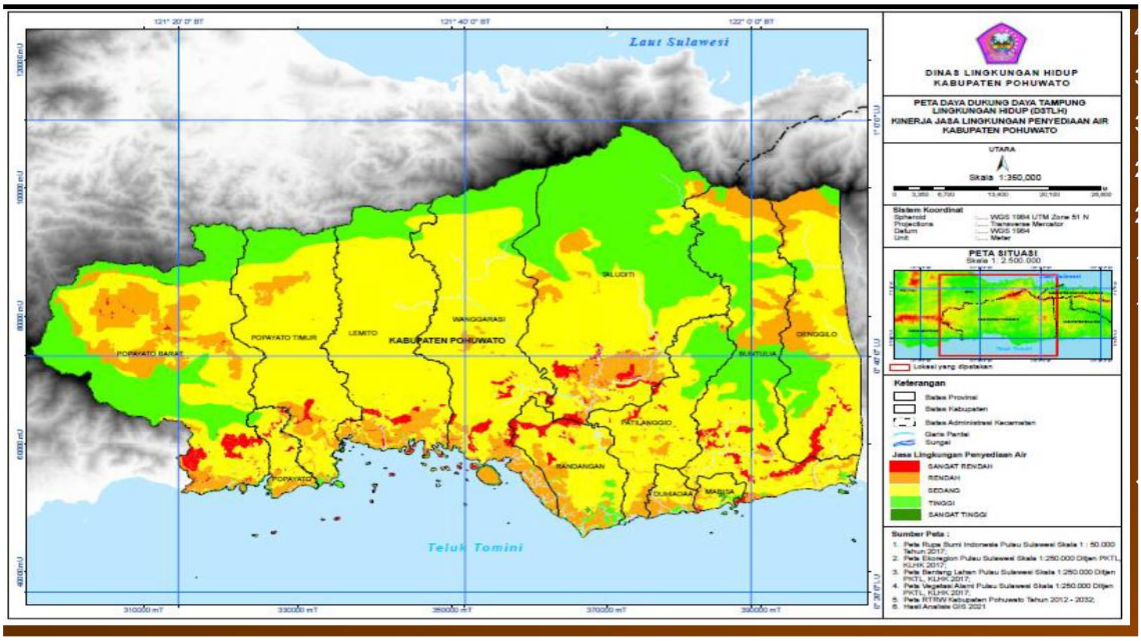

Sumber : Dok. KLHS RPJMD Kabupaten Pohuwato 2020

Adapun sebarannya di Kecamatan dapat dilihat pada grafik 2.6. berikut ini.

Grafik 2.6
Sebaran Ancaman Krisis Air Di kabupaten Pohuwato

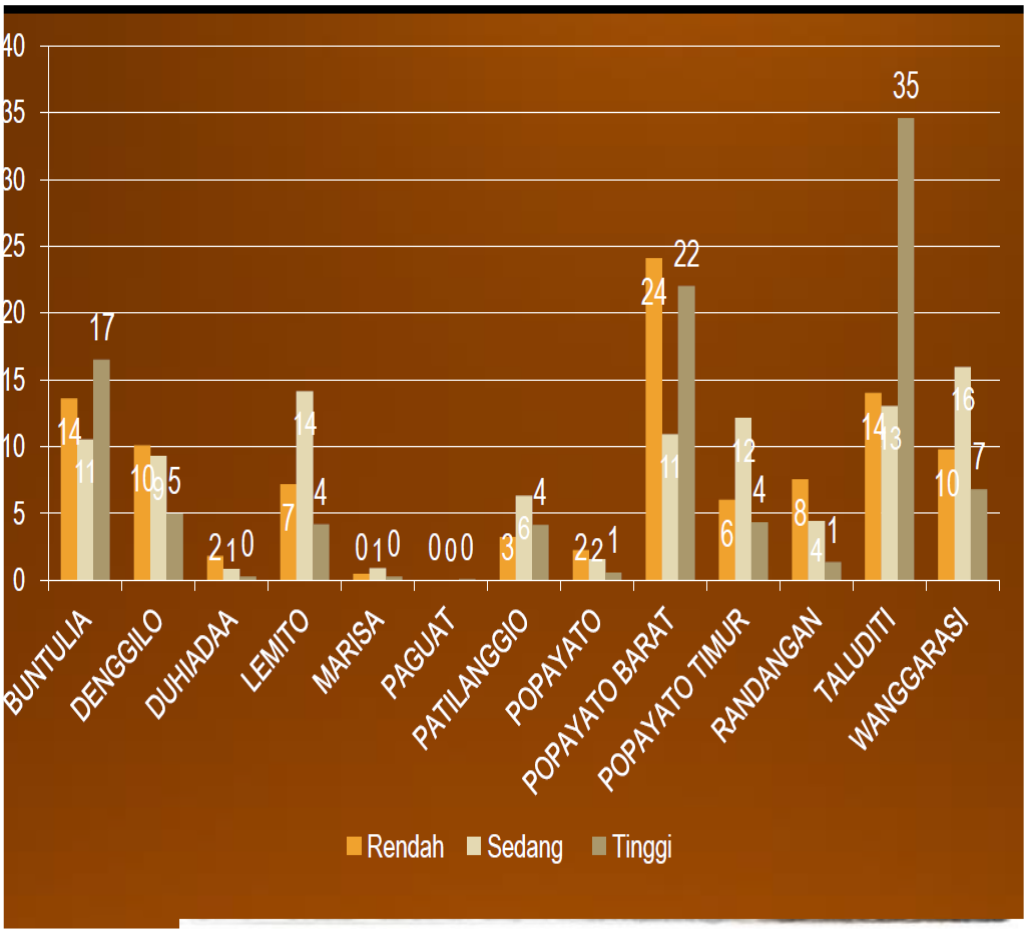

Sumber : Dok. KLHS RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2020

Berdasarkan grafik 2.6 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 115.859,15 hektar atau 26,29% lahan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato memberikan daya dukung tinggi dalam jasa penyediaan air. Kategori sedang seluas 254.441.19 hektar atau 57,74%, serta kategori rendah seluas 70.353,38 hektar atau 15,96%.
2. Jika dilihat distribusinya per kecamatan kategori tinggi dalam jasa penyediaan air terdapat di Kecamatan Taluditi, dan Kecamatan Popayato Barat

3. Sedangkan jasa penyediaan air kategori rendah yang dominan yaitu Kecamatan Paguat, Kecamatan Duhiadaa, Kecamatan Marisa dan Kecamatan Popayato

2.1.4. Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Pohuwato pada kurun 5 tahun, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.34.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato (jiwa)

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dengilo	5.970	6.093	6.251	6.285	6.296
Paguat	16.168	16.217	16.345	16.301	16.246
Marisa	20.017	20.190	20.750	21.043	21.193
Duhiadaa	12.117	11.517	12.727	12.860	12.883
Buntulia	11.494	11.512	11.843	12.077	12.041
Patilanggio	9.543	9.578	9.666	9.747	9.813
Taluditi	7.949	8.318	8.548	8.829	8.853
Randangan	16.355	16.132	17.004	17.239	17.285
Wanggarasi	5.018	5.016	5.183	5.304	5.383
Lemito	11.181	11.030	11.129	11.229	11.250
Popayato Timur	8.206	8.185	8.404	8.473	8.483
Popayato	9.796	9.803	10.165	10.092	10.191
Popayato Barat	7.044	7.001	7.298	7.421	7.569
JUMLAH	**140.858**	**142.571**	**145.469**	**146.900**	**147.486**

Sumber : BPS Pohuwato dan Dukcapil Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.34 di atas, jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2020 147.486 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 5 tahun terakhir yakni 33.6 jiwa/km2 dengan laju pertumbuhan 2010-2020 sejumlah 1.30 persen.

Selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan jenis agama yang dianut, dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dianut

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Popayato	96,68	3,21	0,04	0,07	-	-
Popayato Barat	98,29	1,44	0,22	0,05	-	-
Popayato Timur	75,36	24,1	0,48	0,06	-	-
Lemito	97,37	2,63	-	-	-	-
Wanggarasi	94,56	5,3	0,14	-	-	-
Marisa	99,08	0,78	0,04	0,1	-	-
Patilanggio	98,37	1,63	-	-	-	-
Buntulia	99,66	0,29	0,03	-	0,02	-
Duhiadaa	98,91	1,04	0,01	-	0,03	-
Randangan	90	2,97	0,49	6,48	0,06	-
Taluditi	92,85	5,66	0,25	1,23	-	-
Paguat	98,66	1,25	0,06	0,01	0,02	-
Dengilo	90,94	9,06	-	-	-	-
Pohuwato	**95,27**	**3,69**	**0,14**	**0,89**	**0,01**	**-**

Sumber : BPS Pohuwatotahun 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran aspek kesejahteraan masyarakat akan dijelaskan pada tiga sub bagian yakni 1) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, 2) fokus kesejahteraan sosial dan 3) fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

1. Pertumbuhan PDRB

Secara umum perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.7.
Perkembangan PDRB Kabupaten Pohuwato

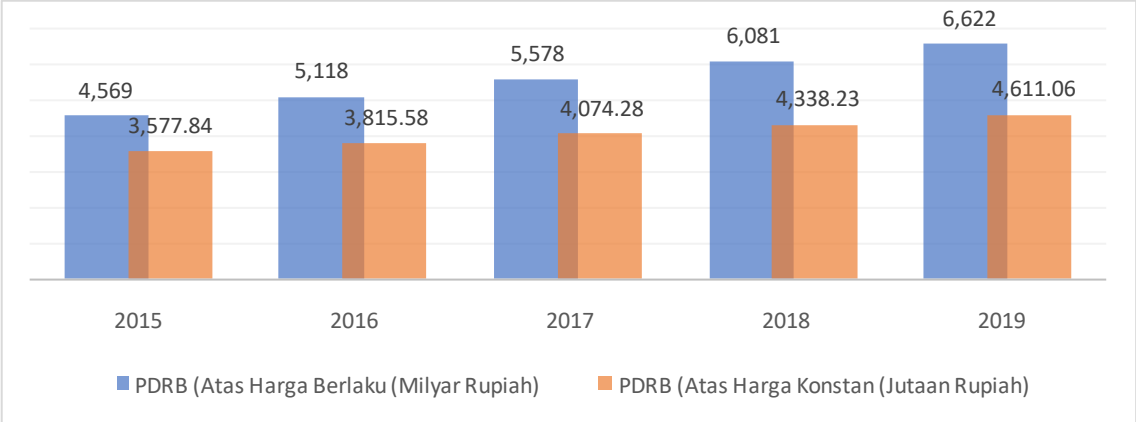

Sumber : BPS KabupatenPohuwato 2020

Berdasarkan grafik 2.7 nampak bahwa selama 5 tahun terakhir perkembangan PDRB Pohuwato terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan ini menunjukkan ekonomi pohuwato terus bergerak kearah yang lebih baik. Peningkatan PDRB juga nampak tergambarkan dari pertumuhan eknomi pohuwato yang cukup stabol hingga tahun 2019, namun mengalami kontraksi tahun 2020 akibat dampak pandemic covid 19. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 2.8.

Grafik 2.8.
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pohuwato

Sumber : BPS Pohuwato Tahun 2020

Dari grafik 2.8 nampak bahwa perekonomian Kabupaten Pohuwato tahun 2019 berada pada angka 6,29 persen, dan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar -0.18.

sebagaimana diketahui pada kondisi tahun 2020, dunia diterpa wabah pendemi covid-19, termasuk Indonesia.

Selanjutnya untuk struktur PDRB Kabupaten Pohuwato, rata-rata kontribusi sektor masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Pohuwato dimana sektor ini pada tahun 2020 mencapai 59,89 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.36
Distribusi PDRB-ADHB Menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	59,22	59,75	60,19	60,28	59,89
Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,76	0,71	0,71	0,77
IndustriPengolahan	4,47	4,33	4,34	4,4	4,54
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Pengadaan Air, PengelolaanSampah,Limbah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kontruksi	6,58	6,29	5,96	5,69	5,61
PerdaganganBesar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,43	9,83	10,2	10,74	10,69
Transportasi dan Pergudangan	3,12	3,03	2,94	2,88	2,82
PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum	1,1	1,13	1,14	1,14	1,13
Informasi dan Komunikasi	1,35	1,37	1,37	1,35	1,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	2,28	2,21	2,04	2,32
Real Estate	0,83	0,81	0,79	0,79	0,79
Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
AdministrasiPemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,01	4,61	4,29	4,07	4,02
Jasa Pendidikan	2,21	2,26	2,32	2,39	2,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,46	2,4	2,37	2,38	2,43
Jasa lainnya	1,1	1,06	1,02	0,99	0,95
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya dari Sisi Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami perlambatan dan berada pada angka -0,18 persen. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang minus termasuk sektor pertanian, sebagaimana disajikan pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA INDUSTRI	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,59	7,81	7,03	6	-1.40
Pertambangan dan Penggalian	-3,67	-0,87	0,02	4,79	-0.58
IndustriPengolahan	*6,15*	*3,15*	*5,69*	*8,64*	*4.20*
Pengadaan Listrik dan Gas	16,58	9,7	9,36	9,34	5.40
Pengadaan Air, PengelolaanSampah,Limbah	*14,9*	*15,73*	*11,9*	*12,98*	*2.22*
Kontruksi	6,28	2,15	2,17	1,99	-0.02
PerdaganganBesar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	*9,71*	*10,14*	*10,26*	*12,07*	*-0.15*
Transportasi dan Pergudangan	6,86	5,8	4,91	5,38	-3.04
PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum	8,86	9,25	8,55	6,74	-0.10
Informasi dan Komunikasi	10,18	10,22	9,18	6,81	7.37
JasaKeuangan dan Asuransi	20,07	10	4,08	-0,82	14.88
Real Estate	8,35	4,83	5,02	8,03	1.29
Jasa Perusahaan	5,81	5,12	4,99	5,04	-5.27
AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan JaminanSosialWajib	0,01	0,07	1,04	2,45	0.02
Jasa Pendidikan	*3,75*	*5,84*	*8,06*	*8,92*	*5.34*
JasaKesehatan dan KegiatanSosial	8,39	4,96	6,15	8,13	2.09
Jasalainnya	2,95	3,49	3,48	3,47	-3.12
LAJU PDRB	**6,64**	**6,78**	**6,47**	**6,28**	**-0.18**

Sumber : BPS, 2021

2. PDRB Perkapita

Untuk mengetahui nilai PDRB per perkepalaatau per satu orang penduduk di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat melalui PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pertumbuhannya dapatd ilihat melalui PDRB Perkapita Atas Harga Konstan, sebagaimana pada Grafik 2.9.

Grafik 2.9.
PDRB Perkapita KabupatenPohuwato

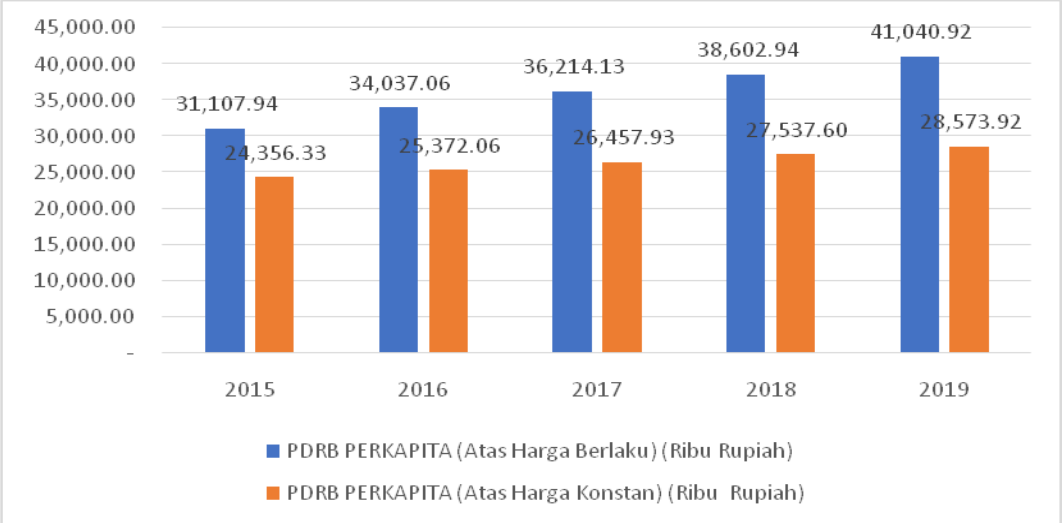

Sumber : BPS KabupatenPohuwatoTahun 2020

Berdasarkan grafik 2.9 nampak bahwa baik PDRB per kapita atas harga konstan dan atas harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahun. Demikian juga laju pertumbuhan PDRB perkapita cukup baik yakni pada kisaran 3 – 4 persen, sebagaimana digrafik 2.10.

Grafik 2.10.
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita

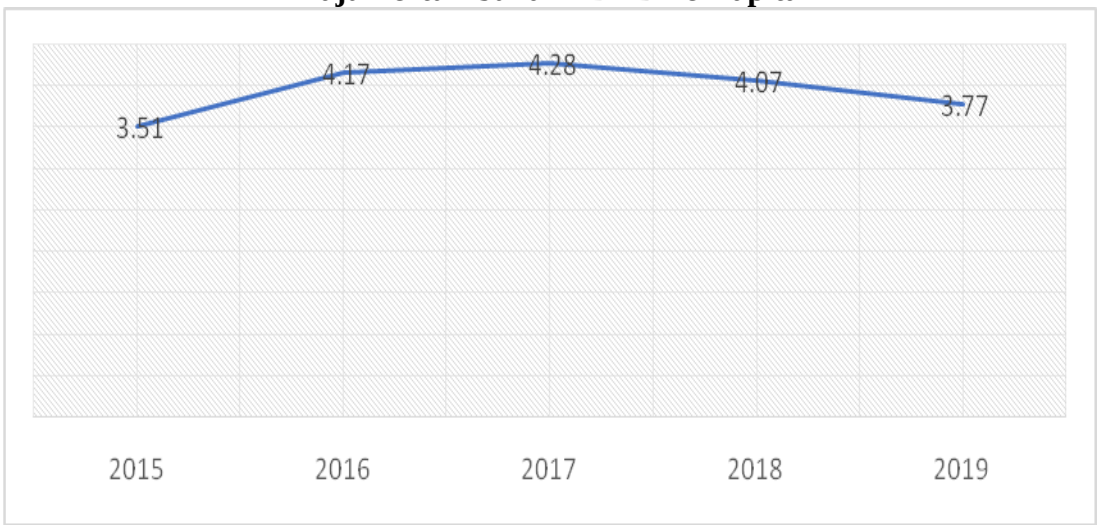

Sumber : BPS KabupatenPohuwatotahun 2020

3. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach)* dengan bersumber data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun perkembangan presentase kemiskinan dan penduduk yang diatas garis kemiskinan disajikan pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Perkembangan Kemiskinan

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PersentaseKemiskinan (%)	21,17	21,27	19,4	18,16	17.62
Presentase Penduduk diatasGarsi Kemiskinan	78,83	78,73	80,6	81,84	82.38

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan tabel 2.38 nampak bahwa pada tahun 2020 menunjukan angka penurunan yakni dari angka 17,62 persen atau 28.92 ribu jiwa dengan garis kemiskinan 309.174 rupiah. Garis kemiskinan ini menunjukan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Presentase penduduk diatas garis kemiskinan setiap tahunnya semakin meningkat dimana hingga tahun 2020 sudah mencapai 82,38 persen.

Grafik 2.11

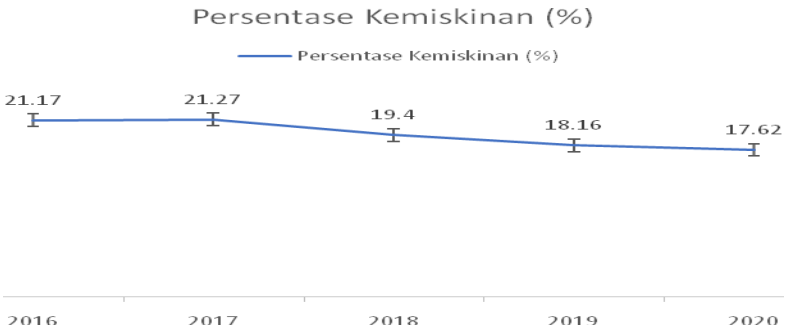

Sumber : BPS KabupatenPohuwato 2021

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pohuwato dijalankan melalui beberapa pendekatan program, antaranya adalah pendekatan pemberdayaan. Pendekatan ini lebih mengoptimalkan kemandirian usaha masyarakat melalui pemanfaatan potensi SDA yang ada seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, jasa dan lainnya. Selanjutnya adalah pendekatan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan,sandang dan papan.

Untuk pendekatan sosial ini banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program nasional seperti pemenuhan rumah layak huni, air bersih, sanitasi, listrik dan lainnya. Sedangkan untuk pemenuhan pangan setiap tahunnya diberikan secara gratis maupun pangan murah bagi warga miskin.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang atau hidup sehat, pengetahuan, dan

standar hidup yang layak. Untuk Kabupaten Pohuwato, berdasarkan data terakhir BPS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni berada pada posisi 65.37 persen.

Grafik 2.12.
IPM Kabupaten Pohuwato 2016-2020

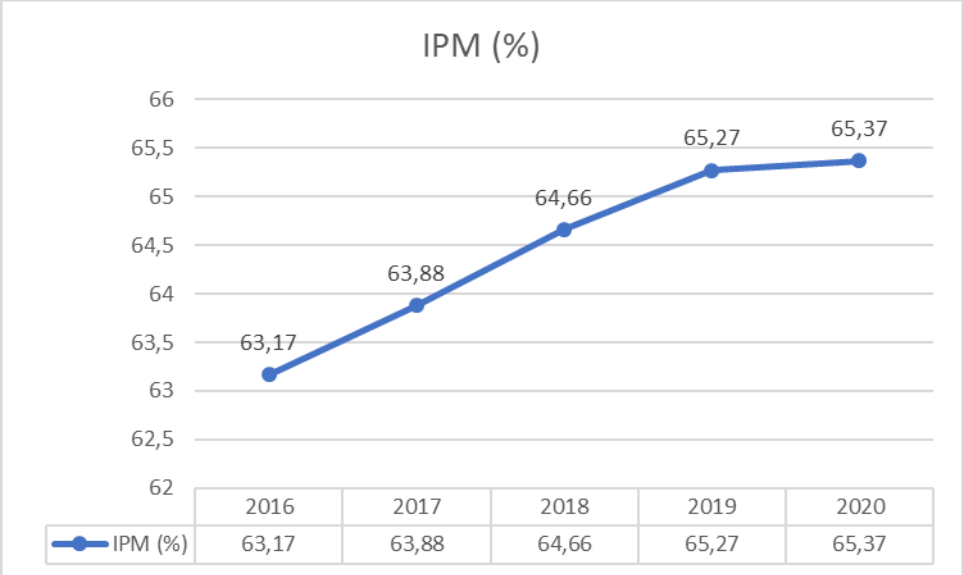

Sumber :PDA, 2021

5. Gini Ratio

Inflasi dan gini ratio belum tersedi adatanya di tingkat Kabupaten. Oleh sebab itu, sebagaimana halnya inflasi, Gini ratio di Provinsi Gorontalo termasuk Kabupaten Pohuwato masih cukup tinggi sebagaimana grafik 2.13, artinya program pemberdayaan yang dijalankan setiap tahunya belum efektif mengangkat kesejahteraan masyarakat sehingga kesenjangannya masih cukup jauh.

Grafik 2.13.
Gini Ratio Provinsi Gorotalo

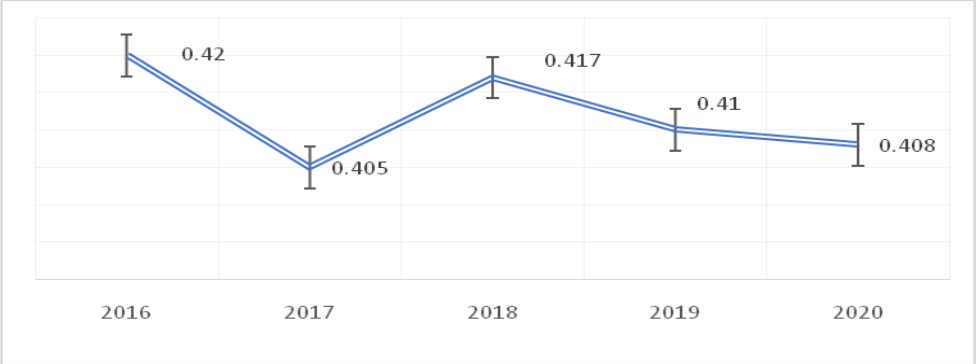

Sumber :Website BPS Provinsi Gorontalo 2020

6. Laju Inflasi

Data resmi yang dipublis BPS Kabupaten Pohuwato untuk inflasi daerah belum ada, yang ada dirilis setip bulan adalah inflasi tingkat Provinsi Gorontalo. Adapun perkembangan inflasi tersebut sebagaimana grafik 2.14. berikut ini.

Grafik 2.14.
Inflasi Provinsi Gorontalo

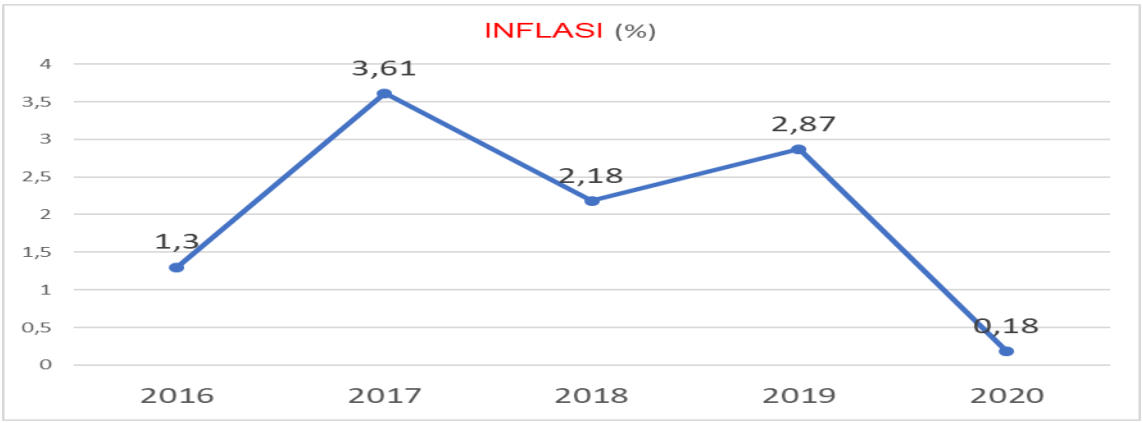

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka

pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, stunting, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Secara detail ketercapaian indikator tersebut pada kurun satu hingga 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

1. Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Sejak tahun 2019 Kabupaten Pohuwato ditetapkan sebagai lokus stunting oleh pemerintah pusat karena sesuai hasil pemetaan Kabupaten/Kota pada tahun 2015, angka stunting Pohuwato masuk kategori tinggi, seperti pada grafik 2.15 berikut ini.

Grafik 2.15.
Perkembangan Stunting KabupatenPohuwato

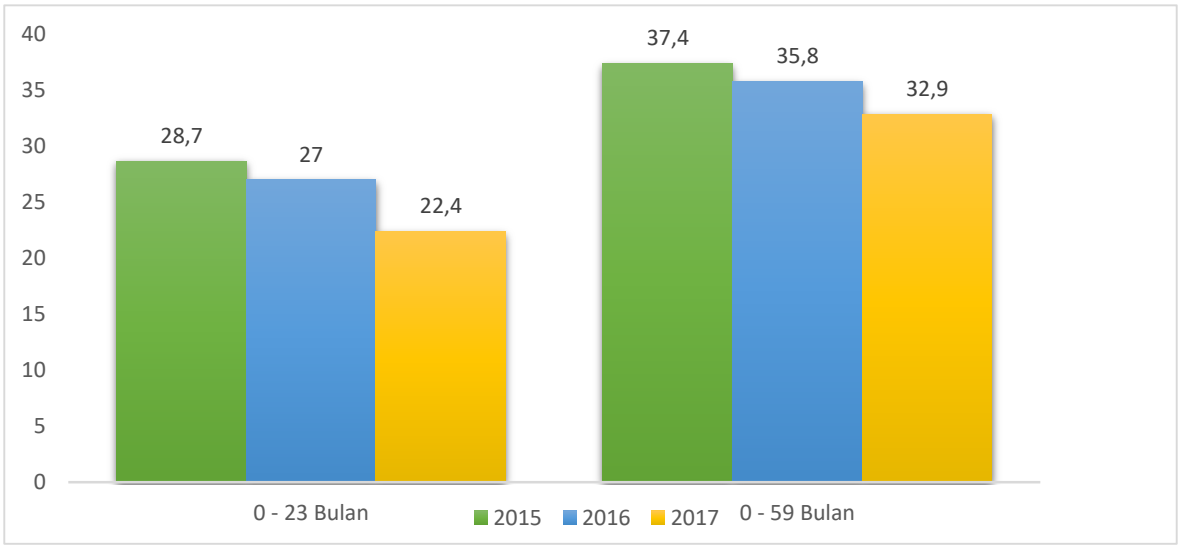

Sumber : Dikes Provinsi Gorontalo 2018

Berdasarkan grafik 2.15 nampak bahwa presentase stunting untuk anak usia 0 – 23 Bulan dari tahun 2015 s/d tahun 2017 cukup tinggi dan mengalami penurunan setiap tahunnya, demikian halnya dengan bayi umur 0 – 59 bulan atau balita.

Setelah ditetapkan jadi lokus stunting tahun 2019, pemerintah daerah terus berupaya keras melaksanakan intervensi kegiatan, baik yang spesifik ataupun sensitive yang terintegraasi melalui kegiatan GEMA PANUA (Gerakan Bersama Pelayanan Untuk Semua) dan GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting). Hal tersebut cukup berdampak dengan semakin menurunnya angka stinting pada tahun 2020 sebagaimana grafik 2.16.

Grafik 2.16.
Persentase Stunting di Kabupaten Pohuwato

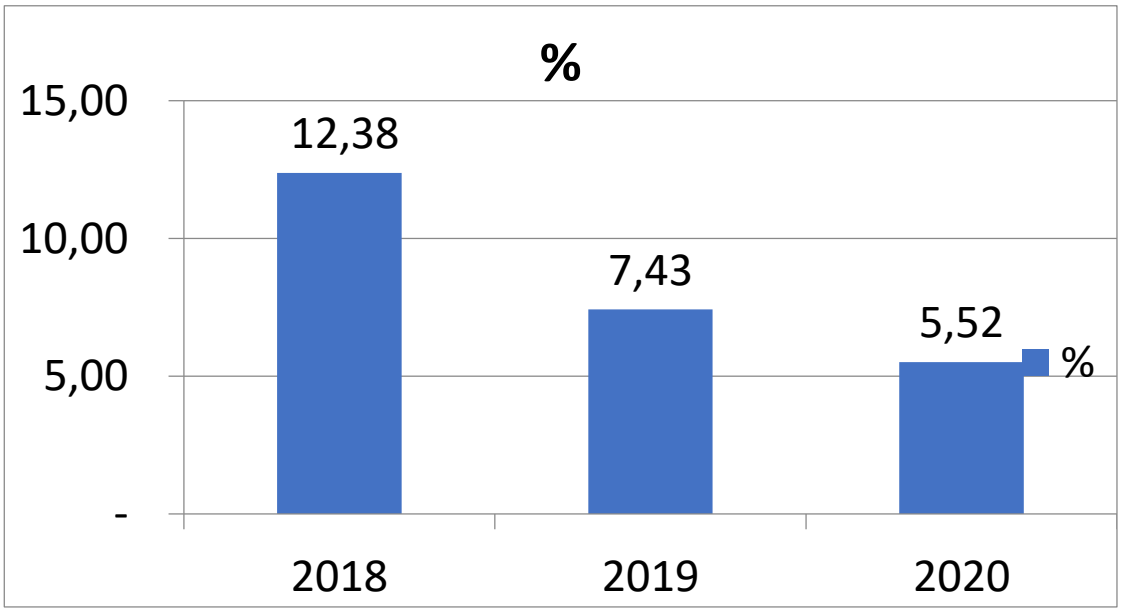

Sumber : Dikes Provinsi Gorontalo, 2020

Dari grafik 2.16 nampak bahwa pada tahun 2018 angka stunting Kabupaten Pohuwato sudah turun menjadi 17.78 persen. Sementara itu data sementara hasil penimbangan Posyandu tahun 2019, angka stunting berada pada 7,43 persen dan tahun 2020 sudah berada pada angka 5,52 persen. Secara teknis hasil tersebut diperoleh dari

jumlah baduta yang diintervensi program setiap tahunnya kemudian setelah mereka masuk umur BALITA (Bayi Lima Tahun) diadakan kembali pengukuran. Seperti pada tahun 2019 jumlah total BADUTA (Bayi Dua Tahun) yang diintervensi sebanyak 5.222 jiwa, kemudian setelah masuk BALITA diadakan pengukuran kembali dan terdapat sebanyak 117 Balita status sangat pendek dan sebanyak 271 Balita status pendek, sehingga totalnya sebanyak 388 Balita Pendek atau sebesar 7,43 persen. Dengan perhitungan yang sama tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 5,52 persen.

Adapun sebaran angka stunting masing-masing kecamatan disajikan pada grafik 2.17 berikut ini. Dari grafik tersebut nampak bahwa kecamatan tertinggi angka stuntingnya adalah kecamatan Popayato, sedangkan terendah adalah kecamatan Duhiadaa.

Grafik 2.17.
Sebaran Stunting Per Kecamatan tahun2019

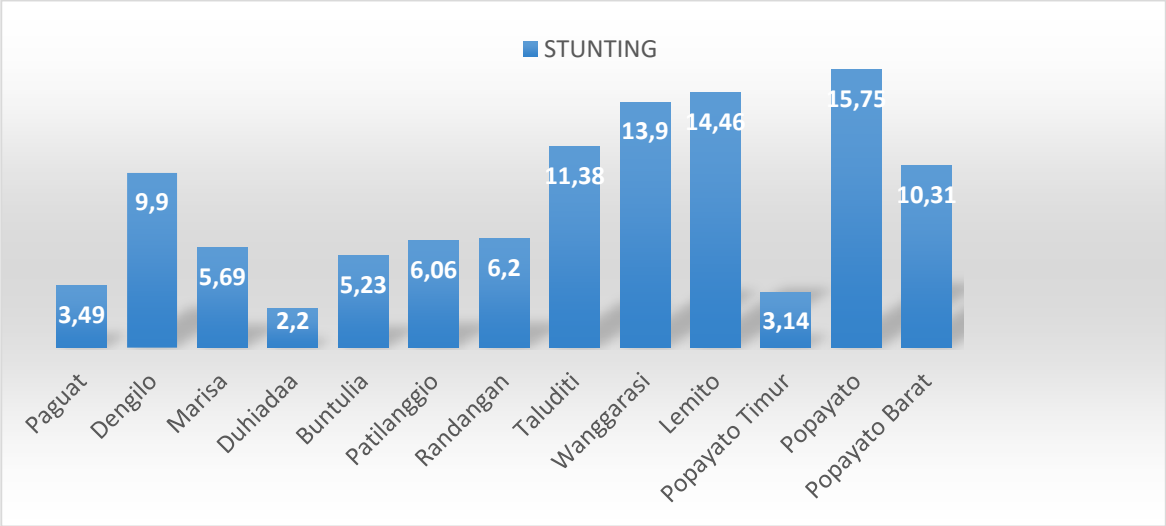

Sumber : Dikes Pohuwato 2020

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsung hidup bayi dapat juga dianalisis melalui angka kematian bayi yakni dihitung dari jumlah usia bayi dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun

per 1000 kelahiran hidup dalam waktu yang sama. Untuk Kabupaten Pohuwato perkembangan lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Capaian AKB KabupatenPohuwato

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka KematianBayi per 1000 kelahiranhidup (KH)	(11 kasus) 3,3 /1000 KH	(7 kasus) 2,1 /1000 KH	17 kasus (6.57/1000 KH	17 (6.13/1000) KH	8 Kasus (3.0/1000 KH)

Sumber : Dikes Pohuwato, 2020

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan kesehatan. Adapun perkembangan AKI Kabupaten Pohuwato untuk kurun 4 tahun terakhir disajikan pada tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Capaian AKI Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	(8 Kasus) 242/100.000 KH	(11Kasus) 331 /100.000 KH	(5 Kasus) 193/100.000 KH)	5(166/100.000 KH)	4 Kasus (150,49/100.000 KH)

Sumber : LKPJ 2020

Berdasarkan tabel 2.40 nampak bahwa angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam periode satu tahun masih cukup tinggi yakni masih terdapat 4 kasus atau 150,49 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup rendah dibanding capaian tahun 2019 dan 2018.

4. Angka Usia harapan hidup

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi". Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat

kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya dinegara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan. Adapun perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada grafik 2.18.

Grafik 2.18.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kab. Pohuwato

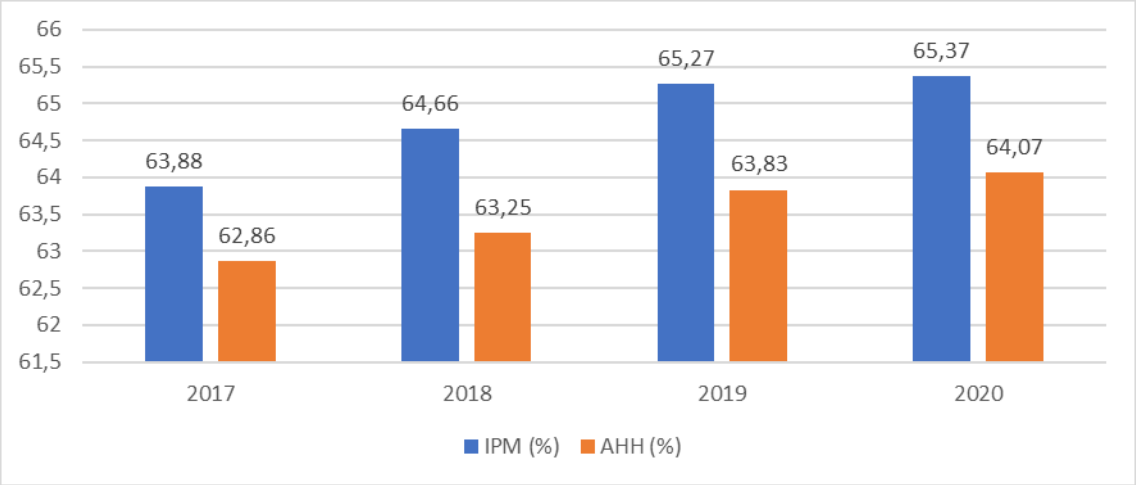

Sumber : BPS KabupatenPohuwato, 2021

Berdasarkan grafik 2.18 nampak bahwa AHH Kabupaten Pohuwato setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan angka terakhir 64,07 persen. Jika dibanding capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka angka ini masih rendah artinya AHH yang merupakan salah satu komponen pembentuk nilai IPM kontribusinya belum signifikan.

5. Angka Melek Huruf

Pada sektor Pendidikan pencapaian kinerja salah satunya diukur dari persentase angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca / ditulisnya. Adapun angka melek huruf Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pohuwato 2019

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
Jenis Kelamin		
Laki-laki	98,81	15,20
Perempuan	97,84	18,82

Sumber : BPS KabupatenPohuwato, 2020

Berdasarkan tabel 2.39 nampak bahwa pada tahun 2019 angka melek huruf Kabupaten Pohuwato sebesar 98,33, untuk AMH laki-laki 98,81 persen dan perempuan 97,84 persen. Selanjutnya untuk membaca huruf lainnya masih cukup rendah yakni rata-rata sebesar 17,01%, dimana persentase tertinggi pada perempuan.

6. Angka rata-rata lama sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Selanjutnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Adapun RTL dan HLS Kabupaten Pohuwato perkembangan kurun 4 tahun terakhir disajikan berikut:

Grafik 2.19.
RLS dan HLS KabupatenPohuwato

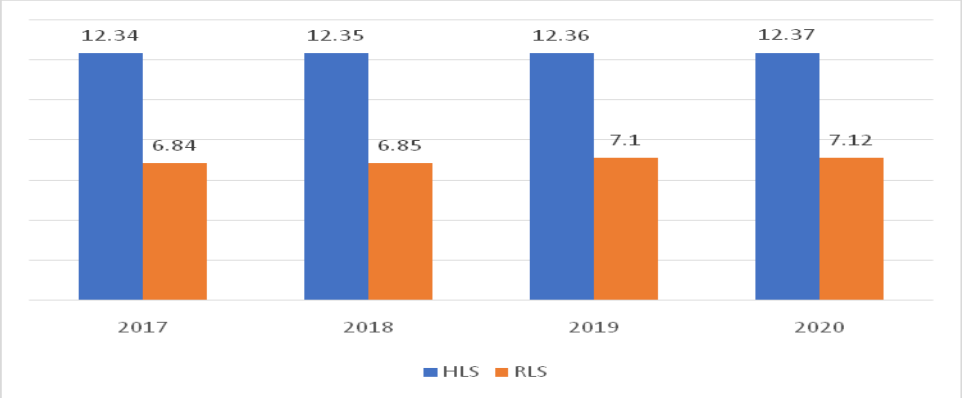

Sumber : BPS KabupatenPohuwatoTahun, 2020

Berdasarkan grafik 2.19 tersebut nampak bahwa angka RLS dan HLS Kabupaten Pohuwato setiap tahun mengalami peningkatan, namun kedepan masih harus terus dioptimalkan agar bisa menyamai pencapaian rata-rata Provinsi Gorontalo.

7. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Sektor Pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Beberapa indikator strategis dalam pengukuran keberhasilan terhadap pendidikan melalui indikator capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Adapun perkembangan indikator tersebut dalam kurun 4 tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.42.
Perkembangan APM/APK Kabupaten Pohuwato

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019*	2020*
APM (angka partisipasi murni)-%						
1	SD/Sederajat	96,44	97,18	98,84	87,91	94,39
2	SMP/Sederajat	74,38	73,60	70,13	79,58	69.05
3	SMA/Sederajat	57,82	60,09	60,77	*61.04*	*108.09*
APK (angka partisipasi kasar)						
1	SD/Sederajat	109.13	105,43	111,05	100,13	103.75
2	SMP/Sederajat	88,48	87,48	70,32	90,94	88.85
3	SMA/Sederajat	80,11	80,53	94,18	*104.36*	*90.75*

Sumber : BPS, 2021 – Diknas 2019

Berdasarkan tabel 2.42 nampak bahwa APM untuk SD sederajat tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019. Namun tidak demikian dengan SMP sederajat, justru yang menggembirakan adalah APM SMA sederajat yang naik signifikan tahun 2020. Penurunan APM dan APK pada jenjang SMP sederajat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dimana hal ini ditengarai sebagian besar disebabkan mereka membantu orang tuanya mencari nafkah sehingga tidak melanjutkan sekolah lagi.

8. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Adapun APS berdasarkan kelompok umur tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.43.
APS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Karakteristik	7 - 12	13 - 15	16 - 18
Jenis Kelamin			
Laki-laki	98.34	88.80	55.76
Perempuan	99.52	93.04	66.06
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	98,97	93,00	54,55
40 Persen Tengah	98,39	85,45	59,34
20 Persen Teratas	99,24	96,78	88,30
Pohuwato	**98,84**	**89,98**	**61,30**

Sumber :StatistikKesejahteraan Rakyat Kab. Pohuwato,2020

Berdasarkantabel 2.43 nampak bahwa APS yang masih rendah berada pada jenjang Pendidikan SMA dan kelompok pengeluaran yang paling berkontribusi adalah pada kelompok 40 persen tengah dan 40 persen teratas. Artinya kontribusi warga yang berpenghasilan tengah dan teratas tersebut signifikan dalam pencapaian APS pada jenjang tersebut. Demikian juga pada jenjang SMP sederajat. Selanjutnya untuk melihat penduduk usia 7 – 24 Tahun berdasarkan status pendidikan disajikan pada tabel

2.44. Pada tabel tersebut nampak bahwa pada jenjang usia sekolah berdasarkan umur tersebut terdapat rata-rata 32,44 persen yang sudah tidak bersekolah lagi dan kontribusi tertinggi justru berada pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas, artinya justru orang-orang yang berpenghasilan baik atau sejahtera yang tidak bersekolah lagi dan secara umum lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.

Tabel 2.44
Persentase Penduduk Usia 7-24 tahun berdasarkan status sekolah

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,61	35,17	14,42	15,39	34,42	100
Perempuan	0,26	36,93	13,30	18,95	30,56	100
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	0,66	41,88	14,84	11,09	31,52	100
40 Persen Tengah	0,32	28,58	14,07	24,34	32,69	100
20 Persen Teratas	-	39,92	9,94	15,48	34,65	100
Pohuwato	**0,43**	**36,07**	**13,85**	**17,21**	**32,44**	**100**

Sumber :Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. PohuwatoTahun 2019.

Usia 7 – 24 Tahun yang tidak bersekolah lagi sebagaimana tabel 2.44 diatas jika dilihat detailkan per kecamatan untuk jenjang Pendidikan dasar melalui capaian APM, dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45

APM Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019

No.	KECAMATAN	2019							
		APM Tingkat SD Sederajat				APM Tingkat SMP Sederajat			Urutan
		Termasuk Paket A			Urutan	Termasuk Paket B			
		L	P	Rata-Rata		L	P	Rata-Rata	
01	Kecamatan Buntulia	97,30	96,73	97,02	3	74,85	69,15	71,82	8
02	Kecamatan Dengilo	78,84	74,52	76,78	12	46,84	55,26	51,05	13
03	Kecamatan Duhiadaa	84,71	82,82	83,81	11	69,66	88,68	78,79	7
04	Kecamatan Lemito	95,20	101,47	98,20	2	87,66	97,65	92,57	2
05	Kecamatan Marisa	66,11	72,05	69,00	13	85,02	99,37	92,17	3
06	Kecamatan Paguat	89,36	87,80	88,61	10	79,09	100,80	89,69	4
07	Kecamatan Patilanggio	91,67	92,96	92,27	7	44,82	64,26	54,19	12

08	Kecamatan Popayato	100,51	92,01	96,34	4	41,03	90,80	67,37	9
09	Kecamatan Popayato Barat	101,09	98,63	99,89	1	91,42	104,76	97,74	1
10	Kecamatan Popayato Timur	97,59	87,68	92,83	5	80,30	97,91	88,67	5
11	Kecamatan Randangan	87,07	87,58	87,31	9	84,04	92,69	88,26	6
12	Kecamatan Taluditi	95,90	88,82	92,56	6	66,67	66,12	66,40	10
13	Kecamatan Wanggarasi	90,43	89,37	89,88	8	47,02	69,08	57,50	11
Jumlah		88,27	87,53	87,91		72,15	87,18	79,58	

Sumber : Dinas Pendidikan 2020

Berdasarkan tabel 2.45 nampak bahwa untuk jenjang Pendidikan Dasar APM terendah berada di Kecamatan Marisa, kecamatan dengilo, Kecamatan Duhiadaa, Kecamatan Paguat, dst. Data ini menginformasikan bahwa sebaran wilayahnya cukup acak, ada yang diibukota kabupaten dan ada di Kecamatan yang dipedalaman. Selanjutnya untuk jenjang SMP Sederajat nampak bahwa APM terendah kembali terjadi di Kecamatan Dengilo, kemudian kecamatan Patilanggio, Kecamatan Wanggarasi, Kecamatan taluditi, dst. Jika melihat wilayah tersebut sebagian besar sedah dengan akses Pendidikan yang baik, infrastruktur yang baik pula. Sementara untuk jumlah siswa putus sekolah bedasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP untuk 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabek 2. 46 sebagai berikut :

Tabel. 2.46.

Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2020

JENJANG	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD	124	24	74	96	31
SMP	39	35	15	23	62

Dari tabel 2.46 tersebut diatas terlihat bahwa jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Sedangkan siswa putus sekolah pada tingkat SMP terus mengalami peningkatan, hal ini disesbabkan oleh beberapa factor diantaranya keterbatasan ekonomi sehingga para siswa tersebut memilih untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah atau membantu diperkebunan. Untuk kajian lebih mendalam mengapa banyak usia sekolah

yang tidak melanjutkan sekolah menjadi penekanan utama kedepan agar pembangunan Pendidikan akan berhasil.

9. Rasio penduduk yang bekerja

Salah satu soal mendasar di sektor ketenagakerjaan adalah angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain perbandingan jumlah pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja tidak seimbang. Juga peluangkerja yang tersedia yang sebagain besar disektor pertanian dan industry belum sesuai dengan minat dan harapan dari pencari kerja. Sebagian besar tamatan Perguruan Tinggi lebih berminat dapat pekerjaan professional, jasa dan pendampingan. Inilah salah satu penyebab tingkat pengangguran di Kabupaten Pohuwato terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 2.20.
Tingkat pengangguran di KabupatenPohuwato

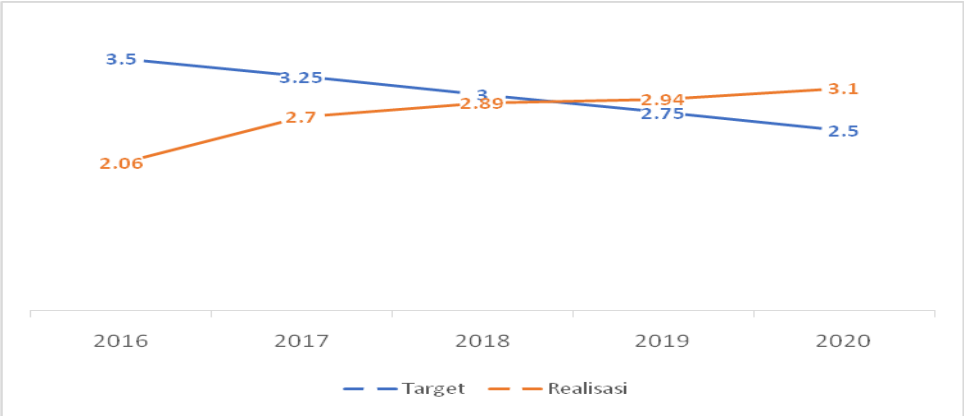

Sumber : BPS KabupatenPohuwatotahun 2021

Pada grafik tersebut diatas nampak bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran Kabupaten Pohuwato sebesar 3.1 persen masih dibawah target RPJMD. Hal ini menjadi evaluasi pemerintah daerah, dan akan kembali dirumuskan kedepan strategi

pengurangan angka pengangguran ini. Adapun jumlah penganggur berdasarkan kualifikasi Pendidikan tahun 2020 disajikan pada tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Tingkat Pengangguran Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Sekolah Dasar	45.808	366	46.174
Sekolah Menengah Pertama	9.785	207	9.992
Sekolah Menengah Atas	16.443	1.442	17.885
Perguruan Tinggi/Diploma	9.461	558	10.019
Jumlah	**81.497**	**2.573**	**84.070**

Sumber :KabupatenDalam Angka, 2021

Pada tabel tersebut nampak bahwa kontribusi pengangguran tertinggi berasal dari tamatan SMA dan kemudian perguruan tinggi.

2.2.3. Seni, Budaya dan Olahraga

Seni, budaya dan olah raga merupakan satu-kesatuan yang tumbuh dan mengakar dalam sebuah wilayah atau daerah. Perkembangannya menujukkan suatu tingkat derajat kesehatan dan kebahagiaan, juga akan lebih berkembang ketika ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Pekembangan Seni, Budaya dan Olah raga Kabupaten Pohuwato

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah Budaya/Adat yang eksis	-	-	-	-	-
4	Jumlah Cagar Budaya	-	-	-	-	-
5	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	13	13	13	13	13
6	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	15	16	18	22	22

Berdasarkan tabel 2.48 nampak bahwa untuk perkembangan kesenian, termasuk kesenian daerah di Kabupaten Pohuwato belum terdata dengan baik sehingga perlupenguatan dan pembinaan kedepan. Secara umum sarana penunjangnya pun belum tersedia dengan baik, padahal kesenian daerah merupakan implementasi budaya dan pemersatu keragaman yang harus terus mendapat perhatian dan pembinaan. Selanjut terkait dengan eksistensi budaya, cukup banyak yang berkembangan di Kabupaten Pohuwato namun juga belum terdata dengan baik sehingga perlu pembenahan kedepan. Budaya yang dominan melekat di masyarakat adalah budaya Gorontala yang sangat nampak pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakat. Namun budaya ini sudah mulai terancam pudar karena proses regenerasinya lambat dan belum menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan.

Selanjutnya dari aspek Olahraga, cukup banyak jenis olahraga yang berkembang di masyarakat tetapi belum terbina dan tersistem degan baik, kecuali pada jenis olahraga Bola Kaki. Untuk jenis yang lainnya perlu ditingkatkan pembinaannya, tenti saja melalui Lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pohuwato dan instansi terkait. Untuk melihat perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 per Kecamatan disajikan pada tabel 2.49.

Tabel. 2.49.
Seni, Budaya dan Olahraga Perkecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	JumlahBudaya/ Adat yang eksis	Jumlah Cagar Budaya	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Paguat	-	-	-	-	1	16
2	Dengilo	-	-	-	-	1	8
3	Marisa	-	-	-	-	1	24
4	Duhiadaa	-	-	-	-	1	7
5	Buntulia	-	-	-	-	1	5
6	Patilanggio	-	-	-	-	1	14
7	Randangan	-	-	-	-	1	22

8	Taluditi	-	-	-	-	1	17
9	Wanggarasi	-	-	-	-	1	14
10	Lemito	-	-	-	-	1	17
11	Popayato Timur	-	-	-	-	1	7
12	Popayato	-	-	-	-	1	14
13	Popayato Barat	-	-	-	-	1	12

Dari tabel 2.49 nampak bahwa untuk kegiatan keseniaan dan kebudayaan juga belum terdata secara baik diseluruh kecamatan sehingga perlu penguatan dan pembinaan kedepan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya terbagi dalam dua urusan yakni urusan wajib pemerintahan dan urusan pilihan. Urusan wajib pemerintahan terbagi dalam urusan pemerintah wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah kegiatan pendidikan yang mencakup kelompok bermain (*Play Group*) dan Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK). Berikut Jumlah sekolah, murid, rasio murid dan guru disajikan pada tabel 2.51.

Tabel 2.50.
Jumlah Sekolah, Murid, Rasio Murid dan Guru Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta Kabupaten Pohuwato

No	Kecamatan	Jumlah			
		Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	Popayato	11	416	35	12
2	Popayato Barat	6	220	20	11
3	Popayato Timur	7	355	20	18
4	Lemito	9	413	53	8
5	Wanggarasi	6	179	18	10
6	Marisa	9	451	46	10
7	Patilanggio	7	262	24	11
8	Buntulia	5	303	28	11
9	Duhiadaa	4	120	13	9
10	Randangan	10	446	32	14
11	Taluditi	6	231	32	7
12	Paguat	14	470	49	10
13	Dengilo	10	236	54	4
	Tahun 2020	**104**	**4102**	**424**	10
	Tahun 2019	104	4212	298	14
	Tahun 2018	105	4018	380	9.46
	Tahun 2017	100	4016	226	12
	Tahun 2016	97	3829	230	17

Sumber : BPS &LapTahDiknas, 2021

Berdasar kantabel 2.50 nampak bahwa tahun 2016 jumlah STK baru sebanyak 97 Sekolah, pada tahun 2020 meningkat menjadi 104 sekolah, dengan rasio murid - Guru sebesar 10. Selanjutnya untuk STK atau Raudatul Athfal (RA) dibawah naungan Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel 2.51 . Berdasarkan tabel 247 nampak bahwa jumlah sekolah RA tahun 2019 dan 2020 tidak berubah, demikian juga jumlah gurunya. Dari jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa sekolah RA belum merata diseluruh kecamatan dan keberadaanya masihsedikit.

Tabel 2.51.
Sekolah Raudatul Athfal (RA)/TK dibawah Kementerian Agama
Kab. PohuwatoTahun 2020

No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
		2018/ 2020	2019/ 2020	2018/ 2020	2019/ 2020	2018/ 2020	2019/ 2020
1	Popayato	-	-	-	-	-	-
2	Popayato Barat	-	1	-	4	-	18
3	Popayato Timur	1	-	3	-	20	-
4	Lemito	1	1	3	3	30	16
5	Wanggarasi	-	-	-	-	-	-
6	Marisa	1	1	3	3	34	41
7	Patilanggio	1	1	3	3	31	12
8	Buntulia	-	-	-	-	-	-
9	Duhiadaa	-	-	-	-	-	-
10	Randangan	1	1	4	4	62	42
11	Taluditi	-	-	-	-	-	-
12	Paguat	1	1	4	4	25	9
13	Dengilo	1	1	3	3	25	23
	Pohuwato	**7**	**7**	**23**	**24**	**227**	**161**

Sumber : BPS KabupatenPohuwato 2020

b) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar di Kabupaten Pohuwato terdiri dari Sekolah Dasar (SD) negeri dan ada pula Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta dibawah naungan kementerian Agama. Untuk jumlahs ekolah, murid dan guru SD dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Jumlah Sekolah, Murid, Rasio Murid dan Guru
Sekolah Dasar Kabupaten Pohuwato

No	Kecamatan	Jumlah			
		Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	Paguat	16	1578	130	12
2	Dengilo	7	593	59	10
3	Marisa	9	2139	110	19
4	Buntulia	11	1308	86	15
5	Duhiadaa	9	1535	79	19
6	Patilanggio	8	1013	57	18
7	Randangan	12	1846	97	19
8	Taluditi	9	940	68	14

9	Wanggarasi	8	570	58	10
10	Lemito	10	1325	83	16
11	Popayato	10	1286	75	17
12	Popayato Timur	10	975	75	13
13	Popayato Barat	8	893	50	18
Tahun 2020		**127**	**16.001**	**1.027**	**16**
Tahun 2019		127	15343	812	19
Tahan 2018		127	17199	790	6.42
Tahun 2017		127	16028	771	15
Tahun 2016		126	16514	771	21

Sumber : BPS &LapTahDiknas 2020

Berdasarkan tabel 2.52 nampak bawah jumlah sekolah SD hingga tahun 2019 sebanyak 127 dengan rasio Murid-Guru sebesar 19,00. Keberadaan sekolah sudah cukup merata diseluruh Kecamatan. Selanjutnya untuk sekoleh MI dapat dilihat pada tebel 2.53.

Tabel 2.53.
Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI)/SD dibawah Kementerian Agama Kab. Pohuwato Tahun 2019

No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
		2018 /2019	2019/ 2020	2018 /2019	2019/ 2020	2018 /2019	2019/ 2020
1	Popayato	1	1	9	4	113	41
2	Popayato Barat	4	4	5	30	37	296
3	Popayato Timur	1	1	7	2	58	15
4	Lemito	2	2	12	13	110	110
5	Wanggarasi	-	-	-	-	-	-
6	Marisa	-	-	10	-	137	-
7	Patilanggio	2	2	13	14	146	154
8	Buntulia	-	-	-	-	-	-
9	Duhiadaa	-	-	-	-	-	-
10	Randangan	1	1	10	3	173	183
11	Taluditi	-	-	-	-	-	-
12	Paguat	2	2	27	30	268	320
13	Dengilo	1	1	10	8	45	50
	Pohuwato	**14**	**14**	**103**	**104**	**1087**	**1169**

Sumber : BPS Pohuwato, tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.53 nampak bahwa jumlah sekolah RA tahun 2019 dan 2020 tidak berubah. Dari jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa sekolah RA belum merata diseluruh kecamatan dan keberadaanya masih sedikit.

c) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah di Kabupaten Pohuwato diselenggarakan melalui Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MadrasahTsanawiyah (MTS). Untuk Pendidikan SMP Negeri perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.534 Pada tabel tersebut nampak bahwa Jumlah SMP negeri pada tahun 2020 sebanyak 44 sekolah dengan Rasio murin-guru sebesar10.

Tabel 2.54.
Jumlah Sekolah, Murid, Rasio Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama/SMP Kabupaten Pohuwato

No	Kecamatan	Jumlah			
		Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	Paguat	3	427	41	10
2	Dengilo	2	205	21	10
3	Marisa	6	1081	93	12
4	Buntulia	3	277	31	9
5	Duhiadaa	3	583	51	11
6	Patilanggio	3	302	31	10
7	Randangan	5	577	59	10
8	Taluditi	4	323	46	7
9	Wanggarasi	3	205	29	7
10	Lemito	3	376	38	10
11	Popayato	3	383	29	13
12	Popayato Timur	3	437	38	12
13	Popayato Barat	3	286	29	10
	Tahun 2020	44	5462	536	10
	Tahun 2019	43	5411	346	16
	Tahun 2018	44	5456	323	9
	Tahun 2017	42	5616	337	12

Tahun 2016	41	5339	326	16

Sumber : BPS 2021 &LapTah Diknas 2019

Selanjutnya untuk melihat perkembangan sekolah MTs hingga tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.55. Pada tabel tersebut nampak bahwa jumlah sekolah MTs di Kabupaten Pohuwato sebanyak 12 Sekolah, Jumlah Murid sebanyak 2190 orang dan Guru sebanyak 214 orang. Keberadaan sekolah MTs juga belum merata diseluruh Kecamatan dan masih tergolong sedikit.

Tabel 2.55.
Sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts)/SMP
dibawah Kementerian Agama Kab. Pohuwato

No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
		2018/ 2019	2019/ 2020	2018/ 2019	2019/ 2020	2018/ 2019	2019/ 2020
1	Popayato	1	1	15	17	135	138
2	Popayato Barat	2	2	18	17	117	127
3	Popayato Timur	-	-	-	-	-	-
4	Lemito	1	1	24	24	213	213
5	Wanggarasi	-	-	-	-	-	-
6	Marisa	2	2	24	33	342	347
7	Patilanggio	1	1	9	12	58	57
8	Buntulia	1	1	22	26	311	316
9	Duhiadaa	-	-	-	-	-	-
10	Randangan	2	2	31	23	432	440
11	Taluditi	-	-	-	-	-	-
12	Paguat	2	2	83	62	561	552
13	Dengilo			-	-	-	-
	Pohuwato	**12**	**12**	**226**	**214**	**2169**	**2190**

Sumber : BPS KabupatenPohuwato 2021

2. Kesehatan

Fasilitas umum terkait urusan kesehatan terdiri dari Fasilitas Kesehatan dan tenaga kesehatan. Adapun perkembangan Fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.56. Pada tabel tersebut nampak bahwa Fasilitas kesehatan di Kabupaten Pohuwato terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 16 Puskesmas dan 26 Puskesmas Pembantu.

Jumlah fasilitas kesehatan pada tahun ini tidak mengalam iketambahan secara signifikan.

Tabel 2.56.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	16	16	16	16	16
3	Puskesmas Pembantu	25	25	25	26	25
4	Apotik	14	14	14	17	16
5	Toko Obat	1	2	2	1	3

Sumber :) BPS 2020 dan Laporan Tahunan Dikes 2020*

Selanjutnya untuk perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada grafik 2.21 berikutini.

Grafik 2.21.
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020

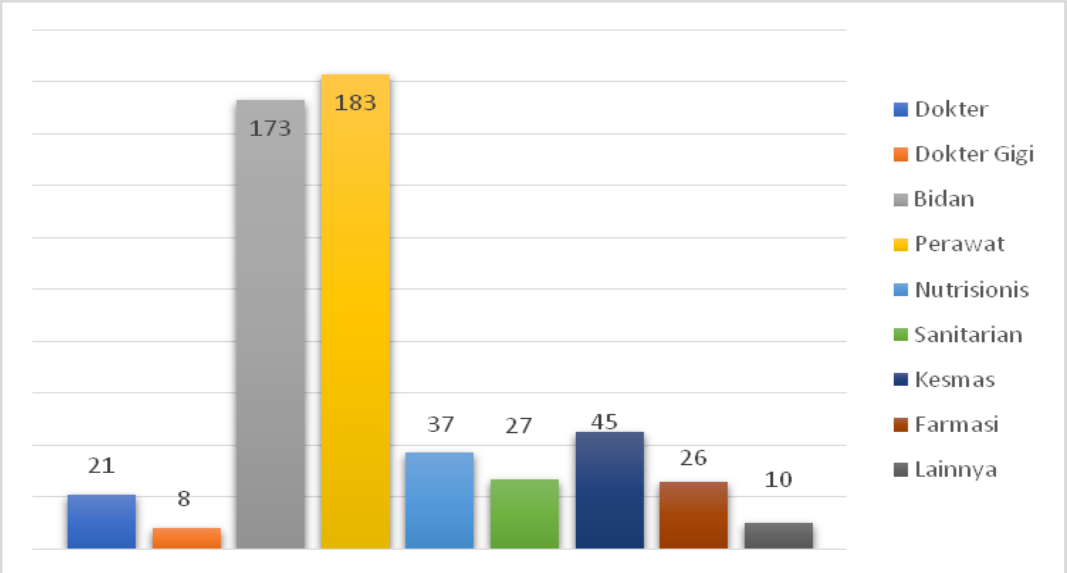

Sumber :Dikes 2020

Berdasarkan grafik 2.21. nampak bahwa jumlah tenaga Kesehatan tercatat pada tahun 2020 sejumlah 540 tenaga Kesehatan yang tersebar di seluruh puskesmas masing-masing terdiri dari; Dokter 21 orang , Dokter Gigi 8 orang, Bidan 173 orang , Perawat 183 orang, 37 orang nutrisionis, sanitarian 27 orang , kesmas 45 orang, 26 orang farmasi , 10 orang nakes lainnya dan umum 10 orang.

Sementara itu untuk melihat rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pohwato dapat dilihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2020

1	Rasio Tenaga Dokter Terhadap 100.000 Penduduk	10,79
2	Rasio Tenaga Perawat Dan Bidan Terhadap 100.000 Penduduk	133,29
3	Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat Terhadap 100.000 Penduduk	15,23
4	Rasio Tenaga Kesling Terhadap 100.000 Penduduk	17,77
5	Rasio Tenaga Gizi Terhadap 100.000 Penduduk	19,68
6	Rasio Tenaga Ahli Laboratorim Terhadap 100.000 Penduduk	5,08
7	Rasio Tenaga Kefarmasian Terhadap 100.000 Penduduk	16,50
	RATA-RATA KABUPATEN	**31,19**

Sumber : Dikes Pohuwato, 2020

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a) Binamarga

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang bertujuan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Adapun perkembangan Panjang jalan di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Data Panjang Jalan di KabupatenPohuwato

Panjang Jalan menurut status/kewenangan					
Status	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Jalan Negara	165,91	165,91	165,5	169,50	169.50
Jalan Provinsi	16	53,48	68,47	68,47	68.47
Jalan Kabupaten	892,62	895,12	912,6	912,65	912.65
Total (Km)	**1.074,52**	**1.114,51**	**1.146,57**	**1.150,62**	**1.150.62**
Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi					
Kondisi	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Baik	625.06	650,65	678	701,54	705.02
Sedang	62.33	59,35	55.195	49,56	49.63
Rusak	94.26	93,65	88.32	80,35	77.36
Rusak Berat	110.97	91,47	90.15	81,20	80.65
Total (Km)	**892.62**	**895,12**	**911.65**	**912,65**	**912.66**
Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan					
Jenis Permukaan	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aspal	251,42	264,33	279.66	331,40	550.22
Kerikil	586,35	580,15	582.30	559,39	592.256
Lapen	33,03	28,83	28,83	-	-
Beton	4,60	4,60	4,60	4,65	4.34
Tanah	17,21	17,21	17,21	17,21	3.81
Total (KM)	**892,62**	**895,12**	**912.6**	**912,65**	**1150.63**

Sumber : Dinas PU Pohuwato, 2020

Berdasarkan tabel 2.58 nampak bahwa total panjang jalan di Kabupaten Pohuwato mencapai 1.150,62 kilometer yang terdiri dari jalan negara 169,50 km, jalan provinsi sepanjang 68,47 kilometer serta kabupaten sepanjang 912,65 kilometer. Pada jalan kabupaten kategori rusak dan rusak berat sepanjang 158 Km, selanjutnya yang masih lapisan permukaan kerikil sepanjang 592,25 Km dan tanah 3,81 Km. Secara lengkap kondisi jalan masing-masing Kecamatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.59.

Tabel. 2.59.
Kondisi Jalan menurut Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Popayato	48.99	3.42	6.73	2.09
2	Popayato Barat	48.39	1.25	3.80	2.55
3	Popayato Timur	33.45	3.47	13.22	1.79
4	Lemito	46.18	5.76	5.47	2.87
5	Wanggarasi	46.01	4.39	4.37	0.30
6	Marisa	46.24	4.36	6.70	2.32
7	Patilanggio	56.73	-	1.18	13.47
8	Buntulia	52.75	2.03	3.23	3.02
9	Duhiadaa	50.31	1.69	5.11	10.35
10	Randangan	113.75	5.76	11.11	22.04
11	Taluditi	64.01	13.16	6.92	7.10
12	Paguat	62.85	3.42	6.09	7.14
13	Dengilo	35.35	0.93	3.44	5.61
	Pohuwato	**705.02**	**49.63**	**77.36**	**80.65**

Sumber : BPS Pohuwato, 2021

b) Sumber Daya Air

Sumber daya Air yang menjadi kewenagan pemerintah Kabupaten adalah pada Irigasi dengan luasan 1000 Ha kebawah. Selain itu menjadi urusan Provinsi dan Pusat seperti Sungai, Danau dan embung. Adapun perkembangan Irigasi Kabupaten Pohwuato berdasarkan status kewenagan dapat dilihat pada tabel 2.60 berikut ini.

Tabel 2.60.
Irigasi Berdasarkan Status Kewenangan Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi	Lokasi Bangunan	Luas Areal (Ha)			Ket.
			Kabupaten	Baku	Potensial	Fungsional	
I	**Kewenangan Pusat**						
1	D.I Randangan	Irigasi Permukaan	Pohuwato	8.960	8.960	-	Irigasi Teknis
II	**Kewenangan Provinsi**						
1	D.I Tauduyunu	Irigasi Permukaan	Pohuwato	1.542	1.542	1.542	Irigasi Teknis
III	**Kewenangan Kabupaten Pohuwato**						
1	D.I Karangetan	Irigasi Permukaan	Pohuwato	447	423	310	Irigasi Teknis
2	D.I Bunuyo	Irigasi Permukaan	Pohuwato	308	278	163	Irigasi Teknis

3	D.I Iloheluma	Irigasi Permukaan	Pohuwato	251	209	148	Irigasi Teknis
4	D.I Molosipat	Irigasi Permukaan	Pohuwato	333	239	121	Irigasi Teknis
5	D.I Marisa IV	Irigasi Permukaan	Pohuwato	612	472	278	Bangunan Utama Rusak Berat
6	D.I Ilota	Irigasi Permukaan	Pohuwato	26	26	21	Irigasi Desa
7	D.I Panca Karsa I	Irigasi Permukaan	Pohuwato	14	14	12	Irigasi Desa
8	D.I Panca Karsa II	Irigasi Permukaan	Pohuwato	15	15	10	Irigasi Desa
9	D.I Sari Murni	Irigasi Permukaan	Pohuwato	20	20	18	Irigasi Desa
10	D.I Taludiri	Irigasi Permukaan	Pohuwato	70	70	62	Irigasi Desa
	Jumlah			**12.598**	**12.268**	**2.685**	

Selanjutnya masalah umum yang sering terjadi di Kabupaten Pohuwato adalah banyaknya genangan bahkan banjir yang salah salah satu penyebabnya adalah belum ada atau belum berfungsinya drainese dengan baik.

c) Cipta Karya

Urusan Pekerjaan umum dalam lingkup keciptakaryaan fokus pada isu utama yakni pemenuhan air bersih dan terwujudnya sanitasi yang baik. Beberapa indikator pencapaian Air Minum dan Sanitasi dapat dilihat pada tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Pencapaian Air Minum dan Sanitasi

Jenis Capaian	2016	2017	2018	2019	2020
Akses Air Minum	74.67%	82.1%	84%	86%	85.42%
Akses Sanitasi	56,87%	60,19%	57,08%	75,67%	75,67%
Kepemilikan Jamban	45,25%	48,41%	53,66%	72,25%	80.07

Sumber : Dikes dan Dinas Perkim, 2020

Berdasarkan tabel 2.61 nampak bahwa terdapat pekembangan yang sangat baik setiap tahunnya, utamanya pada akses air bersih, sementara itu untuk sanitasi juga jamban perlu percepatan kedepan. Adapun tingkat pencapaian berdasarkan Kecamatan pada tahun 2020 disajikan pada tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Pencapaian Air Minum dan Sanitasi Per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	% Akses Air Minum	% Akses Sanitasi	% Kepemilikan Jamban
1	DENGILO	90,23	54,43	60,40
2	PAGUAT	100,00	70,01	52,77
3	MARISA	88,66	57,89	76,11
4	BUNTULIA	96,96	87,24	61,63
5	DUHIADAA	97,83	88,88	66,46
6	PATILANGGIO	98,92	95,37	49,75
7	RANDANGAN	92,84	84,98	50,53
8	TALUDITI	100,00	92,29	79,53
9	WANGGARASI	97,18	75,67	63,29
10	LEMITO	96,98	68,11	39,16
11	POPAYATO TIMUR	96,99	92,52	64,70
12	POPAYATO	84,60	65,74	62,52
13	POPAYATO BARAT	93,43	56,79	43,97
Jumlah		**94,62**	**75,67**	**59,59**

Sumber : Dikes dan DinasPerkimtahun 2020

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Terpenuhinya perumahan yang sehat dan lingkungan pemukiman yang baik (tidak kumuh) merupakan dambaan setiap warga masyarakat. Hal ini pun telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkannya, termasuk pemerintah Kabupaten Pohuwato. Sejak terbentuk, penyediaan rumah sehat bagi warga masyarakat telah digagas oleh pemerintah daerah. Untuk kurun waktu tahun 2015 s/d 2020 pembangunan rumah sehat yang telah dilaksanakan tersaji pada Grafik 2.22. Pada grafik tersebut nampak setiap tahun pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat

mewujudkan rumah sehat lebih dari 500 unit rumah per tahun. Jumlah tersebut sudah termasuk yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Desa.

Grafik 2.22.
Jumlah Rumah Sehat Kabupaten Pohuwato

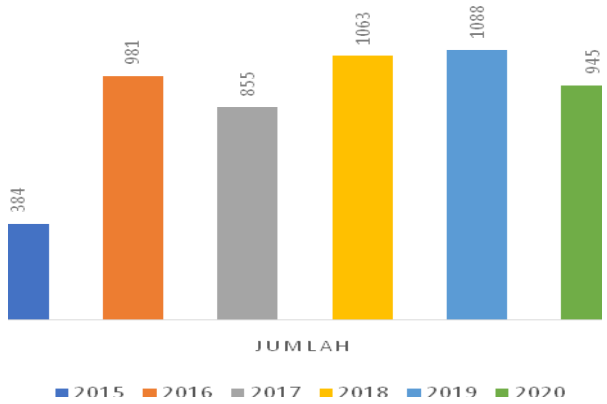

Selanjutnya untuk melihat status kepemilikan rumah di kabupaten Pohuwato tersaji pada tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Status Kepemilikan rumah Tahun 2020

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri*	
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	87.37	12.63	100
Perempuan	88.06	11.94	100
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	88.51	11.49	100
40 Persen Tengah	87.73	12.27	100
20 Persen Teratas	85.74	14.26	100
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	90.40	9.60	100
SMP ke atas	80.97	19.03	100
Pohuwato	**87.97**	**19.03**	**100**

Sumber : BPS KabupatenPohuwato (SKRKB 2020)

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa masyarakat pohuwato yang sudah memiliki rumah sendiri sebesar 87.97 persen, yang belum memiliki tinggal 19.03 persen. Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, maka justru yang kelompok pengeluaran 20 persenter atas tertinggi (14.26%) belum memiliki rumah, sedangkan dari aspek pendidikan tertinggi, yang tertinggi belum memiliki rumah adalah SMP Keatas. Selanjutnya untuk melihat persentase warga masyarakat yang belum memiliki rumah layak dan sehat, dapat dilihat pada tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Persentase rumah Belum Layak/Sehat tahun 2020

No	Kecamatan	JumlahRumah	JumlahRumah Belum Layak	Persen
1	Dengilo	2799	770	1,55
2	Paguat	5111	1381	2,78
3	Marisa	3422	1294	2,61
4	Buntulia	4077	834	1,68
5	Duhiadaa	4403	1192	2,40
6	Patilanggio	4820	1206	2,43
7	Randangan	4470	2297	4,63
8	Taluditi	3058	1115	2,25
9	Wanggarasi	2257	814	1,64
10	Lemito	4978	1127	2,27
11	Popayato Timur	3337	872	1,76
12	Popayato	3665	1037	2,09
13	Popayato Barat	3193	1233	2,49
		49590	**15.172**	**30,59**

Selanjutnya untuk melihat tingkat kekumuhan dimasing-masing kecamatan, persentasenya dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut ini.

Tabel 2.65.
Persentase Kekumuhan Per Kecamatan

No	KECAMATAN	Luas Pemukiman (Km^2)	Luas PemukimanKumuh (Ha)	Persen	Ket.
1	Popayato Barat	702,92	9,50	1,35	
2	Popayato	62,98	10,70	16,99	
3	Popayato Timur	401,94	9,20	2,29	
4	Lemito	459,80	66,38	14,44	Penanganan Provinsi
5	Wanggarasi	554,33	8,75	1,58	
6	Taluditi	830,72	14,63	1,76	
7	Randangan	181,52	7,00	3,86	
8	Patilanggio	232,42	-	-	
9	Duhiadaa	36,86	11,32	30,71	

10	Buntulia	434,03	-	-	
11	Marisa	28,29	43,25	152,88	Penanganan Provinsi
12	Dengilo	364,88	8,00	2,19	
13	Paguat	68,76	4,05	5,89	
	JUMLAH	4.359,45	192,78	22,61	

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Keagamaan Dan Perlindungan Masyarakat

Terjaminnya keamanan dan ketertiban menjadi modal utama daerah dalam menjalankan roda pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Adapun Kondisi tersebut di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.66. Dari tabel tersebut nampak bahwa tingkat kriminalitas dari tahun 2016 ketahun 2020 naik walaupun tidak signifikan. Namun jika dilihat dari tingkat penyelesaian kasus, maka pada tahun 2020 meningkat signifikan. Kasus kriminal tertinggi terdapat pada Kecamatan Popayato, sedangkan yang terendah pada Kecamatan Taluditi.

Tabel 2.66.
Kondisi Kriminalitas 2016-2020

KEPOLISIAN SEKTOR	TINDAK PIDANA	
	JUMLAH KASUS	PERSENTASE PENYELESAIAN
Popayato	64	38
Popayato Barat	26	12
Lemito	53	19
Marisa	59	75
Patilanggio	20	0
Randangan	33	0
Taluditi	14	0
Paguat	47	74
Tahun 2020	195	92
Tahun 2019	316	27%
Tahun 2018	366	26%
Tahun 2017	348	10%
Tahun 2016	288	40%

*BPS Tahun 2020 menyebutkan bahwa s*ebagai daerah dengan mayoritas pemeluk Agama Islam, Kabupaten Pohuwato memiliki banyak masjid dan juga musholah. Tercatat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato bahwa terdapat 257 Mesjid dan 100 Musholah. Fasilitas tempat peribatan lain yang terdapat di Kabupaten Pohuwato diantaranya adalah 42 Gereja Protestan, 6 Gereja Katholik, dan 14 Pura. Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Pohuwato

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Popayato	22	2	2	1	-	-
Popayato Barat	15	6	1	-	-	-
Popayato Timur	12	3	6	2	-	-
Lemito	16	7	2	1	-	-
Wanggarasi	18	5	5	-	-	-
Marisa	21	16	2	-	-	-
Patilanggio	21	1	2	-	-	-
Buntulia	21	2	-	-	-	-
Duhiadaa	18	10	1	-	-	-
Randangan	32	13	7	1	13	-
Taluditi	21	23	9	-	1	-
Paguat	27	8	2	1	-	-
Dengilo	13	4	3	-	-	-
Pohuwato	**257**	**100**	**42**	**6**	**14**	**-**

Sumber : Kementerian Agama, Kab. Pohuwato

Kerukunan umat antar beragama terus terpupuk baik di Kabupaten Pohuwato sehingga walaupun terdepat beberapa agama yang berkembang tetapi keharmonisan dan kedamaian terus terjaga. Namun pada tahun 2020 karena terlena dengan kebebasan pengembangan paham keagamaan, di Kabupaten Pohuwato telah tertutupi dengan faham Radikalisme yang dibktikan dengan penangkapan 7 orang Teroris. Adanya kasus ini maka sistem keamanan lingkungan berbasis desa atau dusun harus kembali dioptimalkan kedepan.

Pengembangan nilai-nilai spiritual juga agar dioptimalkan, khususnya bagi ajaran agama islam khususnya pada jenjang sekolah TK/PAUD, SD dan SMP. Pengembangan rumah hafiz quran yang saat ini telah dirintias di pusat Kabupaten Pohuwato agar dimaksimalkan dan menjadi pusat kegiatan hafiz quran untuk seluruh kecamatan. Untuk masyarakat umum, pembinaan dan pengamalan nilai agama agar terus ditingkatkan, khususnya bagi kaum muslim untuk menyisihkan penghasilan mereka untuk zakat dan disalurkan melalui Lembaga Baznas.

Selanjutnya terkait perlindungan masyarakat, utamanya yang disebabkan oleh bencana alam maupun non alam, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang ada sengaja dihadirkan untuk menangani dan mengatasi permasalahan tersebut. Untuk bencana alam yang mencakup banjir, informasinya dapat dilihat pada tabel 2.68. Pada tabel tersebut nampak bahwa bencana banjir pada tahun 2018 terjadi pada 47 desa, kemudian tahun 2019 pada 35 desa dan tahun 2020 pada 29 desa.

Tabel 2.68.
Bencana BanjirKabupaten Pohuwato Tahun 2018-2020

Kecamatan	Banjir		
	2018	2019	2020
Popayato	4	4	4
Popayato Barat	4	3	2
Popayato Timur	2	2	1
Lemito	2	2	1
Wanggarasi	2	2	-
Marisa	2	1	3
Patilanggio	3	4	6
Buntulia	3	3	1
Duhiadaa	1	-	-
Randangan	7	2	4
Taluditi	7	5	2
Paguat	7	4	5
Dengilo	3	3	-
Pohuwato	**47**	**35**	**29**

Sumber : BPS Kab.Pohuwato 2020

6. Sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu dampak yang menjadi target pembangunan daerah. Oleh sebab itu strata sosial masyarakat agar terpetakan bagus demi lahirkan intervensi program yang tepat dalam memacu pencapaian tersebut. Melalui kementerian sosial pemerintah pusat telah merencanakan ini secara baik melalui pelaksanaan Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini. Perkembangan DTKS Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada grafik 2.23.

Grafik 2.23.
Perkembangan Jumlah DTKS

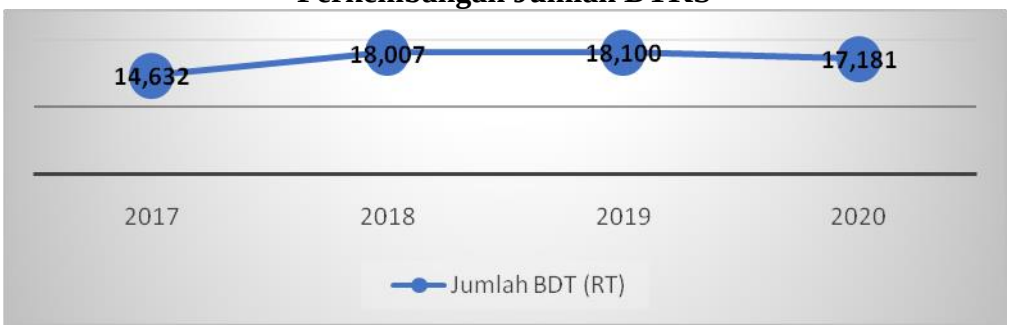

Sumber :Dinas Sosial, 2020

Pada grafik 2.23 nampak bahwa mulai tahun 2018 jumlah DTKS sudah mulai stabil bahkan sudah menurun ditahun 2020. Artinya data base DTKS sudah mulai bagus dan dinamika data di Desa/Kelurahan tidak terlalu tinggi. Tentu dengan adanya data yang semakin baik ini, maka kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan sosial kedepan akan semakin baik. Berikut Jumlah DTKS perkecamatan di sajikan pada tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Jumlah DTKS Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah DTKS (RT)			
		2017	2018	2019	2020
1	Popayato Barat	975	1.230	1.230	1.120
2	Dengilo	814	1.025	1.029	935
3	Patilaggio	1.222	1.389	1.415	1.281
4	Lemito	1.372	1.633	1.634	1.555
5	Taluditi	1.076	1.277	1.277	1.242
6	Popayato Timur	1.043	1.179	1.178	1.139
7	Wanggarasi	598	730	730	726
8	Buntulia	1.277	1.459	1.461	1.346
9	Duhiadaa	1.292	1.578	1.613	1.482
10	Popayato	1.036	1.410	1.409	1.434
11	Paguat	1.657	2.064	2.074	1.943
12	Randangan	1.213	1.704	1.710	1.793
13	Marisa	1.057	1.329	1.340	1.185
	Jumlah	**14.632**	**18.007**	**18.100**	**17.181**

Sumber :DinasSosial 2020

Berdasarkan tabel 2.68 nampak bahwa kecamatan dengan jumlah DTKS tertinggi adalah Kecamatan Paguat, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Wanggarasi. Dari data DTKS tersebut, pemerintah daerah sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 telah melaksanakan intervensi berbagai program terhadap PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang merupakan bagian dari data DTKS, dengan realisasi sebagaimana tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Target dan Realisasi PMKS Penerima Bantuan

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target RPJMD (Jiwa)	1.966	12.765	12.765	12.765	12.765
Realisasi (Jiwa)	12.053	13.701	18.373	19.458	19.883

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial untuk tahun 2020 sebanyak 19.883 jiwa mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019

yang hanya 19.458 jiwa. Capaian ini juga telah melampaui target RPJMD. Pelampauan terjadi karena pemerintah daerah juga meluncurkan kegiatan lain yang mendukung program nasional berupa PKH pusat, PKH Daerah (Lomaya) dan antar nasi tumis (anak terlantar, tuna susila tua miskin) dimana melalui barbagai inovasi tersebut para warga miskin mendapatkan bantuan untuk meringankan biaya hidup sehari-hari dalam bantuan dana dan tambahan asupan makanan berkalori. Perkembangan data dimaksud sebagaimana tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
BPNT/ RASKIN RASKINDA	9,647	9647	10,612	9797	10.557
PKH PUSAT	2,406	4,054	6178	5967	5.947
PKH DAERAH (LOMAYA)	-	-	783	1781	2.761
ANTAR NASI TUMIS	-	-	800	800	800

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Salah satu soal mendasar di sektor ketenagakerjaan adalah angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain perbandingan jumlah pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja tidak seimbang. Disamping itu pula rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja serta perkembangan kelompok industri yang belum optimal. Gambaran kondisi ketenagakerjaan yang disandingkan dengan jumlah perusahaan dan nilai produksi tersaji pada tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi
Menurut Klasifikasi Industri Kabupaten Pohuwato Tahun 2019

KLASIFIKASI INDUSTRI			NILAI PRODUKSI (Rp. 000)
	PERUSAHAAN	TENAGA KERJA	
IndustriPangan	1947	3042	32.774.636
IndustriSandang	297	483	6.565.382
Industri Kimia dan BahanBangunan	326	997	40.178.441
IndustriLogam dan Elektronik	49	127	4.329.577
IndustriKerajinan	423	831	15.260.434
Tahun 2020	*3042*	*5480*	*99.108.470*
Tahun 2019	*2416*	*5109*	*57.551.936*
Tahun 2018	*2379*	*5007*	*57.110.197*
Tahun2017	*2381*	*5002*	*57.117.197*
Tahun2016	*170*	*373*	*3.156.348*

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan tabel 2.72 nampak bahwa hingga tahun 2020 jumlah perusahaan di Kabupaten Pohuwato adalah 3.042 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 5.480 orang dan nilai produksi sebesar 99 milyar. Jumlah ini sejak tahun 2016 terus meningkat setiap tahunnya.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pelayanan umum pemerintahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dilaksanakan. Hingga tahun 2020 urusan wajib ini dilaksanakan oleh satu perangkat daerah di Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya terkait fasilitas umum yang menunjang pelayanan ini belum tersedia secara merata di seluruh Kecamatan, yang ada baru kelembagaan dan mitra organisasi yang memiliki kegiatan yang terkait. Secara rinci kasus KDRT dan kasus anak dapat dilihat padatabel 2.73 berikut:

Tabel 2.73.
Kasus KDRT dan Anak

Uraian	JmlKasus Anak	JmlKasus KDRT
Tahun 2016	16	19
Tahun 2017	13	19
Tahun 2018	45	14
Tahun 2019	29	7
Tahun 2020	33	20

Sumber :LapTah DP3AP2KB 2020

Berdasarkan tabel 2.73, nampak bahwa kasus KDRT tahun 2020 meningkat yakni20 kasus KDRT bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 7 kasus. Pada kondisi kasus tersebut sangat di dominasi oleh kasus anak yakni 29 kasus tahun 2019 dan 20 kasus tahun 2020.

3. Pangan

Pangan merupakan salah satu aspek kebutuhan manusia yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang harus tersedia setiap hari. Oleh sebab itu jaminan ketersediaan pangan setiap waktu merupakan sesuatu yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pemerintah daerah setiap tahunnya selalu melakukakn analisis terhadap ketersediaan pangan dan cadangan pangan. Adapun ketersediaan pangan dihitung dari rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun per Kg dibagi jumlah penduduk dikali 100 persen. Adapun ketersediaanp angan Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Ketersediaan pangan

Uraian	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020
Persentase Ketersediaan pangan	69.70 %	82.90 %	83.60 %

Selanjutnya untuk penguatan cadangan pangan dihitung dari jumlah cadangan pangan Kabupaten Pohuwato dibagi 100 ton dikali 100 persen. Adapun perkembangan cadangan pangan Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Penguatan Cadangan pangan

Uraian	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020
Persentase Penguatan Cadangan pangan	53.33 %	42,86 %	37 %

Selanjutnya untuk melihat sebaran desa yang masuk rawan pangan dimasing-masing Kecamatan disajikan pada tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JLH DESA	JLH DESA RAWAN PANGAN	PERSEN	KET.
1	Dengilo	5	1	0,20	KaryaBaru
2	Buntulia	7	1	0,14	Hulawa
3	Patilanggio	6	2	0,33	Dudepo,Manawa
4	Taluditi	7	5	0,71	Kalimas, Malango, Makarti Jaya, Puncak Jaya, Tirto Asri
5	Wanggarasi	7	4	0,57	Bohusami, BukitHarapan, Lembah Permai, Wonggarasi Timur
6	Lemito	8	1	0,13	Wonggarasi Barat
7	Popayato Timur	7	3	0,43	Marisa, Bunto, Kelapa Lima
8	Popayato	10	1	0,10	Torosiaje
9	Popayato Barat	7	3	0,43	Butungale, Tunas Jaya, Molosifat Utara
Jumlah			21		

4. Pertanahan

Pelayanan pertanahan menjadi salah satu factor strategis dalam penentuan percepatan pelaksanaan sebuah pembangunan fisik baru. Sejak 5 tahun terakhir, persyaratan ketersediaan lahan (pembebasan lahan) menjadi syarat dalam pengajuan kegiatan pembangunan fisik pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu urusan pelayanan umum terkait pertanahan menjadi konsen pemerintah daerah. Adapun data luas tanah dan bangunan pemerintah yang telah bersertifikat dapat dilhat pada tabel 2.77 dan rincian perkecamatan pada tabel 2.78.

Tabel 2.77.
Luas Tanah dan Bangunan Bersertifikat Tahun 2020

Total Luas Tanah	7.502.048 m²
Yang sudah bersertifikat	485.842 m²
Yang belum bersertifikat	7.016.206 m²

Tabel 2.78.
Luas Tanah dan Bangunan Bersertifikat Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN PEMDA (M2)	LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT (M2)	LUAS LAHAN PEMDA BELUM BERSERTIFIKAT (M2)
1	Paguat	789.723	56.744	732.979
2	Dengilo	256.374	19.739	236.635
3	Marisa	1.292.049	156.667	1.135.382
4	Buntulia	419.918	20.678	399.240
5	Duhiadaa	454.989	47.121	407.868
6	Patilanggio	701.286	29.955	671.331
7	Randgan	1.125.707	8.076	1.117.631
8	Taluditi	527.842	3.101	524.741
9	Wanggrasi	435.520	39.081	396.439
10	Lemito	360.109	64.225	295.884
11	Poptim	290.179	20.779	269.400
12	Popayato	487.813	5.449	482.364
13	Popbar	360.539	14.227	346.312
JUMLAH		**7.502.048**	**485.842**	**7.016.206**
PERSENTASE			**6,48%**	

Sumber :Dinas Perkim, 2020

5. Lingkungan Hidup

a. Persampahan

Pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah antaranya adalah persampahan, pencemaran dan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk pelayanan umum terkait persampahan, fasilitasnya dapat dilihat pada tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Fasilitas Persampahan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

No	KECAMATAN	TPA	UPS3R	Bank Sampah
1	Marisa	1	7	5
2	Buntulia	-	-	2
3	Duhiadaa	-	2	2
	Jumlah	**1**	**9**	**9**

Selanjutnya terkait penanganan sampah di Kabupaten Pohuwato untuk tahun 2020 terealisasi sebesar 99 %. Secara lengkap jumlah sampah yang ditangani disajikan pada tabel 2.80.

Tabel 2.80.
Kondisi Penanganan Sampah

URAIAN	TAHUN 2020
TIMBUNAN SAMPAH 169,9 M^3 / hari X 26 HARI = 4.417 M^3 / BULAN	
DITANGANI KE TPA	4,259 M^3
DIOLAH	
A.KOMPOS (ORGANIC)	250 M^3
B.DAUR ULANG	20 M^3
C.DICACAH	15 M^3
Tidak di angkut	-
JUMLAH	4,544 M^3/ BULAN

Sumber : DLH,2020

Nampak bahwa total sampah per bulan dihasilkan sebesar 4.417 M^3, maka total potensi sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 sebesar

53.208M^3. Penanganan sampah masih dapat dioptimalkan dengan meningkatan sarana dan prasarana persampahan sebagaimana tersaji berikut pada tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kenderaan Sampah roda 4	4	5	7	8	8
2	Jumlah Kenderaan Sampah roda 3	7	7	9	7	7
3	Jumlah tenaga kebersihan	124	131	147	161	169
4	Jumlah Bak Sampah	30	30	30	27	25
5	Jumlah Potensi sampah (ton/tahun)	49.272	56.160	52.968	53.004	53.208
6	Persentase Sampah Tertangani (%)	11	14.12	15,2	19	20

Sumber : Laporan Tahunan DLH 2020

b. Indeks Lingkungan Hidup

1. Informasi Status Air Sungai Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

   Terdapat 5 (lima) sungai besar di Kabupaten Pohuwato, dimana sungai – sungai tersebut merupakan salah satu sumber air baku untuk memenuhi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Kondisi / status air sungai menjadi salah satu indikator apakah sumber air baku tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun status Air Sungai di Kabupaten Pohuwato Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut :

Tabel 2.82.

Informasi status air sungai di Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

NO	NAMA SUNGAI	NILAI INDEKS PENCEMARAN/STATUS MUTU AIR						PERKIRAAN PENCEMARAN	RATA-RATA	BOBOT
		NILAI IP	HULU	NILAI IP	TENGAH	NILAI IP	HILIR		IP	IKA
1	Popayato	0,43	Baik	0,29	Baik	-	-	-	0,36	100
2	Lemito	0,21	Baik	0,29	Baik	0,31	Baik	-	0,27	100
3	Malango	0,89	Baik	0,50	Baik	0,89	Baik	Pengunaan Pupuk Kimia, deterjen,Limbah Tinja	0,76	100
4	Taluduyunu	4,34	Cemar Sedang	14,54	Cemar Berat	14,47	Cemar Berat	Pertambangan Tradisional/ Galian C Sedotan Pasir	11.11	20
								Pengunaan Deterjen, Libah Tinja	-	-
5	Paguat	3,36	Cemar Ringan	10,08	Cemar Sedang	10,56	Cemar Berat	Pertambangan Tradisional/ Galian C Sedotan Pasir di Kec Dengilo	8,3	20
								Pengunaan Pupuk Kimia, deterjen,Limbah Tinja	-	-

Sumber Data : Dinas LH Tahun 2020

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kebutuhan administrasi kependudukan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Pohuwato. Pelayanan kependudukan tersebut dilaksanakan oleh satu perangkat daerah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Pelayanan yang selama ini dilaksanakan adalah dengan cara pelayanan terpusat melalui kantor yang berada di ibukota dan pelayanan kunjungan ke kecamatan dan desa (pelayanan mobile).

Pencapaian kinerja kependudukan hingga tahun 2020 adalah Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 89%. Persentase ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 69%. Sementara itu penerapan KTP Nasional Berbasis NIK sesuai dengan target 97% realisasi 99% atau 102.370 jiwa yang sudah memiliki tanda pengenal elektronik. Bayi berakta kelahiran antara 0-18 tahun, target 87% terealisasi 97% atau 47.946 jiwa yang telah diterbitkan akta

kelahiran oleh dinas terkait. Perkembangan setiap tahun dapat dilihat pada tabel 2.83 berikut ini.

Tabel 2.83.
Realisasi Adminduk

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100%	100%	96%	99%	99%
2	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	50%	61,47%	61,47%	69%	87%

Sumber :DinasDukcapilTahun 2020

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pelayanan umum terkat pemberdayaan masyarakat dan desa menjadis angat startegis seiring adanya dana desa sejaktahun 2015 hingga saa tini. Kinerja pembangunan desa salah satunya diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dimana untuk Kabupaten Pohuwatod apatdilihat pada tabel 2.84.

Tabel.2.84.
Status IDM KabupatenPohuwato 2016 dan 2020

Kecamatan	Status Desa IDM								Jml Desa	% Desa Terting-gal	Ranking
	Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal				
	2016	2020	2016	2020	2016	2020	2016	2020			
Popayato	0	0	0	0	8	8	2	2	10	20,00	5
Popayato Barat	0	0	0	0	2	5	5	2	7	28,57	3
Popayato Timur	0	0	0	1	3	6	4	0	7	0,00	0
Lemito	0	0	0	0	2	6	6	2	8	25,00	4
Wanggarasi	0	0	0	0	1	3	6	4	7	57,14	2
Marisa	0	0	3	1	3	6	2	1	8	12,50	7
Patilanggio	0	0	0	0	4	0	2	6	6	100,00	1
Buntulia	0	0	2	3	3	4	2	0	7	0,00	0
Duhiadaa	0	0	1	7	6	1	1	0	8	0,00	0
Randangan	0	0	1	2	9	11	3	0	13	0,00	0
Taluditi	0	0	0	2	2	4	5	1	7	14,29	6
Paguat	0	0	0	2	8	6	0	0	8	0,00	0
Dengilo	0	0	0	1	4	4	1	0	5	0,00	0
Jumlah	**0**	**0**	**7**	**19**	**55**	**64**	**39**	**18**	**101**	**17,82**	**-**

Sumber :BeperlitbangKabupatenPohuwato

Kinerja desa juga diukur dari perkembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya desa sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun status Bumdes di Kabupaten Pohuwato tahun 2020 disajikan pada tabel 2.85.

Tabel 2.85.
Rekapan Jumlah Permodalan BUMDES Yang Disalurkan Melalui BUMDES Kepada Masyarakat Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA	Unit Usaha	JUMLAH BARANG	
				Tahun 2019	Tahun 2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Taluditi	Desa Panca Karsa 1	Pertanian, BRI LINK, Agen Tabung Gas 5 Kg	105.000.000	-
		Desa Malango	Pertanian dan Perdagangan	120.000.000	-
		Desa Panca Karsa 2	Pertanian dan Perdagangan	60.000.000	50.000.000
		Kalimas	Jasa Penyewaan Tenda & Kursi, Gas 5 Kg, Pengemukan Sapi, Bensin, Pupuk, Pengelolaan Pasar	100.000.000	50.000.000
		Makarti Jaya	Pengemukan Sapi, Jual Beli Pasar	28.819.042	50.000.000
		Tirto Asri	Konfeksi, Perbengkelan, Usaha Kue	60.000.000	-
		Puncak Jaya	Saprodi, Saprotan	-	180.000.000
2	Popayato	Torosiaje Jaya	Alat Pertanian	100.000.000	-
		Popayato	Saprodi, Warkop	75.000.000	-
		Telaga	Perdagangan Umum, Saprodi, Foto Copy	45.000.000	-
		Torosiaje	Alat Kelautan, Air Bersih, wisata dan Perdagangan	50.000.000	100.000.000
		Bukit Tingki	Kios Tani, Simpan Pinjam	50.000.000	-
		Tunas Harapan	Usaha Toko Tani, Menyediakan Kebutuhan Pokok	100.000.000	-
		Trikora	Perdagangan dan Produksi, Pariwisata	50.000.000	-
		Dambalo	Budidaya Jahe Merah, Kios Grosir dan Simpan Pinjam	150.000.000	-
		Telaga Biru	Pertanian Saprodi, Kios Sembako	100.000.000	-
		Bumi Bahari	Jasa dan Toserba	100.000.000	25.000.000
3	Lemito	Lemito	Bank Desa, Perikanan, Kios Pasar	-	-
		Wanggarasi Barat	Jaring Tangkap, Kios Desa, Lumbung Pangan	-	-
		Lomuli	Bank Desa	60.000.000	-
		Lemito Utara	Bank Desa, Pemasaran, Gedung Serba Guna Desa	20.000.000	-
		Kenari	Simpan Pinjam Pertanian, Perdagangan, Warung	-	-
		Wanggarasi Tengah	Barang Jasa, UKM	30.000.000	-
		Suka Damai	Perdagangan, HomeInsdustri, Pertanian	70.000.000	-

			dan Perikanan		
		Babalonge	Bank Desa, Jual Beli Hasil Pertanian	50.000.000	-
4	Paguat	Bunuyo	Pertania, Perdagangan	75.000.000	150.000.000
		Sipayo	Pertanian, Simpan Pinjam, Perdagangan	200.000.000	65.121.000
		Soginti	Gula Aren, Jasa Persewahan, Simpan Pinjam	200.000.000	-
		Bumbulan	Abon Ikan	-	-
		Maleo	Perikanan, Hasil Bumi, Perdagangan	75.000.000	-
		Molamahu	Pertanian, Perdagangan Nelayan, Meubel	150.000.000	-
		Buhu Jaya	Pertanian, Simpan Pinjam, Perdagangan	150.000.000	-
		Kemiri	Pertanian, Simpan Pinjam	150.000.000	32.800.000
5	Buntulia	Sipatana	Warkop/Toserba	-	-
		Buntulia Tengah	Kerajinan Tangan	20.000.000	-
		Buntulia Utara	Saprodi	-	-
		Taluduyunu	Saprodi, Ikan Air Tawar	20.000.000	-
		Karya Indah	FotoCopy	20.000.000	15.000.000
		Hulawa	Depot Air Isi Ulang/Saprodi	-	20.000.000
		Taluduyunu Utara	Simpan Pinjam	-	20.000.000

Sumber :LapTahDinas PMD, 2020

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Salah satu cara dalam memperlambat laju pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menerapkan Keluarga Berencana. Penerapan ini ditunjukkan agar setiap rumah tangga dapat merencanakan kelahiran dengan baik dan maksimal dua anak saja. Dengan cara seperti ini maka harapan keluarga Bahagia sejahtera dapat diwujudkan. Adapun capaian kinerja pengendalian penduduk dan keluarga Berencana oleh pemerintah daerah sebagaimana grafik 2.24.

Grafik 2.24.
Cakupan Peserta KB Aktif

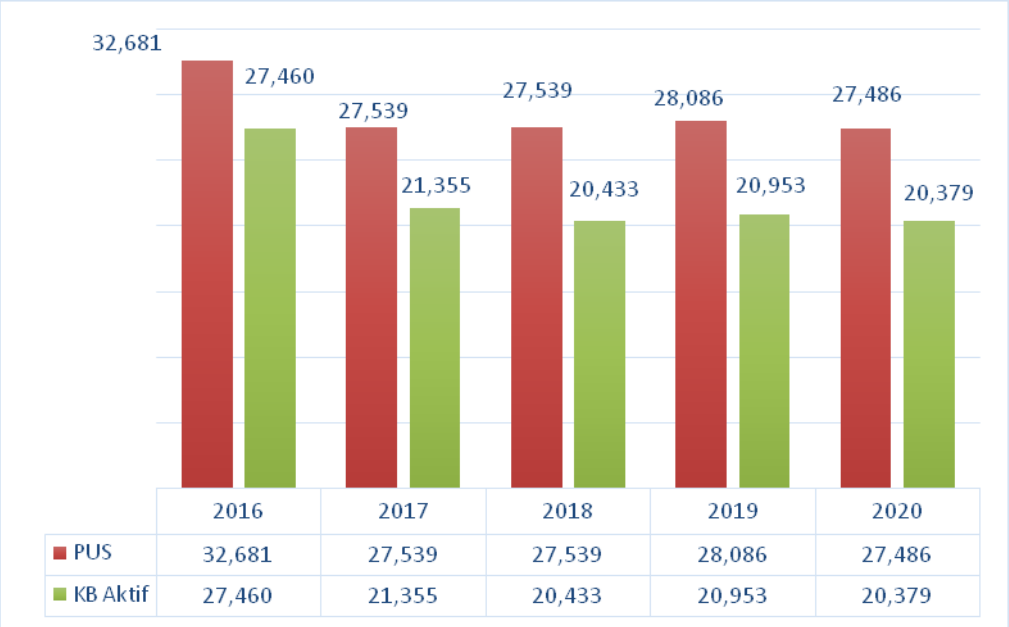

	2016	2017	2018	2019	2020
PUS	32,681	27,539	27,539	28,086	27,486
KB Aktif	27,460	21,355	20,433	20,953	20,379

Sumber :LapTah DP3AP2KB 2020

Berdasarkan grafik 2.24 diatas bahwa jumlah peserta aktif KB sebanyak 20.379 orang dibagi jumlah PUS yaitu sebesar 27.486 orang dikali 100 hasilnya adalah 74%. terhitung cukup berhasil karena target yang ditentukan adalah sebesar 77% pada Tahun 2020. Namun secara Nasional pencapaian tersebut terhitung sangat tinggi. Diantara faktor belum berhasilnya pemenuhan target yakni masih rendahnya kepesertaan ber KB di wilayah khusus (tertinggal, terpencil) serta belum adannya kebijakan strategi dan materi informasi tentang kesehatan reproduksi.

Selanjutnya untuk melihat fasilitas umum yang mendukung terwujudnya target pencapaian penendalian penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tabel 2.86.

Tabel.2.86.
Fasilitas Umum KB Tahun 2020

No	KECAMATAN	JmlDesa	Ktr. PPLKB	Jml PPLKB	Operasional KB	
					Mobil	Motor
1	Dengilo	5	1	1	-	1
2	Paguat	1	1	2	-	2
3	Marisa	8	1	2	-	2
4	Buntulia	7	1	2	-	1
5	Duhiadaa	8	1	2	-	2
6	Patilanggio	6	1	1	-	1
7	Randangan	13	1	2	-	2
8	Taluditi	7	1	1	-	1
9	Wanggarasi	7	1	2	-	2
10	Lemito	8	1	1	-	1
11	Popayato	10	1	1	-	1
12	Popayato Timur	7	1	1	-	1
13	Popayato Barat	7	1	1	-	1
	JUMLAH	104	13	19	-	18

9. Perhubungan

Fasilitas umum perhubungan merupakan penunjang utama moda transportasi dalam satu wilayah, baik itu manusia maupun barang. Pergerakan ini akan menunjang percepatan perkembangan ekonomi suatu daerah. Untuk Kabupaten Pohuwato fasilitas umum perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Fasilitas Umum Perhubungan

No	KECAMATAN	Jumlah Terminal	Pelabuhan	Bandara	TambatanPerahu	Keterangan
1	Paguat		2			Aktif
2	Dengilo					
3	Marisa	1				Aktif
4	Buntulia					
5	Duhiadaa					
6	Patilanggio					
7	Randangan	1		1		Aktif
8	Taluditi					
9	Wanggarasi					
10	Lemito	1				Tidak Aktif
11	Popayato Timur					
12	Popayato	1				

13	Popayato Barat	1				Aktif
	JUMLAH	**5**				Aktif

Sumber :DinasPerhubungan, 2020

Selanjutnya untuk melihat akses transportasi darat pada desa-desa Terpencil di Kabupaten Pohuwato, disajikan pada tabel 2.88 berikut ini.

Tabel 2.88.
Akses Transportasi Pada Desa Terpencil

No	KECAMATAN	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah DesaTerpencil	JumlahDesa Terpencil Terakses Roda 4	Keterangan			
1	Dengilo	5	2	2	Dari pemerintah Kab. Pohuwato dalam hal ini Dinas Perhubungan sejak Tahun 2017 s/d sekarang telah menyerahkan Bantuan Hibah Moda Transp Darat dan Perairan ke PemDes dan BUMDES dgn jenis bantuansbb :			
2	Paguat	11	1	1				
3	Marisa	8	1	1				
4	Buntulia	7	2	2				
5	Duhiadaa	8	2	2				
6	Patilanggio	6	2	2	Mobil Pick Up	14	Unit	Bantuan Moda dimaksud diserahkan ke Desa Terpencil, khusus Moda Transp. Darat dan Perairan diserahkan ke Desa di Daerah Pesisir
7	Randangan	13	2	2	Mobil Micro Bus	9	Unit	
8	Taluditi	7	4	3	Water Taxi	9	Unit	
9	Wanggarasi	7	3	3	Bantuan dumaksudutk mempermudah akses transportasi dan peningkatan ekonomi masyarakat yg bermukim di daerah terpencil			
10	Lemito	8	1	1				
11	Popayato Timur	7	2	2				
12	Popayato	10	2	2				
13	Popayato Barat	7	2	2				
	JUMLAH	**104**	**26**	**25**				

Sumber :DinasPerhubungan, 2020

Perkembangan kenderaan di Kabupaten Pohuwato dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini disamping menunjukkan sebagai suatu dinamikan ekonomi yang positif, juga semakin mudahnya masyarakat dalammengakses kenderaan untuk jasa trasportasi. Secara lengkap perkembangan kenderaan dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2.89.
Perkembangan Data Kenderaan Kab. Pohuwato

NO	JENIS KENDERAAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
A	**Mobil Penumpang**	**1441**	**1636**	**1863**	**1995**	**1995**
	Sedan	1	1	1	2	2
	Jeep	45	55	59	68	68
	Station Wagon	1294	1484	1703	1925	1925
	Lans/Mikrolet	101	96	100	0	0
B	**Mobil Beban**	**1911**	**2147**	**2335**	**2556**	**2556**
	Truck Barang	572	620	651	709	709
	TruckTanky	3	4	2	0	0
	PickUp	1338	1523	1678	1847	1847
C	**Mobil Bus**	**29**	**34**	**36**	**38**	**38**
	Bus Biasa	4	4	3	3	3
	Mini Bus/Mikro	26	30	33	35	35
D	**Sepeda Motor**	**32618**	**35408**	**38156**	**41398**	**41398**
E	**Mobil Khusus**	**7**	**33**	**15**	**14**	**14**
	Pemadam Kebakaran	2	2	2	2	2
	Ambulance	30	31	34	12	12
TOTAL		**39422**	**43108**	**42390**	**46001**	**46001**

Sumber : BPS 2020 , DishubPohuwato 2020

Untuk kinerja dinas perhubungan dapat diukur diantaranya melalui persentase kelayakan angkutan penumpang dan barang serta jumlah keseluruhan sarana dan fasilitas perhubungan yang memadai. Tahun 2020, indikator persentase kelayakan angkutan penumpang dan barang ditargetkan 50 persen terealisasi 56 persen. Sedangkan untuk indikator jumlah sarana dan fasilitas perhubungan yang memadai, ditargetkan 700 buah dan realisasinya 697 buah.

10. Komunikasi Dan Informatika

Sejak lima tahun taerakhir, pembangunan jaringan infrastruktur komunikasi dan informatika berkembang cukup baik, sebagaimana dapatdilihat pada tabel 2.90.

Tabel 2.90.
Perkembangan Akses Komunikasi

PENYEDIA	LOKASI KECAMATAN
PT. Telkomsel	Dengilo, Paguat, Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, Randangan, Taluditi, Lemito, Popayato Timur, Popayato Barat, Wanggarasi dan Lemito
PT. Indosat	Paguat, Marisa, Randangan, Wanggarasi dan Popayato
PT. Protelindo	Dengilo, Buntulia, Lemito dan Randangan
PT. Solusi Kreasi Pratama (SKP)/ Tower Bersama Group (TBG)	Paguat, Duhiadaa, Randangan dan Popayato
PT. XL Axiata	Marisa dan Popayato
PT. Dayamitra Telekomunikasi	Paguat, Marisa, Buntulia, Randangan dan Taluditi

Sumber :Diskominfotahun 2020

Dalam memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, Kabupaten Pohuwato sebagian besar telah terlayani dengan operator seluler. Nampak pada tabel penyebaran tower komunikasi tower Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan dari 35 unit menjadi 37 unit tahun 2020 yang tersebar di seluruh Kabupaten Pohuwato.

11. Penanaman Modal.

Pelayanan umum terkait penanaman modal bertujuan agar manajemen investasi dan perizinan yang masuk kedaerah berlangsung dengan baik, cepat dan akuntabel. Karena investasi sangat dibutuhkan oleh daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan peyerapan tenaga kerja, sehingga prosedurnya mulai dari perizinan dan administrasi lainnya agar dipermudah dan dipercepat. Adapun perkembangan investasi di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.91. Pada tabel tersebut

nampak bahwa jumlah investor penanaman modal asing/dalam negeri (PMA/PMDN) tahun 2020 sebanyak 17 investor termasuk 4 investor asing dengan total nilai investasi sekitar Rp. 7.211.822.452.782,26,-.

Tabel 2.91.
Investor Kabupaten Pohuwato

No	Nama Perusahaan	Nilai Investasi	PMA / PMDN
1	PT. Maria SPI	39.000.000.000	PMA
2	PT. Multi Nabati Sulawesi	165.255.483.269	PMA
3	PT. Harim	82.900.000.000	PMA
4	PT. Millenium Agroindo Selebes	18.000.000.000	PMA
5	PT. Loka Indah lestari	324.167.630.505	PMDN
6	PT. Sawit Tiara Nusa	190.111.520.950	PMDN
7	PT. Inti Global Laksana	94.218.351.151	PMDN
8	PT. Wira Sawit Mandiri	119.224.666.808	PMDN
9	PT. Karunia Sawait Permai	47.639.179.573	PMDN
10	PT. Banyan Tumbuh Lestari	100.323.336.001	PMDN
11	PT. GSM	2.866.182.586.982	PMDN
12	PT. PLN (Persero)	1.735.051.708.305	PMDN
13	PT. Seger Pangan Sejahtera (Masa Konstruksi)	107.816.140.671	PMDN
14	PT. Nurza Bersama Sejahtera (Masa Kontruksi)	10.000.000.000	PMDN
15	PT. Cargil Indonesia	1.304.267.117.109	PMDN
16	PT. Expres Rajawali Gemilang	500.000.000	PMDN
17	PT. PuncakEmasTani Sejahtera (PETS)	7.164.731.458,26	PMDN
	JUMLAH	7.211.822.452.782,26	

Sumber : LapTah DPM Tahun 2020

Sementara itu untuk melihat perkembangan perizinan yang diberikan kepada IKM/UKM pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.92. Pada tabel tersebut nampak bahwa terdapat kecenderungan penurunan perizinan pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang menggratiskan perizinan bagi usaha tertentu. Secara lengkap data perizinan dapat dilihat berikut:

Tabel 2.92.
Data Perizinan Kabupaten Pohuwato 2020

NO	URAIAN	T A H U N					
		2016	2017	2018	2019	2020	KET
1	NomorIndukBerusaha (NIB)	-	-	-	275	85	
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	437	375	278	275	85	
3	Izin Usaha Mikro	-	-	-	30	98	
4	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	2	-	
5	Surat IzinGangguan Usaha (SIGU)	437	231	-	-	-	
6	IzinPerluasan (IP)	-	-	-	-	-	
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	438	375	278	-	-	
8	Tanda Daftar Industri (TDI)	6		2	1	-	
9	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2	7	2	2	-	
10	Surat Izin Usaha Perikanan	8		4	4	-	
11	Surat IzinPenagkapan Ikan (SIPI)	8	1	4	1	-	
12	Surat IzinKapalPenangkap Ikan (SIKPI)	-	-	-	-	-	
13	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	80		20	94	-	
14	IzinMendirikanBangunan (IMB)	100	134	249	216	154	
15	IzinTrayek (IT)	-	-	-	3	-	
16	IzinPrinsip (IP)	-	4	1	-	-	
17	Izin Lokasi (ILOK)	-	-	2	-	-	
18	IzinLingkungan (IL)	-	-	50	38	32	
19	IzinPerubahanPenggunaan Tanah (IPPT)	-	-	9	5	14	
20	Surat IzinInternsip	-	-	-	-	-	
21	Surat IzinPraktek Ahli Tenaga Gizi	-	-	-	1	-	
22	Surat IzinPraktek ATEM	-	-	-	-	-	
23	Surat IzinPraktekDokter	-	-	-	45	57	

24	Surat IzinPraktek Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	15	12	
25	Surat IzinPraktekApoteker	-	-	-	16	5	
26	Surat IzinPraktekBidan	-	-	-	118	20	
27	Surat IzinPraktekLaboratorium (SIPL)	-	-	-	5	9	
28	Surat IzinPraktekPerawat (SIPP)	-	-	-	118	40	
29	Surat IzinPraktekPerawat Gigi (SIPPG)	-	-	-	2	s	
30	SertifikatProduksiPanganIndustriRumah Tangga (SPP-IRT)	-	-	-	8	-	
	JUMLAH	**1.516**	**1.127**	**899**	**1.274**	**611**	

Sumber : DPM,2020

12. Kepemudaan Dan Olah Raga.

    Pemuda merupakan generasi penerus pembangunan bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kabupaten Pohuwato semangat pemuda berkembang sangat pesat, yang diindikasikan dengan hidupnya berbagai oragnisasi kepemudaan dalam naungan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Perkembangan organisasi kepemudaan dan juga prasarana olahraga telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

13. Kebudayaan

    Sebagaimana dijelaskan pada paragraph sebelumnya, bahwa kegiatan kebudayaan, khususnya budaya lokal Gorontalo sudah mulai pudar. Sebagian besar pelaksana kegiatan budaya dan adat istiadat Gorontalo sudah uzur, demikian juga dengan para pengurus Lembaga adat. Untuk itu kedepan melalui OPD terkait kegiatan regerasi kebudayaan perlu dimaksimalkan.

14. Kearsipan

Untuk kearsipan yang baik belum menjadi budaya diseluruh instansi pemerintah daerah termasuk desa, sehingga perlu selalu ada pembinaan dan eveluasi kedepan.

15. Statistik

    Kegiatan statistik yang terkait dengan BPS Pohuwato seluruh dokumen yang dibutuhkan selalu tersedia, seperti Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, dll. Permasalahan dalam urusan ini adalah belum terimplemtasinya konsep satu data yang mengintegrasikan seluruh OPD terkait termasuk pemerintah desa dan kelurahan.

16. Persandian

    Urusan persandian juga terkait dengan kelancaran informasi penyelenggaraan negara, sehingga keberadaannya penting dalam sebuah pemerintahan daerah. Di Kabupaten Pohuwato urusan ini melekat dengan OPD Kominfo dan statistic dimana hingga tahun 2021 sarana dan prasarana penunjangnya tersedia namun SDM yang sudah tidak ada, sehingga perlu ada rekrutmen atau kaderisasi kedepan.

17. Perpustakaan

    Membaca adalah jendela dunia, demikianlah pepatah yang selama ini diberikan sebagai motivasi bagi masyarakat, utamanya bagi generasi yang masih dalam studi. Kegiatan membaca dimasyarakat harus terus ditumbuhkan agar terwujud masyarakat yang cerdas dan prdoduktif. Namun demikian kegiatan membaca harus juga ditunjang dengan ketersediaan perpustakaan serta beragam buku didalamnya. Adapun perkembangan fasilitas umum perpustakaan di Kabupaten Pohuwato disajikan pada Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93.
Jumlah Perpustakaan di kabupaten Pohuwato

No	KECAMATAN	JumlahDesa/Kel.	JumlahPerpustakaanDesa	JumlahPerpustakaanSekolah/PT	JumlahPerpustakaanKabupaten	Total
1	Marisa	8	8	17	25	25
2	Buntulia	7	7	14	21	21
3	Dengilo	4	4	10	14	14
4	Paguat	8	8	21	29	29
5	Duhiadaa	7	7	12	19	19
6	Patilanggio	6	6	12	18	18
7	Randangan	5	5	18	23	23
8	Taluditi	5	5	4	9	9
9	Wanggarasi	5	5	11	16	16
10	Lemito	3	3	15	18	18
11	Popayato Barat	4	4	13	17	17
12	Popayato	4	4	15	19	19
13	Popayato Timur	4	4	14	18	18
	JUMLAH					**246**

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Pariwisata

   Sektor parwisata merupakan sektor yang sangat strategis untuk dikembangkan. Dampak pengembangan sector ini sangatluas (*multi player effect*) sehingga setiap daerah berlomba untuk mempromosikan potensi wisatanya.

   Fasilitas lain penunjang pengembangan kepariwisataan adalah adanya rumah makan dan restoran. Untuk Kabupaten Pohuwato perkembangannya dapat dilihat pada grafik 2.25 berikutini.

Grafik 2.25.
Jumlah Rumah Makan dan Retoran

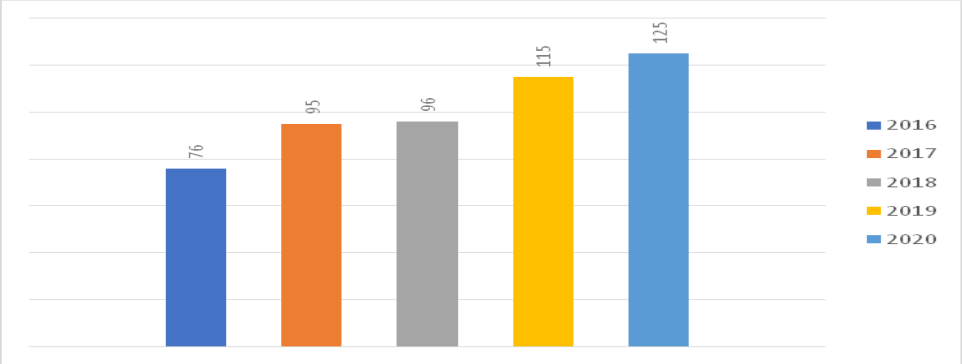

Sumber : BPS PohuwatoTahun 2020

Berdasarkan grafik 2.23 nampak bahwa perkembangan rumah makan dan restoran di Kabupaten Pohuwato terus meningkat setiap tahunnya, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 125 rumah makan/restoran. Adapun sebesarannya berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.94.
Jumlah Rumah Makan dan Restoran per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Popayato	4	6	6	12	12
Popayato Barat	-	4	4	5	5
Popayato Timur	5	6	6	7	7
Lemito	7	9	9	6	6
Wanggarasi	5	2	2	2	2
Marisa	22	48	48	58	65
Patilanggio	-	1	1	1	1
Buntulia	2	1	1	1	1
Duhiadaa	10	4	5	4	4
Randangan	11	12	12	10	10
Taluditi	1	-	-	-	-
Paguat	9	2	2	9	9
Dengilo	-	-	-	-	-
Pohuwato	**76**	**95**	**96**	**115**	**125**

Sumber : BPS Pohuwatotahun 2020

Dari tabel 2.94 nampak bahwa kecamatan yang memiliki rumah makan dan restoran tertinggi adalah Kecamatan Marisa, kemudian Kecamatan Popayato dan Kecamatan Randangan.

2. Perindustrian

Pada poin 2.1.2.8 telah disajikan terkait perkembangan industri di Kabupaten Pohuwato dimana hingga tahun 2020 telah berjumlah 2.418 usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.109 orang. Namun dampak pandemi covid 19 diperkirakan telah menurunkan daya serap tenaga kerja 30 sampai 40 persen. Oleh sebab itu penguatan modal dan pembinaan industry kedepan menjadi fokus pemerintah agar industry yeng tersebar di 13 kecamatan ini perlahan akan bangkit dan kembali menjadi pilar utama penyerap tenaga kerja.

3. Perdagangan

Aktivitas perdagangan sangat erat dengan berbagai kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan hidup se hari-hari hingga kepemenuhan barang dan jasa. Akses pemenuhan kebuhatan tersebut sangat ditunjang dengan keberadan para pedagang. Adapun perkembangan perdagangan di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.95.

Tabel 2.95.
Jumlah Pedagang Kabupaten Pohuwato Tahun 2019

Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
Popayato	39	71	124
Popayato Barat	26	40	40
Popayato Timur	38	55	74
Lemito	45	86	133
Wanggarasi	32	32	122
Marisa	49	49	168

Patilanggio	44	44	182
Buntulia	77	70	185
Duhiadaa	52	60	129
Randangan	56	76	120
Taluditi	26	44	60
Paguat	70	83	94
Dengilo	37	40	70
Pohuwato	**591**	**750**	**1501**

Sumber : BPS KabupatenPohuwatoTahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.95 nampak bahwa untuk pedagang besar jumlahnya 591 pedagang, pedagang menengah 750 pedagang dan pedagang kecil sebanyak 1501 pedagang. Konsentrasi pedagang kecil terbanyak berada di Kecamatan Buntulia dan Kecamatan Patilanggio.

Selanjutnya untuk melihat keberadaan pasar sebagai pusat perdagangan di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.96. Pada tabel tersebut nampak bahwa pasa kabupaten yang dikelola oleh dinas Koperindag sebanyak 7 pasar dan pasar desa sebanyak 10 desa. Dari seluruh Kecamatan, hanya Kecamatan Buntulia yang belum memiliki pasar.

Tabel 2.96.
Jumlah Pasar Di Kabupaten Pohuwato

Kecamatan	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan	Pemerintah Desa
Popayato	1	-
Popayato Barat	-	2
Popayato Timur	-	2
Lemito	1	1
Wanggarasi	-	1
Marisa	1	-
Patilanggio	-	1
Buntulia	-	-
Duhiadaa	-	1
Randangan	1	-
Taluditi	-	2

Paguat	2	-
Dengilo	1	-
Pohuwato	**7**	**10**

Sumber : BPS KabupatenPohuwatotahun 2021

4. Perikanan dan Kelautan

   Potensi perikanan dan kelautan telah dijelaskan pada poin 2.1.2.4 dimana untuk produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya fluktuatif setiap tahunnya. Agar sektor ini semakin berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan kedepan maka pengembangan perikanan budidaya ramah lingkungan perlu dimaksimalkan, baik budidaya perikanan tangkap maupun pada budidaya perikanan darat/payau.

5. Pertanain

   Pengembangan pertanian telah disajikan pada poin 2.1.2.2 yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Fokus kedepan pengelolaan potensi ini adalah dengan meningkatakan nilai tambah perkomoditi dan melaksanakan reformasi tata kelola pertanian.

6. Kehutanan

   Potensi kehutanan di Kabupaten Pohuwato sebagaimana telah disajikan pada poin 2.1.2.7 dimana sekitar 70 persen tutupan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kawasan hutan. Oleh sebab itu walaupun kewenangan kehutanan ada diberbagai lintes sektor dan lintas daerah, pengendalian kerusakan hutanan agar menjadi prioritas kedepan.

7. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

   Potensi ESDM telah disajikan pada poin 2.1.2.6 dimana dari 13 Kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Pohuwato yang memiliki potensi emas.

Pengelolaan emas yang paling masiv terjadi ada di Kecamatan Buntulia, Dengilo dan Taluditi. Agar potensi ini dapat berkontribusi secara legal pada kesejahteraan masyarakat, maka harapan masyarakat untuk adanya Wilayah Pertanmbangan Rakyat (WPR) dapat diwujudkan. Selain itu pengembangan pengelolaan emas yang ramah lingkungan agar bisa dihadirkan untuk dapat memninimalisir dampak pencemaran lingkungan.

8. Transmigrasi

   Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang menjadi lokus program Transmigrasi sejak tahun 1980 an. Hingga tahun 2020 masih terdapat satu Unit Pemukiman transmigrasi baru yaitu UPT Sandalan di kecamatan taluditi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dianalisis perkembangannya melalui beberapa indikator strategis berikutini.

a. Pengeluaran konsumsi Panganrumah tangga per kapita

   Kemampuan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu indikantor yang menunjukkan kemampuan daya belinya. Semakin baik daya beli masyarakat maka kemampuan ekonomi daerah semakin baik. Adapun perkembangan konsumsi pangan Rumaht angga per kapita pertahun dapat dilihat berikut.

Grafik 2.26.
Pengeluaran Konsumsi pangan Rumah Tangga Per Kapita

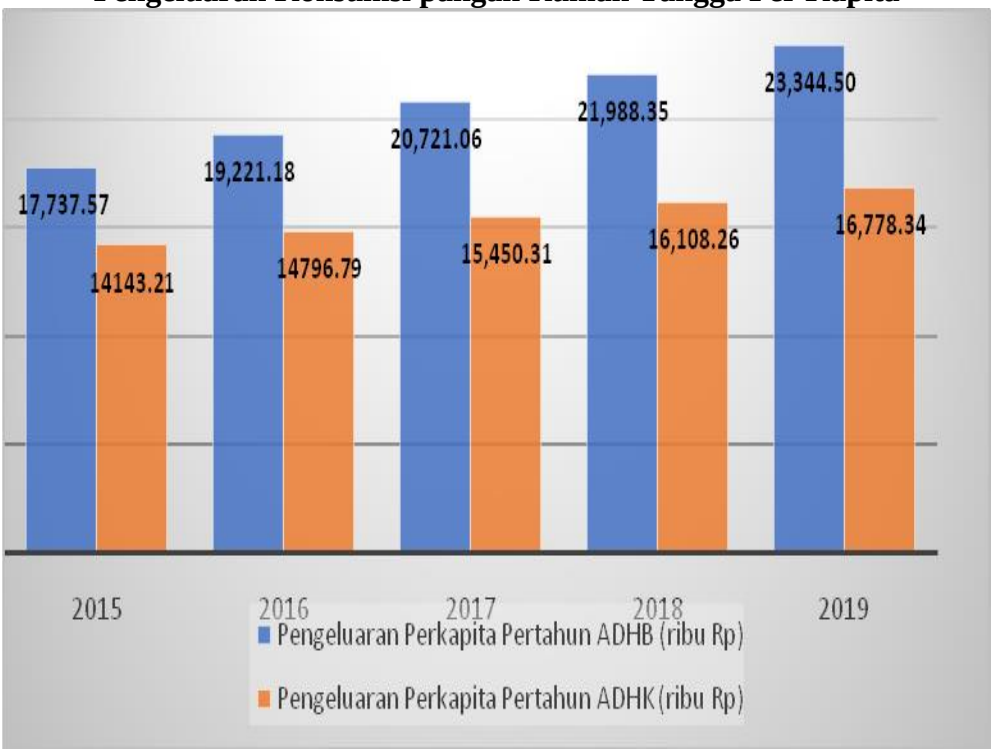

Sumber : BPS PohuwatoTahun 2020

Berdasarkan grafik 2.26 nampak bahwa pengeluaran konsumsi perkapita per tahun baik ADHK ataupun ADHB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk meilihat tingkat konsumsi pangan berdasarkan kategori per bulan dapat dilihat pada grafik 2.27.

Grafik 2.27.
Pengeluaran Konsumsi Pangan RT Perkapita Perbulan Per Kategori (Rp)

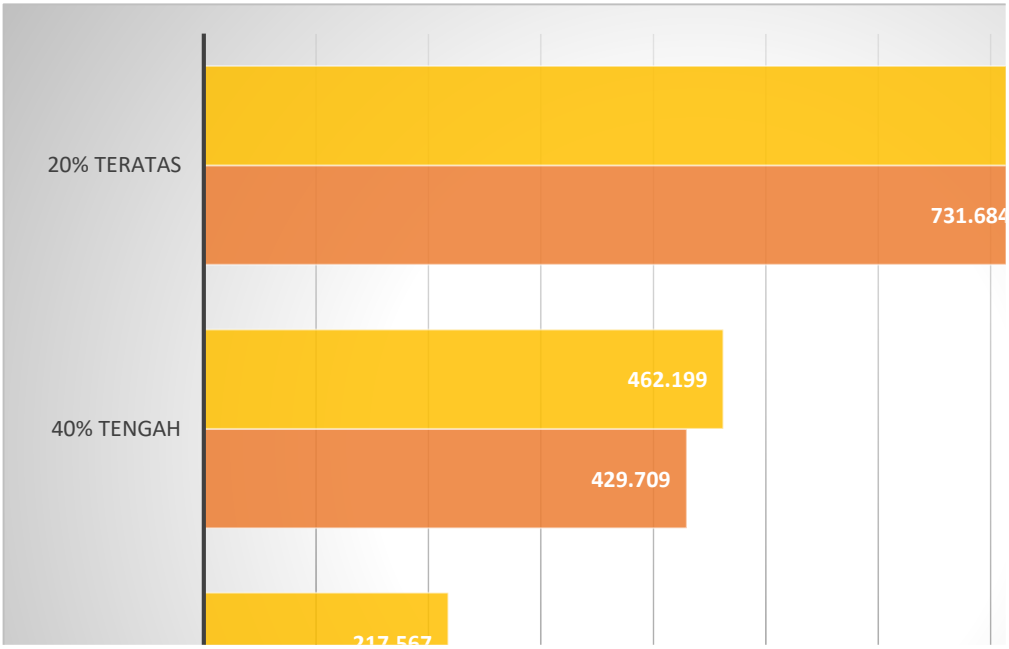

Sumber : BPS Pohuwato tahun 2020

Berdasarkan grafik 2.27 nampak bahwa pengeluaran konsumsi pangan tertinggi perkapita perbulan berada pada kategori 20 persen teratas atau pada orang-orang kaya atau mampu, sebaliknya pengeluaran terendah pada kategori 40 persenter bawah atau masyarakat kurang mampu.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

Jenis pengeluaran ini dihitung dari total pengeluaran konsumsi non pangan Rumah tangga dibagi total pengeluaran rumah tangga. Semakin besar jumlahnya berarti semakin tinggi pula pengeluaran jenis ini pada sebuah rumah tangga. Untuk melihat perkembangan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita disajikan pada grafik 2.28.

Grafik 2.28.
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per kapita

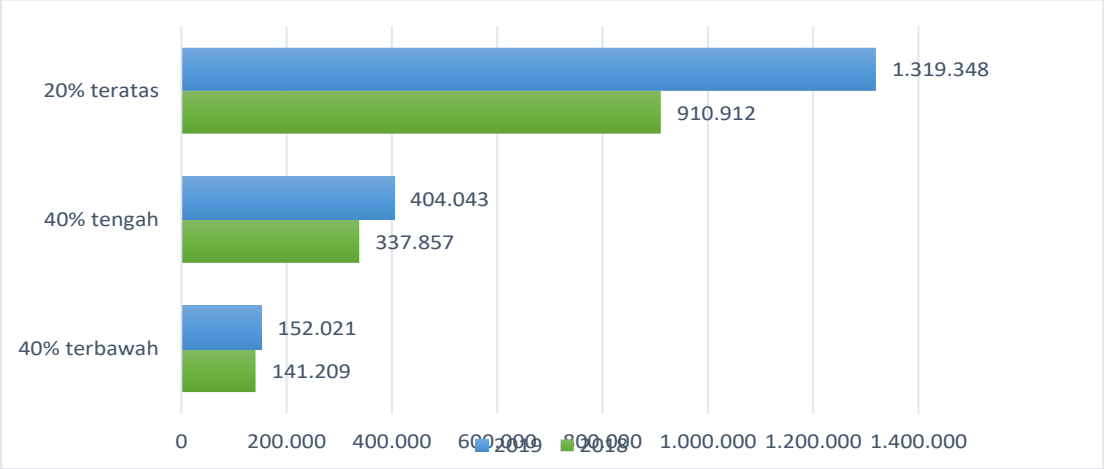

Sumber : BPS Pohuwatotahun 2020

c. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani semakin baik. Berikut pada grafik 2.29 disajikan beberapa jenis NTP berdasarkan komiditi yang berkembang di Kabupaten Pohuwato.

Grafik 2.29.
Nilai Tukar Petani

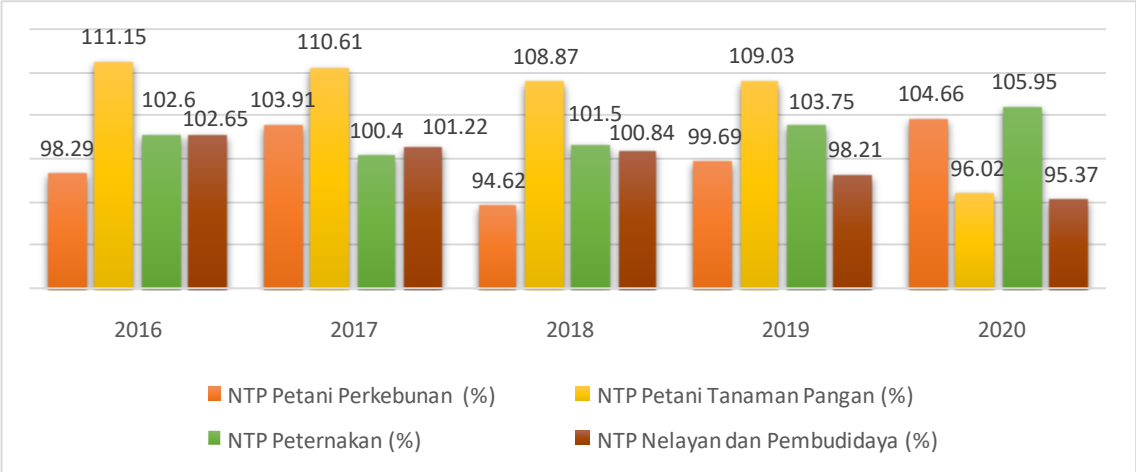

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan grafik 2.29 nampak bahwa dari 4 jenis nilai tukar petani, yang memiliki trend kenaikan hingga tahun 2020 adalah komoditi peternakan dan perkebunan. Sedangkan untuk komoditi pertanian tanaman pangan dan komoditi nelayan mengalami penurunan. Salah satuf actor penyebab penuruan adalah adanya pandemic covid 19 yang telah masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo termasuk Pohuwato pada maret 2020 hingga oktober ini masih terus terjadi ekskalasi kasus.

d. Total Produktivitas Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang setiap tahunnya dilaksanakan kajiannya oleh BPS. Untuk Kabupaten Pohuwato Total Produktifitas Daerah dapat dilihat pada tabel 2.97.

Tabel 2.97.
Total Produktivitas Daerah

No	LAPANGAN USAHA	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
	PDRB ADHB	(Milyar Rp)		(Milyar Rp)		(Milyar Rp)		(Milyar Rp)	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3031,25	4,628	3332,2	5,002	3661,48	4,716	3992,23	4,965
2	Pertambangan dan Penggalian	42,15	0,064	42,27	0,063	43,2	0,056	47,26	0,059
3	IndustriPengolahan	228,81	0,349	241,63	0,363	263,81	0,340	291,28	0,362
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,91	0,003	2,35	0,004	2,63	0,003	2,92	0,004
5	Pengadaan Air, PengelolaanSampah,Limbah	1,3	0,002	1,52	0,002	1,71	0,002	1,93	0,0024
6	Kontruksi	336,91	0,514	347,92	0,522	362,34	0,467	377,06	0,469
7	PerdaganganBesar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	482,29	0,736	548,01	0,823	620,59	0,799	711,39	0,885
8	Transportasi dan Pergudangan	159,84	0,244	169,42	0,254	178,63	0,230	190,52	0,237
9	PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum	56,07	0,086	62,79	0,094	69,41	0,089	75,25	0,094
10	Informasi dan Komunikasi	60,03	0,092	76,31	0,115	83,4	0,107	89,18	0,111
11	JasaKeuangan dan Asuransi	109,87	0,168	125,35	0,188	134,56	0,173	134,99	0,168
12	Real Estate	42,35	0,065	45,22	0,068	47,98	0,062	52,18	0,065
13	Jasa Perusahaan	4,85	0,007	5,2	0,008	5,53	0,007	5,85	0,007
14	AdministrasiPemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosialWajib	256,62	0,392	257,07	0,386	260,9	0,336	269,31	0,335
15	Jasa Pendidikan	112,97	0,172	125,93	0,189	140,99	0,182	158,46	0,197
16	JasaKesehatan dan KegiatanSosial	125,97	0,192	134,15	0,201	144,21	0,186	157,59	0,196
17	Jasa Lainnya	56,46	0,086	59,27	0,089	62,29	0,080	65,51	0,081
	Jumlah Angkatan Kerja	**65.505**		**66.618**		**77.640**		**80.404**	

Sumber : BPS Pohuwato 2020 dan AnalisisBaperlitbang

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur atau fasilitas wilayah dalam suatu daerah akan sangat menunjang daya saing daerah tersebut. Untuk Kabupaten Pohuwato fasilitas tersebut secara lengkap disajikan berikutini.

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Untuk melihat tingkat kemampuan jalan dengan jumlah kenderaan, perkembangannya di Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.98.

Tabel 2.98.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah kenderaan

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	1074,53	1114,51	1150,57	1150,62	1150,62
2	Jumlah Kenderaan	36.006	39.258	42.405	46.001	46.001
	Rasio	0,030	0,028	0,027	0,025	0,025

Sumber : BPS KabupatenPohuwato, 2020

b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan jumlah orang/barang yang masuk atau keluar di kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.99 berikut ini.

Tabel 2.99.
Jumlah Orang/barang yang terangkut

NO	URAIAN	2018		2019		2020	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Terminal Marisa	55,134	-	115.463	-	95.718	-
2	Terminal Randangan	-	-	-	-	-	-
3	Terminal Popayato	-	-	-	-	-	-
4	Terminal Popayato Barat	88.970	-	115.543	-	87.002	-

Sumber :DinasPerhubungan, 2020

c. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Perkembangan jumlah orang / barang yang masuk atau keluar di kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.100 berikut ini.

Tabel 2.100.
Jumlah orang/barang di Pelabuhan

NO	URAIAN	2018		2019		2020	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Penumpang Pelabuhan A	-	-	114.69	-	-	-
2	Samudra Barang Pelabuhan B	-	-	-	68	-	-

Sumber :DinasPerhubungan, 2020

d. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif bermanfaat untuk menganilisis sejauh mana pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Cara menghitungnya adalah dengan menetapkan luas Kawasan budidaya yang telah ada dalam RTRW dibagi dengan luas wilayah produktif di kali 100 persen. Untuk Kabupaten Pohuwato hasilnya sebagaimana disajikan pada tabel 2.101.

Tabel 2.101.
Luas Wilayah Produktif

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Produktif (Ha)	56.048	65.906	65.773	65.799,5	65.799,5
2	Luas Kawasan Budidaya (Ha)	101.309	101.309	101.309	101.309	101.309
3	Presentase	55,32	65,05	64,92	64,95	64,95

Sumber : Hasil analisis Baperlitbang, 2020

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa Kawasan budidaya di Kabupaten Pohuwato baru termanfaatkan 64,95 persen tahun 2020. Dengan demikian potensi yang sekitar 35 persen yang belum termanfaatkan dapat dioptimalkan kedepan.

e. Luas Wilayah Perkotaan

KabupatenPohuwatoibukotanyaadalah Kota Marisa yang mencakupKecamatan Marisa, kecamatanDuhiadaa dan KecamatanBuntuliadengan total luas 449.82 KM2.

f. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Keberadaan Bank sangat menunjang daya saing ekonomi daerah. Untuk Kabupaten kondisi perbankan disajikan pada tabel 2.102.

Tabel 2.102.
Kondisi Perbankan di Kabupaten Pohuwato

Nama / Status Kantor	Pusat	Cabang	Capem	Unit	Jumlah
PEMERINTAH					
BRI	-	1	-	3	4
BNI	-	-	1	-	1
Mandiri	-	-	1	-	1
PEMBANGUNAN DAERAH					
Bank SulutGo	-	1	-	3	4
SWASTA					
Danamon	-	-	-	1	1
Muamalat	-	-	-	-	-
BTPN	-	1	-	-	1
Paro Dana	-	1	-	-	1
Mega Syariah	-		-	-	
BPR Ulam	-	1	-	-	1
Total		5	2	7	14
Thn 2019	**-**	***10***	**-**	***6***	***16***

*Sumber : **Pohuwato Dalam Angka 2019*

g. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran/Hotel

Salah satu sarana akomodasi penunjang dalam pengembangan pariwisata dan kegiatan ekonomi di daerahadalah hotel dan penginapan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sampai dengan tahun 2019, mencatat bahwa jumlah hotel/penginapan/losmen dan sejenisnya naik secara signifikan yaitu sejumlah 40 sertajumlah kamar sebanyak 361 kamar yang tersebar di 7 kecamatan.

Tabel 2.103.
Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Pohuwato

NO	NAMA HOTEL DAN PENGINAPAN	KEC	JUMLAHKAMAR
1	Marina Beach Resort	Marisa	13
2	Manggrove Eco Resort	Marisa	15
3	Hotel Grand Permai	Marisa	20
4	Hotel Golden Sri	Marisa	22
5	Penginapan Dimas	Marisa	6
6	Penginapan Ritz Colton	Marisa	7
7	Disitu Homestay	Marisa	5

8	Penginapan J & J Star	Marisa	10
9	Penginapan Pohuwato Indah	Marisa	16
10	Penginapan Multi	Marisa	8
11	Penginapan Selta	Marisa	12
12	Penginapan Rahmatia	Marisa	10
13	Penginapan Roja Bulalo	Marisa	9
14	Penginapan Panua	Marisa	9
15	Penginapan Mutiara	Duhiadaa	5
16	Hotel Tanjung	Duhiadaa	5
17	Hotel Winner	Duhiadaa	7
18	Hotel Irene I	Duhiadaa	38
19	Penginapan Miranti	Buntulia	25
20	Hotel Alfa New	Buntulia	26
21	Hotel Yuliani	Popayato	9
22	Hotel Isabela	Popayato	12
23	Penginapan Erzah	Lemito	5
24	Hotel Sarah	Popayato	9
25	Mess Pemda Torosiaje	Popayato	6
26	Losmen Torosiaje	Popayato	6
27	Rena Homestay	Popayato	3
28	Mutiara Laut Homestay	Popayato	3
29	Cottage Panua	Paguat	7
30	CottageLibuo	Paguat	19
31	Fauzan Homestay	Taluditi	1
32	Raka Homestay	Taluditi	1
33	Shirrabim Homestay	Taluditi	1
34	Kafa Homestay	Taluditi	1
35	Susi Homestay	Taluditi	1
36	Leha Homestay	Taluditi	4
37	Rifai Homestay	Taluditi	1
38	Hanafi Homestay	Taluditi	2
39	Agus Homestay	Taluditi	1
40	Widi Homestay	Taluditi	1
Total			**361**

Sumber :DinasPoraparbud, 2020

h. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas

mereka sehari-hari. Adapun perkembangan rumah tangga yang menggunakan air dapat dilihat pada grafik 2.30.

Grafik . 2.30.
Jumlah Pelanggan menurut Kecamatan

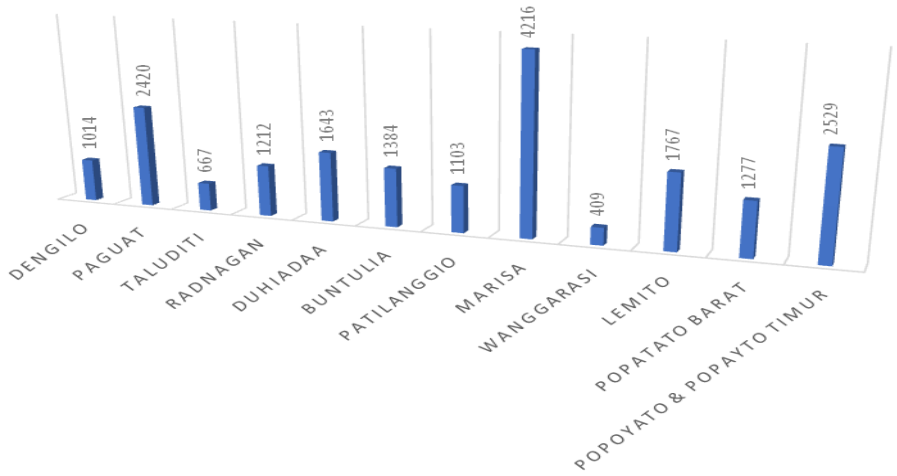

Sumber : BPS,2020

Untuk Kabupaten Pohuwato, kebutuhan air bersih sebagian besar dipenuhi oleh PDAM Tirta Maleo dengan jumlah air yang disalurkan mencapai 2.064.407 m^3.

i. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan listrik di KabupatenPohuwato dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui 7 unit distribusi yaitu Ranting Marisa, Sub Ranting Paguat, Sub Ranting Manunggal Karya, Sub Ranting Panca Karsa, Sub Ranting Iloheluma, Sub RatingLemito, Sub Ranting Molosipat dan Pembangik Listrik Tenaga Gas di KecamatanPaguat.

Berdasarkan data BPS 2020 bahwaPerusahaan Listrik Negara sejumlah103.459 kwh terpasangdenganjumlahproduksi 88.980.711 kwh.Secararincidisajikan pada tabel 2.104.

Tabel. 2.104.
Daya, Produksi dan Distribusi Listrik KabupatenPohuwato

Tahun	Daya Terpasang (Kwh)	Produksi (Kwh)	Terjual (Kwh)	Dipakai Sendiri (Kwh)	Susut (Kwh)
2015	36 555	69 532 410	58 075 256	41 719	11 415 435
2016	34 275	75 490 263	64 969 967	45 294	10 475 002
2017	30 280	78 943 318	69 173 909	47 366	9 722 043
2018	103 459	88 980 711	76 371 252	10 829	12 598 630

Sumber : BPS,2020

j. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Akses listrik kedesa dan kelurahan di Kabupaten pohuwato telah mencapai 100 persen. Sementara itu untuk akses kerumah tangga sudah mencapai 95 persen. Berikut jumlah pelanggan listrik per kecamatan tahun hingga 2020 disajikan pada tabel 2.105.

Tabel.2.105.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Pohuwato

Kecamatan	2016	2017	2018	2020
Popayato	2 056	2 196	2 307	2542
Popayato Barat	1 320	1 334	1 432	1935
Popayato Timur	1 258	1 534	1 632	2367
Lemito	2 351	2 335	2 449	1912
Wanggarasi	958	1 124	1 121	1267
Marisa	5 467	5 735	6 251	6395
Patilanggio	1 619	1 718	1 804	2304
Buntulia	2 202	2 358	2 540	3075
Duhiadaa	2 680	2 566	2 766	3194
Randangan	3 447	3 595	3 736	4423
Taluditi	1 854	1 947	2 013	2184
Paguat	3 523	3 504	3 985	4798
Dengilo	1 066	1 154	1 281	1822
Pohuwato	**29 801**	**31 130**	**33 308**	**38 218**

Sumber : BPS, 2020

k. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Untuk akses aringan telepon dan juga internet, seluruh desa/kelurahan di Kabuapten Pohuwato telah terakses. Dengan akses ini maka seluruh warga masyarakat dapat menggunakannya untuk berkomunikasi. Adapun persentase penduduk yang menggunkan HP/telepeon per kecmatan disajikan pada tabel 2.106.

Tabel 2.106.
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2020

No.	Kecamatan	JumlahPenduduk	JumlahPendudukMenggunakan HP	%
1	**Patilanggio**	**9.712**	**7.620**	**78,46**
	a. Manawa	2.153	1.714	79,61
	b. Dulomo	1.358	981	72,24
	c. Sukamakmur	1.458	1.177	80,73
	d. Iloheluma	2.410	2.004	83,15
	e. Dudepo	724	539	74,45
	f. Balayo	1.609	1.205	74,89
2	**Dengilo**	**5.762**	**5.116**	**88,79**
	a. Popaya	1.273	1.130	88,77
	b. Hutamoputi	1.415	1.215	85,87
	c. Karangetang	652	593	90,95
	d. Padengo	1.263	1.168	92,48
	e. Karya Baru	1.159	1.010	87,14
3	Wanggarasi	5.543	3.462	62,46
	a. Yipilo	1.049	716	68,26
	b. Wanggarasi	1.428	924	64,71
	Timur	1.074	738	68,72
	c. Limbula	458	212	46,29
	d. Bukit Harapan	569	326	57,29
	e. Tuweya	554	316	57,04
	f. Bohusami	411	230	55,96
	g. Lembah Permai			
4	Popayato Timur	8.471	5.615	66,28
	a. Kelapa Lima	613	450	73,41
	b. Milangodaa	1.523	820	53,84
	c. Londoun	1.343	940	69,99
	d. Tahele	1.484	1.020	68,73
	e. Marisa	1.354	880	64,99
	f. Maleo	1.251	925	73,94
	g. Bunto	903	580	64,23
5	Popayato Barat	7.649	4.750	62,10
	a. Dudewulo	1.683	1.150	68,33
	b. Butungale	1.071	604	56,40
	c. Tunas Jaya	384	420	109,38
	d. Padengo	998	564	56,51
	e. Persatuan	1.107	626	56,55
	f. Molosipat	1.212	734	60,56
	g. Molosipat Utara	1.194	652	54,61
6	Duhiadaa	17.933	11.752	65,53
	a. Bulili	2.678	1.037	38,72
	b. Buntulia	7.725	5.775	74,76
	Selatan	1.629	769	47,21
	c. Buntulia Jaya	2.186	1.801	82,39
	d. Buntulia Barat	1.545	915	59,22
	e. Duhiadaa	876	515	58,79
	f. Padengo	1.294	940	72,64
	g. Mekar Jaya	1.057	815	77,11
	h. Mootilango			
7	Randangan	8.940	5.278	59,04
	a. Sidorukum	825	500	60,61

	b. Pelambane	1.150	750	65,22
	c. Patuhu	1.360	820	60,29
	d. Motolohu	2.149	1.124	52,30
	e. Motolohu	878	420	47,84
	Selatan	1.414	914	64,64
	f. Huyula	1.164	750	64,43
	g. Siduwonge	1.139	660	57,95
	h. Imbodu	1.664	570	34,25
	i. Omayuwa	1.354	380	28,06
	j. Ayula	1.820	920	50,55
	k. Manunggal	1.148	540	47,04
	l. Banuroja	1.155	320	27,71
	m. Sarimurni			
8	Marisa	18.806	17.838	94,85
9	Paguat	14.450	9.914	68,61
	a. Pentadu	1.695	885	52,21
	b. Siduan	1.825	1.300	71,23
	c. Libuo	1.474	758	51,42
	d. Maleo	381	190	49,87
	e. Buhu Jaya	1.241	1.054	84,93
	f. Sipayo	1.621	1.091	67,30
	g. Soginti	1.590	1.431	90,00
	h. Bunuyo	1.245	955	76,71
	i. Bumbulan	1.755	995	56,70
	j. Kemiri	746	428	57,37
	k. Molamahu	877	827	94,30
10	Popayato	10.753	9.000	83,70
11	Buntulia	11.733	8.240	70,23
	a. Sipatana	1.394	1.012	72,60
	b. Buntulia	2.211	1.659	75,03
	Tengah	1.971	1.686	85,54
	c. Buntulia Utara	1.916	1.151	60,07
	d. Taluduyunu	1.410	650	46,10
	e. Taluduyunu	947	561	59,24
	Utara	1.884	1.521	80,73
	f. Karya Indah			
	g. Hulawa			
12	Lemito	13.283	7.594	57,17
	a. Babalonge	518	284	54,83
	b. Lomuli	2.716	1.696	62,44
	c. Kenari	1.294	702	54,25
	d. Lemito Utara	2.007	998	49,73
	e. Lemito	2.707	1.616	59,70
	f. Wanggarasi	1.402	794	56,63
	Barat	1.656	950	57,37
	g. Wanggarasi	983	554	56,36
	Tengah			
	h. Suka Damai			
13	Taluditi	7.057	4.969	70,41
	a. Panca Karsa 1	1.958	1.460	74,57
	b. Panca Karsa 2	1.351	842	62,32
	c. Malango	871	542	62,23
	d. Makarti Jaya	1.241	838	67,53
	e. Tirto Asri	715	610	85,31
	f. Kalimas	921	677	73,51
	g. Puncak Jaya	1.000	783	78,30

2.4.3. Sumber Daya Manusia

Kuatnya daya saing daerah salah satunya ditopang kuat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin berkualitas dan produktif SDM nya maka daerah tersebut juga semakin kuat dan maju.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Mata pencaharian yang menyerap dominan tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato adalah pertanian, perdagangan, IKM/UKM, buruh, dll. Sebagian besar pada sector ini kualitas tenaga kerjanya adalah tamat SMA sederajat. Selanjunya untuk kualitas tenaga ASN dilingkupngan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel 2.107.

Tabel 2.107.
Rasio Tenaga Kerja ASN

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	JmlLulusan S1	2170	1951	2147	2282	2206
2	JmlLulusan S2	95	68	70	71	62
3	JmlLulusan S3	0	0	0	3	4
4	Jumlah	2265	2019	2217	2356	2268
5	JumlahPenduduk	140.858	142.571	145.469	146.900	146.432
	Rasio	0,02	0,01	0,02	0,02	0.02

Sumber :Analisis Baperlitbang, 2020

Berdasarkan tabel 2.107 nampak bawa SDM ASN Pohuwato yang berpendidikan paska sarjana (S3 dan S2) masih sedikit. Sementara itu khusus yang fungsional Guru juga masih terdapat yang belum S1, demikian juga yang fungsional kesehatan. Kedepan hal ini menjadi priorita pemerintah daerah melalui kebijakan beasiswa, demikian juga dengan Pendidikan S2 dan S3 untuk profesi tertentu yang sangat dibutuhkan daerah dapat diprioritaskan.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan dimasa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) Tahun mendatang. Analisis keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu dibutuhkan realisasi keuangan daerah sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dasar yuridis pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Pohuwato mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato membuahkan Hasil opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 8 Tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2020.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil analisis kinerja pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, dalam kurun 5 (lima) tahun sebelumnya kapasitas fiskal Kabupaten Pohuwato berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Fiskal Daerah berada pada kategori rendah, namun dari rata-rata pertumbuhan pendapatan yang dapat dijadikan analisis proyeksi keuangan mengalami peningkatan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu menerapkan prinsip dan pendekatan norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien,

efektif, transparan dan dapat dipertangungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat bagi masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku mulai tahun anggaran 2021. Dimana APBD meliputi aspek pendapatan, belanja dan Pembiayaan. Pada aspek pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Aspek belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, sementara aspek pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1. Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 –2020 Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	**PENDAPATAN**	**850.328.082.944,00**	**834.555.268.718,00**	**924.940.297.080,40**	**996.284.671.188,00**	**989.132.017.642,40**
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**42.056.984.194,00**	**70.687.310.318,00**	**60.636.332.336,00**	**66.564.152.234,00**	**74.201.375.007,00**
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.433.582.027,00	8.916.490.833,00	9.291.490.833,00	10.977.490.833,00	11.143.760.798,00
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.399.872.167,00	8.469.070.000,00	8.219.670.000,00	9.142.603.200,00	7.467.727.000,00
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	1.300.000.000,00	3.095.980.220,00	3.685.000.000,00	3.800.000.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	24.823.530.000,00	52.001.749.485,00	40.029.191.283,00	42.759.058.201,00	51.789.887.209,00
1 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**802.213.935.000,00**	**759.843.587.000,00**	**839.032.271.000,00**	**902.601.434.104,00**	**880.341.494.400,00**
1 . 2 . 1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**716.122.933.000,00**	**652.636.066.000,00**	**711.185.232.000,00**	**758.384.805.900,00**	**730.575.882.000,00**
1 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak	11.906.016.000,00	11.138.236.000,00	10.389.302.000,00	10.086.823.900,00	7.679.939.000,00
1 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6.146.416.000,00	6.451.085.000,00	2.658.341.000,00	2.176.064.000,00	1.993.790.000,00
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU)	521.261.079.000,00	512.143.752.000,00	513.389.155.000,00	529.422.948.000,00	489.117.966.000,00
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	176.809.422.000,00	122.902.993.000,00	184.748.434.000,00	216.698.970.000,00	231.784.187.000,00
1 . 2 . 2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**68.150.002.000,00**	**87.766.521.000,00**	**106.147.039.000,00**	**120.987.917.000,00**	**120.319.701.000,00**
1 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian	68.150.002.000,00	87.766.521.000,00	106.147.039.000,00	120.987.917.000,00	120.319.701.000,00
1 . 2 . 3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**14.575.000.000,00**	**18.575.000.000,00**	**21.700.000.000,00**	**23.228.711.204,00**	**25.000.000.000,00**
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.575.000.000,00	18.575.000.000,00	21.700.000.000,00	23.228.711.204,00	25.000.000.000,00
1 . 2 . 4	**Bantuan Keuangan**	**3.366.000.000,00**	**866.000.000,00**	**0**	**0**	**4.445.911.400,00**
1 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	3.366.000.000,00	866.000.000,00	0	0	4.445.911.400,00
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.057.163.750,00**	**4.024.371.400,00**	**25.271.693.744,40**	**27.119.084.850,00**	**34.589.148.235,40**
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	6.057.163.750,00	4.024.371.400,00	25.271.693.744,40	27.119.084.850,00	34.589.148.235,40
2	**BELANJA**	**766.015.475.694,00**	**748.554.306.367,00**	**808.702.870.684,84**	**865.037.328.039,00**	**855.941.060.021,35**
2 . 1	**BELANJA OPERASI**	**561.512.075.257,00**	**586.886.867.477,00**	**625.329.568.629,92**	**665.480.989.757,00**	**653.015.295.841,09**
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	351.465.834.625,00	312.216.082.000,00	317.143.155.941,38	335.740.398.607,00	326.837.467.138,80
2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.232.108.433,00	219.726.549.938,00	282.550.797.688,54	301.828.521.150,00	265.655.312.258,29
2 . 1 . 5	Belanja Hibah	11.652.256.500,00	22.803.674.849,00	17.063.565.000,00	20.564.970.000,00	48.471.545.244,00

2 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	21.161.875.699,00	32.140.560.690,00	8.572.050.000,00	7.347.100.000,00	12.050.971.200,00
2 . 2	**BELANJA MODAL**	**204.003.400.437,00**	**160.867.438.890,00**	**182.523.302.054,92**	**199.116.338.282,00**	**186.159.904.880,26**
2 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	10.854.370.413,00	6.797.250.000,00	6.618.250.000,00	2.505.000.000,00	2.583.000.000,00
2 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.395.236.337,00	31.769.791.765,00	34.122.103.254,00	56.510.133.446,00	70.768.931.900,60
2 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.826.592.803,00	38.448.106.812,00	39.471.648.644,00	64.079.210.741,00	80.320.723.327,00
2 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.226.380.884,00	79.790.241.751,00	97.311.477.258,92	69.613.409.293,00	29.573.994.605,26
2 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.700.820.000,00	4.062.048.562,00	4.999.822.898,00	6.408.584.802,00	2.913.255.047,40
2 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**500.000.000,00**	**800.000.000,00**	**850.000.000,00**	**440.000.000,00**	**16.765.859.300,00**
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	800.000.000,00	850.000.000,00	440.000.000,00	16.765.859.300,00
2 . 3	**BELANJA TRANSFER**	**124.495.290.583,00**	**151.197.292.523,00**	**145.724.537.823,00**	**154.387.233.080,00**	**145.968.187.380,00**
2 . 3 . 1	**BELANJA BAGI HASIL PENDAPATAN**	**1.434.304.503,00**	**1.738.556.083,00**	**1.751.116.083,00**	**2.012.009.403,00**	**1.861.148.780,00**
2 . 3 . 1 . 1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	743.358.203,00	891.649.083,00	929.149.083,00	1.097.749.083,00	1.114.376.080,00
2 . 3 . 1 . 2	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	690.946.300,00	846.907.000,00	821.967.000,00	914.260.320,00	746.772.700,00
2 . 3 . 2	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**	**123.060.986.080,00**	**149.458.736.440,00**	**143.973.421.740,00**	**152.375.223.677,00**	**144.107.038.600,00**
2 . 3 . 2 . 1	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	122.184.293.200,00	148.691.001.000,00	143.205.686.300,00	151.599.339.302,00	144.107.038.600,00
2 . 3 . 2 . 2	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	876.692.880,00	767.735.440,00	767.735.440,00	775.884.375,00	0
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-40.182.683.333,00**	**-65.196.330.172,00**	**-29.487.111.427,44**	**-23.139.889.931,00**	**-12.777.229.758,95**
3	**PEMBIAYAAN**					
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**47.182.683.333,00**	**68.196.330.172,00**	**35.487.111.427,44**	**30.139.889.931,00**	**12.777.229.758,95**
3 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	47.182.683.333,00	68.196.330.172,00	35.487.111.427,44	30.139.889.931,00	12.777.229.758,95
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7.000.000.000,00**	0	0	0	**0**
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	**3.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**40.182.683.333,00**	**3.000.000.000,00**	**29.487.111.427,44**	**7.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**65.196.330.172,00**	**0,00**	**23.139.889.931,00**	**12.777.229.758,95**

Pendapatan Daerah tahun 2016 sebesar Rp 850.328.082.944,- dan pada tahun 2017 mengalami penurunann 1,85% diakibatkan oleh pemotongan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sehingga Pendapatan Daerah menjadi Rp 834.555.268.718,- untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan rata-rata 9,27% dan untuk pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,72% yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, penurunan tersebut pada pendapatan transfer pemerintah pusat.

Grafik Pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:

Grafik 3.1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

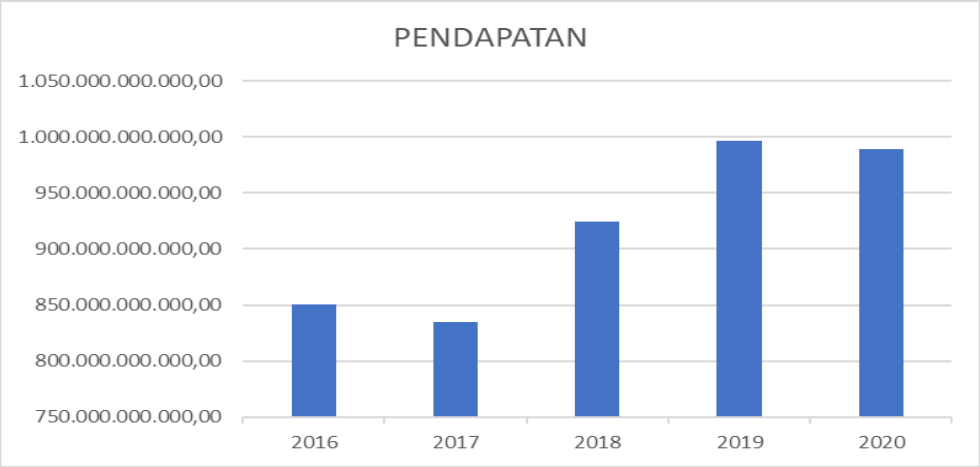

Sumber : BKD Pohuwato 2021

Belanja Daerah tahun 2016 sebesar Rp 766.015.475.694,- dan pada tahun 2017 mengalami penurun 2,28% terutama pada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Grafik Pertumbuhan belanja daerah dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:

Grafik 3.2. Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016-2020

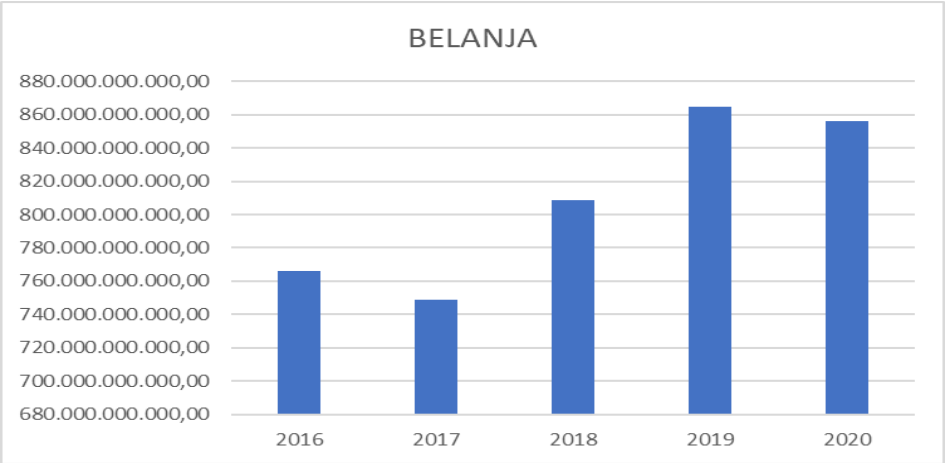

Sumber : BKD Pohuwato 2021

Pembiayaan Daerah tahun 2016 sebesar Rp 40.182.683.333,- dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 62,25% terutama pada penggunaan Silpa. Grafik Pertumbuhan pembiayaan daerah dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini :

Grafik 3.3. Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020

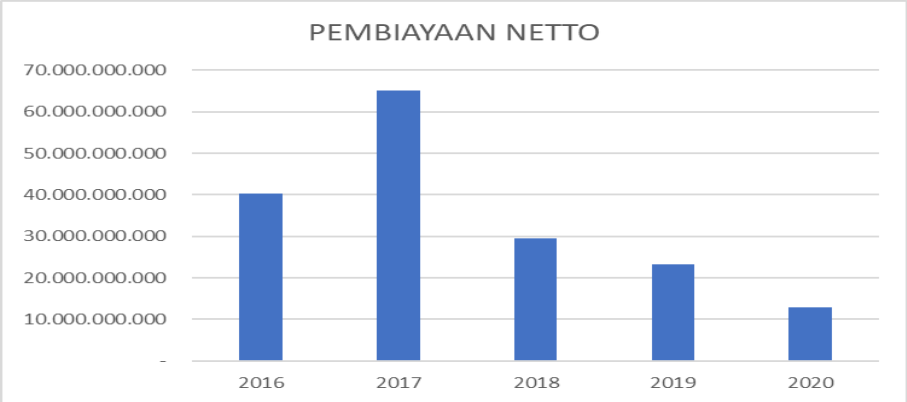

Sumber : BKD Pohuwato 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah disajikan untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang serta untuk mengulur kemampuan daerah dalam menggali potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, berikut kami sajikan rata-rata pertumbuhan neraca daerah

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN %
1	**ASET**	
1 . 1	**ASET LANCAR**	
1 . 1 . 1	Kas	-20,69
1 . 1 . 2	Piutang	37,07
	Beban dibayar dimuka	-16,21
1 . 1 . 3	Persediaan	40,40
	INVESTASI JANGKA PENJANG	68,60
1 . 2	**ASET TETAP**	
1 . 2 . 1	Tanah	10,34
1 . 2 . 2	Peralatan dan mesin	17,78
1 . 2 . 3	Gedung dan bangunan	13,14
1 . 2 . 4	Jalan, irigasi, dan jaringan	10,99
1 . 2 . 5	Aset tetap lainny	9,05
1 . 2 . 6	Konstruksi dalam pengerjaan	-4,94
1 . 2 . 7	Akumulasi penyusunan	16,70
1 . 3	**ASET LAINNYA**	
1 . 3 . 1	Tagihan penjualan angsuran	
1 . 3 . 2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	31,31
1 . 3 . 3	Kemitraan dengan pihak kedua	
1 . 3 . 4	Aset tak berwujud	35,96
1 . 3 . 5	Aset Lain-lain	21,63
	JUMLAH ASET DAERAH	
2	**KEWAJIBAN**	
2 . 1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	
2 . 1 . 1	Utang perhitungan pihak ketiga	15,50
2 . 1 . 2	Uang muka dari kas daeraH	
2 . 1 . 3	Pendapatan diterima dimuka	373,93
2 . 1 . 4	Dst	
3	**EKUITAS DANA**	**9,90**
3 . 1	**EKUITAS DANA LANCAR**	

Sumber : BKD Pohuwato 2021

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah melalui kebijakan fiscal. pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiscal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keinginan masyarakat dengan mewujudkan keseimbangan antara hak daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

3.2.1. Proporsi Pengganaan Anggaran

Rata-rata total belanja untuk pemenuhan aparatur dari totalpengeluaran yaitu belanja ditambah dengan pembiayaan pengeluaran sebesar 40,52%proporsi belanja kebutuhan aparatur yaitu belanja pegawai pada belanja operasi dari tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 53,40%.

Adapun proporsi penggunaan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pohuwato

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	2016	351.465.834.625,00	773.015.475.694,00	45,47
2	2017	312.216.082.000,00	751.554.306.367,00	41,54
3	2018	317.143.155.941,38	814.702.870.684,84	38,93
4	2019	335.740.398.607,00	872.037.328.039,00	38,50
5	2020	326.837.467.138,80	855.941.060.021,35	38,18

Sumber : BKD Pohuwato 2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yaitu penggunaan Silpa dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah

Tabel 3.4. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	862.253.451.273	822.153.886.288	904.691.929.792	970.534.277.246	955.946.119.926
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	766.015.475.694	748.554.306.367	808.702.870.685	865.037.328.039	855.941.060.021
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	-
	Defisit riil	**89.237.975.579**	**70.599.579.921**	**89.989.059.107**	**98.496.949.207**	**100.005.059.905**

Sumber : BKD Pohuwato 2021

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa pada sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat defisit anggaran, Selanjutnya Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pohuwato tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.5 berikut. Berdasarkan tabel 3.5 tersebut nampak bahwa untuk SILPA tahun 2016 s/d tahun 2020 terus mengalami penurunan artinya semakin baik. Tercatat juga selama lima tahun tersebut pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato belum pernah melakukan pinjaman daerah.

Tabel 3.5. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	40.182.683.333	65.196.330.172	29.487.111.427	23.139.889.931	12.777.229.758
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	543.314.000	205.897.000	-	128.622.489	75.571.499
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : BKD Pohuwato 2021

Selanjutnya pada tabel 3.6 disajikan realisasi SILPA Kabupaten Pohuwato dimana sejak tahun 2016 s/d 2020 rata-rata 100 persen terealisasi. Juga naampak terjadi pelampauan PAD pada tahun 2016 hingga tahun 2018.

Tabel 3.6. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa
1	Jumlah SiLPA	68.196.330.172	100	35.487.111.427	100	30.143.013.378	100	12.777.229.758	100	11.843.975.866	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	17.791.475.350	26,09	3.624.447.668	10,21	3.589.214.755	11,91	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	2.324.732.318	6,55	823.610.570	2,73	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	7.697.064.961	11,29	2.659.371.218	7,49	1.704.624.596	5,66	2.725.535.487	21,33	7.204.223.273	60,83
7	Kegiatan lanjutan	7.951.761.846	11,66	2.213.909.201	6,24	1.539.775.153	5,11	2.358.208.704	18,46	4.605.400.444	38,88

3.3. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis arah kebijakan perekonomian, tantangan dan prospek ekonomi serta hasil analisis kondisi keuangan daerah kedepan, maka

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

proyeksi Pendapatan/pendanaan pembangunan untuk 5 (lima) Tahun kedepan kenaikannya diperkisar 5 Persen. Hal ini karena semua upaya pemerintah daerah mulai dari pusat hingga daerah focus pada penanganan covid 19 yang diperkirakan dampaknya hingga 5 tahun kedepan sehingga sumber-sumber pendapatan negara dan daerah belum optimal.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dapat diproyeksikan melalui optimalisasi obyek-obyek pajak dan retribusi daerah berupa:

1. Penggunaan elektronifikasi obyek pajak hotel dan restoran/ rumah makan. Saat ini pemerintah daerah telah bekerjasama dengan lembaga keuangan perbankan dengan menempatkan alat perekaman transaksi (EDC) pada obyek pajak hotel/penginapan dan restoran/rumah makan. Dalam mengoptimalkan sumber pendapatan tersebut pemerintah daerah akan terus menambah alat perekaman dimaksud. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah aktif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dimaksud.
2. Melakukan peninjauan kembali beberapa nilai jual objek pajak reklame yang telah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah yang ada.
3. Melaksanakan pendetailan zona nilai tanah yang akan digunakan untuk menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam penetapan besaran target pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

4. Optimalisasi pemungutan pajak sarang walet dengan mendatangkan eksportir yang akan meningkatkan nilai jual petani serta dapat mengendalikan penjualan ilegal.
5. Peningkatan pendapatan retribusi daerah melalui penggunaan Elektronifikasi retribusi daerah pada objek retribusi pasar, retribusi tempat pelelangan ikan.
6. Penambahan penempatan dana pemerintah (penyertaan modal) pada lembaga keuangan yang dapat meningkatkan pendapatan derah melalui pendapatan bagian laba.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2022 sampai dengan 2026 dapat di lihat pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel.3.7. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 – 2026

KODE	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
4	**PENDAPATAN**	**894.266.540.577,00**	**976.769.512.568,85**	**1.036.712.452.407,29**	**1.088.548.075.027,66**	**1.142.975.478.779,04**	**1.200.124.252.717,99**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**72.592.330.198,00**	**75.995.694.409,65**	**79.795.479.130,13**	**83.785.253.086,64**	**87.974.515.740,97**	**92.373.241.528,02**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	11.143.760.798,00	11.526.365.374,65	12.102.683.643,38	12.707.817.825,55	13.343.208.716,83	14.010.369.152,67
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.309.524.220,00	9.599.733.360,00	10.079.720.028,00	10.583.706.029,40	11.112.891.330,87	11.668.535.897,41
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.869.250.000,00	4.062.712.500,00	4.265.848.125,00	4.479.140.531,25	4.703.097.557,81
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	50.339.045.180,00	51.000.345.675,00	53.550.362.959	56.227.881.106,69	59.039.275.162,02	61.991.238.920,12
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**794.147.825.000**	**890.198.137.959,20**	**945.812.509.067,16**	**993.103.134.520,52**	**1.042.758.291.246,54**	**1.094.896.205.808,87**
4 . 2 . 1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**661.740.047.000**	**738.770.678.345**	**775.709.212.262**	**814.494.672.875**	**855.219.406.519**	**897.980.376.845**
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak	9.257.157.000	10.591.165.095,00	11.120.723.349,75	11.676.759.517,24	12.260.597.493,10	12.873.627.367,75
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.613.634.000	2.284.867.200,00	2.399.110.560,00	2.519.066.088,00	2.645.019.392,40	2.777.270.362,02
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU)	480.943.263.000	555.894.095.400,00	583.688.800.170,00	612.873.240.178,50	643.516.902.187,43	675.692.747.296,80
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	169.925.993.000	170.000.550.650,00	178.500.578.182,50	187.425.607.091,63	196.796.887.446,21	206.636.731.818,52
4 . 2 . 2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**132.407.778.000**	**127.037.312.850,00**	**133.389.178.492,50**	**140.058.637.417,13**	**147.061.569.287,98**	**154.414.647.752,38**
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian	132.407.778.000	127.037.312.850,00	133.389.178.492,50	140.058.637.417,13	147.061.569.287,98	154.414.647.752,38
4 . 2 . 3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**20.000.000.000**	**24.390.146.764,20**	**25.609.654.102,41**	**26.890.136.807,53**	**28.234.643.647,91**	**29.646.375.830,30**
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000.000	24.390.146.764,20	25.609.654.102,41	26.890.136.807,53	28.234.643.647,91	29.646.375.830,30
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**27.526.385.379,00**	**10.575.680.200,00**	**11.104.464.210,00**	**11.659.687.420,50**	**12.242.671.791,53**	**12.854.805.381,10**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah		10.575.680.200,00	11.104.464.210,00	11.659.687.420,50	12.242.671.791,53	12.854.805.381,10
5	**BELANJA**	**747.570.178.997,00**	**814.662.917.835,10**	**866.500.527.936,46**	**909.936.466.408,80**	**964.208.046.146,24**	**1.021.193.201.516,30**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**619.444.407.210**	**602.336.108.244,00**	**651.616.631.950,00**	**683.570.883.369,38**	**711.781.810.020,09**	**741.374.149.002,60**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	333.227.112.621	335.250.455.750,00	352.012.978.537,50	369.613.627.464,38	388.094.308.837,59	407.499.024.279,47
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.384.592.345	248.788.950.250,00	261.228.397.762,50	285.750.255.650,00	300.037.768.432,50	315.039.656.854,13
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	15.796.702.244	15.796.702.244,00	35.750.255.650,00	25.450.750.255,00	20.755.670.250,00	15.796.702.244,00

5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	36.000.000	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**117.625.771.787,00**	**202.326.809.591,10**	**204.493.411.049,46**	**216.034.661.689,43**	**240.699.285.776,14**	**266.488.102.163,70**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	1.880.000.000	10.591.638.894,00	8.100.000.000,00	8.505.000.000,00	8.930.250.000,00	9.376.762.500,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.538.445.996	39.755.650.250,00	41.743.432.762,50	43.830.604.400,63	46.022.134.620,66	48.323.241.351,69
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.600.089.381	49.550.250.755,00	52.027.763.292,75	54.629.151.457,39	57.396.275.650,00	60.266.089.432,50
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.339.519.310	95.700.255.650,00	95.556.750.250,00	101.651.167.850,00	120.560.950.625,00	140.342.850.255,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.267.717.100	6.729.014.042,10	7.065.464.744,21	7.418.737.981,42	7.789.674.880,49	8.179.158.624,51
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**10.500.000.000**	**10.000.000.000,00**	**10.390.484.937,00**	**10.330.921.350,00**	**11.726.950.350,00**	**13.330.950.350,00**
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000,00	10.390.484.937,00	10.330.921.350,00	11.726.950.350,00	13.330.950.350,00
6	**TRANSFER**	**146.696.361.580,00**	**162.106.594.734,00**	**170.211.924.470,70**	**178.611.608.675,90**	**178.767.429.851,72**	**178.931.042.086,33**
6 . 1	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**1.861.148.780**	**2.112.609.873,15**	**2.218.240.366,81**	2.218.240.366,81	2.329.152.385,15	2.445.610.004,41
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.861.148.780	1.152.636.537,15	1.210.268.364,01	1.270.781.782,21	1.334.320.871,32	1.401.036.914,88
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		959.973.336,00	1.007.972.002,80	1.058.370.602,94	1.111.289.133,09	1.166.853.589,74
6 . 2	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**144.835.212.800**	**159.993.984.860,85**	**167.993.684.103,89**	**176.393.368.309,09**	**176.438.277.466,57**	**176.485.432.081,92**
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	144.835.212.800	159.179.306.267,10	167.138.271.580,46	175.495.185.159,48	175.495.185.159,48	175.495.185.159,48
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	814.678.593,75	855.412.523,44	898.183.149,61	943.092.307,09	990.246.922,44

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 3.8. berikut ini :

Tabel 3.8. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	976.769.512.568	1.036.712.452.407	1.088.548.075.027	1.142.975.478.779	1.200.124.252.717
2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
3	SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	TOTAL PENERIMAAN	**1.001.769.512.568**	**1.061.712.452.407**	**1.113.548.075.027**	**1.167.975.478.779**	**1.225.124.252.717**
	DI KURANGI :					
4	BELANJA TIDAK LANGSUNG	335.250.455.750	352.012.978.537	369.613.627.464	388.094.308.837	407.499.024.279
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	**666.519.056.819**	**709.699.473.870**	**743.934.447.563**	**779.881.169.941**	**817.625.228.439**

Sementara itu untuk penghitangan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 5 (lima) tahun kedepan dikurangi dengan prioritas I dan Prioritas II disajikan pada Tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	666.519,05	709.699,47	743.934,44	779.881,16	817.625,22
	PRIORITAS I	229.800,00	230.100,00	230.200,00	230.300,00	230.300,00
	PRIORITAS II	329.700,00	341.900,00	331.300,00	379.200,00	384.200,00

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan pada bab ini adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara detil permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :

4.1.1. Kesehatan

Posisi kabupaten Pohuwato yang sangat strategis, menjadi jalan poros utama lintas Sulawesi, terdapat dua pelabuhan yakni pelabuhan Samudra dan pelabuhan penyeberangan yang berada di kecamatan Paguat. Disamping itu terdapat 1 pelabuhan swasta juga di Kecamatan Paguat dan satu lagi akan dibangun ditahun 2022 di kecamatan Popayato. Juga ditargetkan pada tahun 2023 Bandara Udara Pohuwato akan beroperasi yang terdapat di Kecamatan Randangan. Dari kacamata kesehatan semua ini berpotensi terhadap masuknya berbagai macam penyakit menular, seperti covid 19 yang hingga tahun 2021 belum ada indikasi untuk segera berakhir.

Permasalahan covid 19 hingga saat ini masih menjadi momok dan berdampak pada perekonomian daerah Kabupaten Pohuwato. Hingga tanggal 6 Mei 2021 terdapat 6 orang kasus positif, 288 orang sembuh, 6 orang meninggal, total kasus sebanyak 301 orang. Upaya pemerintah daerah terus melaksanakan penegakan protokol kesehatan bahkan sudah didukung dengan peraturan daerah, namun demikian masyarakat mulai banyak yang tidak teralalu menggubris terkait prokes ini, utamanya pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Sementara itu untuk pelaksanaan vaksin belum berjalan sesuai harapan karena

ketersediaan vaksin juga yang masih terbatas. Dari target 108.191 yang akan divaksin, baru sekitar 6000 yang telah terealisasi hingga Mei 2021. Dengan demikian dukungan operasional pelaksanaan vaksin masih akan menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kurun 1 – 2 tahun kedepan.

Topografi daerah Pohuwato yang berada dipesisir dan cenderung banyak rawa serta sering terjadi genangan pada musim hujan sangat rentan dengan penyakit deman berdarah. Tercatat penyakit ini sering muncul kasusnya setiap tahun, utamanya pada musim hujan.

Permasalahan kesehatan penyelesaiannya diukur dalam 4 indikator utama yakni angka harapan hidup, angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta stunting. Pada bab II perkembangan kasusnya dapat dilhat untuk lima tahun terkahir, dimana secara umum usia harapan hidup Kabupaten Pohuwato masih berada diurutan 5 dari 6 Kab/Kota di Provinsi Gorontalo dan masih terdapat kasus kematian ibu dan kematian bayi. Untuk stunting, sejak ditetapkan menjadi lokus tahun 2019, terjadi kemajuan dalam pencapaiannya dimana pada tahun 2019 sudah dibawah 10 persen, dan hal ini akan terus dipacu dan diturunkan kedepan.

Derajat kesehatan masyarakat belum optimal disebabkan beberapa aspek yakni :

- Masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga

  Rendahnya kualitas kesehatan keluarga tercermin dari prilaku hidup bersih dan sehat yang belum maksimal dan masih terdapatnya kasus-kasus bayi stunting. Stunting salah satunya disebabkan oleh kebersihan lingkungan

termasuk didalamnya lingkungan rumah yang belum baik, belum berjamban dan pola asuh anak yang belum tepat.

- Infrastruktur dan SDM Kesehatan yang belum merata

  Secara umum Ketersediaan infrastruktur kesehatan sebagaimana disajikan di bab II, terdapat 2 RSUD yakni Rumah Sakit Bumi Panua dan Satu Rumah Sakit Pratama dibangun tahun 2020 dan diperkirakan beroperasi tahun 2021. Sementara itu terdapat 16 Puskesmas, 8 puskes telah direvitalisasi pembangunannya sehingga menjadi lebih sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sisa 8 puskes lagi yang masih membutuhkan revitalisasi. Revitalisasi puskesmas dan penyempurnaan kebutuhan infrastruktur ini menjadi prioritas penanganan kedepan.

  Dari aspek SDM kesehatan, untuk RSUD Bumi Panua sebagian besar sudah terpenuhi, hingga tahun 2021 telah terdapat 11 dokter spesialis. Hanya permasalahan di RSUD adalah luas lahan yang sudah sempit sehingga penambahan bangunan sudah sulit kecuali konsep pembangunan vertical (dua hingga tiga lantai). Sementara itu untuk Rumah Sakit Pratama masih Gorontalo Barat membutuhkan penambahan gedung penunjang dan lebih utama lagi pemenuhan tenaga medis dan non medis. Tahun ini struktur organisasi akan difinalkan dan mengidentifikasi petugas-petugas yang akan ditugaskan ditempat ini serta merekrut tenaga sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, agar rumah sakit ini segera bermanfaat untuk masyarakat.

  Selanjutnya permasalahan SDM kesehatan di 16 Puskesmas umumnya belum terpenuhi sesuai kebutuhan. Tahun ini sudah dilaksanakan evaluasi

kebutuhan SDM berbagai formasi yang kosong telah disepakati dengan badan kepegawaian untuk dibuka formasi tahun-tahun kedepan. Kebutuhan dokter diseluruh puskesmas belum terpenuhi secara permanen, bahkan untuk hal ini pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan beasiswa satu dokter satu kecamatan sejak tahun 2016 hingga 2021. Tahun 2021 target 13 orang beasiswa ini telah terpenuhi, sebingga untuk periode pemerintahan 2021 – 2026 tinggal menyempurnakan lagi ke tambahan studi 2 tahun Bahkan kedepan kebijakan ini akan diteruskan dengan tujuan agar kebutuhan dokter benar-benar terpenuhi dari warga masyarakat setempat sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan dokter dipuskesmas. Karena permasalahan yang selama ini dihadapi adalah para dokter yang ditempatkan, utamanya di daerah yang terpencil kurang betah dan mudah pindah tugas ke tempat asalnya. Selain rekrutmen, peningkatan kapasitas SDM kesehatan secara rutin setiap tahunnya juga perlu dilaksanakan agar kinerja pelayanan semakin baik kedepan.

- Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan

  Permasalahan layanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin melalui BPJS belum optimal dilakukan. Disamping permasalahan data warga miksin yang cukup kompleks permasalahannya mulai dari tidak adanya NIK yang sebagian besar disebabkan status perkawainan, juga kemampun keuangan daerah untuk membiayai seluruh warga miskin yang terdapat di DTKS hingga tahun 2020 sekitar 18.682 Rumah Tangga, yang terakomodir pada BPJS baru sekitar 60 persen. Kedepan pemerintah daerah akan berupaya untuk terus meningkatkan

kepersertaan warga masyarakat dalam BPJS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.1.2. Pendidikan

Jika dilihat dari capaian Indkes Pembangunan Manusia (IPM) hingga tahun 2020 pada angka 63,37 sebagaimana tersaji pada bab II. Setiap tahun terdapat peningkatan namun masih sangat rendah, belum signifikan dan dengan kondisi ini rangking IPM Kabupaten Pohuwato masih berada di rangking 5 dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam dunia Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah masih rendah

   Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pohuwato sebagaimana pada bab II grafik 2.17, tahun 2020 berada pada angka 7,12 tahun, artinya sebagian besar masyarakat pohuwato hanya lulusan sekolah dasar. Tentu hal ini sangat terkait dengan kondisi kemampuan masyarakat, kesadaran pentingnya pendidikan dan akses terhadap pendidikan. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan gratis, ditambah dukungan beasiswa bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berprestasi serta dukungan regulasi Pendidikan wajib 12 tahun, diharapkan kedepan angka rata-rata lama sekolah ini akan terus membaik.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) level PAUD/TK dan SMP Sederajat rendah

   Perkembangan APM disemua level Pendidikan menjadi salah satu indikator kinerja utama sektor Pendidikan. Perkembangan APM sebagaimana disajikan di Bab II tabel 2.40 nampak bahwa untuk APM SMP Sederajat mengalami penurunan dibanding tahun 2019 bahkan capaiannya dibawah 70

persen, sangat jauh dari target nasional pada angka 90 persen. Semnetara itu untuk Sekolah TK capaian APM nya masih pada angka 51 persen. Hal ini masih jauh dari harapan dan target nasional. Untuk APM SD Sederajat tinggal dipertahankan capaiannya setiap tahun.

Terkait APM yang masih rendah, beberapa aspek penyebabnya yakni :

- Tingkat Kesadaran Orang Tua

  Untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) dari aspek ketersediaan sekolah sudah cukup merata, hingga tahun 2020 terdapat 104 STK Negeri dan Swasta dan 7 Sekolah Raudatul Athfal (RA). Sebagian besar orang tua belum memasukkan anaknya ke jenjang ini karena faktor kesadaran dan juga faktor ekonomi.

  Sementara itu pada level SMP Sederajat, permasalahannya demi kepentingan pemenuhan ekonomi kadang orang tua setelah anaknya lulus sekolah SD sederajat, tidak lagi melanjutkan ke SMP, sebagian besar dipanggil membantu pekerjaan di kebun. Kadang juga terjadi sebaliknya, karena anak tidak tega lihat orang tuanya kerja sendiri, mereka memilih membantu orang tua dari pada melanjutkan pendidikan. Hingga tahun 2020 terdapat 32,44 persen anak usia 7 – 24 tahun yang tidak berskolah lagi (Bab II, tabel 2.42). Dengan adanya kondisi ini, maka sosialisasi, edukasi dan komunikasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan bahkan perlu ada regulasi yang memaksa bagi para orang tua untuk memenuhi hak pendidikan anaknya. Kebijakan ini juga akan paralel dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor pertanian dan perikanan.

- Akses Pendidikan

  Seluruh janjang pendidikan mulai dari level STK hingga SMA/SMK sederajat sudah berada di Kabupaten Pohuwato dan tersebar merata di 13 Kecamatan. Namun diakui jarak sekolah dari tempat domisili siswa masih ada yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya-biaya transportasi. Selain itu bantuan seragam dan perlengkapan sekolah masih dibutuhkan kedepan, khusus bagi warga miskin

- Manajemen mutu Pendidikan

  Peningkatan mutu Pendidikan ditentukan kualitas guru, sarana dan prasarana pendukung. Untuk para Guru, kualifikasi Pendidikan agar terus ditingkatkan. Demikian juga dengan tenaga non kependidikan. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan diupayakan dicapai sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

3. Masih rendahnya prestasi generasi muda dan olahraga

   Generasi yang berprestasi disegala bidang merupakan target utama dalam pembangunan kepemudaan. Prestasi akan muncul ketika seluruh komponen yang menunjangnya tersedia dan dimanfaatkan secara baik. Beberapa aspek yang menjadi penyebab rendahnya prestasi generasi muda yakni :

   1. Kurangnya pembinaan

      Organisasi kepemudaan di Kabupaten Pohuwato cukup berkembang dengan baik, akan tetapi kurangnya pembinaan dalam kompetensi tertentu sehingga belum bisa bersaing ditingkat regional bahkan nasional.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

   Banyak pemuda yang memiliki bakat dibidang kesenian, teknologi informasi, olahraga, keterampilan tertentu, tetapi karena belum didukung dengan prasarana memadai sehingga belum bisa berkembang dengan baik. Keberadaan gedung kesenian di Kabupaten belum ada hingga saat ini, kelembagaannya pun baru terbentuk tahun 2021 dan belum bisa eksis dengan baik. Prasarana olah raga belum merata disetiap Kecamatan, pembinaannya pun belum optimal sehingga belum bisa mengantarkan Pohuwato tampil secara baik diberbagai ivent olahraga.

4. Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan

   Membaca adalah pintu utama kecerdasan, dengan membaca kita akan selalu mendapatkan pengentahuan dan informasi yang baru. Salah satu fasilitas yang mendukung untuk kegiatan membaca tersebut adalah keberadaan perpustakaan. Prasarana perpustakaan di Kabupaten, Desa/Kelurahan dan sekolah-sekolah umumnya sudah ada, namun belum berfungsi dengan baik. Penyebabnya adalah manajemen pengelolaan perpustakaan yang belum baik dan belum disesuaikan dengan kondisi diera teknolgi informasi saat ini. Selain itu kurangnya buku-buku yang sesuai dengan jenis kebutuhan masyarakat sehingga mereka tidak berminat untuk membacanya. Sosialisasi terkait fungsi perpustakaan harus terus menerus dilakukan.

4.1.3. Kebudayaan

Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya Kabupaten Pohuwato dikenal dengan daerah adat dengan motto **adat bersandikan sara' dan sara' bersandikan alquran**. Pada praktek kehidupan sosial masyarakat sehari-hari kegiatan adat ini

sudah menjadi budaya, mulai dari proses perkawinan, pembeatan, penyelenggaraan jenazah, dll. Dari kegiatan keagamaan sangat nampak pada peringatan hari-hari besar islam. Permasalahan utama pada aspek kebudayaan ini adalah regenerasi. Sebagian besar petugas adat dan pelaku budaya saat ini adalah generasi yang sudah uzur, kaum millennial kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan ini. Kesenian-kesenian yang bernafaskan budaya lokal juga sudah kurang berkembang, vestipal-vestipal keseniah daerah sudah jarang dilakukan, sehingga berpengarauh terhadap pudarnya budaya lokal daerah. Pengintegrasian ivent budaya dengan pariwisata akan lebih efektif dilaksanakan kedepan.

Dari aspek cagar budaya, salah satu kecamatan yang menjadi kedudukan pemerintahan Belanda dulu sekitar tahun 1800 san adalah Kecamatan Paguat yang dikenal dengan Kota Tua. Ditempat ini banyak terdapat bangunan-bangunan kuno yang hingga saat ini belum ditetapkan menjadi cagar budaya daerah. Letak kecamatan Paguat yang berada dalam kompleks Pelabuhan cocok dikembangkan menjadi salah satu destinasi budaya dengan bangunan kuno tersebut.

4.1.4. Kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama berdirinya sebuah daerah otonom. Pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu daerah diukur melalui pencapaian indikator makro pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, kemiskinan, gini ratio, pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato sebagaimana pada bab II grafik 2.7 nampak bahwa sejak tahun 2016 s/d 2019 terjadi perlambatan,

selanjutnya tahun 2020 mengalami kontraksi tinggi jatuh pada angka -0,18 persen. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab hal ini yakni :

- Investasi yang belum beroperasi maksimal

  Perkembangkan investasi tidak maksimal karena dari 17 investasi yang sudah masuk ke Pohuwato (tabel 2.8 bab II) terdapat sembilan investor yang hingga tahun 2021 belum berjalan maksimal, sehingga tidak memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi daerah. Belum berjalan maksimal karena ada yang dilanda konflik internal organisasi, ada yang karena prodaknya (sawit) tertolak dipasaran international.

- Produksi pertanian yang masih rendah

  Pertanian jagung merupakan komoditi unggulan dan strategis daerah karena sekitar 50 persen masyarakat berada dalam jenis pekerjaan ini. Namun dikondisi 5 tahun terakhir, produksi jagung cenderung statis sebagaimana tersaji di bab II tabel 2.17 dimana tahun 2020 dengan luasan tanam 84.654 ha produksi yang dicapai sebesar 429.265,19 atau hanya 5,1 ton per ha. Capaian ini sangat rendah bila dibanding dengan potensi produksi bibit jagung hibrida 8 – 10 ton pe ha yang selama ini dibagikan kepada masyarakat petani. Kondisi yang sama pula terjadi pada komoditi padi, buah-buahan dan tanaman perkebunan lainnya. Penyebab utama hal ini adalah berkurangnya unsur hara tanah dan sistem pertanian yang masih tradisional. Sehingga gerakan pertanian kedepan agar lebih fokus pada Gerakan rehabilitasi kesuburan tanah dengan pupuk organik.

  Selanjutnya rendahnya produktivitas pertanian utamanya jenis tanaman pangan juga akan berpengaruh pada ketahanan pangan daerah. Kurangsnya

stok pangan ini juga berdampak pada kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas pangan daerah, apalagi masih terdapat sekitar 21 desa yang masih masuk dalam status desa rawan pangan.

- Pengembangan peternakan yang masih tradisional

  Untuk komoditi peternakan, pengembangannya sangat menjanjikan di Kabupaten Pohuwato, karena disamping lahan masih luas, makanan yang bersumber dari limbah pertanian juga banyak. Pada bab II tabel 2,23 nampak bahwa peternakan sapi merata diseluruh kecamatan, kemudian kambing kecuali di kec. Buntulia dan ternak babi kecuali di 4 kecamatan. Permasalahan utama pengembangan peternakan tersebut adalah sistem pemeliharaan yang masih tradisional, masih lebih banyak dilepas di alam sehingga perkembangannya pun lambat. Sementara itu, untuk ternak unggas, ternak ayam kampung yang merata dikembangkan diseluruh kecamatan, namun masih juga dengan sistem tradisional. Beberapa kecamatan telah mengembangan ayam petelur secara peternakan modern. Sedangkan untuk ayam pedaging belum ada dikembangkan. Pada ternak itik juga kondisi tidak jauh beda sistem pemeliharaannya sehingga belum memberikan tambahan pendapatan signifikan kepada peternak.

- Produksi Perikanan belum maksimal

  Kabupaten Pohuwato berada dalam Kawasan Teluk Tomini Pulau Sulawesi dan dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada dalam Kawasan pesisir Teluk Tomini dengan panjang pantai 165 Km. Pencapaian pembangunan perikanan diukur dari peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya.

Untuk perikanan tangkap sebagaimana tersaji pada bab II tabel 2.25 nampak bahwa hingga tahun 2020 sebesar 26.148 ton yang dihasilkan oleh 2.364 Rumah Tangga Perikanan (RTP). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa produksi per rumah tangga setiap bulan sekitar 93 Kg. Bila setiap Kg ikan dihargai maksimal Rp. 50.000 maka rata-rata pendapatan kotor rumah tangga perikanan perbulan sebesar Rp. 4.650.000. Pendapatan sudah cukup tinggi dan sudah melampaui garis kemiskinan Kabupaten Pohuwato yang berada pada angka 1,2 jutaan per RT. Namun pendapatan ini tidak selalu stabil, sangat ditentukan oleh cuaca di laut setiap tahunnya. Disamping itu juga sangat ditentukan oleh peralatan dan perlengkapan penangkap ikan yang dimiliki nelayan. Selain itu pengawasan belum optimal sehingga Praktek illegal fishing masih terjadi dan hal ini secara jangka panjang berdampak terhadap ekosistem terumbu karang dan menurunya stok ikan di Teluk Tomini.

Pada perikanan budidaya, sebagaimana pada tabel yang sama, jumlah produksi tahun 2020 mencapai 21.687 ton, menurun jika dibandingkan produksi tahun 2018 dan 2019. Permasalahan pada perikanan budidaya ini khususnya untuk budidaya air payau sebagian besar adalah budidaya ikan bandeng dan udang yang memanfaatkan sumber daya pesisir Pohuwato dimana ditempat itu tumbuh hutan mangrove. Masifnya kegiatan pertambakan ini, menjadi penyebab banyak ekosistem mangrove yang rusak sehingga berdampak pada berkurangnya tempat pemijahan ikan dan pemasok oksigen. Teknik budidaya yang tidak mengindahkan lingkungan menjadi permasalahan utama dalam pengembangan perikanan budidaya ini.

Sementara itu untuk pengembangan perikanan budidaya, perikanan terapung seperti budidaya taripang, budidaya ikan nila salinitas, budidaya ikan kerapu, dll belum menjadi budaya nelayan sehingga belum berkembang dengan baik.

- Pemanfaatan sumber daya hutan belum maksimal

  Tutupan lahan di Kabupaten Pohuwato sekitar 70 persen adalah kawaasan hutan sebagaimana tersaji pada bab II tabel 2.31. itulah sebabnya daerah ini memiliki banyak jenis flora dan fauna, beberapa diantaranya adalah endemic dan dilindungi pemerintah. Potensi kehutanan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah madu, rotan, dll. Permasalahan utama diaspek kehutanan ini adalah tingginya tingkat kerusakan hutan, baik pada hutan lindung maupun hutan konservasi. Penyelesaian kerusakan ini semakin rumit karena level kewenangan yang berbeda-beda, dimana untuk hutan lindung menjadi kewenangan provinsi sementara untuk cagar alam kewenagan instansi vertikal. Selanjutnya untuk areal penggunaan lain adalah kewenangan kabupaten. Untuk mengatasi persoalan ini maka kolaborasi antar instansi, lembaga vertical serta lembaga dan badan non-pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Pohuwato menjadi penting dilakukan.

  Kerusakan hutan juga ini telah berdampak pada kejadian banjir yang melanda setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen KLHS tahun 2021, Beberapa kejadian banjir di Kabaupten Pohuwato yakni :

  1. Tanggal 19 September 2020, banjir menerjang 4 kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Buntulia dan Patilanggio. Akibat banjir tersebut, sebanyak 2.874 jiwa atau 940 kepala keluarga (KK) terdampak. Rinciannya Desa Manawa, Patilanggio 54 KK/198 jiwa dan Desa

Sipatana, Buntulia sebanyak 100 KK/244 Jiwa. Untuk Kecamatan Duhiadaa ada tiga desa terdampak banjir yakni Desa Buntulia Barat sebanyak 44 KK/185 jiwa, Desa Buntulia Jaya 40 KK/195 jiwa, dan Desa Buntulia Selatan 381 KK/904 jiwa. Sementara Kecamatan Marisa terdapat dua desa terdampak banjir yakni Desa Botubilotahu 70 KK/253 jiwa dan Desa Teratai 251 KK/895 jiwa.

2. Tanggal 16 Juni 2019, banjir melanda 4 kecamatan yaitu: Paguat, Wonggarasi, Taluditi dan Patilanggio. Total warga yang terdampak mencapai 1270 jiwa
3. Tanggal 5 Mei 2019, banjir menerjang kecamatan Paguat dan Popayato Barat. Sedikitnya 30 unit ruma terendam banjir dengan jumlah warga yang terdampak banjir mencapa 100 jiwa
4. Tanggal 1 Mei 2018 Banjir melanda Kecamatan Popayato. Sedikitnya 20 rumah terendam banjir
5. Tanggal 5 Juni 2017, banjir melanda 4 kecamatan yaitu: Taluditi, Randangan, Patilanggio dan Wonggarasi. Warga yang terdampak berjumlah 4000 jiw

Kerusakan hutan juga mengganggu debit air yang masuk ke berbagai IPA (instalasi Pengelolaan Air) PDAM sehingga pasokan air ke masyarakat berkurang, utamanya pada musim kemarau. Hal ini juga senada dengan dokumen KLHS tahun 2021,bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisa spasial terdapat terdapat 55.983,38 hektar atau 13% lahan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato yang memberikan daya tampung tinggi dalam jasa pengaturan pemurnian air dan pengelolaan

limbah namun 114.959,07 hektar atau 61,21% lahan Kabupaten Pohuwato yang memberikan jasa pengaturan pemurnian air kategori rendah

2. Wilayah dengan daya tampung tinggi adalah Kecamatan Popayato Timur dan Kecamatan Lemito sedangkan daya tampung rendah di kecamatan Paguat, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Marisa

3. Pengelolaan Pertambangan Rakyat .

   Pohuwato memiliki potensi pertambangan seperti emas, galian c, dll sebagaimana pada bab II tabel 2.30. Permasalahan yang dihadapi pada pertambangan ini, khususnya pertambangan emas adalah belum adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pertambangan rakyat saat ini masif dengan tanpa izin dan pengelolaannya tidak mematuhi kaidah lingkungan. Dampaknya sebagian besar sungai di sebahagian besar wilayah Pohuwato terus mengalami kedangkalan yang disebabkan tingginya kiriman sedimentasi berupa pasir dan kerikil. Belum adanya peralatan yang sederhana untuk mengolah emas dengan ramah lingkungan juga menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Selain itu Program pemberdayaan bagi keluarga penambang juga belum berjalan dengan baik.

- Pengembangan UMKM yang belum maksimal

  Berdasarkan data BPS Pohuwato tahun 2019, jumlah perusahaan industri yang ada di Kabupaten Pohuwato adalah sebanyak 2.416 perusahaan yang mampu menyerap tenaga sebanyak 5.109 orang. Selanjutnya untuk jenis perdagangan terdapat Jumlah Pedagang besar sebanyak 345, Pedagang

menengah 574, Jumlah Kios sebanyak 5260 kios dan Jumlah warung sebanyak 1257 warung.

Khusus industri, permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya hasil-hasil industri terserap oleh pasar. Penyebabnya sebagian besar belum punya izin, merek, label halal, dll. Kelembagaan yang menaungi industri juga belum berperan maksimal, juga variasi prodak yang belum mampu bersaing dipasar-pasar modern.

Selanjutnya khusus UKM yang bergerak dalam bidang perdagangan, lemahnya permodalan dan managemen usaha menjadi penyebab usaha ini sulit maju. Selanjutnya Untuk menunjang kegiatan ekonominya, masyarakat kabupaten Pohuwato menggunakan pasar sebagai sarana untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa dimana hingga tahun 2019 terdapat 17 pasar. Dari 17 pasar tersebut, sebagian besar masih bermasalah dalam penataan, kelembagaan, kebersihan dan pemeliharaan gedung.

- Sektor pariwisata yang belum maksimal

  Letak geograpis Pohuwato yang berada dalam Kawasan Teluk Tomini dengan bentang alam ada yang dipesisir dan ada yang di kawasan hutan, menyebabkan daerah ini memiliki banyak ragam obyek wisata sebagaimana tersaji di Bab II tabel 2.28.

  Belum maksimalnya kunjungan wisata, utamanya pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid 19. Permasalahan lainnnya adalah masih lemahnya promosi wisata, sarana dan prasarana wisata yang belum baik serta kelembagaan wisata yang belum terbina dengan baik. Selain itu

belum terbentuk masyarakat sadar wisata sehingga benar-benar searah dengan kebijakan pengembangan wisata yang pemerintah jalankan.

Kemudian dari aspek PDRB perkapita hingga tahun 2020 terus terjadi peningkatan dimana untuk PDRB perkapita atas harga berlaku sebesar 41,04 juta rupiah dan PDRB perkapita atas harga konstan sebesar 28,57 juta rupiah. Walupun terjadi peningkatan setiap tahun, tetapi gap antara yang kaya dan miskin masih cukup jauh, yakni sebesar 0,408. Permaslahan utama yang dihadapi adalah belum stabilnya tingkat pendapatan masyarakat, khususnya para petani jagung yang sebagian besar tergantung pada kondisi iklim. Komoditi jagung sangat peka terhadap iklim, dua minggu saja tidak mendapatkan air hujan, tanaman ini akan kering. Kedepan variasi tanaman (*mix farming*) agar dilakukan dalam pengembangan pertanian, khususnya tanaman-tanaman perkebunan dan buah-buahan.

Tingkat pendapatan yang tidak stabil juga berdampak pada masih tingginya angka Kemiskinan pohuwato walaupun pada 5 tahun terakhir terjadi penurunan setiap tahunnya. Demikian juga dengan tingkat pengangguran. Pada tahun 2020 angka kemiskinan pohuwato sebesar 17,62 persen, sedangkan angka pengangguran sebesar 3,1 persen dari angkatan kerja. Dengan kondisi sosial ekonomi seperti ini, maka program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal agar ditingkatkan. Selain pendekatan pemberdayaan, masyarakat pohuwato juga masih harus ditopang dengan berbagai program perlindungan sosial

4.1.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga tahun 2020 meningkat yakni 20 kasus bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 7 kasus. Pada kondisi kasus tersebut sangat di dominasi oleh kasus anak yakni 29 kasus tahun 2019 dan 20 kasus tahun 2020. Permasalahan lainnya adalah masih banyak status Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang belum terberdayakan, juga sekitar 6000 kepala keluarga yang masih bermasalah dengan status pernikahannya sehingga menjadi masalah terhadap hak-hak anak dimasa mendatang, utamanya dalam aspek pendidikan.

4.1.6. Pengelolaan lingkungan dan Bencana Alam

Pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangan daerah fokus pada pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan hutan kota. Permasalahan pada persampahan adalah dari 9 Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) baru tiga yang berfungsi secara maksimal. Dasi sisi kelembagaan, kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang menjadi pengelola UPST belum berfungsi maksimal dan merata. Beberapa peralatan UPST juga banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan kedepan sehingga dapat berfungsi lagi dengan baik. Dari aspek mobilisasi pengangkutan sampah, dari 8 kenderaan roda 4, hanya 4 unit yang beroperasi secara maksimal, sisanya sudah perlu peremajaan. Dengan demikian dari jumlah potensi sampah 53.208 ton pertahun, baru sekitar 20 persen yang bisa diolah dengan baik sisanya diangkut ke TPA sebagaimana tabel 2.77 bab II.

Dari sisi pencemaran, khususnya air, pada tabel 78 bab II nampak bahwa dari 5 sungai yang diukur status air bakunya, terdapat dua sungai yang airnya dari hulu hingga hilir sudah tercemar yakni sungai Taluduyunu dan Paguat. Penyebab pencemaran dominan akibat praktek pertambangan yang illegal dengan menggunakan zat yang tidak ramah lingkungan. Degredasi tanah seperti menurunnya unsur hara tanah pertanian untuk jangka panjang dipicu oleh penggunaan pupuk non organik dan bahan kimia yang berlebihan pada sector pertanian serta penggarapan lahan pertanian semusim dengan sitem monokultur di lahan yang melebihi 30 %. Perburuan satwa, penebangan kayu dan perambahan dalam Kawasan hutan juga memicu menurunnya keseimbangan ekosistem seperti serangan hama, bajir, longsor di musim hujan serta kekurangan air di musim kemarau.

Selanjutnya terkait kebencanaan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hampir setiap tahun tajadi bencana banjir di Kabupaten Pohuwato. Bencana yang mingintip lainnya juga adalah gempa dan tsunami. Dalam dokumen KLHS Tahun 2021 dinyatakan bahwa Kawasan Patahan Bumi Aktif, memanjang dari arah Kec. Dengilo, Buntulia, Taluditi, dan Wanggarasi. Selanjutnya Kawasan Rawan Gempa Bumi Tinggi di Kec: Lemito, PopayatoTimur, Popayato, dan Popayato Barat. Kemudian Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami: Pentadu, Libuo, Molamahu, Lemito, Dudewulo, Milangodaa. Selain gempa dan tsunami, ancaman tanah longsor juga terdapat pada kecamatan meliputi Kecamatan Paguat, Kecamatan Taluditi, Kecamatan Popayato dan Kecamatan Wonggarasi. Terkait kebencanaan ini aspek yang menjadi perhatian kedepan adalah perlunya edukasi terus menerus kepada warga masyarakat terkait mitigasi

bencana, sosialisasi melalui papan informasi dan teknologi informasi, pentingnya pelestarian lingkungan hidup dibangian ekosistem hulu dan hilir

4.1.7. Infrastruktur Wilayah.

Pembangunan infrastruktur wilayah memegang peranan strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Pencapaian pembangunan ini salah satunya diukur melalui indeks pembangunan infrastruktur. Beberapa aspek yang menjadi pemasalahan dalam hal ini yakni :

- Jalan

  Total panjang jalan di Kabupaten Pohuwato mencapai 1.150,62 kilometer yang terdiri dari jalan negara 169,50 km, jalan provinsi sepanjang 68,47 kilometer serta kabupaten sepanjang 912,65 kilometer. Untuk jalan nasional hingga tahun 2021 sudah 90 persen dalam kondisi mantap. Selanjutnya untuk jalan Provinsi, baru sekitra 60 persen dalam kondisi mantap. Untuk jalan Kabupaten kategori rusak dan rusak berat sepanjang 158 Km, selanjutnya yang masih lapisan permukaan kerikil sepanjang 592,25 Km dan tanah 3,81 Km (bab II tabel 2.59).

- Irigasi

  Pada bab II tabel 2.56 disajikan status irigasi dan kewenangannya dimana terdapat irigasi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten.

  Untuk irigasi teknis yang menjadi kewenangan pusat yakni Daerah Irigasi Randangan yang ditergetkan mengairi sawah seluas 8.960 Ha. Permasalahan hingga tahun 2021 pembangunan irigasi ini masih terus berlanjut, pencetakan sawah yang akan menjadi sasaran juga belum diteruskan pelaksanaannya.

Untuk irigasi teknis kewenangan Provinsi Gorontalo, berada pada daerah irigasi taluduyunu dengan luas areal sawah 1.542 ha. Irigasi ini merupakan irigasi tertua di Kabupaten Pohuwato dan sudah lama berfungsi. Permasalahan pada irigasi ini adalah perlu rehabilitasi kembali bangunan dibagian hulunya sesuai dengan perubahan kondisi sungai saat ini, selain itu perlu diperpanjang jaringanya agar potensial sawah yang belum berfungsi saat ini dapat menjadi areal sawah. Hal ini juga agar diikuti dengan perbaikan pintu klap yang ada di Kecamatan Duhiadaa yang berfungsi menahan masuknya air laut ke areal persawahan.

Untuk irigasi teknis kewenangan Kabupaten terdiri dari 8 irigasi dimana terdapat satu irigasi yang sudah rusak berat yakni daerah irigasi marisa IV Kecamatan Taluditi. Irigasi yang lainnya butuh pemeliharaan dan rehabilitasi ringan.

- Air Besih

Pada bab II tabel 2.57 nampak bahwa layanan air minum hingga tahun 2020 sudah mencapai 85,42 persen, menurun dibanding dengan tahun 2019. Permasalahannya adalah berkurangnya debit air, utamanya pada musim kemarau sehingga suplai air tidak maksimal.

Permasalahan lainnya beberapa sumber air yang menjadi penyuplai utama air PDAM berada pada Kawasan yang rawan oleh praktek pertambangan liar sehingga sering mengalami kerusakan. Untuk jangka panjang sudah perlu digagas pemanfaatan air baku yang ada dibendungan randangan sebagai sumber air minum untuk beberapa kecamatan termasuk Kawasan ibu kota dan Kawasan bandara nantinya. Regulasi terhadap perlindungan sumber

mata air dan jaringan penyumplainya menjadi kebutuhan kedepan agar menjadi dasar dalam penegakan hukum bagi para pengganggu dan perusak sumber dan jaringan mata air.

Selanjutnya beberapa IPA (Instalasi Pengelolaan Air) sudah rusak sehingga butuh perbaikan kedepan.

- Perumahan dan Kawasan pemukiman

  Rumah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi sebuah kelaurga. Di Kabupaten Pohuwato sudah 87,97 persen telah memiliki rumah sendiri dan sisanya 19,03 persen belum mimiliki rumah sendiri. Dari aspek kelayakan rumah sejumlah 30,59 persen yang statusnya rumah belum layak dan sehat atau sebesar 15.172 rumah.

  Selanjutnya untuk kawasan pemukiman, dari total luas pemukiman seluas 4.359,45, ha terdapat kawasan kumuh seluas 192,78 ha atau 22,61 persen. Dari luasan tersebut terdapat dua kawasan yang menjadi kewenangan Provinsi Gorontalo yakni Kawasan di kecamatan Marisa dan Kecamatan Lemito. Kekumuhan juga sangat erat dengan tidak lancarnya sistem aliran air yang disebabkan drainase yang buruk.

  Terkait sanitasi, hingga tahun 2020 telah mencapai 75,67 persen. Permasalahan dari aspek sanitasi ini adalah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan masih rendah, kemudian pengelolaan limbah rumah tangga masih dianggap belum terlalu penting. Padahal potensi penyakit dari berbagai limbah tersebut sangat besar.

- Perhubungan

Aspek perhubungan di Kabupaten Pohuwato terdapat aktivitas Perhubungan laut melibuti pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan samudera di Kecamatan Paguat, perhubungan darat mencakup jalan desa, kabupaten, provinsi dan nasional, dan perhubungan udara yakni pembangunan bandar udara yang berada di Kecamatan Randangan.

Untuk pelabuhan penyeberangan dengan pelabuhan samudra merupakan kewenangan balai pelabuhan, namun koordinasi peningkatan kapasitas pelabuahan dan jalan akses kepelabuhan masih belum terlalu baik. Sarana dan prasrana pendukung lainnya juga masih minim.

Untuk perhubungan darat, permasalahan diaspek ini adalah masih kurangnya rambu-rambu lalulitas, dan moda transportasi ke daerah-daerah yang terpencil.

Untuk perhubungan udara, hingga tahun 2021 pembangunannya sudah mencapai 60 persen dan sesuai target kementerian perhubungan tahun 2023 akan beroperasi. Tahun 2021 ini pemerintah daerah melaksanakan pembebasan lahan dilokasi tersebut.

- Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan kebutuhan strategis yang mesti dipenuhi, apalagi diera digitalisasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan apabila kita jauh dari akses telekomunikasi. Di masa pandemi covid 19 ketika pertemuan tatap muka sulit dilakukan, disitulah tampil peran telekomunikasi menjadi sangat strategis dan penting. Di Kabupaten Pohuwato infrastruktur telekomunikasi seperti tower hingga tahun 2021 telah berjumlah 37 unit. Dari jumlah ini sudah dapat mengakses sekitar 60 persen desa. Desa yang belum terakses

menjadi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan kedepan. Selain itu permasalahan integrasi aplikasi, pembangunan data center, penambahan kapasitas server dan peningkatan SDM serta gedung kantor yang refresentatif menjadi kebutuhan dalam peningkatan layanan dan jaringan telekomunikasi kedepan.

- Kantor dan Bangunan Gedung

  Untuk perkantoran di Kabupaten Pohuwato hingga tahun 2021 dari 43 OPD termasuk 13 kecamatan di dalamnya, hanya tinggal 3 OPD yang belum memiliki kantor permanen. Selain itu beberapa perkantoran sudah perlu direhabilitasi dan penambahan gedung, termasuk kantor Bupati. Kemudian untuk kantor camat, sudah banyak rumah dinas camat yang rusak ringan hingga berat, demikian juga dengan aula pertemuan.

  Untuk bangunan gedung yang menjadi prasarana utama daerah seperti stadion, permasalahannya hingga tahun 2021 belum rampung pembangunannya, juga belum tertata dengan baik, juga masih kurang penghijauan dan akses jalan belum baik. Selanjutnya untuk Gedung kolam renang yang berada dikompleks stadion, permasalahannya akses air belum normal, masih kurang prasarana penunjang dan perbaikan sistem pengelolaan. Kemudian untuk gedung masjid baituraahim yang menjadi masjid besar Kabupaten, ikon daerah masih perlu perampungan pembangunannya kedepan sehingga semakin baik, indah dan lengkap berbagai kebutuhan di tempat itu.

4.1.8. Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja pemerintahan diukur dari beberapa indikator antaranya pelayanan publik, Perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan, pengawaasan serta sumber daya manusia ASN. Permasalahan pada tata kelola pemerintahan ini yakni

- Aspek pelayanan publik, masih terdapat perkantoran yang belum memenuhi standar pelayanan publik, masih terdapat beberapa perizinan yang belum diserahkan ke kantor pelayanan satu pintu atau Dinas Penanaman Modal, kurang kompotensi SDM, serta sarana dan prasarana penunjang yang belum maksimal.
- Aspek perencanaan, kurangnya SDM perencana di Baperlitbang, kompotensi perencana OPD yang masih rendah, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang masih kurang.
- Aspek pengelolaan keuangan, masih rendahnya pendapatan asli daerah, kurangnya SDM bidang akuntansi dan asset, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang belum memadai
- Aspek pelaksanaan pembangunan, proses pengadaan barang dan jasa belum berjalan normal akibat kelembagaan yang belum jelas dan jumlah SDM pengadaan yang kurang.
- Aspek pengawasan, kurangnya SDM auditor dan juga sarana prasarana penunjangan pelaksanaan tugas yang belum memadai.
- Aspek SDM, adanya moratorium penerimaan PNS pada pegawai struktural menyebabkan banyak OPD yang mengalami kekurangan staf dalam komptensi tertentu.

4.1.9. Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Kentraman dan ketertiban menjadi salah satu indikator penting dalam jalannya pemerintahan. Indikator ini biasanya dapat dilihat dari tingkat krimilaitas yang terjadi dalam satu daerah. Pada bab II tabel 2.62 nampak bahwa tingkat kriminalitas tahun 2020 lebih rendah dibanding tahun 2019. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup baik, namun demikian tingkat kriminalitas tersebut masih harus terus ditekan. Permasalahan pada aspek ini adalah masih kurang personil satpol PP, rendah prasarana penunjang kegiatan, rendahnya SDM serta wilayah tugas yang cukup luas.

Pada aspek perlindungan masyarakat, khusus untuk perlidungan dari aspek bencana kebarakaran, mobil pemadam yang dimiliki sudah kurang memadai dan perlu peremajaan bahkan tambahan pengadaan baru, SDM pemadam juga yang masih rendah komptensinya. Dari aspek perlindungan bencana alam, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan BPBD dan juga dinas Sosial, kelembagaan kebencanaan yang masih lemah serta komptensi SDM yang masih rendah.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Terdapat isu strategis international yang implementasinya dapat berpengaruh terhadap perbaikan kesejahteraan, lingkungan dan sosial di Kabupaten Pohuwato. Isu tersebut terangkum dalam rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau juga dikenal *Sustainable Development Goals* (SDG), terdiri dari :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan

15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional telah terangkum dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 yang difokuskan pada agenda sebegai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Refolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhuthankam dan transformasi pelayanan public.

Secara detail implemtasi dari 7 agenda prioritas tersebut telah terjabarkan dengan baik pada program prioritas yang ada pada RPJMN dimana dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian implementasi pembangunan nasional akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Gorontalo

Isu strategis yang telah terumuskan dalam RPJMD Propinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dalam bingkai kedaulatan NKRI
2. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penguatan kapasitas SDM masyarakat Gorontalo.
4. Tingkat perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
5. Pemenuhan infrastruktur dasar dan Konektivitas wilayah.
6. Mitigasi bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan isu strategis tersebut tentu akan berdampak pada perkembangan kehidupan ekonomi, sosial dan pemerintahan yang ada di Kabupaten Pohuwato.

4.2.4. Isu Strategis Pohuwato

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.2.4.1.RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 – 2025.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato 2009 - 2025, isu strategis pohuwato terdiri dari :

1. Mendorong penyediaan dan pemenuhan hak dasar pelayanan masyarakat berbasis kesetaraan gender, terutama dalam hal pemenuhan pangan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan.
2. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar sebagai upaya peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui peningkatan infrastruktur transportasi, infrastruktur energi kelistrikan, infrastruktur air bersih, infrastruktur pemukiman, sarana dan prasarana perekonomian daerah.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur serta akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah
4. Produktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi Lokal dan Gender. Mendorong sektor-sektor produktif dalam mewujudkan kemandirian lokal berbasis potensi lokal.
5. Mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah berbasis distrik/kampung yang tertinggal dan terisolir serta mempertimbangkan Potensi, pemanfaatan, Degradasi Lingkungan, dan mitigasi bencana.
6. Infrastruktur daerah; Infrastruktur ke PU-an saat ini kurang memadai dan belum merata ke seluruh wilayah dalam mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tingkat kemantapan, jaringan dan kualitas jalan (termasuk trotoar,

marka jalan, dan rambu lalu lintas), kurangnya saluran drainase, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur air bersih belum memadai/tergantung pihak lain, infrastruktur irigasi belum memadai. Selain itu perlu adanya sarana prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan.

7. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan); Kualitas SDM dipengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, terlihat dari tinggi angka penduduk (usia diatas 10 tahun) yang tidak memiliki ijazah mencapai 66,36%. Dari aspek kesehatan, derajat kesehatan masyarakat masih kurang, terbukti dari angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan penduduk masih tinggi dan angka harapan hidup belum optimal.
8. Pendapatan dan daya beli masyarakat; Untuk memantau perkembangan daya beli secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2011 mencapai Rp 560.584,-. Berdasarkan survei IPM Kabupaten Pohuwato tahun 2011, IPM Kabupaten Pohuwato tahun 2011 mencapai 59,85; terdiri dari indeks kesehatan sebesar 75,05 indeks pendidikan sebesar 86,62 dan indeks paritas daya beli sebesar 62,80 (setara paritas daya beli/purchasing power parity sebesar Rp 631.750,00 perbulan perkapita). Dari ketiga komponen tersebut, indeks daya beli menempati urutan terakhir dengan laju pertumbuhan yang lambat.
9. Tata kelola pemerintahan; Isu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (amanah) saat ini belum dijawab dengan pembuktian yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan pemerintah yang masih belum sepenuhnya efektif,

efisien dan proporsional serta sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai tanggung jawab dan bebankerja. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi melemahkan disiplin, etos, dan produktivitas kerja.

10. Penanggulangan kemiskinan; Angka kemiskinan di Pohuwato pada tahun 2010 mencapai 18,75 persen, lebih rendah dibanding Provinsi Gorontalo saat itu sebeser 23,19 persen dan Nasional sebesar 13,33 persen. Secara nasional sesuai target RPJMN 2009-2014, angka kemiskinan harusnya berada pada kisaran 8-10% pada tahun 2014.
11. Tata nilai dan kebudayaan daerah. Moral, tata nilai, kesalehan sosial dan akhlak masyarakat mengalami degradasi/penurunan yang dibuktikan dengan semakin tinggiinya kasus narkoba bahkan sudah merambah ke usia sekolah dengan berbagai racikan-racikan bahan yang mudah mereka dapatkan seperti komix, lem fox, dll. Sementara itu apresiasi, ketahanan dan pelestarian terhadap budaya oleh masyarakat relatif rendah sebagai akibat imbas perubahan global.

4.2.4.2.Isu Strategis Pohuwato berdasarkan analisis permasalahan.

Isu strategis berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

1) Masih rendah derajat kesehatan masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi pada aspek kesehatan adalah :

- Ancaman pandemic covid 19 yang belum bisa terkendali hingga tahun 2021
- Kurangnya SDM kesehatan utamanya dokter umum dan dokter spesialis
- Belum semua fasilitas layanan kesehatan lengkap dan memadai

- Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi
- Usia harapan hidup masih rendah
- Sistem pelayanan kesehatan yang belum berkualitas

2) Output Pendidikan yang belum kompetitif dan berkarakter

Permasalahan utama yang dihadapi adalah :

- Menurunnya kualitas proses belajar mengajar akibat adanya pandemic covid 19 sehingga harus lebih banyak dengan sistem on line (jarak jauh). Hal ini berdampak pada kualitas lulusan yang belum baik
- Sarana dana prasarana Pendidikan yang belum memadai
- Belum meratanya SDM tenaga Pendidikan dan kependidikan

3) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang belum merata.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh produksi pertanian belum optimal, nilai usaha perdagangan, nilai usaha industri, produksi perikanan belum optimal, kurangnya kualitas prodak UMKM, nilai investasi rendah, penyebaran penyakit hewan menular dan masih terdapat desa rawan pangan, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tingginya Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tingginya tingkat pengangguran.

4) Tata kelola pemerintahan yang belum maksimal

Hal ini ditetapakan sebagai isu strategis didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Pelayanan publik yang belum optimal, disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem informasi manajemen dan belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik,
- Kinerja pemerintah daerah yang belum optimal yang disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya kinerja pemerintah desa, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan, belum terpenuhinya kebutuhan pegawai, rendahnya kesejahteraan ASN dan belum optimalnya implementasi peraturan daerah.

5) Ancaman kerawanan dan ketertiban umum

Penetapan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:

- Potensi terjadinya permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya implementasi peraturan daerah dan meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum.
- Potensi kerawanan ketertiban umum yang disebabkan adanya heterogenitas penduduk, kecemburuan dalam pengelolaan SDA, fanatisme berlebihan dalam menjalankan ajaran agama, dan sistem keamanan lingkungan yang tidak berjalan lagi disetiap desa/kelurahan

6) Infrastruktur wilayah yang belum merata dan optimal

Hal ini ditetapkan menjadi isu strategis didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Infrastruktur kawasan belum optimal
- Pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal

- Konektivitas antar kawasan belum maksimal
- Krisis air dan resiko bencana tinggi

Terkait infrastruktur kawasan yang belum optimal merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Sarana dan prasarana perekonomian yang belum maksimal (pasar, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, UMKM)
- Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman belum optimal (air minum, limbah, sampah, rumah hunian)
- Sarana dan prasarana gedung belum optimal
- Sarana dan prasarana jalan belum optimal
- Sarana dan prasarana sumber daya air belum optimal

Khusus pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Belum semua kecamatan memiliki RDTR, revisi RTRW belum belum selesai dan ditetapkan
- Pengelolaan pertanahan belum optimal
- Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya

Konektivitas antar kawasan yang belum optimal merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Luasnya wilayah kabupaten dengan topografi beragam (pesisir, dataran, perbukitan, pegunungan)
- Kualtas jalan yang belum merata
- Pelayanan transportasi belum merata
- Belum semua desa bisa 100 persen pendudukanya menikmati internet

Kirisis air dan Risiko Bencana Tinggi merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa factor penyebab, antara lain :

- Pengelolaan SDA yang belum ramah lingkungan
- Topografi daerah dengan perbukitan dan pegunungan
- Sekitar 70 persen tutupan lahan adalah kawasan hutan dengan tingkat perambahan semakin tinggi
- Menurunnya debit air untuk kepentingan irigasi dan air minum
- Lokasi IPA PDAM dan jaringan pipa yang berada ditempat rawan (jalur lokasi pertambangan) sehingga sering terjadi gangguan kerusakan
- IPA PDAM sudah banyak yang rusak (tidak opimal bekerja)
- Terdapat warga masyarakat tinggal di daerah rawan bencana
- Kapasitas sumber daya menghadapi bencana belum optimal

7) Tata kelola Lingkungan yang belum maksimal

Hal ini diangkat menjadi satu isu strategis karena disebabkan permasalahan :

- Sekitar 70 persen Kawasan pohuwato adalah Kawasan hutan yang dalam penanganannya melibatkan berbagai instansi mulai dari Kabupaten, Provinsi dan pusat dimana dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan belum tersiergi dengan baik.
- Potensi SDA yang menonjol di Kabupaten Pohuwato salah satunya adalah pertambangan emas, dimana dalam pengelolaannya belum memperhatikan kaidah lingkungan.
- Perambahan dan penebangan liar dalam kawasan hutan di hulu dan di daerah aliran sungai masih terjadi, menyebabkan longsor dan banjir setiap tahun pda musim hujan.

- Sumber daya pesisir pohuwato juga kaya akan hutan mangrove, namun maraknya budidaya perikanan yang merambah mangrove menjadi tambak, menyebabkan hutan semakin parah.
- Beberapa daerah aliran sungai mengalami sedimentasi dan sudah teriedntifikasi airnya sudah tercemar oleh bahan berbahaya ringan hingga berat.

8) Nilai budaya dan adat yang mulai pudar

Hal ini ditetapkan menjadi isu strategis karena pelaksanaan kebudayaan dan adat di Kabupaten Pohuwato bersandarkan pada ajaran agama islam dengan motto adat bersandikan syara, syara bersandikan alquran. Memudarnya hal ini disebabkan beberapa hal antaranya :

- Belum optimalnya pembelajaran agama islam bagi kaum muslim mulai dari bangku sekolah Paud/TK s/d Pergurun tinggi.
- Peran kelembagaan adat mulai lemah
- Regenerasi pelaksana kegiatan kebudayaan dan kegiatan adat berjalan lambat
- Pengamalan nilai ajaran agama pada lingkungan pemerintahan dan masyarakat belum optimal
- Belum meratanya keberadaan pesantren disemua kecamatan
- Kurangnya para muballigh

Seluruh isu strategis baik tingkat global, nasional, regional dan lokal tersebut dalam penyajian prioritas perencanaan tahunan akan disajikan delam kerangka 9 agenda prioritas pembanguan Kabupaten Pohuwato yakni :

1. Terciptanya masyarakat sehat, bebas stunting dan terjamin dari bahaya penyakit menular.
2. Menghadirkan Pola Pendidikan yang murah, terjangkau, berkualitas dan berkarakter.

3. Membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah.
4. Mewujudkan daya saing Ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industry, dan investasi serta infrastruktur penunjangnya.
5. Tata kelola Lingkungan Hidup yang semakin baik
6. Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat serta pemberdayaan bagi kaum milenial.
7. Terus mendorong seluruh desa di Pohuwato menuju desa maju dan mandiri.
8. Menghadirkan pelayanan pemerintahan yang bersih, profesional dan ramah.
9. Mewujudkan masyarakat yang religius, tertib dan harmonis.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi.

Visi pemerintahan daerah periode tahun 2021 – 2026 diambil dari dokumen visi kepala daerah yang telah ditetapkan KPU sebangai pemenang Pilkada dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Pebruari tahun 2021. Adapun visi tersebut adalah :

TERWUJUDNYA POHUWATO SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA (POHUWATO SMS)

Visi tersebut mengandung 3 kata kunci yang bermaka :

SEHAT

Merupakan sebuah cita-cita besar dari pemerintahan daerah untuk kedepan masyarakat bisa hidup sehat, mudah mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas.

MAJU

Merupakan sebuah cita-cita kedepan pemerintah daerah untuk dapat diwujudkan sistem pendidikan maju berkualitas, infrastruktur semakin merata, meningkat dan berkualitas, tata kelola lingkungan semakin baik dan kinerja pemerintahan terus membaik dan berkualitas.

SEJAHTERA

Merupakan cita-cita pemerintah daerah kedepan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan SDA secara ramah lingkungan.

5.2. Misi

Visi Kabupaten PohuwatoTahun 2021 – 2026 tersebut di atas akan dicapai melalui 4 misi yakni :

1. **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Dan Pendidikan**

   Pada misi ini dimaksudkan agar kedepan sistem pelayanan kesehatan dan Pendidikan semakin baik dan mudah sehingga akan berdampak pada perbaikan kualitas sumberdaya manusia Pohuwato.

2. **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan**

   Kualitas infrastruktur sangat menunjang pergerakan ekonomi dan daya saing daerah. Oleh sebab itu pada misi ini pemerintah kedepan menghendaki terjadi pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, air bersih, irigasi, drainase, perhubungan, telekomunikasi, perumahan, pariwisata, olahraga, Prasarana pemerintahan, kelistrikan dan tata kelola lingkungan yang semakin baik

3. **Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Inovatif**

   Melalui misi ini pemerintah kedepan akan mendorong masyarakat dapat produktif dalam mengelola sumberdaya alam Pohuwato dengan optimal dan ramah lingkungan dengan terus melakukan inovasi-inovasi sehingga terjadi efisiensi yang nanintinya berdampak pada peningkatan pendapatan.

4. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Masyarakat Tertib Dan Religius**

   Pada misi ini implementasi pemerintah yang baik agar terus diterapkan sehingga berbagai prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan selanjutnya terjadi peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan pemerntahan. Pemerintah juga akan terus menjaga koordinasi antara semua pihak khususnya dalam Lembaga forum

komunikasi pimpinan daerah untuk terus berupaya menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan harmonis, jauh dari pengaruh radikaisme. Pembinaan spiritual dan peningkatan pengamalan nilai agama dilingungan masyarakat akan terus ditingkatkan dengan melibatkan forum kerukunan umat beragama dan Lembaga-lembaga lainnya yang terkait.

5.3. Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang dijelaskan diatas, kemudian diselaraskan dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 serta RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009 – 2025, maka ditetapkan 4 tujuan pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya masyarakat yang sehat, sumberdaya manusia unggul dan berkarakter.**

   Pemcapaian tujuan ini akan dilaksanakan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pengembangan potensi dan prestasi generasi muda serta peningkatan kebudayaan.

2. **Mewujudkan Pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta tata kelola lingkungan sesuai RTRW**

   Tujuan ini akan dicapai melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah berupa jalan dan jembatan, air bersih, irigasi, perhubungan, telekomunikasi, perumahan dan kawasan pemukiman, persampahan, bangunan gedung

perkantoran, ruang terbuka hijau, pengelolaan lingkungan, sistem drainase dan penanganan kebencanaan.

3. **Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**

   Tujuan ini akan dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hortikultura yang lebih baik dan ramah lingkungan. Selain itu pengembangan investasi, pariwisata, UMKM, pemberdayaan perempuan dan ekonomi kreatif.

4. **Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, masyarakat yang aman dan tertib serta religius**

   Tujuan ini akan dicapai melalui peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, pengawasan, pelaksananaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta perbaikan pelayanan publik daerah dan desa, peningkatan peran keamanan dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat, peningkatan kehidupan demokrasi yang baik, serta peningkatan pengamalan nilai-nilai spiritual.

5.3.2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yakni :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis daerah
4. Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat.
5. Menigkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang

6. Meningkatknya kesejahateraan masyarakat
7. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan pekerjaan
8. Meningkatnya kualitas pennyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel
9. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
10. Meningkatnya pembinaan dan pengamalan nilai agama

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diatas diukur dari beberapa indikator sebagiamana disajikan pada tabel 5.1. keterkaitan antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuan, indikator tujuan dan sasaran serta indikator sasaran.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :TERWUJUDNYA POHUWATO SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA (POHUWATO SMS)

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASRAN
Misi 1 :				
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pendidikan	Terwujud nya masyarakat yang sehat, sumber daya manusia unggul dan berkarakter	IPM	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan 2. Angka Stanting
			2. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	1. Indeks Pendidikan
Misi2 :				
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan	Mewujudkan Pembangunan dan pemerataan infastruktur serta tata kelola lingkungan sesuai RTRW	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis daerah	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur. 2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

			2. Meningkatnya pelayanan perumahan dan Kawasan pemukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat.	1. Indeks Infrastruktur Pemukiman
		2. Indeks Pembangunan Berkelanjutan	3. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi3 :				
Mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi 2. PDRB ADHK 3. PDRB ADHB 4. Gini Ratio 5. Angka Kemiskinan	1. Meningkatknya kesejahateraan masyarakat	1. Rata-rata Konsumsi Perkapita (ADHB) 2. Pengeluaran Per kapita 3. Inflasi
			2. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan pekerjaan	1. Angka pengangguran 2. Nilai Realisasi investasi daerah
Misi4 :				
Mewujudkan pemerintahan yang baik, Masyarakat tertib dan religius	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, masyarakat yang aman dan tertib serta religius	1. Nilai Refomasi Birokrasi 2. Indeks Ketertiban umum	1. Meningkatnya kualitas pennyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
			2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Cakupan penegakan perda keamanan dan ketertiban masyarakat
			3. Meningkatnya pembinaan dan pengamalan nilai spritual	1. Cakupan Pembinaan kegiatan pengamalan nilai spritual

Sumber :Baperlibang Pohuwato 2021

Selanjutnya Untuk indikator target dari dampak (*impacts*) pencapaian sasaran program yang diukur dari hasil (*outcomes*) secara agregat dari misi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi, maka ditetapkan ukuran capaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang sering disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Pohuwato Sehat, Maju Dan Sejahtera (Pohuwato SMS)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	indikator	Satuan	Kndisi Awal (2020)	Prognosis 2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
								I	II	II	IV	V
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat dan Pendidikan	Terwujudnya masyarakat yang sehat, sumber daya manusia unggul dan berkarakter		IPM	Nilai	65,37	65,88	66,25	66,73	67,22	67,85	68,20
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	%	60,02	63,21	65,17	68,90	72,13	76,23	80,11
				Angka Stunting	%	7,43	8,10	7,99	6,50	6,11	5,99	5,50
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	%	64,33	64,99	65,85	68,01	73,11	76,42	81,22
2	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan	Mewujudkan Pembangunan dan pemerataan infastruktur serta tata kelola lingkungan sesuai RTRW		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	50,55	63,22	65,77	69,2	73,22	76,75	79,5

				Indeks Pembangunan Berkelanjutan	%	60,23	62,55	67,53	70,11	74,33	77,65	80,17
			Meningkatnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan strategis daerah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	80,22	80,22	83,67	85,77	89,11	92.75	97,22
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	50,23	50,23	55,6	62,43	67,65	72,65	77,11
			Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat.	Indeks Infrastruktur Pemukiman	%	50,55	55,72	60,62	65,55	70,25	75,55	80,21
			Menigkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	Indeks Kualitas Lingkungan	%	62,44	65,75	70,27	75,44	80,32	85,52	90,11
3	Mewujudkan masyarakat yang produktif dan Inovatif	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	%	-0,18	2,5	3,7	4,5	5,5	5,8	6,5
				PDRB ADHK	Rp (000.000.000)	4.712	4.932	5.201	5.805	6.421	7.021	7.025
				PDRB ADHB	Rp (000.000.000)	7.002	7.365	7.655	8.155	8.650	9.050	9.765
				Gini Ratio	%	0.412	0,413	0,411	0,408	0,399	0,312	0,299
				Angka	%	17,62	17,68	17,01	16,50	16,00	15,61	14,21

				Kemiskinan								
			Meningkatknya kesejhateraan masyarakat	Rata-rata Konsumsi Perkapita (ADHB)	Rp.(000)	21.320	21.525	22.800	23.400	24.100	25.000	25.500
				Pengeluaran Perkapita	Rp.(000)	10.500	10.800	11.100	12.350	13.100	13.950	14.600
				Inflasi	%	0,18	1,12	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
			Meningkatnya investasi daerah dan lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	%	3,00	3,00	2,85	2,80	2,75	2,65	2,50
				Nilai Realisasi Investasi	Rp (000.000)	150.000	**209.673**	**293.542**	**410.959**	**575.342**	**805.480**	**966.576**
4	Mewujudkan pemerintahan yang baik, Masyarakat tertib dan religius	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, masyarakat yang aman dan tertib serta religius		Nilai Refomasi Birokrasi	%	60,50	65,00	70,00	70,50	80,00	85,00	85,00
				Indeks Ketertiban umum	%	80,55	82,31	84,27	86,55	88,22	90,12	93,36
			Meningkatnya kualitas pennyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	63,16	65	75	80	85	90	95
				Indeks Kepuasan	%	75,5	80,11	85,21	90,22	93.76	94,42	96,55

				Masyarakat								
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan penegakan perda keamanan dan ketertiban masyarakat	%	70,66	72,33	75,21	77,22	80,33	84,78	90,21
			Meninkatnya pembinaan dan pengamalan nilai spritual	Cakupan Pembinaan kegiatan pengamalan nilai spritual	%	95	95	95	95	95	95	95

Sumber :BaperlibangTahun 2021.

5.4. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Pohuwato, RPJPDP rovinsi Gorontalo dan RPJMN 2020 - 2024.

5.4.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 - 2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 mengacu pada dokumen visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Dalam proses penyusunan RPJMD tersebut harus berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2009 - 2025. Adapun misi yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan Sistem ekonomi Pohuwato yang handal, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan***, adalah suatu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif menjadi kompetitif melalui upaya membangun keterkaitan sistem yang meliputi produksi, distribusi dan pelayanan. Pengembangan ekonomi ini menekankan pada kompetensi inti daerah dengan basis pertanian dalam arti luas yang dilakukan dalam suatu sistem agribisnis yang utuh dan menyeluruh dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
2. ***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Pohuwato Yang Tangguh, Cerdas Dan Produktif***, adalah suatu upaya pembangunan sumber daya manusia yang handal dengan kualitas jasmani dan rohani yang terjamin serta memiliki kecerdasan sehingga mampu berproduktifitas dengan baik. Hal ini akan dicapai melalui; peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,

pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.

3. ***Mewujudkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato Yang Berkualitas Dan Amanah***, adalah peningkatan kualitas penyelenggaranaan pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan daerah; pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, *right-sizing* OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik serta peningkatan penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Adapun korelasi antara misi jangka panjang dan misi jangka menengah Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 sebagaimana pada gambar 5.1.

Gambar 5.1.
Keterkaitan misi RPJPD dan Misi RPJMD
Kabupaten Pohuwato 2021 – 2026.

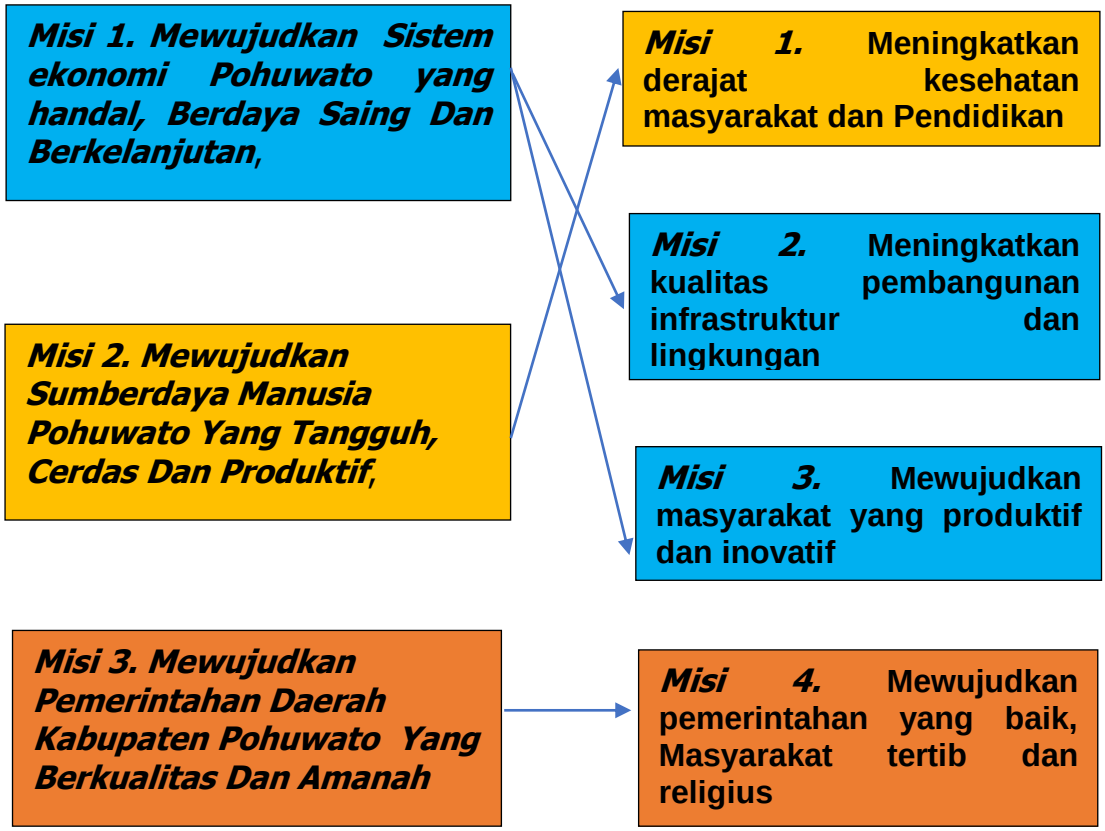

5.4.2. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah yang terdapat dalam wilayah administrasi Provinsi Gorontalo. Dalam RTRW Provinsi Gorontalo daerah yang dikenal dengan julukan Bumi panua ini dijadikan sebagai daerah andalan, dengan dasar potensi sumberdaya alam dimiliki yang cukup besar. Oleh sebab itu arah pembangunan Kabupaten Pohuwato harus mengacu pada misi perencanaan jangka panjang Provinsi Gorontalo.

Adapun korelasi misi RPJMD Provinsi Gorontalo dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 disajikan pada gambar 5.2.

Gambar 5.2.
Korelasi RPJPD Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 dengan RPJMD PohuwatoTahun 2021 – 2026

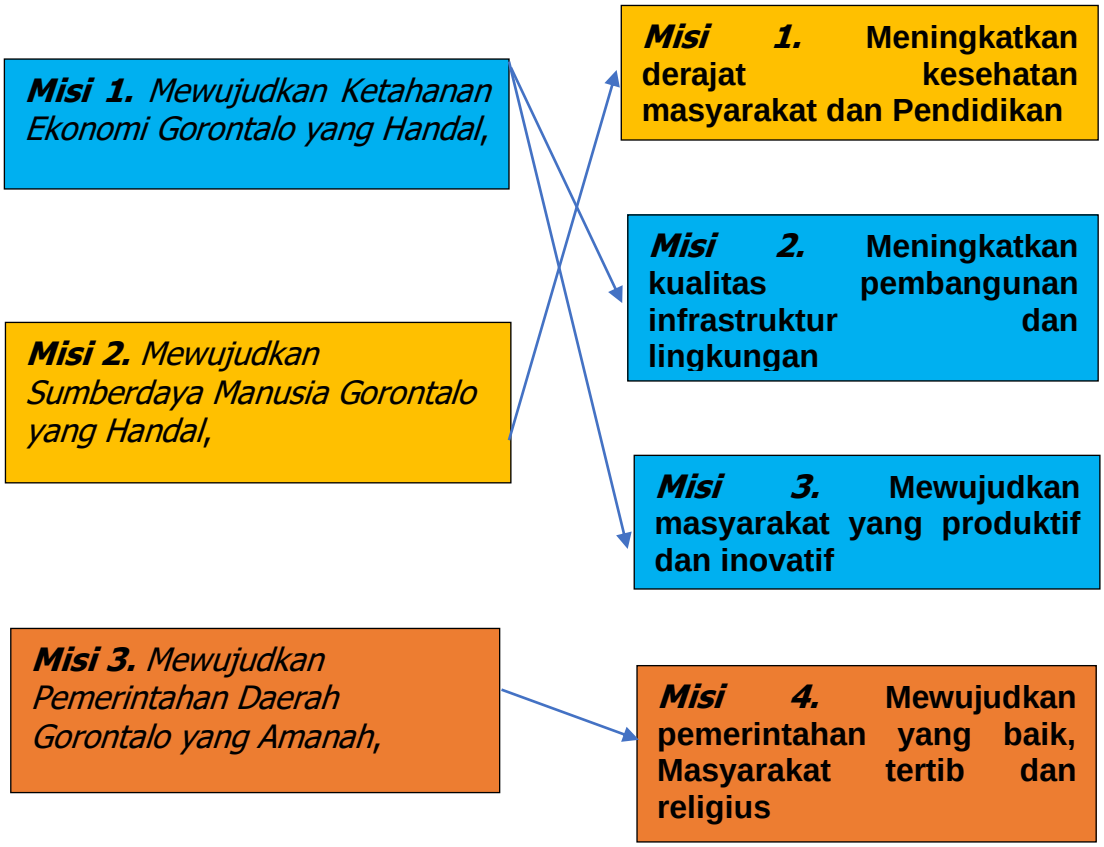

5.4.3. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwatotahun 2021 – 2026 sesuai amanah regulasi yang ada harus selaras dengan dokumen yang diatasnya yakni RPJMN 2020 – 2024. Adapun misi pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN tersebut yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya misi tersebut dipetakan kedalam 7 Agenda RPJMN 2020 – 2024 yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Adapun keselarahan misi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 sebagaimana gambar 5.3.

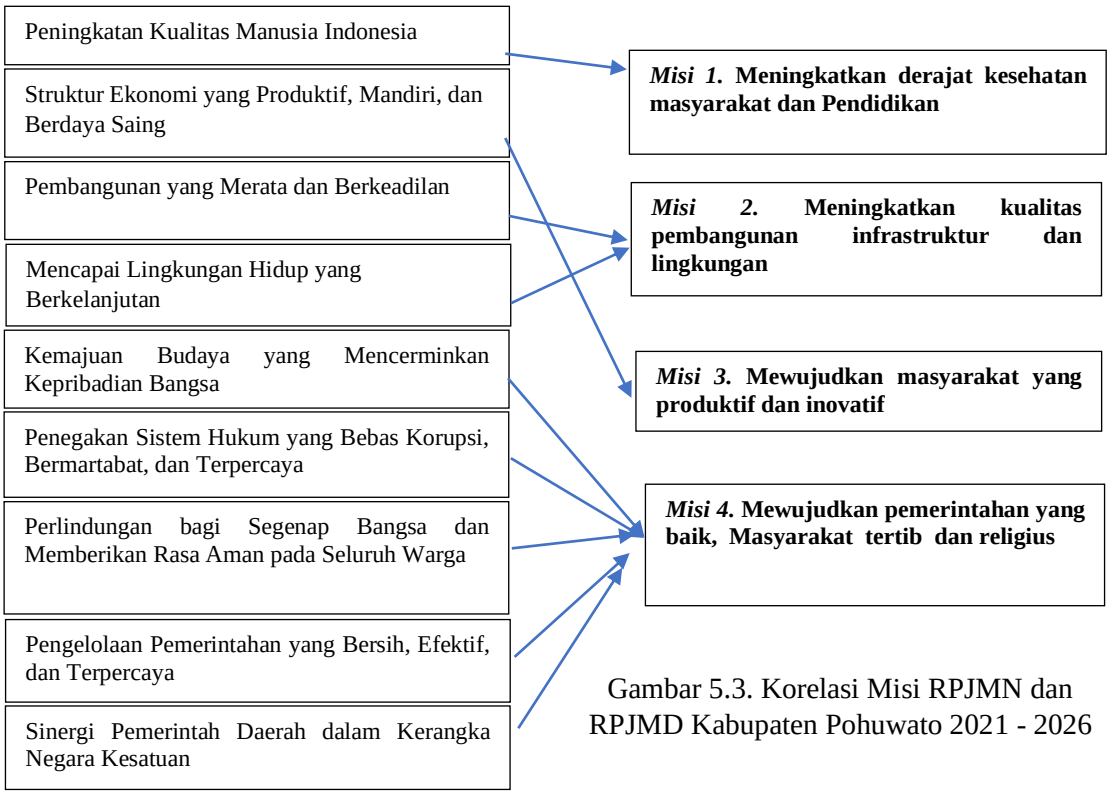

Gambar 5.3. Korelasi Misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Pohuwato 2021 - 2026

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna pencapaian Visi Kabupaten Pohuwato yakni terwujudnya Pohuwato Sehat, Maju dan Sejahtera, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang holistic, tematik dan terintegratif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

6.1.1. Misi 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pendidikan.

Adapun pencapaian dari tujuan dan sasaran misi 1 ini akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keluarga berencana
3. Memperbaiki sistem Pendidikan

4. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan perpustakaan
5. Meningkakan pengembangan dan pelestarian budaya daerah
6. Meningkatkan prestasi generasi muda disemua bidang

6.1.2. Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran dari misi 2 iniakan dicapai melalui pelaksanaan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastrukur jalan dan jembantan
2. Meningkatkan koordinasi dan dukungan percepatan penyelesaian infrastruktur perhubungan udara dan laut
3. Meningkatkan kualitas infrastrutur dan jaringan pelayanan air bersih dan sanitasi
4. Perluasan dan pemerataan akses jaringan internet dan telekominkasi
5. Meningkatkan koordinasi dan percepatan penyelesaian pembanguan stadion olah raga (sport center)
6. Meningkatkan kualitas jaringan dan layanan irigasi
7. Meningkatakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penagananan bencana alam
8. Meningkatkan kualitas perumahan warga miskin
9. Mewujudkan kampung asri tanpa kumuh
10. Menerapakan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
11. Mengendalikan pemanfaatan ruang

6.1.3. Misi 3. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 3, akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

1. Menjadikan Pohuwato sebagai lumbung pangan di Provinsi Gorontalo.
2. Menjadikan kabupaten Pohuwato sebagai lumbung ternak di Provinsi Gorontalo
3. Meningkatkan kualitas usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
4. Meningkatkan manajemen pengembangan pariwisata strategis daerah berbasis budaya dan kearifan lokal
5. Menumbuh kembangkan investasi yang bisa menyerap tenaga kerja lokal dan bekerjasama dengan masyarakat
6. Meningkatkan SDM dan produktifitas tenaga kerja
7. Meningkatkan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
8. Meningkatkan perlindungan sosial
9. Meningkatkan peran dan fungsi fasilitator pendamping dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
10. Peningkatkan komptensi kerja, kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
11. Peningkatan kemitraan antar level pemerintah dalam pemberdayaan pemuda penganggur
12. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

6.1.4. Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, Masyarakat tertib dan religius

Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi 4, akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berbasis Teknologi Informasi.
2. Meningkatkan sistem dan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

Adapun alur keterkaitan dari rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten

Pohuwato 2021 – 2026

TERWUJUDNYA POHUWATO SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA (POHUWATO SMS)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pendidikan.		
Terwujudnya masyarakat yang sehat, sumber daya manusia unggul dan berkarakter	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
		Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana

	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Memperbaiki sistem pendidikan
		Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan perpustakaan
		Meningkakan pengembangan dan pelestarian budaya daerah
		Meningkatkan prestasi generasi muda disemua bidang
Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan.		
Mewujudkan kualitas dan pemerataan infastruktur sesuai RTRW	Meningkatnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan strategis daerah	Meningkatkan kualitas infrastrukur jalan dan jembantan
		Meningkatkan koordinasi dan dukungan percepatan penyelesaian infrastruktur perhubungan udara dan laut
		Meningkatkan kualitas infrastrutur dan jaringan pelayanan air bersih dan sanitasi
		Perluasan dan pemerataan akses jaringan internet dan telekomuinikasi
		Meningkatkan koordinasi dan percepatan penyelesaian pembanguan stadion olahraga (sport center)
		Meningkatkan kualitas jaringan dan layanan irigasi

	Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas perumahan warga miskin
		Mewujudkan kampung asri tanpa kumuh
	Menigkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	Menerapakan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
		Mengendalikan pemanfaatan ruang
		Meningkatakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penagananan bencana alam
Misi 3. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif		
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatknya kesejahteraan masyarakat	Menjadikan Pohuwato sebagai lumbung pangan di Provinsi Gorontalo.
		Menjadikan kabupaten Pohuwato sebagai lumbung ternak di Provinsi Gorontalo
		Meningkatkan Kualitas usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis

		kemandirian dan potensi lokal
		Meningkatkan manajemen pengembangan pariwisata strategis daerah berbasis budaya dan kearifan lokal
		Menumbuh kembangkan investasi yang bisa menyerap tenaga kerja lokal dan bekerjasama dengan masyarakat
		Meningkatkan SDM dan produktifitas tenaga kerja
		Meningkatkan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatkan perlindungan sosial
		Meningkatkan peran dan fungsi fasilitator pendamping dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
	Meningkatnya investasi daerah dan lapangan pekerjaan	Peningkatkan komptensi kerja, kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
		Peningkatan kemitraan antar level pemerintah dalam pemberdayaan pemuda penganggur
		Peningkatan iklim investasi yang kondusif
Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, Masyarakat tertib dan religius		
Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,	Meningkatnya kualitas	Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel,

masyarakat yang aman dan tertibsertareligius	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel	inovatif dan berbasis Teknologi Informasi
		Meningkatkan sistem dan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan
		Meningkatkan peren Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam upaya pencegahan dalam memeliharan ketertiban dan ketentraman
	Meninkatnya pembinaan dan pengamalan nilai agama	Meningkatkan jam pelajaran keagamaan bagi peserta didik.
		Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan.

Sumber : Baperlitbang KabupatenPohuwato 2021

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran sehingga yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 dapat dicapai dengan baik.

6.2.1. Arah Kebijakan Misi 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pendidikan.

Adapun Arah kebijakan misi ini terdiri dari :

1. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengendalikan penyakit menular seperti cavid 19, demam berdarah, TBC, HIV/Aids dll dan penyakit tidak menular seperti darah tinggi, penyakit gula, jantung, dll. Adapun arah kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Pelaksanaan vaksinasi, khususnya covid 19 yang masih pandemi hingga tahun 2021 ini.
   - Penyediaan obat-obatan dan vaksin sesuai kebutuhan
   - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat
   - Peningkatan kemitraan dan keterpaduan dalam penanganan penyakit menular
   - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
   - Peningkatan SDM tenaga kesehatan yang menangani penyakit menular dan tidak menular
   - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
   - Kolaborasi dengan pemerintah desa/lurah dan kecamatan dalam mewujudkan kampung sehat asri dan bersih

2. Peningkatan kolaborasi program antar OPD dalam mewujudkan generasi sehat bebas stunting.

Arah kebijkan ini ditujukan untuk mendukung program nasional dalam pengentasan stunting, dengan kebijakan umum mencakup, antaranya :

- Penanganan spesifik oleh dinas kesehatan melalui perbaikan pelayanan kesehatan 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin, insiasi menyusui dini, pemberian makan pendamping ASI, perbaikan pola asuh, pelayanan posyandu.
- Pemberian makanan tambahan pada level sekolah PAUD/STK melalui dinas pendidikan
- Pembentukan TFC (*therapeutic Feeding Centre*) atau pusat pembinaan dan pemilihan gizi yang berkedudukan di Kabupaten dan juga di seluruh kecamatan/puskesmas
- Penanganan sensitif melalui OPD terkait (perkim/PUTR/Dikes) berupa penyediaan jamban, penanganan limbah domestik, penyediaan layanan air bersih.
- Pemberian bahan makanan bergizi dari dinas pertanian berupa buah dan sayur, dari dinas perikanan berupa ikan segar dan ikan olahan, dari dinas pangan berupa paket sembako.
- Pendampingan oleh LSM lokal dalam pelaksanaan Gerbos Emas (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting)
- Kemitraan dengan lembaga PKK, Darmawanita dalam penguatan eknomi keluarga khususnya dalam pemanfaatan lahan pekarangan
- Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

- Edukasi sebelum menikah oleh kementerian agama kerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas terkait (yang menangani kelaurga berencana)
- Penyuluhan keluarga berencana

3. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan.

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan managemen pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin, melalui kebijakan umum, antaranya sebagai berikut :

   - Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran di Puskesmas/rumah sakit dan dikes
   - Perbaikan sistem pelayanan melalui SOP kesehatan yang jelas, transparan dan diimpelmentasikan dengan baik.
   - Tatakelola ketersdiaan obat-obatan, oksigen dan bahan pakai habis secara baik dan berkelanjutan (kontinue)
   - Pembentukan Tim Patroli Kesehatan Masyarakat (TPKM) di setiap puskesmas
   - Peningkatan dukungan mobil ambulance bagi puskesmas dan rumah sakit dalam percepatan pelayanan rujukan bagi masyarakat
   - Pelaksanaan evaluasi secara kontinue sistem pelayanan kesehatan disemua level
   - Perlindungan kesehatan gratis bagi warga miskin melalui asuransi BPJS
   - Peningkatan SDM para kepala puskesmas melalui bimtek khusus
   - Pemenuhan SDM kesehatan dipuskes utamanya 9 jenis profesi yang harus ada.

- Perbaikan kapasitas kelembagaan puskesmas/rumah sakit dan dinas kesehatan
- Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, profesionalisme dan transparansi
- Peningkatan kualitas sistem pelaporan berbasis sistem informasi
- Pelayanan kesehatan gratis mobile ke kecamatan dan desa melalui Gebyar SMS (Gerakan Bersama Melayani Rakyat, Sehat Maju dan Sejahtera. Gebyar SMS dilaksanakan setiap tahun berpusat di Puskesmas dengan agenda utama pelayanan kesehatan gratis oleh dokter spesialis, bakti sosial berupa sunatan massal, dan kegiatan lainnya yang diintegrasikan dikecamatan setempat. Kegiatan dipimpin langsung bupati/wakil bupati dengan mengikutkan OPD terkait dengan konsep pelayanan menerapkan protokol kesehatan (semasa pandemi covid 19).

4. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan dan KB

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatan kualitas pembangunan infrastruktur kesehatan secara bertahap sehingga semakin relevan dan sesuai dengan harapan masyarakat., dengan kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Rekosntruksi 8 puskesmas yang belum sesuai standar pelayanan
   - Secara bertahap melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi Rumah Sakit Bumi Panua
   - Pembangunan prasarana penunjang dan penataan kawasan Rumah sakit pratama Gorontalo barat.
   - Peningkatan sarana dan prasarana KB

5. Peningkatan SDM Kesehatan dan KB

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas SDM kesehatan. dengan kebijakan umum mencakup antaranya :

   - Pemberian beasiswa dokter spesialist, Ners, keperawatan, dll
   - Melanjutkan program beasiswa satu dokter satu kecamatan bagi generasi pohuwato untuk memenuhi kebutuhan dokter secara permanen di daerah
   - Rekruktmen dokter dan tenaga medis sesuai kebutuhan daerah
   - Mendukung pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kesehatan
   - Pelatihan tenaga medis setiap tahun
   - Evaluasi profesionalisme medis setiap tahuan

6. Pengembangan/Peningkatan layanan kesehatan lingkungan masyarakat dan fasilitas publik.

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui perbaikan kesehatan lingkungan, fasilitas publik dan lainnya. kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Peningkatan desa/kelurahan ODF (desa/kelurahan bebas buang air besar sembarangan)
   - Peningkatan manajemen penanganan limbah B3 puskesmas dan rumah sakit
   - Pembinaan, penyuluhan, evaluasi fasilitas kesehatan publik
   - Pengendalian peredaran industri makanan

- Penempatan petugas kesehatan di desa terpencil/terjauh dari layanan kesehatan, 1 orang tenaga gizi dan 1 orang tenaga bidan di setiap desa
- Peningkatan peran dan fungsi tenaga penyuluh keluarga berencana
- Pembuatan sistem informasi layanan kesehatan berupa Sistem Informasi Layanan Kesehatan Masyarakat
- Pendampingan pengelolaan sistem informasi

7. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter;

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi hak setiap anak pohuwato dalam memperoleh pendidikan hingga 12 tahun dengan karakter pendidikan berkualitas dan religius. Kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Perbaikan kualitas perencanaan
   - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan PAUD/STK
   - Pemberian dukungan dana operasional untuk lembaga pendidikan TPQ yang memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswa STK dan SD
   - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD Sederajat
   - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP sederajat
   - Pemberian dukungan dana operasional bagi lembaga pendidikan yang bergerak dalam tahfiz Quran
   - Pemberian beasiswa bagi siswa/siswi miskin
   - Pemberian bantuan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah
   - Peningkatan SDM Guru

- Perbaikan sistem belajar mengajar
- Perbaikan pelayanan PKBM
- Perbaikan sistem pendidikan paket A, B dan C
- Perbaikan sistem administrasi dan manajemen pendidikan
- Pemanfaatan teklogi informasi dalam pengembangan pendidikan
- Pendampingan pengembangan pendidikan
- Peningkatan evaluasi dan pengawasan

8. Menumbuhkan peran dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk memupuk dan membangun komitmen masyarakat utamanya para orang tua siswa untuk bersama-sama mendukung dan berperan dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Secara umum kebijakannya mencakup, antaranya :

   - Peningkatan peran organisasi paguyuban sekolah
   - Peningkatan pengawasan orang tua terhadap anaknya diluar jam sekolah
   - Peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan bagi usia sekolah
   - Peningkatan peran pemerintah desa/kelurahan serta tokoh masyarakat dalam penurunan angka putus sekolah

9. Peningkatan pembinaan dan sarana prasarana perpustakaan

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatan peran dan fungsi perpustakaan diberbagai institusi. Kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Penataan dan perbaikan gedung perpustakaan daerah
   - Perbaikan pelayanan pada kantor perpustakaan daerah

- Peningkatan jumlah buku sesuai kebutuhan masyarakat
- Pembinaan perpustakaan desa/Kelurahan
- Pembinaan perustakaan sekolah
- Penyediaan regulasi perpustaakan
- Penyelenggaraan perpustakaan keliling

10. Pembinaan dan peningkatan prestasi pemuda dalam segala bidang

    Arah kebijakan ini ditujukan untuk memberikan semangat kepada para pemuda berprestasi disegala bidang untuk terus meningkatkan kompotensi dirinya sesuai bakan dan kemampuannya. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

    - Pelaksanaan bimtek bagi para lulusan SMA/SMK yang berminat masuk ke jenjang TNI, Polri dan STPDN
    - Pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi lulusan SMA/SMK/MA yang berprestasi bidang olahraga, bidang keagamaan (hafiz quran), dan bidang keseniaan, kebudayaan, dan lainnya.
    - Memberikan peluang dan bantuan bagi masyarakat miskin untuk melanjutkan studi sarjana 3 orang calon mahasiswa per desa/kelurahan.
    - Bantuan beasiswa S2 (Magister) bagi mahasiswa berprestasi /potensial sesuai kebutuhan daerah dibidang pertaniaan, perikanan, pertambangan, peternakan dan lingkungan di Perguruan Tinggi atau program studi yang terakreditasi.
    - Pembinaan organisasi kepemudaan
    - Peningkatan lomba/iven pemuda berprestasi diberbagai bidang keilmuan

11. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, sastra dan cagar/warisan budaya.

    Arah kebijakan ini ditujukan untuk mempertahankan kelestarian budaya luhur masyarakat Gorontalo dengan motto Adat bersandikan syara, dan syara bersandikan alquran. Disamping itu untuk menjaga warisan cagar budaya daerah yang ada saat ini. Kebijakan umum mencakup antaranya :

    - Penguatan lembaga adat mulai dari level kabupaten hingga desa
    - Pelaksanaan seminar terkait adat dan budaya lokal daerah
    - Penyusunan dan pencetakan buku-buku terkait adat dan budaya
    - Penetapan cagar budaya yang masih tersisa saat ini di Kecamatan paguat dan kecamatan lainnya
    - Pengembangan kesenian lokal daerah
    - Peningkatan sarana dan prasarana rumah adat
    - Peningkatan pemakaian bahasa gorontalo dilingkungan sekolah dan rumah
    - Pelaksanaan vestipal budaya lokal (meeraji, Tolangga dan Tumbilatohe)
    - Pelaksanaan vestipal pelaksanaan prosesi adat oleh generasi muda terintegrasi dengan iven wisata

6.2.2. Arah Kebijakan Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan.

Adapun arah kebijakan untuk mencapai misi ini meliputi :

1. Pembangunan dan revitalisasi sumber air bersih yanag berkualtas dan berkelanjutan

   Arah kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat. Adapun kebijakan umum mencakup :

   - Perbaikan jaringan dan instalasi pengelola air (IPA) yang sudah rusak atau tidak maksimal menyalurkan air.
   - Perbaikan/pemeliharaan jaringan air bersih
   - Pelaksanaan evaluasi kualitas air setiap tahun untuk menjamin air ditsribusi PDAM aman
   - Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi PDAM
   - Pembangunan IPA Randangan sebagai alternatif pemenuhan air untuk kawasan ibukota dan sekitarnya serta kawasan bandara Pohuwato
   - Pembentukan Pokja lingkungan atau nama lainnya sebagai wadah peningkatan koordinasi pada berbagai level kewenangan untuk percepatan pemulihan kawasan tangkapan air
   - Pelibatan pemerintah desa/kelurahan dan seluruh masyarakat dalam gerakan penanaman pohon baik diareal DAS dan wilayah tangkapan air, perkebunan dikemiringan 15 persen keatas dan pekarangan.

2. Meningkatkan dan menuntaskan Pembangunan Jalan Dan Jembatan yang menghubungkan lokasi-lokasis trategis

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas pada lokasi-lokasi strategis. Adapun kebijakan umum mencakup :

- Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan-jembatan yang menghubungkan centra-centra ekonomi seperti kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pasar, pariwisata dan pusat UMKM
- Pembangunan dan peningkatan jalan- jembatan menuju lokasi pendidikan
- Pembangunan dan peningkatan jalan-jembatan menuju lokasi pelayanan kesehatan
- Pembangunan dan peningkatan jalan-jembantan menuju terminal, bandara dan pelabuhan
- Pembangunan dan peningkatan jalan-jembatan menuju kawasan pemukiman utamanya kawasan rumah sehat komunal, kawasan rumah adat terpencil dan kawasan pemukiman di pedesaaan/kelurahan

3. Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pedesaan yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Peningkatan ketersediaan akses internet melalui kolaborasi dengan pemerintah desa.
   - Pembangunan tower telekomunikasi
   - Peningkatan ketersediaan rumah-rumah produksi untuk industri rumah tangga
   - Peningkatan konektivitas dan promosi pariwisata desa

- Fasilitasi penyediaan infrastrukur pelatihan untuk komoditi unggulan dimasing-masing desa/kelurahan
- Penyediaan sistem aplikasi pemasaran prodak unggulan desa/kelurahan

4. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk membangun dan mempertahankan fungsi bendungan sebagai sumber air untuk persawahan. Kebijkan umum mencakup, antaranya :

   - Refitalisasi bendungan di kecamatan Taluditi
   - Rehabilitasi jaringan irigasi
   - Pemeliharaan irigasi
   - Pembangunan saluran tersier
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi
   - Pembangunan sumur bor sebagai alternatif pengairan pada musim krisis air.

5. Pembangunan dan peningkatan kualitas fungsi drainase

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih, jauh dari genangan dan banjir. Kebijkan umum mencakup, antaranya :

   - Pembangunan drainase
   - Peningkatan drainase
   - Pemeliharaan drainase
   - Pengawasan fungsi drainse oleh kecamatan dan desa

6. Penanganan bencana alam maupun non alam

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan bencana secara terpadu.. Kebijkan umum mencakup, antaranya :

- Penyediaan logistik
- Penyelamatan krban bencana
- Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan
- Penguatan kelembagaan kebencanaan
- Penyediaan gedung operasi komando bencana
- Penyediaan master plan kebencanaan
- Penanganan infrastuktur pasca bencana
- Pengendalian secara terpadu bencana non alam

7. Percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis daerah

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Kebijkan umum mencakup, antaranya :

- Melanjutkan pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) yang representative untuk pengembangan minat dan bakat pemuda.
- Membangun Terminal angkutan darat kelas IA yang memiliki rest area dan dilengkapi fasilitas sebagai tempat peristirahatan.
- Mendukungan penuntasan pembangunan bandara Pohuwato sampai Ke Tingkat Operasional
- Rehabilitasi dan Pembangunan gedung perkantoran serta fasilitas publik lainnya
- Peningkatan koordinasi untuk peningkatan akses listrik
- Penyediaan gedung data center dan prasarana penunjang

8. Pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan serta pembangunan yang tidak sesuai tata ruang daerah. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman-tanaman produktif
   - Evaluasi secara kontinu kualitas air, tanah, udara
   - Keterpaduan kebijakan lingkungan antara kabupaten dan desa melalui Harmonisasi program kegiatan berbasis SDGs
   - Pemberian riword bagi desa yang memiliki keberpihanan terhadap penanganan lingkungan
   - Peningkatan luas tutupan lahan melalui gerakan penanaman pohon
   - Secara bertahap mendorong pegelolaan tanah pertanian menggunakan pupuk organik berkualitas yang ramah lingkungan
   - Pengembangan pertanian campuran (*mix farming*)
   - Pengembangan tanaman produktif terintegrasi jagung pada kawasan kemiringan diatas 15 persen keatas (terasering)
   - Pengembangan ekowisata baik itu wisata pertanian, wisata alam, dll
   - Peningkatan kualitas pangan daerah
   - Pemberdayaan kelompok usaha non hasil hutan
   - Pemberdayaan masyarakat penambang
   - Mendorong pengelolaan pertambangan emas ramah lingkungan

- Pengembangan perikanan yang ramah lingkungan
- Pengembangan sistem peternakan yang ramah lingkungan
- Peningkatan pengelolaan persampahan
- Peningkatan dan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara
- Peningkatan evaluasi perizinan lingkungan
- Pengembangan dan penataan hutan kota
- Peningkatan dan penataan fungsi Ruang Terbuka hijau
- Peningkatan peran dan fungsi Tim koordinasi tata ruang daerah
- Percepatan penyelesaian RDTR untuk seluruh kecamatan

9. Peningkatan penyediaan perumahan dan perbaikan kawasan pemukiman.

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses rumah sehat bagi masyarakat miskin dan para korban bencana alam serta perbaikan kualitas kawasan pemukiman. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Pembangunan rumah sehat dan layak huni bagi koban bencana
   - Pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin yang direlokasi akibat program pemerintah
   - Penyediaan rumah singgah bagi korban bencana prioritas kawasan yang sering ada bencana, khususnya banjir.
   - Menata dan melanjutkan peningkatkan kualitas kawasan perumahan sehat komunal, Rumah KAT, Rumah susun dan rumah commmunitas
   - Meningkatan PSU dikawasan rumah sehat komunal dan rumah kawasan adat terpencil (KAT)
   - Peningkatan kualitas rumah bagi warga miskin

- Pembangunan dan peningkatan kualitas septitank komunal
- Pembangunan dan peningkatan jamban
- Peningkatan askes air bersih pada kawasan pemukiman
- Merubah kawasan kumuh menjadi kawasan asri tanpa kumuh (KATAKU)
- Penyediaan regulasi terkait perumahan dan kawasan pemukiman

6.2.3. Arah Kebijakan Misi 3. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif

Adapun arah kebijakan dalam mencapai misi 3 meliputi :

1. Peningkatan Intensifikasi/ekstensifikasi, kualitas dan tata niaga pertanian, perkebunan dan perikanan

   Tujuan arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan serta pengembangan perikanan dan peternakan. Adapun kebijakan umum mencakup antaranya :

   - Peningkatan produksi dan produktivitas jagung dengan mengedepankan sistem pertanian organik
   - Peningkatan produksi dan produktivitas padi dengan mengedepankan sistem pertanian organik
   - Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman coklat dengan mengedepankan sistem pertanian organik
   - Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman buah-buahan dengan mengedepankan sistem pertanian organik

- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi rica, tomat dan bawang dengan mengedepankan sistem pertanian organik
- Penyediaan bibit tanaman perkebunan dengan prioritas lokasi lahan pada kemiringan 15 persen keatas
- Penyediaan benih padi dan jagung
- Penyediaan sarana dan prasarana prduksi pertanian
- Pembangunan jalan usaha tani
- Penyediaan obat-obatan
- Penyediaan pupuk gratis dan bersubsidi
- Pengadaan bantuan ternak
- Penguatan kelembagaan pertanian
- Pembuatan kawasan percontohan pembibitan dan pengembangan budidaya taripang dan nila salinitas
- Pengadaan perahu fiber
- Pengadaan peralatan perikanan tangkap
- Peningkatan sarana dan prasarana balai benih ikan
- Pembukaan jaringan pemasaran untuk produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan
- Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi berbasis komoditi unggulan lokal

2. Pengembangan agribisnis peternakan

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian terintegrasi peternakan sehingga pendapatan petani meningkat. Adapun kebijakan umum yang akan dilaksanakan adalah :

- Pembuataan blue print pengembangan peternakan di Kabupaten Pohuwato
- Pengembangan peternakan rakyat berbasis koperasi dan bumdes
- Terus memantapkan kerjasama dengan Kabupaten Gorotalo utara untuk kemudahan pemasaran ternak.
- Peningkatan SDM Peternakan
- Peningkatan sarana produksi peternakan
- Peningkatan sarana penunjang pengembangan peternakan
- Pendampingan program peternakan

3. Pengembangan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semboyan Bela, Berdayakan dan Beli Prodak Lokal (B3PL)

   Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun kebijakan umum mencakup :

   - Penguatan kelembagaan asosiasi indutri pohuwato
   - Peningkatan SDM pelaku industri
   - Memprioritaskan bantuan kepada tenaga kerja yang bersertifikat, yang telah dilatih BLK Pohuwato atau lembaga lainnya.
   - Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan wira usaha baru berbasis komoditi unggulan daerah

- Pendampingan dan pembinaan wirausaha menuju kemandirian
- Penyediaan sarana dan prasaran industri
- Revitalisasi pasar sebagai pusat perdagangan
- Penguatan peran dan fungsi koperasi
- Pembemberdayaam koperasi dan UMKM
- Menumbuhkan gerakan Bela, Berdayakan dan Beli Prodak Lokal (B3PL)

4. Pengembangan dan diversifikasi pangan

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan lokal serta diragam jenis pangan lokal. Adapun kebijakan umum yang akan dilaksanakan, antaranya adalah :

   - Penuntasan desa rawan pangan
   - Peningkatan konsumsi kalori per kapita per hari
   - Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan
   - Penyediaan cadangan pangan
   - Kampenye konsumsi pangan lokal

5. Menjadikan Pohuwato menuju pusat ekonomi dan pariwisata dikawasan Teluk Tomini

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi kawasan teluk tomini untuk kemajuan dan daerah dan kesejahteraan masyarakat pohuwato. Kebijakan umum mencakup antaranya :

   - Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan kawasan teluk tomini.

- Membangun kerjasama antara daerah yang berada di kawasan teluk tomini, utamanya kontivitas pariwisata, jasa transportasi dan layanan kesehatan

6. Peningkatan perlindungan sosial, pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan

   Arah kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan peningkatan pemberdayaan perempuan. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Terus mengupdate, menjaga kualitas dan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan OPD terkait sebagai basis utama sasaran program penanggulangan kemiskinan.
   - Penyediaan program perlindungan sosial berupa asuransi petani jagung, padi, ternak, perikanan, ketenagakerjaan dan kesehatan
   - Penyedian program bantuan sosial bagi warga miskin
   - Peningkatan peran dan fungsi organisasi perempuan dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan potensi lainnya
   - Pemberdayaan kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
   - Pemberdayaan oragnisasi perempuan
   - Peningkatan sisitem perencanaan dan penganggaran berbasis gender

7. Perbaikan pelayanan sistem investasi

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk kemudahan dan meningkatkan iklim investasi di Pohuwato. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Penyediaan pelayanan perizinan berbasis sistem informasi secara on line

- Perbaikan sarana dan prasarana pendukungan pelayanan investasi
- Perbaikan sistem layanan
- Pengembangan regulasi yang mendukung investasi
- Peningkatan SDM layanan invastasi
- Peningkatan nilai dan realisasi investasi

8. Perbaikan sisitem ketenaga kerjaan dan pengangguran

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap tenaga kerja serta menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Peningkatan SDM tenaga kerja
   - Pembinaan dan evaluasi para pekerja diperusahaan
   - Peningkatan peran dan fungsi balai latihan kerja
   - Peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja
   - Penyediaan data base pencari kerja
   - Pendampingan ketenaga kerjaan

9. Pengembangan infrastruktur, sosial dan ekonomi transmigrasi

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, sosial dan ekonomi kawasan transmigrasi. Adapun kebijakan umum yang akan dilaksanakan, antaranya :

   - Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan air bersih
   - Penyediaan akses telekomunikasi
   - Penyediaan akses ekonomi
   - Penyediaakan fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan

- Penyediaan fasilitas sosial
- Pemberdayaan ekonomi

6.2.4. Arah Kebijakan Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, Masyarakat tertib dan religius

Adapun arah kebijakan pada misi 4 ini meliputi :

1. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan desa

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dan prestasi pemerintah kabupaten pohuwato diajang nasional dan juga kinerja pemerintah desa. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

   - Penyesuaian Sistem Organisasi Tata Kelola (SOTK) pemerintahan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta efektik menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
   - Peningkatan disiplin dan budaya kerja ASN
   - Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran
   - Perbaikan sistem pengelolaan aset
   - Pengembangan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah
   - Peningkatan pembinaan pengawasan internal
   - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
   - Peningkatan kualitas sistem evaluasi dan pelaporan
   - Konektivitas sistem perencanaan dan pembanguan antara desa dan kabupaten
   - Perbaikan sistem kinerja pemerintahan desa/kelurahan

- Peningkatan peran dan fungsi kecamatan
- Peningkatan rekrutmen ASN
- Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa
- Peningkatan peran dan fungsi lembaga DPRD
- Peningkatan peran dan fungsi kesbangpol
- Peningkatan strata pendidikan ASN melalui program beasiswa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

2. Peningkatan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
   - Peningkatan kapasitas sumberdaya personil dalam penegakan ketentraman, ketertiban dan keindahan
   - Peningkatan operasi penegakan perda keindahan, keamanan dan ketertiban umum
   - Peningkatan kinerja kepala desa/lurah dan camat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional satpol PP
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas mobil pemadam kebakaran
   - Penguatan kelembagaan kebencanaan
   - Penyediaan bahan kebutuhan untuk bencana
   - Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan
   - Sukses penyelenggarann pilkada serentak tahun 2024
   - Sukses penyelenggaraan pilkades serentak tahun 2022
   - Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, kemasyarakat, keagamaan dan kemahasiswaan

3. Peningkatan pengamalan nilai-nilai spritual dan budaya
    - Peningkatan kegiatan belajar keagamaan khususnya agama islam melalui TPQ dan mesjid / mushollah
    - Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan keagamaan
    - Penyediaan pusat kegiatan islam (*islamic center*) di Ibukota Kabupaten
    - Dukungan operasional kegiatan pendidikan hafiz qu'ran di tingkat kabupaten dan kegiatan pesantren yang mencetak para hafiz qur'am di kecamatan dan desa/kelurahan
    - Penyelenggaraan STQH mulai dari level desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten
    - Peningkatan peran dan fungsi baznas

Selanjutnya dari strategi dan arah kebijakan serta kebijakan umum di atas akan dijadikan arahan dalam mengharmonisasi program dan indikator yang telah ditetapkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana tabel 6.2. yakni Program Pembangunan daerah disertai pagu indikatif dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6.2.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato 2021 – 2026 disertai Pagu Indikatif.

Misi **Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat dan Pendidikan**
Tujuan **Terwujudnya masyarakat yang sehat, sumber daya manusia unggul dan berkarakter**

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021 (Transisi)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2026		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 1.																		
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat																		
	Program																	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	150 / 100000 KH	(137/ 100000 KH)	74.633.300.000	125 /100000 KH	83.715.000.000	113 /100000 KH	87.102.000.000	103 /100000 KH	94.603.000.000	94 /100000 KH	98.254.000.000	93 /100000 KH	90.032.000.000	93 /100000 KH	528.339.300.000	DINAS KESEHATAN
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2,25 /1000 KH	(2.05/1000 KH)	-	1,87 /1000 KH	-	1,70 /1000 KH	-	1,54 /1000 KH	-	1,40 /1000 KH	-	1,39 /1000 KH	-	1,39 /1000 KH	-	DINAS KESEHATAN
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KESEHATAN
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6,62 /1000 KH	(5.82/1000 KH)	-	5,29 /1000 KH	-	4,81 /1000 KH	-	4,37 /1000 KH	-	3,98 /1000 KH	-	3.94 /1000 KH	-	3,94 /1000 KH	-	DINAS KESEHATAN

5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KESEHATAN
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	353 /100000 Penduduk	333/100000 Penduduk	-	318 /100000 Penduduk	-	300 /100000 Penduduk	-	276 /100000 Penduduk	-	259 /100000 Penduduk	-	259 /100000 Penduduk	-	259 /100000 Penduduk	-	DINAS KESEHATAN
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	95 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KESEHATAN
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	90 %	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	DINAS KESEHATAN
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita hipertensi	56 %	59 %	-	62 %	-	65 %	-	68 %	-	71 %	-	71 %	-	71 %	-	DINAS KESEHATAN
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Gangguan Jiwa Berat	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Militus	64,78 %	68,70 %	-	72,1 %	-	75,7 %	-	79,5 %	-	83,5 %	-	83,5 %	-	83,5 %	-	DINAS KESEHATAN

13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan imunisasi atas penyakit pandemi yang melemahkan daya tahan tubuh	0 %	50 %	-	55 %	-	60 %	-	65 %	-	70 %	-	70 %	-	70 %	-	DINAS KESEHATAN
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase KLB yang tertangani	100 %	98 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KESEHATAN
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase korban bencana alam yang tertangani	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KESEHATAN
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat sembuh atas penyakit pandemi yang melemahkan daya tahan tubuh	98 %	100 %	-	55 %	-	60 %	-	65 %	-	70 %	-	70 %	-	70 %	-	DINAS KESEHATAN
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tipe Rumah Sakit	C Kelas	C Kelas		C Kelas	1.050.000.000	B Kelas	1,103,000,000	B Kelas	1.158.000.000	B Kelas	1.216.000.000	B Kelas	1.276.000.000	B Kelas	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	1/1000 Dokter /Penduduk	1/1000 Dokter /Penduduk		1/1000 Dokter /Pen duduk	8.511.000.000	1/1000 Dokter /Pen duduk	8.937.000.000	1/1000 Dokter /Pen duduk	9.384.000.000	1/1000 Dokter /Pen duduk	9.853.000.000	1/1000 Dokter /Pen duduk	9.853.000.000	1/1000 Dokter /Pen duduk	46.538.000.000	DINAS KESEHATAN
19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4/1000 dokter/ penduduk	4/1000 Dokter /Penduduk		4/1000 Dokter /Pen duduk	-	4/1000 Dokter /Pen duduk	-	4/1000 Dokter /Pen duduk	-	4/1000 Dokter /Pen duduk	-	4/1000 Dokter /Pen duduk	-	4/1000 Dokter /Pen duduk	-	DINAS KESEHATAN
20	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotik dan toko obat yang memenuhi syarat	100 %	100%	642.000.000	100%	731.000.000	100%	769.000.000	100%	808.100.000	100%	849.000.000	100%	854.000.000	100%	4.653.100.000	DINAS KESEHATAN

21	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persetase industri rumah tangga yang memenuhi upaya kesehatan	100 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita	1 balita		918.800.000	1 balita	923.000.000	1 balita	927.400.000	1 balita	932.000.000	1 balita	936.800.000	1 balita	936.800.000	1 balita	5.574.800.000	DINAS KESEHATAN
23	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2 anak	2 anak	188.000.000	2 anak	425.000.000	2 anak	262.000.000	2 anak	276.000.000	2 anak	289.000.000	2 anak	407.000.000	2 anak	1.847.000.000	DINAS KESEHATAN
24	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Akseptor KB	74,14 %	74,00 %	4.750.000.000	74 %	8.172.000.000	74 %	8.591.000.000	74 %	9.022.000.000	74 %	9.471.000.000	74 %	9.944.000.000	74 %	49.950.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	46,7 %	46,7 %	211.000.000	46,7 %	474.000.000	46,7 %	533.000.000	46,7 %	555.000.000	46,7 %	578.000.000	46,7 %	601.000.000	46,7 %	2.952.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Sasaran 1			**81.343.100.000**		**104.001.000.000**		**107.121.400.000**		**116.738.100.000**		**121.446.800.000**		**113.903.800.000**		**639.854.200.000**	
Sasaran 2																		
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat																		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,83 %	61,83 %	20.876.000.000	62,44 %	21.586.000.000	63,07 %	22.331.000.000	63,70 %	23.113.000.000	64,34 %	23.935.000.000	64,98 %	24.789.000.000	63,08 %	136.630.000.000	DINAS PENDIDIKAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	103,75 %	103,19 %	-	102 %	0	101 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	101,20 %		DINAS PENDIDIKAN
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,85 %	90,56 %	-	92,44 %	0	92,44 %	-	96,18 %	-	98,10 %	-	100 %	-	94,49 %		DINAS PENDIDIKAN
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melek huruf penduduk usia 7 - 18 tahun, perempuan dan laki-laki	100 %	100 %	-	100 %	0	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %		DINAS PENDIDIKAN

5	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76 %	80 %	40.000.000	84 %	50.000.000	88 %	60.000.000	92 %	70.000.000	96 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	380.000.000	DINAS PENDIDIKAN
6	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah PAUD yang memiliki izin	100,00 %	0,00 %	-	100,00 %	76.000.000	100,00 %	40.000.000	100,00 %	44.000.000	100,00 %	98.000.000	100,00 %	100.000.000	100,00 %	358.000.000	DINAS PENDIDIKAN
7	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rasio jumlah buku bahasa daerah per jumlah murid SD/MI dan SMP/Mts.	3,78 %	0,00 %	-	5 %	110.000.000	5,30 %	115.000.000	6 %	119.000.000	6 %	125.000.000	6 %	125.000.000	5 %	594.000.000	DINAS PENDIDIKAN
8	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan dalam 1 Tahun	65,00 %	66,00 %	4.848.000.000	67,00 %	5.199.000.000	68,00 %	5.460.000.000	69,00 %	5.734.000.000	70,0 %	6.019.000.000	72,00 %	6.322.000.000	80,0 %	33.582.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda berprestasi tingkat kab, provinsi, nasional dan internasional	100 %	100 %	1.800.000.000	100 %	2.390.000.000	100 %	2.510.000.000	100 %	2.635.000.000	100 %	2.767.000.000	100 %	2.905.000.000	100 %	15.007.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan organisasi cabang olahraga	100 %	100 %	575.000.000	100 %	1.115.000.000	100 %	1.171.000.000	100 %	1.229.000.000	100 %	1.291.000.000	100 %	1.355.000.000	100 %	6.736.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikursertaan organisasi kepramukaan pada setiap kegiatan tingkat kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional	85 %	80 %	-	85 %	45.000.000	90 %	47.000.000	95 %	50.000.000	100 %	52.000.000	100 %	55.000.000	100 %	249.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penggiat kebudayaan yang berumur 20 - 40 tahun dari total penggiat kebudayaan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	416.000.000	100 %	437.000.000	100 %	459.000.000	100 %	482.000.000	100 %	414.000.000	100 %	2.308.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
14	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan telah dilindungi pemda	100 %	100 %	-	100 %	78.000.000	100 %	230.000.000	100 %	244.000.000	100 %	166.000.000	100 %	175.000.000	100 %	893.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
15	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik	30 %	49 %	16.000.000	55 %	70.000.000	70 %	75.000.000	80 %	79.000.000	85 %	83.000.000	90 %	72.000.000	100 %	395.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang sangat penting terlindungi dan terselamatkan	65 %	70 %	21.000.000	75 %	65.000.000	80 %	68.000.000	85 %	71.000.000	90 %	74.000.000	100 %	76.000.000	100 %	375.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
17	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase arsip yang bisa akses	0 %	0 %	-	60 %	25.000.000	60 %	26.000.000	65 %	30.000.000	65 %	28.000.000	65 %	29.000.000	65 %	138.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Naskah Kuno Yang tersedia diperpustakaan Daerah	0 %	0 %	-	15 %	60.000.000	25 %	64.000.000	40 %	68.000.000	55 %	72.000.000	70 %	76.000.000	85 %	340.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jumlah sasaran 2					**28.276.000.000**		**31.285.000.000**		**32.634.000.000**		**33.945.000.000**		**35.272.000.000**		**36.573.000.000**		**197.985.000.000**	
Total Jumlah					**109.619.100.000**		**135.286.000.000**		**139.755.400.000**		**150.683.100.000**		**156.718.800.000**		**150.476.800.000**		**837.839.200.000**	

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan dan pemerataan infastruktur serta tata kelola lingkungan sesuai RTRW

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021 (Transisi)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2026		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 1.																		
Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis daerah																		
	Program																	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	77,25 %	84,60 %	164.515.280.000	89.97 %	145.764.490.000	91.40 %	30.486.910.000	93.04 %	28.436.910.000	94.79 %	26.236.910.000	96.99 %	47.086.910.000	96.99 %	442.527.410.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	84,05 %	84,56 %	2.345.000.000	87 %	28.412.000.000	89 %	10.040.000.000	91 %	10.542.000.000	93 %	11.069.000.000	94 %	11.291.000.000	94 %	73.699.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Jasa Konstruksi yang terlatih	0 %	0 %	-	20 %	300.000.000	40 %	200.000.000	60 %	350.000.000	80 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	1.250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	58,34 %	58,34 %	-	66 %	3.613.000.000	68 %	3.793.000.000	70 %	3.983.000.000	72 %	4.182.000.000	74 %	4.391.000.000	74 %	19.962.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100 %	100 %	3.434.207.000	100 %	11.152.000.000	100 %	19.343.000.000	100 %	3.481.000.000	100 %	3.481.000.000	100 %	3.760.000.000	100 %	44.651.207.000	DINAS PERHUBUNGAN
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terminal dalam kondisi baik dan difungsikan	50 %	50 %		50 %	0	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %		DINAS PERHUBUNGAN
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase desa yang masih sulit (1 kali seminggu) terakses jasa kenderaan roda empat	20 %	20 %		20 %	0	30 %	-	50 %	-	70 %	-	80 %	-	90 %		DINAS PERHUBUNGAN
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase PAD transportasi	80 %	80 %		100 %	0	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %		DINAS PERHUBUNGAN
9	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase badan usaha pelayaran yang memiliki izin	100 %	5 %	200.000.000	100 %	0	0 %	-	0 %	-	100 %	500.000.000	100 %		100 %	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

10	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Pesentase lokasi pendaratan dan lepas landas helikopter yang memiliki izin	50 %	60 %	1.999.999.999	80 %	0	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	80 %	1.999.999.999	DINAS PERHUBUNGAN
11	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	95 %	1.210.000.000	96 %	1.320.500.000	97 %	1.384.025.000	98 %	1.450.725.000	99 %	1.520.761.000	100 %	1.293.848.000	100 %	8.179.859.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
12	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang sistem aplikasinya telah terintegrasi dengan OPD lainnya, Provinsi dan nasional	90 %	100 %	3.070.000.000	100 %	3.974.000.000	100 %	10.117.000.000	100 %	3.554.000.000	100 %	3.732.000.000	100 %	3.918.000.000	100 %	28.365.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
13	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pesentase desa/kelurahan yang telah terakses jaringan internet dengan baik dan lancar	60 %	65 %	-	100 %	0	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	74,76 %	76,55 %	7.678.000.000	79.72 %	13.185.000.000	82,99 %	13.845.000.000	86.06 %	14.537.000.000	89.23 %	15.263.000.000	92.40 %	16.027.000.000	92.40 %	80.535.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai (ws) kewenangan kabupaten	90.58 Rasio	90,58 Rasio		92.08 Rasio	0	93.58 Rasio	-	95.08 Rasio	-	96.58 Rasio	-	98.08 Rasio	-	98.08 Rasio	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,25 %	72,71 %		76,17 %	0	79,63 %	-	83,09 %	-	86,55 %	-	90,01 %	-	93,47 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai (ws) kewenangan kabupaten	85.22 Rasio	86,92 Rasio	52.396.000.000	88.62 Rasio	79.760.000.000	90 Rasio	78.060.000.000	92.02 Rasio	73.900.000.000	93.72 Rasio	33.232.000.000	95.42 Rasio	30.879.000.000	95.42 Rasio	348.227.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	886.000.000	100 %	4.395.000.000	100 %	3.320.000.000	100 %	3.820.000.000	100 %	3.220.000.000	100 %	3.221.000.000	100 %	18.862.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
19	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah korban bencana yang terlayani logistik dengan baik	100 %	100 %	851.000.000	100 %	1.990.000.000	100 %	1.672.000.000	100 %	1.908.000.000	100 %	2.144.000.000	100 %	2.299.000.000	100 %	10.013.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Jumlah sasaran 1				**238.585.486.999**		**293.865.990.000**		**172.260.935.000**		**145.962.635.000**		**104.780.671.000**		**124.366.758.000**		**1.078.971.475.999**	

Sasaran 2																		
Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat.																		
	Program :																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pembangunan / Rehab Rumah Terdampak Bencana Alam	10 %	10 %	-	100 %	1.548.000.000	100 %	1.433.000.000	100 %	1.438.000.000	100 %	1.438.000.000	100 %	1.438.000.000	100 %	7.295.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	0 %	0 %	-	20 %	635.000.000	40 %	235.000.000	60 %	235.000.000	80 %	35.000.000	100 %	185.000.000	100 %	1.325.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni yang tertangani	75,10 %	77,00 %	-	79 %	10.800.000.000	81 %	10.800.000.000	83 %	10.800.000.000	84 %	10.800.000.000	86 %	10.800.000.000	86 %	54.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan pemukiman yang telah memiliki PSU	24 %	0 %	-	41 %	1.870.000.000	59 %	1.320.000.000	76 %	455.000.000	94 %	1.320.000.000	100 %	920.000.000	100 %	5.885.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan yang bekerjasama dengan pemerintah	76.47 %	0	-	82.35 %	120.000.000	88.24 %	120.000.000	94.12 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	600.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Jumlah Sasaran 2				**0**		**14.973.000.000**		**13.908.000.000**		**13.048.000.000**		**13.713.000.000**		**13.463.000.000**		**69.105.000.000**	
Sasaran 3																		
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang																		
	Program :																	
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen lingkungan hidup yang terfasilitasi	60 %	65 %	100.000.000	70 %	550.000.000	75 %	225.000.000	80 %	250.000.000	85 %	250.000.000	90 %	250.000.000	100 %	1.625.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan (Kualitas air)	20 Nilai	52,6 Nilai		52.7 Nilai	0	52.8 Nilai	-	52.9 Nilai	-	52.10 Nilai	-	52.11 Nilai	-	65 Nilai		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Udara)	20 Nilai	92,19 Nilai		92.29 Nilai	0	92.39 Nilai	-	92.49 Nilai	-	92.59 Nilai	-	92.69 Nilai	-	95 Nilai		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Lingkungan Hidup (Luasan Tutupan Lahan)	20 Nilai	72,99 Nilai		73.14 Nilai	0	73.28 Nilai	-	73.45 Nilai	-	73.64 Nilai	-	73.84 Nilai	-	75 Nilai		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan	20 Nilai	72,50 Nilai	701.000.000	72.80 Nilai	1.610.000.000	73.10 Nilai	1.612.000.000	73.50 Nilai	1.627.000.000	74 Nilai	1.392.000.000	74.60 Nilai	1.147.000.000	75 Nilai	8.089.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase lokasi yang dikelola	50 %	0 %	-	60 %	1.140.000.000	63 %	1.040.000.000	81 %	680.000.000	90 %	680.000.000	100 %	680.000.000	100 %	4.220.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Penghasil LB3 Yang Berizin	56 %	67 %	129.000.000	78 %	535.000.000	89 %	237.000.000	100 %	239.000.000	0 %	-	0 %	-	100 %	1.140.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang mendapat persetujuan lingkungan yang dilayani	65 %	70 %	397.000.000	75 %	490.000.000	80 %	500.000.000	85 %	505.000.000	90 %	475.000.000	95 %	475.000.000	100 %	2.842.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase desa/kelurahan dengan resiko tinggi yang tertangani	30 %	0 %	-	50 %	1.150.000.000	60 %	1.105.000.000	65 %	1.075.000.000	70 %	1.075.000.000	80 %	1.075.000.000	90 %	5.480.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase penghargaan yang diberikan	0 %	0 %	-	40 %	500.000.000	50 %	500.000.000	60 %	500.000.000	75 %	500.000.000	90 %	500.000.000	100 %	2.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengaduan lingkungan yang tertangani dengan baik	0 %	5 %	80.000.000	10 %	200.000.000	15 %	200.000.000	20 %	250.000.000	25 %	275.000.000	25 %	275.000.000	25 %	1.280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Pengurangan Sampah	22 %	24 %	3.561.000.000	26 %	5.039.000.000	27 %	4.792.000.000	28 %	5.569.000.000	30 %	5.246.000.000	30 %	5.969.000.000	30 %	30.176.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Penanganan Sampah	75 %	74 %		73 %	0	72 %	-	71 %	-	70 %	-	70 %	-	70 %	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak	80 %	0 %		82,80 %	3.400.000.000	85,61 %	3.570.000.000	88,41 %	3.747.000.000	91,21 %	3.933.000.000	94.02 %	4.129.000.000	94.02 %	18.779.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase bangunan dan gedung yang sesuai RTRW	20 %	20 %	2.580.000.000	20 %	2.528.000.000	20 %	2.829.000.000	20 %	1.846.900.000	20 %	897.400.000	20 %	516.800.000	100 %	11.198.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kecamatan yang telah memiliki RDTR (rencana Detai Tata Ruang)	0 %	0 %	-	0 %	0	7.7 %	-	15.4 %	-	23.1 %	-	0 %	-	46 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber IMB per- satuan bangunan	0,017 Rasio	0,017 Rasio	980.000.000	0,018 Rasio	5.840.000.000	0,019 Rasio	5.972.000.000	0,020 Rasio	6.098.000.000	0,021 Rasio	6.227.000.000	0,022 Rasio	6.538.000.000	0,022 Rasio	31.655.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan dan Gedung Pemerintah Daerah	107 %	82 %		89 %	0	90 %	-	92 %	-	94 %	-	95 %	-	95 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah	13 %	13 %		20 %	0	27 %	-	33 %	-	40 %	-	47 %	-	47 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase data bangunan dan gedung yang terupdate dalam sistem informasi bangunan dan gedung dalam tahun N	0 %	0 %		0,18 %	0	0,36 %	-	0,54 %	-	0,73 %	-	0,86 %	-	0,86 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Jumlah sasaran 3				**8.528.000.000**		**22.982.000.000**		**22.582.000.000**		**22.386.900.000**		**20.950.400.000**		**21.554.800.000**		**118.984.100.000**	
	Total Jumlah				**247.113.486.999**		**331.820.990.000**		**208.750.935.000**		**181.397.535.000**		**139.444.071.000**		**159.384.558.000**		**1.267.060.55.999**	

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang produktif dan Inovatif
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021 (Transisi)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2026		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 1																		
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat																		
	Program :																	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Tanaman pangan	99 %	101 %	6.514.000.000	102 %	10.266.000.000	103 %	10.509.000.000	104 %	10.663.000.000	105 %	11.719.000.000	106 %	3.016.000.000	106 %	52.687.000.000	DINAS PERTANIAN
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Hortikultura	106 %	108 %		109 %	-	110 %	-	111 %	-	112 %	-	113 %	-	114 %		DINAS PERTANIAN
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Tanaman Perkebunan	109,72 %	110,00 %		111 %	-	112 %	-	113 %	-	114 %	-	115 %	-	116 %		DINAS PERTANIAN
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Peternakan	104,13 %	104,14 %		105 %	-	106 %	-	107 %	-	108 %	-	109 %	-	110 %		DINAS PERTANIAN
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas lahan Tanaman Jagung dan Padi yang mendapatkan bantuan Benih	52,48 %	88,89 %		89,40 %	-	90,12 %	-	90.86 %	-	91.75 %	-	93.56 %	-	93,56 %		DINAS PERTANIAN
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan budidaya pertanian yang mendapatkan bantuan pupuk	52,48 %	88,89 %		89,40 %	-	90,12 %	-	90,86 %	-	91.75 %	-	93.56 %	-	93.56 %		DINAS PERTANIAN
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi per hektar	4,7 Ton/Ha	5,2 Ton/Ha		5,3 Ton/Ha	-	5,4 Ton/Ha	-	5,5 Ton/Ha	-	5,6 Ton/Ha	-	5,7 Ton/Ha	-	5,7 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Jagung per hektar	5,70 Ton/Ha	5,8 Ton/Ha		5,90 Ton/Ha	-	6,0 Ton/Ha	-	6,10 Ton/Ha	-	6,20 Ton/Ha	-	6,30 Ton/Ha	-	6,30 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN

9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Kakao per hektar	1,1 Ton/Ha	1,2 Ton/Ha		1,3 Ton/Ha	-	1,4 Ton/Ha	-	1,5 Ton/Ha	-	1,6 Ton/Ha	-	1,7 Ton/Ha	-	1,7 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata-rata Produktivitas tanaman buah-buahan dan Sayuran unggulan per hektar	1,82 Ton/Ha	1,879 Ton/Ha		1.935 Ton/Ha	-	1.975 Ton/Ha	-	2,053 Ton/Ha	-	2,11 Ton/Ha	-	2,17 Ton/Ha	-	2,.17 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Cabe Per hektar	4 Ton/Ha	4,2 Ton/Ha		4,7 Ton/Ha	-	4,9 Ton/Ha	-	5,0 Ton/Ha	-	5,5 Ton/Ha	-	6,0 Ton/Ha	-	6,0 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Bawang MerahPer hektar	4 Ton/Ha	5 Ton/Ha		6,0 Ton/Ha	-	7,0 Ton/Ha	-	7,5 Ton/Ha	-	8,0 Ton/Ha	-	8,5 Ton/Ha	-	8,5 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Jeruk Per hektar	35,8 Ton/Ha	35,85 Ton/Ha		36,0 Ton/Ha	-	36,5 Ton/Ha	-	37,0 Ton/Ha	-	37,5 Ton/Ha	-	38,0 Ton/Ha	-	38,0 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Durian per hektar	24,53 Ton/Ha	24,55 Ton/Ha		26 Ton/Ha	-	26,5 Ton/ Ha	-	27 Ton/H a	-	27,5 Ton/ Ha	-	28 Ton/H a	-	28 Ton/H a		DINAS PERTANIAN
15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pisang (Rumpun)	14,76 Ton/Ha	15 Ton/Ha		16 Ton/Ha	-	17 Ton/Ha	-	18 Ton/Ha	-	19 Ton/Ha	-	20 Ton/Ha	-	20 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ternak sapi yang berhasil berkembang biak melalui Inseminasi Buatan (IB)	25,29 %	27,18 %		39,3 %	-	42,19 %	-	43,81 %	-	45.42 %	-	49,68 %	-	49,68 %		DINAS PERTANIAN
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok pertanian/perkebunan/hortikul tura yang teintegrasi dgn sektor lain dan dikelola ramah lingkungan	37,11 %	40,20 %		43,29 %	-	46,38 %	-	49,47 %	-	52,57 %	-	55,66 %	-	55,66 %		DINAS PERTANIAN
18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan lahan pertanian yang terakses irigasi, jalan usaha tani dan embung dengan kondisi baik	25,49 %	28,89 %	4.655.000.000	30,55 %	8.756.000.000	32,01 %	6.183.000.000	33,6 %	5.733.000.000	36,12 %	5.433.000.000	38,58 %	5.433.000.000	38,58 %	36.193.000.000	DINAS PERTANIAN

19	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit ternak yang dapat tertangani dengan baik dan sembuh	76.46 %	80,71%	343.830.000	85,19 %	1.246.050.000	90,31 %	925.600.000	94,89 %	1.005.600.000	97.59 %	1.061.390.000	105,86 %	1.135.030.000	106,86 %	5.717.500.000	DINAS PERTANIAN
20	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan luas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dapat diatasi akibat bencana pertanian (penyakit, dll)	100 %	100 %	1.269.000.000	100 %	2.179.000.000	100 %	2.203.000.000	100 %	2.203.000.000	100 %	2.203.000.000	100 %	2.203.000.000	100 %	12.260.000.000	DINAS PERTANIAN
21	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase toko usaha pertanian dan peternakan yang memiliki izin	100 %	100 %	129.000.000	100 %	110.000.000	100 %	125.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	140.000.000	100 %	724.000.000	DINAS PERTANIAN
22	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok Tani Yang sudah kuat kelembagaannya	5,87 %	9,87 %	8.259.000.000	13,87 %	2.481.000.000	17,88 %	2.462.000.000	21,88 %	2.672.000.000	25,88 %	2.623.000.000	29,89 %	2.760.000.000	29,89 %	21.257.000.000	DINAS PERTANIAN
23	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan dari total produksi daerah	100 %	100 %	481.000.000	100 %	3.726.000.000	100 %	3.276.000.000	100 %	3.590.000.000	100 %	3.559.000.000	100 %	3.619.000.000	100 %	18.251.000.000	DINAS PERIKANAN
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan tangkap yang melaksanakan penangkapan dengan legal (ramah lingkungan)	95 %	95 %		97 %	-	98 %	-	99 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %		DINAS PERIKANAN
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap PAD	50 %	50 %		50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %		DINAS PERIKANAN
26	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi perikanan budidaya dibanding total produksi daerah	100 %	100 %	1.811.000.000	100 %	3.102.000.000	100 %	3.438.000.000	100 %	3.902.000.000	100 %	4.460.000.000	100 %	5.129.000.000	100 %	21.842.000.000	DINAS PERIKANAN
27	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kontribusi sektor perikanan budidaya terhadap PAD	50 %	50 %		50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %		DINAS PERIKANAN
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok/Nelayan budidaya perikanan payau menerapkan pengelolaan ramah lingkungan	100 %	100 %		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %		DINAS PERIKANAN
29	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kelompok pengelola hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan	8 %	11 %	756.000.000	24 %	1.989.000.000	37 %	3.968.000.000	50 %	2.076.000.000	63 %	3.546.000.000	79 %	1.919.000.000	100 %	14.254.000.000	DINAS PERIKANAN

30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan bina kelompok pengelola hasil perikanan	4 %	11 %		24 %	-	37 %	-	50 %	-	63 %	-	79 %	-	100 %	-	DINAS PERIKANAN
31	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase lama kunjungan wisata	23 %	25 %	400.000.000	30 %	2.450.000.000	40 %	2.573.000.000	50 %	2.701.000.000	60 %	2.720.000.000	70 %	2.978.000.000	70 %	13.822.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
32	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	23000 orang	23000 orang	-	30000 orang	1.300.000.000	32500 orang	1.365.000.000	35000 orang	1.433.000.000	37500 orang	1.505.000.000	40000 orang	1.580.000.000	198000 orang	7.183.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
33	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase ekonomi kreatif yang tertangani	100 %	100 %	-	100 %	590.000.000	100 %	620.000.000	100 %	650.000.000	100 %	683.000.000	100 %	717.000.000	100 %	3.260.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
34	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase penggiat ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	33 %	40 %	-	47 %	330.000.000	53 %	347.000.000	60 %	364.000.000	67 %	382.000.000	70 %	401.000.000	74 %	1.824.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
35	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rasio pasar kabupaten per jumlah kecamatan	0,87 Rasio	0,87 Rasio	-	0,81 Rasio	5.500.000.000	0,76 Rasio	6.050.000.000	0,72 Rasio	6.655.000.000	0,68 Rasio	7.321.000.000	0,65 Rasio	8.053.000.000	0,65 Rasio	33.579.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
36	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah bahan pangan yang didistribusi untuk menstabilkan harga	100 %	100 %	264.000.000	100 %	375.000.000	100 %	375.000.000	100 %	375.000.000	100 %	375.000.000	100 %	375.000.000	100 %	2.139.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
37	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan bahan perdagangan yang aman untuk konsumen	50 %	50 %	-	75 %	1.000.000.000	80 %	1.100.000.000	85 %	1.210.000.000	90 %	1.331.000.000	95 %	1.464.000.000	95 %	6.105.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
38	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan fasilitasi kelompok usaha dalam memasarkan produknya	100 %	100 %	5.000.000	100 %	58.000.000	100 %	63.000.000	100 %	68.000.000	100 %	73.000.000	100 %	78.000.000	100 %	345.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

39	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	7.10 %	7.10 %	2.193.000.000	7,4 %	2.412.000.000	7,4 %	2.654.000.000	7,4 %	2.919.000.000	7,4 %	3.211.000.000	7,5 %	3.532.000.000	7,5 %	16.921.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
40	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase kelompok IKM yang telah memiliki izin usaha industri	15.71 %	15.71 %	32.000.000	16.06 %	90.000.000	16.41 %	90.000.000	16.75 %	120.000.000	17.09 %	120.000.000	17.42 %	150.000.000	67.08 %	602.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
41	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase luas lahan cadangan transmigrasi tersedia dan sesuai RTRW	75 %	90 %	-	100 %	485.000.000	0 %	40.000.000	0 %	-	0 %	45.000.000	0 %	-	0 %	570.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
42	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial menuju transmigrasi mandiri	82%	100%	12.130.000.000	100%	3.065.000.000	100%	105.000.000	100%	4.330.000.000	100%	4.330.000.000	100%	4.330.000.000	1 %	28.290.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
43	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	71.32 %	71.32 %	71.000.000	73.64 %	78.000.000	77.52 %	86.000.000	81.40 %	95.000.000	85.27 %	104.000.000	93.02 %	114.000.000	100 %	548.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
44	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mandiri	10 %	0 %	20.000.000	15 %	22.000.000	15 %	24.000.000	15 %	26.000.000	20 %	29.000.000	25 %	32.000.000	75 %	153.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
45	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha	98.50 %	98.50 %	291.000.000	99.06 %	690.000.000	99.63 %	690.000.000	99.63 %	690.000.000	99.63 %	690.000.000	99.79 %	690.000.000	100 %	3.741.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
46	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi	60,92 %	60,92 %	772.000.000	63.66 %	849.000.000	63.86 %	934.000.000	64.22 %	1.027.000.000	64.58 %	1.130.000.000	64.49 %	1.243.000.000	65.30 %	5.955.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
47	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase beras yang terpenuhi dengan beras produksi lokal	97.98 %	98,32%	115.000.000	98.66 %	300.000.000	98.99 %	315.000.000	99.33 %	330.000.000	99.67 %	345.000.000	100 %	360.000.000	100 %	1.765.000.000	DINAS PANGAN

48	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi pangan perkapita pertahun	63.90 %	65%	615.000.000	67.50 %	1.275.000.000	71.00 %	1.352.000.000	74.50 %	1.430.000.000	78.50 %	1.508.000.000	83 %	1.588.000.000	83 %	7.768.000.000	DINAS PANGAN
49	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan	40,29 %	50,76 %		60.6 %	-	70,44 %	-	80,29 %	-	90.13 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS PANGAN
50	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pangan altenatif (singkong, ubi jalar dan sagu) yang dikonsumsi masyarakat	5 %	7 %		8 %	-	10 %	-	12 %	-	14 %	-	15 %	-	15 %	-	DINAS PANGAN
51	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan desa rawan pangan yang tertangani dengan tuntas	23.80 %	33,33%	110.000.000	52.38 %	425.000.000	61.9 %	465.000.000	76.19 %	510.000.000	90.47 %	545.000.000	100 %	580.000.000	100 %	2.635.000.000	DINAS PANGAN
52	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peredaran pangan segar yang memiliki rekomendasi dan sesuai persyaratan yang dianjurkan	26.47 %	38,23%	170.000.000	50 %	305.000.000	61.76 %	338.000.000	73.52 %	371.000.000	88.23 %	400.000.000	100 %	435.000.000	100 %	2.019.000.000	DINAS PANGAN
53	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	30 %	30 %	848.000.000	30 %	1.164.000.000	30 %	1.432.000.000	30 %	1.486.000.000	40 %	1.542.000.000	40 %	1.542.000.000	40 %	8.014.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
54	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase KDRT	0.11 %	0,11%	220.000.000	0.11 %	231.000.000	0.11 %	24.300.000	0.11 %	255.000.000	0.11 %	267.000.000	0.11 %	281.000.000	0.11 %	1.278.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
55	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kepala Keluarga Perempuan yang terberdayakan	1.12 %	1,75%	264.000.000	1,75 %	277.000.000	1.73 %	290.000.000	1.75 %	304.000.000	1.75 %	319.000.000	1.75 %	319.000.000	1.75 %	1.773.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kawasan Adat Terpencil (KAT) yang tertangani	33.73 %	36,68%	967.000.000	47.62 %	1.024.000.000	57.54 %	1.078.000.000	69.44 %	1.130.000.000	83.33 %	1.185.000.000	100 %	1.246.000.000	100 %	6.630.000.000	DINAS SOSIAL

57	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar di Luar Panti yang tertangani dengan baik	27.15 %	37,31%	4.124.000.000	48.23 %	4.477.000.000	59.92 %	4.541.000.000	72.38 %	4.771.000.000	85.62 %	5.014.000.000	100 %	5.265.000.000	100 %	28.192.000.000	DINAS SOSIAL
58	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Besaran rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti	22.63 %	32,24%		42.82 %	-	54.52 %	-	68.03 %	-	83.49 %	-	99.93 %	-	99.93 %		DINAS SOSIAL
59	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Besaran rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	1 %	49,78 %		55.77 %	-	65.14 %	-	75.62 %	-	86.86 %	-	99.97 %	-	99.97 %		DINAS SOSIAL
60	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Besaran rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	15.20 %	24,63%		36.43 %	-	50.58 %	-	65.91 %	-	82.42 %	-	98.93 %	-	98.93 %		DINAS SOSIAL
61	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang masuk DTKS	45 %	50 %	663.000.000	51 %	705.000.000	52 %	742.000.000	53 %	777.000.000	54 %	817.000.000	55 %	857.000.000	55 %	4.561.000.000	DINAS SOSIAL
62	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	7.510.000.000	100 %	7.799.000.000	100 %	8.189.000.000	100 %	8.599.000.000	100 %	9.028.000.000	100 %	9.481.000.000	100 %	50.606.000.000	DINAS SOSIAL
63	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan bina kesiapsiagaan bencana Cakupan	100 %	100 %		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS SOSIAL
	Jumlah Sasaran 1				**56.001.830.000**		**71.131.050.000**		**68.971.900.000**		**74.580.600.000**		**79.733.390.000**		**73.045.030.000**		**423.463.800.000**	
Sasaran 2																		
Meningkatnya investasi daerah dan lapangan pekerjaan																		
	Program :																	
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen tenaga kerja yang dibutuhkan	0 %	0 %	-	30 %	135.000.000	30 %	35.000.000	30 %	35.000.000	30 %	135.000.000	30 %	35.000.000	30 %	375.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih	83 %	84 %	328.000.000	85 %	1.159.000.000	85 %	1.250.000.000	85 %	1.330.000.000	87 %	1.385.000.000	90 %	1.360.000.000	90 %	6.812.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan	52 %	52 %	233.000.000	52 %	1.374.000.000	55 %	1.758.000.000	55 %	2.377.000.000	60 %	2.496.000.000	70 %	2.580.000.000	70 %	10.818.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Jumlah Perusahaan menjalankan regulasi secara tepat.	27 %	20 %	84.000.000	22 %	392.000.000	24 %	422.000.000	26 %	450.000.000	28 %	473.000.000	30 %	492.000.000	30 %	2.313.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor PMDN/PMA yang mengajukan minat kemudian melanjutkan investasinya	75 %	75 %	162.000.000	76 %	170.000.000	76 %	178.000.000	77 %	187.000.000	77 %	196.000.000	78 %	196.000.000	78 %	1.089.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL

6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6.020 Trilyun	6.230 Trilyun	265.000.000	6.314 Trilyun	265.000.000	6.431 Trilyun	265.000.000	6.595 Trilyun	265.000.000	6.826 Trilyun	265.000.000	7.196 Trilyun	265.000.000	7.196 Trilyun	1.590.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan	80 %	80 %	264.000.000	80 %	264.000.000	80 %	264.000.000	80 %	264.000.000	80 %	264.000.000	80 %	264.000.000	80 %	1.584.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan realisasi investasi	149.766 Milyar	209.673 Milyar	342.000.000	293.542 Milyar	342.000.000	410.959 Milyar	342.000.000	575.342 Milyar	342.000.000	805.480 Milyar	342.000.000	966.576 Milyar	342.000.000	966.576 Milyar	2.052.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
9	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data penanaman modal yang tersaji melalui sistem informasi	87 %	87 %	100.000.000	87 %	100.000.000	87 %	100.000.000	88 %	100.000.000	88 %	100.000.000	89 %	100.000.000	89 %	600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
	Jumlah Sasaran 2				**1.778.000.000**		**.201.000.000**		**.614.000.000**		**5.350.000.000**		**5.656.000.000**		**5.634.000.000**		**27.233.000.000**	
	Total Jumlah				**57.779.830.000**		**75.332.050.000**		**73.585.900.000**		**79.930.600.000**		**85.389.390.000**		**8.679.030.000**		**450.696.800.000**	

Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang baik, Masyarakat tertib dan religius

Tujuan : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, masyarakat yang aman dan tertib serta religius

No	Sasaran Dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021 (Transisi)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2026		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 1																		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel																		
	Program :																	
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang pemerintahan	80 %	80 %	841.000.000	85 %	870.000.000	90 %	897.000.000	90 %	924.000.000	90 %	951.000.000	90 %	980.000.000	90 %	5.463.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang pembangunan manusia	90 %	90 %	638.000.000	92 %	1.062.000.000	93 %	1.142.000.000	94 %	1.214.000.000	96 %	1.306.000.000	100 %	1.673.000.000	100 %	7.035.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang perekonomian	90 %	90 %	-	92 %	-	93 %	-	94 %	-	95 %	-	95 %	-	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang infrastruktur	80 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	95 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100 %	100 %	131.000.000	100 %	306.000.000	100 %	461.000.000	100 %	461.000.000	100 %	391.000.000	100 %	598.000.000	100 %	2.348.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	14 %	24 %		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP Predikat	WTP Predikat	158.744.000.000	WTP Predikat	156.289.000.000	WTP Predikat	164.682.000.000	WTP Predikat	172.875.000.000	WTP Predikat	181.471.000.000	WTP Predikat	190.487.000.000	WTP Predikat	1.024.548.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
8	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan baik dan ada dalam bentuk fisik	96 %	98 %	2.227.000.000	98 %	2.227.000.000	98 %	2.359.000.000	98 %	2.493.000.000	98 %	2.633.000.000	98 %	2.785.000.000	98 %	14.724.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	6.85 %	7.80%	2.064.000.000	7.80 %	2.195.000.000	7.82 %	2.281.000.000	7.84 %	2.017.000.000	7.85 %	2.151.000.000	7.87 %	2.247.000.000	7.91 %	12.955.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN berpendidikan SI, S2, S3 dibanding dengan total ASN	64,64 %	65,07 %	1.747.230.000	66 %	8.615.000.000	66 %	7.432.000.000	66 %	6.412.000.000	67 %	6.856.000.000	67 %	7.228.000.000	67 %	38.290.230.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang disiplin dan berkinerja baik	80 %	83 %	-	85 %	-	90 %	-	93 %	-	95 %	-	97 %	-	97 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15,26 %	15,26 %	458.920.000	28,78 %	3.470.000.000	42.29 %	9.222.000.000	55.80 %	12.804.000.000	69.32 %	9.078.000.000	82.83 %	9.127.000.000	82.83 %	44.159.920.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan pengelolaan keuangan OPD dan Kecamatan dengan hasil baik dan akuntabel	86 %	87 %	1.000.000.000	88 %	2.188.000.000	89 %	1.835.000.000	90 %	1.920.000.000	91 %	2.009.000.000	92 %	2.103.000.000	93 %	11.055.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
14	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pencapaian Monev Terpadu (MCP) KPK , OPD dan Desa setiap Tahun	76 %	70 %	2.145.389.000	72 %	1.858.377.000	74 %	1.910.412.000	76 %	1.965.049.000	78 %	2.022.418.000	80 %	2.082.655.000	82 %	11.984.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	70.73 Nilai	70.73 Nilai	30.400.000.000	72.30 Nilai	31.920.000.000	75.40 Nilai	33.516.000.000	77.20 Nilai	35.192.000.000	79.00 Nilai	36.951.000.000	80 Nilai	38.799.000.000	80 Nilai	206.778.000.000	DINAS PENDIDIKAN
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70.73 Nilai	70 Nilai	-	72.20 Nilai	-	73.49 Nilai	-	75.80 Nilai	-	76.68 Nilai	-	80.30 Nilai	-	80.30 Nilai	0	DINAS PENDIDIKAN
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	85%	85%	-	87 %	-	87 %	-	90 %	-	91 %	-	93 %	-	93 %	0	DINAS PENDIDIKAN
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.50 Nilai	78.50 Nilai	33.921.000.000	80.5 Nilai	36.699.000.000	84.50 Nilai	38.534.000.000	86.50 Nilai	40.461.000.000	88.5 Nilai	42.484.000.000	90 Nilai	42.484.000.000	90 Nilai	234.583.000.000	DINAS KESEHATAN
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	40.22 Nilai	55 Nilai	-	60 Nilai	-	70 Nilai	-	75 Nilai	-	80 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	0	DINAS KESEHATAN
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	80%	80%	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS KESEHATAN
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.25 Nilai	80.25 Nilai	12.336.000.000	81.50 Nilai	12.953.000.000	83.3 Nilai	13.598.000.000	84.5 Nilai	14.512.000.000	86.25 Nilai	15.202.000.000	88.5 Nilai	15.931.000.000	88.5 Nilai	84.532.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	50 Nilai	55 Nilai	-	60 Nilai	-	70 Nilai	-	75 Nilai	-	80 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	79%	79%	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA

24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.74 Nilai	78.27 Nilai	7.840.000.000	82.19 Nilai	10.220.000.000	86.30 Nilai	8.786.000.000	90.61 Nilai	7.912.000.000	95.14 Nilai	8.150.000.000	100 Nilai	8.399.000.000	100 Nilai	51.307.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	73 Nilai	73,83 Nilai	-	76,04 Nilai	-	78,33 Nilai	-	81,46 Nilai	-	85,53 Nilai	-	87,24 Nilai	-	88,99 Nilai	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	0 %	80 %	-	85 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	67.9 Nilai	68 Nilai	4.894.000.000	69 Nilai	5.037.000.000	70 Nilai	5.884.000.000	71 Nilai	5.300.000.000	72 Nilai	5.514.000.000	73 Nilai	5.735.000.000	74 Nilai	32.364.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	60.14 Nilai		-	62 Nilai	-	63 Nilai	-	64 Nilai	-	65 Nilai	-	66 Nilai	-	66 Nilai	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %		-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	50 Nilai	50 Nilai	3.657.000.000	65 Nilai	3.711.000.000	75 Nilai	3.694.000.000	85 Nilai	3.695.000.000	100 Nilai	3.696.000.000	100 Nilai	3.697.000.000	100 Nilai	22.150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	50 Nilai	60 Nilai	-	70 Nilai	-	70 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	75 %	-	80 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	73.76 Nilai	73.76 Nilai	4.699.000.000	79.88 Nilai	4.651.000.000	83.76 Nilai	4.760.000.000	85.88 Nilai	4.850.000.000	87.5 Nilai	4.920.000.000	89.99 Nilai	5.045.000.000	89.99 Nilai	28.925.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	76.90 Nilai	80 Nilai	-	85 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	-	95 Nilai	-	95 Nilai	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76.90 %	80%	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	95 %	-	95 %	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.75 Nilai	76.80 Nilai	4.291.000.000	76.82 Nilai	5.121.000.000	76.85 Nilai	6.049.000.000	76.90	5.249.000.000	76.95 Nilai	5.521.000.000	77 Nilai	5.788.000.000	77 Nilai	32.019.000.000	DINAS SOSIAL

37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	80 Nilai	80.95 Nilai	-	81 Nilai	-	82 Nilai	-	83 Nilai	-	84 Nilai	-	85 Nilai	-	77 Nilai	0	DINAS SOSIAL
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	85 %	86 %	-	87 %	-	88 %	-	89 %	-	90 %	-	90 %	-	95 %	0	DINAS SOSIAL
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	73.5 Nilai	73.5 Nilai	3.831.000.000	74 Nilai	5.564.000.000	75 Nilai	4.611.000.000	75 Nilai	4.686.000.000	75 Nilai	4.926.000.000	75 Nilai	5.199.000.000	75 Nilai	28.817.000.000	DINAS PANGAN
40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70 Nilai	72 Nilai	-	74 Nilai	-	76 Nilai	-	76 Nilai	-	76 Nilai	-	76 Nilai	-	80 Nilai	0	DINAS PANGAN
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS PANGAN
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75 Nilai	75 Nilai	4.894.000.000	75 Nilai	5.439.000.000	75 Nilai	6.213.000.000	75 Nilai	5.640.000.000	75 Nilai	5.861.000.000	75 Nilai	6.090.000.000	75 Nilai	34.137.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	83.57 Nilai	-	83.57 Nilai	-	83.57 Nilai	-	83.57 Nilai	-	83.57 Nilai	-	83.57 Nilai	-	83.57 Nilai	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	76 %	-	76 %	-	76 %	-	76 %	-	76 %	-	76 %	-	76 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.85 Nilai	76.85 Nilai	4.877.000.000	77 Nilai	4.900.000.000	77.85 Nilai	4.900.000.000	77.88 Nilai	4.900.000.000	80 Nilai	4.900.000.000	80 Nilai	4.932.000.000	80 Nilai	29.409.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	90 Nilai	92 Nilai	-	93 Nilai	-	93 Nilai	-	94 Nilai	-	95 Nilai	-	95 Nilai	-	95 Nilai	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	80 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
48	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	71.95 Nilai	71.95 Nilai	2.986.000.000	75.89 Nilai	2.989.000.000	75.89 Nilai	2.991.000.000	75.89 Nilai	2.993.000.000	75.89 Nilai	2.996.000.000	75.89 Nilai	2.998.000.000	75.89 Nilai	17.953.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	71.95 Nilai	71.95 Nilai	-	71.95 Nilai	-	71.95 Nilai	-	71.95 Nilai	-	71.95 Nilai	-	71.95 Nilai	-	71.95 Nilai	0	DINAS PERHUBUNGAN
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %		-	75 %	-	75 %	-	80 %	-	80 %	-	90 %	-	95 %	0	DINAS PERHUBUNGAN
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75.25 Nilai	75.50 Nilai	4.665.000.000	80 Nilai	5.183.000.000	80 Nilai	5.161.000.000	80 Nilai	5.188.000.000	80 Nilai	5.166.000.000	80 Nilai	5.169.000.000	80 Nilai	30.532.000.000	DINAS PERIKANAN
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	75.25 Nilai	75.25 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	0	DINAS PERIKANAN
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	80 %	-	80 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS PERIKANAN
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.75 Nilai	76.80 Nilai	3.368.000.000	76.82 Nilai	5.403.000.000	76.85 Nilai	4.248.000.000	76.90 Nilai	4.353.000.000	76.95 Nilai	4.662.000.000	77 Nilai	4.973.000.000	77 Nilai	27.007.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	8.36 Nilai	-	75 Nilai	-	78 Nilai	-	80 Nilai	-	82 Nilai	-	85 Nilai	-	85 Nilai	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %	60 %	-	60 %	-	70 %	-	80 %	-	90 %	-	100 %	-	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	74.18 Nilai	74.20 Nilai	3.681.000.000	77.05 Nilai	6.272.000.000	80 Nilai	6.900.000.000	80.25 Nilai	7.590.000.000	80.50 Nilai	8.349.000.000	80.75 Nilai	9.184.000.000	90 Nilai	41.976.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	0 Nilai	-	65 Nilai	-	70 Nilai	-	75 Nilai	-	80 Nilai	-	85 Nilai	-	90 Nilai	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	99.93 %	99.95 %	-	99.96 %	-	99.97 %	-	99.98 %	-	99.99 %	-	100 %	-	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	74.35 Nilai	74.65 Nilai	3.275.621.000	78 Nilai	3.601.827.000	79 Nilai	3.804.416.000	80 Nilai	3.975.133.000	81 Nilai	4.164.779.000	82 Nilai	4.357.930.000	82 Nilai	23.179.706.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	0 Nilai	-	75 Nilai	-	80 Nilai	-	85 Nilai	-	90 Nilai	-	95 Nilai	-	100 Nilai	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	99.45 %	99.65 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75,79 Nilai	75,79 Nilai	6.133.760.000	76 Nilai	6.134.420.000	76 Nilai	6.134.950.000	77 Nilai	6.135.510.000	77 Nilai	6.136.110.000	80 Nilai	6.136.110.000	80 Nilai	36.810.860.000	DINAS PENANAMAN MODAL
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	81.08 Nilai	-	82 Nilai	-	83 Nilai	-	83 Nilai	-	83 Nilai	-	83 Nilai	-	83 Nilai	0	DINAS PENANAMAN MODAL
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	69.2 Nilai	70%	3.950.000.000	73 Nilai	4.148.000.000	75 Nilai	4.355.000.000	80 Nilai	4.573.000.000	85 Nilai	4.801.000.000	90 Nilai	5.041.000.000	90 Nilai	26.868.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
67	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	69.2 Nilai	0%	-	73 Nilai	-	75 Nilai	-	80 Nilai	-	85 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	70 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	72 Nilai	72 Nilai	3.701.000.000	73 Nilai	4.270.000.000	74 Nilai	4.483.000.000	80 Nilai	4.707.000.000	85 Nilai	4.939.000.000	90 Nilai	5.183.000.000	90 Nilai	27.283.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	60 Nilai	60 Nilai	-	65 Nilai	-	65 Nilai	-	80 Nilai	-	85 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	75 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	85 %	-	85 %	-	85 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.8 Nilai	79.80 Nilai	15.591.000.000	82.5 Nilai	17.048.000.000	83.5 Nilai	16.428.000.000	84.5 Nilai	17.030.000.000	85.5 Nilai	17.805.000.000	86.5 Nilai	18.617.000.000	86.5 Nilai	102.519.000.000	DINAS PERTANIAN
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	79.55 Nilai	79.65 Nilai	-	79,75 Nilai	-	79,95 Nilai	-	79,85 Nilai	-	80,05 Nilai	-	81.05 Nilai	-	80 Nilai	0	DINAS PERTANIAN
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS PERTANIAN
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	74.3 Nilai	76.8 Nilai	4.172.900.000	76.82 Nilai	4.443.700.000	76.82 Nilai	4.321.600.000	76.85 Nilai	4.809.500.000	76.9 Nilai	4.707.300.000	76.95 Nilai	4.987.600.000	76.95 Nilai	27.442.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	74.3 Nilai	76.8 Nilai	-	76.82 Nilai	-	76.82 Nilai	-	76.85 Nilai	-	76.9 Nilai	-	76.95 Nilai	-	77 Nilai	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	80 %	-	80 %	-	85 %	-	90 %	-	95 %	-	95 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75.51 Nilai	75.55 Nilai	3.573.000.000	75.57 Nilai	3.842.000.000	80 Nilai	3.832.000.000	80 Nilai	3.867.000.000	80 Nilai	3.937.000.000	80 Nilai	3.993.000.000	80 Nilai	23.044.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
79	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	75.51 Nilai	75.55 Nilai	-	75.57 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	80 Nilai	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	77.02 Nilai	77.02 Nilai	4.584.000.000	78 Nilai	4.614.000.000	80 Nilai	4.625.000.000	80 Nilai	4.635.000.000	80 Nilai	4.646.000.000	80 Nilai	4.699.000.000	80 Nilai	27.803.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	97.55 Nilai	97.57 Nilai	-	97.57 Nilai	-	97.58 Nilai	-	97.58 Nilai	-	97.59 Nilai	-	97.60 Nilai	-	97.60 Nilai	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	79.6 Nilai	85.50 Nilai	14.220.000.000	83.50 Nilai	14.166.000.000	84.50 Nilai	14.191.000.000	85.50 Nilai	14.216.000.000	86.50 Nilai	14.246.000.000	87.50 Nilai	14.281.000.000	87.50 Nilai	85.320.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70 Nilai	74 Nilai	-	76 Nilai	-	78 Nilai	-	79 Nilai	-	80 Nilai	-	82 Nilai	-	82 Nilai	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	77.17 Nilai	80.50 Nilai	4.785.000.000	82.20 Nilai	4.785.000.000	84.50 Nilai	4.785.000.000	86.20 Nilai	4.785.000.000	88 Nilai	4.785.000.000	90.10 Nilai	4.785.000.000	90.10 Nilai	28.710.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	83.63 Nilai	83.63 Nilai	-	83.63 Nilai	-	83.63 Nilai	-	83.63 Nilai	-	83.63 Nilai	-	83.63 Nilai	-	83.63 Nilai	0	INSPEKTORAT DAERAH
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	0 %	0 %	-	50 %	-	60 %	-	70 %	-	75 %	-	75 %	-	75 %	0	INSPEKTORAT DAERAH
90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	69.70 Nilai	69.70 Nilai	4.246.000.000	69.80 Nilai	4.608.000.000	69.90 Nilai	4.839.000.000	70 Nilai	5.081.000.000	70.10 Nilai	5.081.000.000	70.20 Nilai	5.335.000.000	70.20 Nilai	29.190.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	83.29 Nilai	83.29 Nilai	-	83.5 Nilai	-	83.55 Nilai	-	83.6 Nilai	-	83.65 Nilai	-	83.7 Nilai	-	83.75 Nilai	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	75 %	-	77 %	-	80 %	-	82 %	-	85 %	-	87 %	-	90 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	65 Nilai	67 Nilai	6.147.000.000	90 Nilai	6.555.000.000	95 Nilai	7.278.000.000	95 Nilai	7.642.000.000	95 Nilai	190.368.000.000	95 Nilai	199.432.000.000	95 Nilai	417.422.000.000	KECAMATAN PAGUAT
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	1.05 Nilai		-	1.20 Nilai	-	1.30 Nilai	-	1.30 Nilai	-	1.50 Nilai	-	1.70 Nilai	-	1.70 Nilai	0	KECAMATAN PAGUAT
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	64.75 %		-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN PAGUAT
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	78 Nilai	79 Nilai	2.805.000.000	80 Nilai	2.945.000.000	82,8 Nilai	3.092.000.000	83 Nilai	3.247.000.000	84 Nilai	3.409.000.000	85 Nilai	3.571.000.000	85 Nilai	19.069.000.000	KECAMATAN DENGILO
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	5.55 Nilai	5.63 Nilai	-	5.70 Nilai	-	5.75 Nilai	-	5.90 Nilai	-	5.92 Nilai	-	5.95 Nilai	-	5.95 Nilai	0	KECAMATAN DENGILO

98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	79 %	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN DENGILO
99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	66.50 Nilai	70 Nilai	2.462.000.000	72 Nilai	2.719.000.000	73 Nilai	2.790.000.000	74.25 Nilai	2.884.000.000	75 Nilai	3.044.000.000	76 Nilai	3.166.000.000	76 Nilai	17.065.000.000	KECAMATAN MARISA
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70.25 Nilai	83.47 Nilai	-	84 Nilai	-	84.4 Nilai	-	85 Nilai	-	85.67 Nilai	-	86 Nilai	-	88 Nilai	0	KECAMATAN MARISA
101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	77 %	-	80 %	-	82 %	-	84 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN MARISA
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	61.90 Nilai	70 Nilai	2.188.000.000	75 Nilai	2.438.000.000	78 Nilai	2.492.000.000	80 Nilai	2.534.000.000	85 Nilai	2.700.000.000	90 Nilai	2.794.000.000	90 Nilai	15.146.000.000	KECAMATAN BUNTULIA
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	83.36 Nilai	80 Nilai	-	70 Nilai	-	72 Nilai	-	74 Nilai	-	74 Nilai	-	74 Nilai	-	80 Nilai	0	KECAMATAN BUNTULIA
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	78 %	-	80 %	-	82 %	-	84 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN BUNTULIA
105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	60 Nilai	60 Nilai	2.648.000.000	70 Nilai	2.816.000.000	75 Nilai	3.059.000.000	80 Nilai	2.924.000.000	85 Nilai	3.103.000.000	90 Nilai	3.204.000.000	90 Nilai	17.754.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai		-	70 Nilai	-	75 Nilai	-	80 Nilai	-	85 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	0	KECAMATAN DUHIADAA
107	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %		-	70 %	-	75 %	-	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN DUHIADAA
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	72.53 Nilai	75 Nilai	2.427.000.000	77 Nilai	2.598.000.000	79 Nilai	2.753.000.000	82 Nilai	2.890.000.000	83 Nilai	3.034.000.000	84 Nilai	3.039.000.000	84 Nilai	16.741.000.000	KECAMATAN PATILANGGIO
109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	23.42 Nilai		-	72 Nilai	-	75 Nilai	-	76 Nilai	-	78 Nilai	-	79 Nilai	-	80 Nilai	0	KECAMATAN PATILANGGIO
110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %		-	80 %	-	82 %	-	83 %	-	85 %	-	90 %	-	95 %	0	KECAMATAN PATILANGGIO

111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	55 Nilai	55 Nilai	2.140.000.000	65 Nilai	2.023.000.000	68 Nilai	2.122.000.000	72 Nilai	2.477.000.000	74 Nilai	2.601.000.000	80 Nilai	2.728.000.000	80 Nilai	14.091.000.000	KECAMATAN RANDANGAN
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	29.67 Nilai	62 Nilai	-	65 Nilai	-	68 Nilai	-	72 Nilai	-	74 Nilai	-	80 Nilai	-	90 Nilai	0	KECAMATAN RANDANGAN
113	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	78 %		-	82 %	-	84 %	-	86 %	-	88 %	-	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN RANDANGAN
114	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	71.8 Nilai	80 Nilai	3.290.000.000	80 Nilai	3.396.000.000	80 Nilai	3.505.000.000	85 Nilai	3.617.000.000	85 Nilai	2.724.000.000	90 Nilai	2.828.000.000	90 Nilai	19.360.000.000	KECAMATAN TALUDITI
115	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	29.83 Nilai		-	80 Nilai	-	80 Nilai	-	85 Nilai	-	85 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	0	KECAMATAN TALUDITI
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	79 %		-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN TALUDITI
117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	64.50 Nilai	70 Nilai	2.462.000.000	72 Nilai	2.723.000.000	73 Nilai	2.797.000.000	74.3 Nilai	2.926.000.000	75 Nilai	3.068.000.000	76 Nilai	3.217.000.000	76 Nilai	17.193.000.000	KECAMATAN WANGGARASI
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	10.56 Nilai	70 Nilai	-	80 Nilai	-	82 Nilai	-	84 Nilai	-	85.67 Nilai	-	86 Nilai	-	86 Nilai	0	KECAMATAN WANGGARASI
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	77 %	-	78 %	-	80 %	-	82 %	-	83 %	-	83.25 %	-	84 %	0	KECAMATAN WANGGARASI
120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	66.50 Nilai	70 Nilai	2.462.000.000	72 Nilai	2.462.000.000	73 Nilai	2.719.000.000	74.25 Nilai	2.790.000.000	75 Nilai	2.884.000.000	76	3.044.000.000	76 Nilai	16.361.000.000	KECAMATAN LEMITO
121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70.75 Nilai	70.75 Nilai	-	84 Nilai	-	84.4 Nilai	-	85 Nilai	-	85.67 Nilai	-	86 Nilai	-	88 Nilai	0	KECAMATAN LEMITO
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	77 %	-	78 %	-	80 %	-	82 %	-	83 %	-	83.25 %	-	84 %	0	KECAMATAN LEMITO
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	63.79 Nilai	70 Nilai	2.746.000.000	75 Nilai	2.816.000.000	78 Nilai	3.059.000.000	80 Nilai	2.924.000.000	85 Nilai	3.103.000.000	90 Nilai	3.204.000.000	90 Nilai	17.852.000.000	KECAMATAN POPAYATO

124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	56.49 Nilai	75 Nilai	-	80 Nilai	-	83 Nilai	-	85 Nilai	-	87 Nilai	-	88 Nilai	-	90 Nilai	0	KECAMATAN POPAYATO
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	78 %	-	80 %	-	83 %	-	85 %	-	87 %	-	88 %	-	90 %	0	KECAMATAN POPAYATO
126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	64.98 Nilai	70 Nilai	2.541.000.000	75 Nilai	2.747.000.000	78 Nilai	2.881.000.000	80 Nilai	3.022.000.000	85 Nilai	3.169.000.000	90 Nilai	3.324.000.000	90 Nilai	17.684.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	64 Nilai	64,22 Nilai	-	74 Nilai	-	84 Nilai	-	85 Nilai	-	85 Nilai	-	86 Nilai	-	88 Nilai	0	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	77 %	-	78 %	-	80 %	-	82 %	-	84 %	-	86 %	-	88 %	0	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	63 Nilai	66 Nilai	2.439.000.000	70 Nilai	2.611.000.000	75 Nilai	2.738.000.000	80 Nilai	2.879.000.000	85 Nilai	3.020.000.000	90 Nilai	3.168.000.000	90 Nilai	16.855.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	65 Nilai	73.73 Nilai	-	75 Nilai	-	78 Nilai	-	81 Nilai	-	84 Nilai	-	86 Nilai	-	88 Nilai	0	KECAMATAN POPAYATO BARAT
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	78 %	-	80 %	-	82 %	-	84 %	-	85 %	-	87 %	-	90 %	0	KECAMATAN POPAYATO BARAT
132	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75.5 Nilai	75.5 Nilai	3.946.000.000	77 Nilai	4.114.000.000	80 Nilai	4.116.000.000	80 Nilai	4.129.000.000	80 Nilai	4.131.000.000	80 Nilai	4.133.000.000	80 Nilai	24.569.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	75 Nilai	75 Nilai	-	75 Nilai	-	75 Nilai	-	75 Nilai	-	75 Nilai	-	75 Nilai	-	75 Nilai	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %	70 %	-	75 %	-	75 %	-	80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	58.40 Nilai	58.40 Nilai	34.854.000.000	61.25 Nilai	38.801.000.000	63.15 Nilai	40.741.000.000	65.55 Nilai	43.028.000.000	67.25 Nilai	44.917.000.000	69.35 Nilai	44.917.000.000	69.35 Nilai	247.258.000.000	SEKRETARIAT DPRD
136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	58.95 Nilai	59 Nilai	-	62.98 Nilai	-	64.50 Nilai	-	66.35 Nilai	-	68.50 Nilai	-	70.25 Nilai	-	72,45 Nilai	0	SEKRETARIAT DPRD

137	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %	63 %	-	65 %	-	67 %	-	68 %	-	70 %	-	70 %	-	72 %	0	SEKRETARIAT DPRD
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	77.2 Nilai	77.2 Nilai	29.032.267.767	78 Nilai	28.710.784.993	78 Nilai	29.986.988.243	79 Nilai	31.332.251.655	79 Nilai	32.744.778.238	80 Nilai	34.227.931.150	80 Nilai	186.035.002.046	SEKRETARIAT DAERAH
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	62 Nilai			65 Nilai	-	65 Nilai	-	65 Nilai	-	71 Nilai	-	71 Nilai	-	71 Nilai	0	SEKRETARIAT DAERAH
140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	0 %			80 %	-	85 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	SEKRETARIAT DAERAH
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penerapan PMRB di kabupaten Pohuwato	23,81%	35,71%	-	65 Nilai	-	65 Nilai	-	65 Nilai	-	71 Nilai	-	71 Nilai	-	71 Nilai	0	SEKRETARIAT DAERAH
142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan tugas keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH
143	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rangking LPPD ditingkat nasional	94.08 %	95	5.977.940.886	96 %	6.276.837.701	96 %	6.590.679.586	96 %	6.920.213.566	96 %	7.266.224.244	96 %	7.629.535.456	96 %	40.661.431.439	SEKRETARIAT DAERAH
144	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perda/Perbup yang diterbitkan dan diImplementasikan	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
145	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang di buat dan terlaksana dengan baik	0 %	20 %	-	20 %	-	20 %	-	20 %	-	20 %	-	20 %	-	20 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
146	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD yang mengimput program kegiatan dalam E-Monev tepat waktu dan terupdate	100 %	100 %	5.351.203.646	100 %	5.467.000.000	100 %	5.569.000.000	100 %	5.676.000.000	100 %	5.788.000.000	100 %	5.906.000.000	100 %	33.757.203.646	SEKRETARIAT DAERAH
147	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD yang mengimput program kegiatan pada E-Sirup tepat waktu dan terupdate	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
148	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase aspirasi atau permasalahan SDA yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
149	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
150	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang dihasilkan setiap tahun	60 %	100 %	15.090.584.777	65 %	15.995.000.000	70 %	16.812.000.000	75 %	17.902.000.000	80 %	18.535.000.000	90 %	16.694.000.000	90 %	101.028.584.777	SEKRETARIAT DPRD

151	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan pengawasan pelaksananaan pembangunan oleh Komisi-komisi	70 %	70 %		75 %	-	80 %	-	85 %	-	90 %	-	100 %	-	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD
152	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan aspirasi masyarakat melalui reses yang dimput dalam E - Pokir tepat waktu	80 %	80 %		90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	-	90 %	0	SEKRETARIAT DPRD
153	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	7.100.000	100 %	7.500.000	100 %	7.800.000	100 %	8.200.000	100 %	8.700.000	100 %	9.100.000	100 %	48.400.000	KECAMATAN PAGUAT
154	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	6.300.000	100 %	6.600.000	100 %	6.900.000	100 %	7.300.000	100 %	7.600.000	100 %	8.000.000	100 %	42.700.000	KECAMATAN DENGILO
155	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	10.500.000	100 %	91.100.000	100 %	91.600.000	100 %	102.200.000	100 %	102.800.000	100 %	103.500.000	100 %	501.700.000	KECAMATAN MARISA
156	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	21.400.000	100 %	105.500.000	100 %	60.100.000	100 %	62.800.000	100 %	65.700.000	100 %	68.700.000	100 %	384.200.000	KECAMATAN BUNTULIA
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	21.000.000	100 %	75.000.000	100 %	28.000.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	213.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
158	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	17.800.000	100 %	68.600.000	100 %	25.600.000	100 %	26.600.000	100 %	27.600.000	100 %	27.600.000	100 %	193.800.000	KECAMATAN PATILANGGIO
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	35.000.000	100 %	36.000.000	100 %	38.000.000	100 %	204.000.000	KECAMATAN RANDANGAN
160	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	101.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	113.000.000	100 %	113.000.000	100 %	114.000.000	100 %	645.000.000	KECAMATAN TALUDITI
161	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	10.500.000	100 %	91.100.000	100 %	93.600.000	100 %	106.200.000	100 %	108.800.000	100 %	111.500.000	100 %	521.700.000	KECAMATAN WANGGARASI

162	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	10.500.000	100 %	91.100.000	100 %	91.600.000	100 %	102.200.000	100 %	102.800.000	100 %	103.500.000	100 %	501.700.000	KECAMATAN LEMITO
163	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	17.000.000	100 %	75.000.000	100 %	28.000.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	209.000.000	KECAMATAN POPAYATO
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	19.000.000	100 %	99.000.000	100 %	100.000.000	100 %	111.000.000	100 %	112.000.000	100 %	113.000.000	100 %	554.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
165	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	11.000.000	100 %	131.000.000	100 %	88.000.000	100 %	88.000.000	100 %	89.000.000	100 %	18.000.000	100 %	425.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
166	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	90 %	90 %	2.890.900.000	90 %	2.900.900.000	90 %	2.910.900.000	95 %	2.920.900.000	98 %	2.930.900.000	98 %	2.940.900.000	98 %	17.495.400.000	KECAMATAN PAGUAT
167	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	14.500.000	85 %	15.000.000	90 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	96.000.000	KECAMATAN MARISA
168	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	-	85 %	12,000,000	90 %	13,000,000	100 %	13,000,000	100 %	14,000,000	100 %	14,000,000	100 %	66.000.000	KECAMATAN BUNTULIA
169	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	12.500.000	85 %	25,000,000	90 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	137.500.000	KECAMATAN DUHIADAA
170	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	50.000.000	85 %	52.000.000	90 %	54.000.000	100 %	56.000.000	100 %	58.000.000	100 %	30.000.000	100 %	300.000.000	KECAMATAN PATILANGGIO
171	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	90 %	20.000.000	95 %	20.000.000	100 %	24.000.000	100 %	26.000.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	148.000.000	KECAMATAN TALUDITI
172	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	14.500.000	85 %	15.000.000	90 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	96.000.000	KECAMATAN WANGGARASI
173	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	14.500.000	85 %	15.000.000	90 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	96.000.000	KECAMATAN LEMITO
174	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	40.000.000	85 %	50.000.000	90 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	25.000.000	100 %	265.000.000	KECAMATAN POPAYATO

175	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	12.600.000	85 %	13.200.000	90 %	13.800.000	100 %	14.400.000	100 %	15.200.000	100 %	15.800.000	100 %	85.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
176	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	-	85 %	13.100.000	90 %	13.800.000	100 %	14.500.000	100 %	15.200.000	100 %	16.000.000	100 %	72.600.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
177	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	153.800.000	90 %	161.500.000	90 %	169.600.000	95 %	178.000.000	98 %	186.900.000	98 %	195.800.000	98 %	1.045.600.000	KECAMATAN PAGUAT
178	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	170.000.000	90 %	178.500.000	90 %	187.400.000	95 %	196.800.000	98 %	206.600.000	98 %	216.500.000	98 %	1.155.800.000	KECAMATAN DENGILO
179	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	391.000.000	80 %	409.800.000	85 %	429.300.000	90 %	429.800.000	95 %	451.300.000	100 %	473.800.000	100 %	2.585.000.000	KECAMATAN MARISA
180	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	104.000.000	95 %	281.000.000	95 %	294.000.000	97 %	308.000.000	97 %	323.000.000	97 %	341.000.000	97 %	1.651.000.000	KECAMATAN BUNTULIA
181	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	104.000.000	95 %	206.000.000	95 %	216.000.000	97 %	226.000.000	97 %	237.000.000	97 %	249.000.000	97 %	1.238.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
182	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	56.300.000	95 %	59.100.000	95 %	62.000.000	97 %	65.100.000	97 %	68.400.000	97 %	68.400.000	97 %	379.300.000	KECAMATAN PATILANGGIO
183	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	100 %	90 %	150.000.000	90 %	157.000.000	90 %	165.000.000	95 %	172.000.000	98 %	181.000.000	98 %	189.000.000	98 %	1.014.000.000	KECAMATAN RANDANGAN
184	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	233.000.000	95 %	234.000.000	98 %	245.000.000	98 %	257.000.000	98 %	268.000.000	98 %	279.000.000	98 %	1.516.000.000	KECAMATAN TALUDITI
185	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	391.000.000	75 %	409.800.000	80 %	429.300.000	85 %	429.800.000	90 %	451.300.000	95 %	473.800.000	95 %	2.585.000.000	KECAMATAN WANGGARASI
186	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	391.000.000	75 %	409.800.000	80 %	429.300.000	85 %	429.800.000	90 %	451.300.000	95 %	473.800.000	95 %	2.585.000.000	KECAMATAN LEMITO
187	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	350.000.000	75 %	206.000.000	80 %	216.000.000	85 %	226.000.000	90 %	237.000.000	95 %	249.000.000	95 %	1.484.000.000	KECAMATAN POPAYATO
188	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	67.000.000	95 %	179.000.000	97 %	187.000.000	97 %	176.000.000	97 %	185.000.000	97 %	195.000.000	97 %	989.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
189	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	71.000.000	80 %	94.000.000	85 %	98.000.000	90 %	104.000.000	95 %	109.000.000	100 %	114.000.000	100 %	590.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
190	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	11.400.000	85 %	12.000.000	90 %	12.600.000	100 %	13.200.000	100 %	13.900.000	100 %	43.700.000	100 %	106.800.000	KECAMATAN PAGUAT

191	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	12.600.000	85 %	13.200.000	90 %	13.900.000	100 %	14.600.000	100 %	15.300.000	100 %	16.000.000	100 %	85.600.000	KECAMATAN DENGILO
192	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	12.600.000	85 %	18.300.000	90 %	18.500.000	95 %	18.800.000	100 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	107.300.000	KECAMATAN MARISA
193	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	4.600.000	100 %	24.900.000	100 %	26.100.000	100 %	27.400.000	100 %	28.600.000	100 %	29.900.000	100 %	141.500.000	KECAMATAN BUNTULIA
194	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	8.000.000	100 %	30.000.000	100 %	31.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	168.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
195	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	50.100.000	85 %	51.900.000	90 %	53.900.000	95 %	55.900.000	100 %	58.000.000	100 %	58.000.000	100 %	327.800.000	KECAMATAN PATILANGGIO
196	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	40.000.000	100 %	42.000.000	100 %	44.100.000	100 %	45.304.000	100 %	47.567.000	100 %	49.945.000	100 %	268.916.000	KECAMATAN RANDANGAN
197	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	27.000.000	90 %	28.000.000	95 %	29.000.000	100 %	29.500.000	100 %	30.000.000	100 %	31.000.000	100 %	174.500.000	KECAMATAN TALUDITI
198	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	18.000.000	80 %	18.300.000	85 %	18.500.000	90 %	18.800.000	95 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	112.700.000	KECAMATAN WANGGARASI
199	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	18.000.000	80 %	18.300.000	85 %	18.500.000	90 %	18.800.000	95 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	112.700.000	KECAMATAN LEMITO
200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	44.000.000	100 %	30.000.000	100 %	31.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	204.000.000	KECAMATAN POPAYATO
201	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	19.000.000	85 %	18.300.000	90 %	18.500.000	95 %	18.800.000	100 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	113.700.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
202	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	9.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	84.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT

203	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan anak yang ada dalam aplikasi	0 %	0 %	-	20 %	150.000.000	30 %	150.000.000	40 %	150.000.000	50 %	150.000.000	50 %	150.000.000	50 %	750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
204	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten Layak anak	500 Nilai	500 Nilai	126.000.000	500 Nilai	132.000.000	500 Nilai	129.000.000	500 Nilai	146.000.000	500 Nilai	153.000.000	500 Nilai	161.000.000	500 Nilai	847.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
205	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	48 %	85 %	19.000.000	85 %	20.000.000	85 %	21.000.000	85 %	22.000.000	85 %	23.000.000	85 %	24.000.000	85 %	129.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
206	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi	100 %	100 %	10.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	110.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
207	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat penyelesaian masalah sengketa tanah yang diselesaikan	90 %	0 %	-	90 %	250.000.000	90 %	250.000.000	90 %	250.000.000	90 %	250.000.000	90 %	250.000.000	90 %	1.250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
208	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian ganti kerugian tanah dan sentunan tanah akibat pembangunan	100 %	0 %	-	100 %	5.000.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	25.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
209	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pemanfaatan tanah kosong	70 %	0 %	-	80 %	150.000.000	80 %	200.000.000	90 %	200.000.000	90 %	200.000.000	90 %	200.000.000	90 %	950.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
210	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tanah milik daerah/negara yang dikelola masyarakat atau pihak ketiga	80 %	0 %		80 %	15.000.000	80 %	15.000.000	80 %	15.000.000	90 %	15.000.000	90 %	15.000.000	90 %	75.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
211	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas tanah yang sudah terpetakan melalui Zona Nilai Tanah	0 %	0 %		25 %	100.000.000	50 %	100.000.000	75 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
212	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0.032 Rasio	0,027401 Rasio	45.257.794	0.027 Rasio	842.000.000	0.027 Rasio	845.000.000	0.027 Rasio	798.000.000	0.028 Rasio	995.000.000	0.028 Rasio	770.000.000	0.028 Rasio	4.295.257.794	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

213	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang diselesaian dengan lembaga terkait lainnya	60 %	50 %	550.000.000	60 %	460.000.000	60 %	460.000.000	65 %	460.000.000	65 %	460.000.000	65 %	460.000.000	70 %	2.850.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
214	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan	75 %	80 %	85.000.000	85 %	85.000.000	85 %	85.000.000	85 %	85.000.000	85 %	85.000.000	85 %	85.000.000	85 %	510.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
215	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data profil kependudukan	100 %	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	126.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
216	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan desa yang tidak bermasalah tata batas desanya	33.73 %	100	-	100 %	-	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	100 %	1.600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
217	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan desa yang memiliki kerjasama antara desa	60 %			80 %	307.000.000	100 %	307.000.000	100 %	307.000.000	100 %	307.000.000	100 %	307.000.000	100 %	1.535.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
218	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki perdes atau dokumen lingkungan sebagai acuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	95 %	95 %	887.400.000	95 %	3.577.000.000	95 %	1.663.000.000	95 %	3.868.000.000	95 %	1.664.000.000	95 %	1.664.000.000	95 %	13.323.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
219	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga yang berprestasi dalam pemberdayaan desa	70 %	80 %	1.197.100.000	85 %	1.229.000.000	90 %	1.229.000.000	95 %	1.230.000.000	100 %	1.231.000.000	100 %	979.000.000	100 %	7.095.100.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
220	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD dan Kecamatan yang telah memiliki aplikasi data yang baik, terupdate dan terintegrasi dengan BPS	90 %	100 %	170.000.000	100 %	300.000.000	100 %	330.000.000	100 %	360.000.000	100 %	400.000.000	100 %	420.000.000	100 %	1.980.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
221	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan informasi yang disampaikan melalui persandian	90 %	100 %	214.000.000	100 %	230.000.000	100 %	241.000.000	100 %	252.000.000	100 %	264.000.000	100 %	270.000.000	100 %	1.471.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Jumlah Sasaran 1			**509.161.574.870**		**555.280.346.694**		**577.761.245.829**		**602.337.861.221**		**802.450.476.482**		**830.465.006.606**		**3.877.647.511.702**	
Sasaran 2																		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat																		
	Program :																	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	50 %	2.399.000.000	60 %	2.600.000.000	70 %	2.600.000.000	80 %	2.600.000.000	90 %	2.601.000.000	100 %	2.401.000.000	100 %	15.201.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan idiologi pancasila kepada Ormas, OKP dan LSM	95 %	95 %	20.000.000	95 %	141.000.000	96 %	149.000.000	97 %	155.000.000	98 %	163.000.000	98 %	171.000.000	98 %	799.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang mendapatkan pembinaan	50 %	50 %	905.000.000	70 %	1.445.000.000	75 %	1.625.000.000	80 %	1.725.000.000	85 %	1.803.000.000	90 %	1.885.000.000	90 %	9.388.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS yang mendapatkan hibah dari pemerintah daerah dan memasukkan laporan tepat waktu dan akuntabel	64 %	69 %	2.940.000.000	72 %	3.087.000.000	75 %	3.241.000.000	80 %	3.404.000.000	83 %	3.574.000.000	85 %	3.572.000.000	85 %	19.818.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik yang terpantau	50 %	50 %	112.000.000	60 %	112.000.000	65 %	125.000.000	70 %	150.000.000	75 %	150.000.000	80 %	150.000.000	80 %	799.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang dapat ditangani	60 %	75 %	2.073.000.000	80 %	2.170.000.000	85 %	2.359.000.000	90 %	2.520.000.000	93 %	2.650.000.000	95 %	2.770.000.000	95 %	14.542.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah sasaran 2					**9.555.000.000**		**10.099.000.000**		**10.554.000.000**		**10.941.000.000**		**10.949.000.000**		**60.547.000.000**	
Sasaran 3																		
Meningkatnya pembinaan dan pengamalan nilai agama																		
	Program :																	
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pembinaan kegiatan keagamaan	100 %	100 %	4.259.329.890	100 %	4.472.296.385	100 %	4.695.911.204	100 %	4.930.706.764	100 %	5.102.177.242	100 %	5.436.104.207	100 %	28.896.525.692	SEKRETARIAT DAERAH
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan realisasi satu desa satu hafiz/hafiza (desa mayoritas muslim)	0 %	0 %	-	12,5%	-	13,46%	0	14.42%	0	15.38%	0	16.35%	0	16.35%	-	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah Sasaran 3				**4.259.329.890**		**4.472.296.385**		**4.695.911.204**		**4.930.706.764**		**5.102.177.242**		**5.436.104.207**		**28.896.525.692**	
	Total Jumlah				**513.420.904.760**	**-**	**569.307.643.079**	**-**	**592.556.157.033**	**-**	**617.822.567.985**	**-**	**818.493.653.724**	**-**	**846.850.110.813**	**-**	**3.967.091.037.394**	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah adalah merupakan gambaran kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Adapun gambaran kapasitas keuangan daerah dapat dilhat pada tabel bab III pada tabel 3.8 dan tabel 3.9. Berdasarkan tabel tersebut maka proyeksi pendanaan untuk setiap program perangkat daerah yang terkait dengan program nasional dan visi misi kepala daerah di prioritaskan.

7.2. Program Perangkat Daerah

Mengacu pada pada kerangka pendanaan sebagaimana dijelaskan pada poin 7.1 diatas, maka disusun indikasi program beserta kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026. Rumusan kebutuhan pendanaan tersebut akan menjadi acuan bagi OPD dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan ditambah sekaligus dengan indikator outcome yang harus dicapai oleh masing-masing OPD. Adapun indikasi program beserta kebutuhaan pendanaan ditampilkan pada tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikasi Program Beserta Kebutuhaan Pendanaan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun Transisi		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,83 %	61,83 %	20.876.000.000	62,44 %	21.586,000,000	63,07 %	22,331,000,000	63,70 %	23,113,000,000	64,34 %	23,935,000,000	64,98 %	24,789,000,000	63,08 %	136.630.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	103,75 %	103,19 %		102 %	0	101 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	101,20 %		DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,85 %	90,56 %		92,44 %	0	92,44 %	0	96,18 %	0	98,10 %	0	100 %	0	94,49 %		DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melek huruf penduduk usia 7 - 18 tahun, perempuan dan laki-laki	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %		DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76,21 %	80,18 %	40.000.000	84 %	50,000,000	88,12 %	60,000,000	92 %	70,000,000	96 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	380.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah PAUD yang memiliki izin	100 %	0 %	-	100 %	76,000,000	100 %	40,000,000	100 %	44,000,000	100 %	98,000,000	100 %	100,000,000	100 %	358.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rasio jumlah buku bahasa daerah per jumlah murid SD/MI dan SMP/Mts.	3,78 %	0,00 %	-	5,05 %	110,000,000	5,30 %	115,000,000	5,57 %	119,000,000	5,85 %	125,000,000	6,14 %	125,000,000	5,40 %	594.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	150 /100000 KH	(137/ 100.000KH)	74.633.300.000	125 /100000 KH	83,715,000,000	113 /100000 KH	87,102,000,000	103 /100000 KH	94,603,000,000	94 /100000 KH	98,254,000,000	93 /100000 KH	90,032,000,000	93 /100000 KH	453.706.000.000	DINAS KESEHATAN

1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2,25 /1000 KH	(2.05/1000 KH)		1,87 /1000 KH	0	1,70 /1000 KH	0	1,54 /1000 KH	0	1,40 /1000 KH	0	1,39 /1000 KH	0	1,39 /1000 KH	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6,62 /1000 KH	(5.82/1000 KH)		5,29 /1000 KH	0	4,81 /1000 KH	0	4,37 /1000 KH	0	3,98 /1000 KH	0	3.94 /1000 KH	0	3,94 /1000 KH	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	353 /100000 Penduduk	333/100000 Penduduk		318 /100000 Penduduk	0	300 /100000 Penduduk	0	276 /100000 Penduduk	0	259 /100000 Penduduk	0	259 /100000 Penduduk	0	259 /100000 Penduduk	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75 %	80 %		85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	90 %	90 %		90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KESEHATAN

1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita hipertensi	56 %	59 %		62 %	0	65 %	0	68 %	0	71 %	0	71 %	0	71 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Gangguan Jiwa Berat	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Militus	64,78 %	68,70 %		72,1 %	0	75,7 %	0	79,5 %	0	83,5 %	0	83,5 %	0	83,5 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan imunisasi atas penyakit pandemi yang melemahkan daya tahan tubuh	0 %	50 %		55 %	0	60 %	0	65 %	0	70 %	0	70 %	0	70 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase KLB yang tertangani	100 %	98 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase korban bencana alam yang tertangani	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat sembuh atas penyakit pandemi yang melemahkan daya tahan tubuh	98 %	100 %		55 %	0	60 %	0	65 %	0	70 %	0	70 %	0	70 %	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tipe Rumah Sakit	C Kelas	C Kelas		C Kelas	1,050,000,000	B Kelas	1,103,000,000	B Kelas	1,158,000,000	B Kelas	1,216,000,000	B Kelas	1,276,000,000	B Kelas	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA

1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	1/1000 Dokter /Penduduk	1/1000 Dokter /Penduduk		1/1000 Dokter /Penduduk	8,511,000,000	1/1000 Dokter /Penduduk	8,937,000,000	1/1000 Dokter /Penduduk	9,384,000,000	1/1000 Dokter /Penduduk	9,853,000,000	1/1000 Dokter /Penduduk	9,853,000,000	1/1000 Dokter /Penduduk	46.538.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4/1000 dokter/ penduduk	4/1000 Dokter /Penduduk		4/1000 Dokter /Penduduk	0	4/1000 Dokter /Penduduk	0	4/1000 Dokter /Penduduk	0	4/1000 Dokter /Penduduk	0	4/1000 Dokter /Penduduk	0	4/1000 Dokter /Penduduk	-	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotik dan toko obat yang memenuhi syarat	100 %	100 %	642.000.000	100 %	731,000,000	100 %	769,000,000	100 %	808,100,000	100 %	849,000,000	100 %	854,000,000	100 %	4.653.100.000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persetase industri rumah tangga yang memenuhi upaya kesehatan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita	1 balita	1 balita	918.800.000	1 balita	923,000,000	1 balita	927,400,000	1 balita	932,000,000	1 balita	936,800,000	1 balita	936,800,000	1 balita	4.656.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai (ws) kewenangan kabupaten	90.58 Rasio	90,58 Rasio		92.08 Rasio	0	93.58 Rasio	0	95.08 Rasio	0	96.58 Rasio	0	98.08 Rasio	0	98.08 Rasio	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,25 %	72,71%		76,17 %	0	79,63 %	0	83,09 %	0	86,55 %	0	90,01 %	0	93,47 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai (ws) kewenangan kabupaten	85.22 Rasio	86,92 Rasio	52.396.000.000	88.62 Rasio	79,760,000,000	90 Rasio	78,060,000,000	92.02 Rasio	73,900,000,000	93.72 Rasio	33,232,000,000	95.42 Rasio	30,879,000,000	95.42 Rasio	348.227.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	84,05 %	84,56 %	2.345.000.000	87 %	28,412,000,000	89 %	10,040,000,000	91 %	10,542,000,000	93 %	11,069,000,000	94 %	11,291,000,000	94 %	73.699.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	58,34 %	58,34 %	-	66 %	3,613,000,000	68 %	3,793,000,000	70 %	3,983,000,000	72 %	4,182,000,000	74 %	4,391,000,000	74 %	19.962.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	74,76 %	76,55 %	7.678.000.000	79.72 %	13,185,000,000	82,99 %	13,845,000,000	86.06 %	14,537,000,000	89.23 %	15,263,000,000	92.40 %	16,027,000,000	92.40 %	80.535.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata	1,03 %	1,03 %	-	1,49 %	44,200,000,000	1,95 %	46,410,000,000	2,41 %	48,731,000,000	2,87 %	51,167,000,000	3,33 %	53,725,000,000	3,33 %	244.233.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber IMB per- satuan bangunan	0,017 Rasio	0,017 Rasio	980.000.000	0,018 Rasio	5,840,000,000	0,019 Rasio	5,972,000,000	0,020 Rasio	6,098,000,000	0,021 Rasio	6,227,000,000	0,022 Rasio	6,538,000,000	0,022 Rasio	31.655.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan dan Gedung Pemerintah Daerah	107 %	82 %		89 %	0	90 %	0	92 %	0	94 %	0	95 %	0	95 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah	13 %	13 %		20 %	0	27 %	0	33 %	0	40 %	0	47 %	0	47 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase data bangunan dan gedung yang terupdate dalam sistem informasi bangunan dan gedung dalam tahun N	0 %	0 %		0,18 %	0	0,36 %	0	0,54 %	0	0,73 %	0	0,86 %	0	0,86 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak	80 %	0 %		82,80 %	3,400,000,000	85,61 %	3,570,000,000	88,41 %	3,747,000,000	91,21 %	3,933,000,000	94.02 %	4,129,000,000	94.02 %	18.779.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	77,25 %	84,60 %	164.515.280.000	89.97 %	145,764,490,000	91.40 %	30,486,910,000	93.04 %	28,436,910,000	94.79 %	26,236,910,000	96.99 %	47,086,910,000	96.99 %	442.527.410.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Jasa Konstruksi yang terlatih	0 %	0 %	-	20 %	300,000,000	40 %	200,000,000	60 %	350,000,000	80 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	1.250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase bangunan dan gedung yang sesuai RTRW	20 %	20 %	2.580.000.000	20 %	2,528,000,000	20 %	2,829,000,000	20 %	1,846,900,000	20 %	897,400,000	20 %	516,800,000	100 %	11.198.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kecamatan yang telah memiliki RDTR (rencana Detai Tata Ruang)	0 %	0 %	-	0 %	0	7.7 %	0	15.4 %	0	23.1 %	0	0 %	0	46 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pembangunan / Rehab Rumah Terdampak Bencana Alam	10 %	10 %	-	100 %	1,548,000,000	100 %	1,433,000,000	100 %	1,438,000,000	100 %	1,438,000,000	100 %	1,438,000,000	100 %	7.295.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	0 %	0 %	-	20 %	635,000,000	40 %	235,000,000	60 %	235,000,000	80 %	35,000,000	100 %	185,000,000	100 %	1.325.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni yang tertangani	75,10 %	77,00 %	-	79 %	10,800,000,000	81 %	10,800,000,000	83 %	10,800,000,000	84 %	10,800,000,000	86 %	10,800,000,000	86 %	54.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan pemukiman yang telah memiliki PSU	24 %	0 %	-	41 %	1,870,000,000	59 %	1,320,000,000	76 %	455,000,000	94 %	1,320,000,000	100 %	920,000,000	100 %	5.885.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan yang bekerjasama dengan pemerintah	76.47 %	0 %	-	82.35 %	120,000,000	88.24 %	120,000,000	94.12 %	120,000,000	100 %	120,000,000	100 %	120,000,000	100 %	600.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	50 %	2.399.000.000	60 %	2.665.000.000	70 %	2.600.000.000	80 %	2.600.000.000	90 %	2.601.000.000	100 %	2.401.000.000	100 %	15.266.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah korban bencana yang terlayani logistik dengan baik	100 %	100 %	851.000.000	100 %	1,990,000,000	100 %	1,672,000,000	100 %	1,908,000,000	100 %	2,144,000,000	100 %	2,299,000,000	100 %	10.013.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	886.000.000	100 %	4,395,000,000	100 %	3,320,000,000	100 %	3,820,000,000	100 %	3,220,000,000	100 %	3,221,000,000	100 %	17.976.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																

1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kawasan Adat Terpencil (KAT) yang tertangani	33.73 %	36,68%	967.000.000	47.62 %	1,024,000,000	57.54 %	1,078,000,000	69.44 %	1,130,000,000	83.33 %	1,185,000,000	100 %	1,246,000,000	100 %	6.630.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar di Luar Panti yang tertangani dengan baik	27.15 %	37,31%	4.124.000.000	48.23 %	4,477,000,000	59.92 %	4,541,000,000	72.38 %	4,771,000,000	85.62 %	5,014,000,000	100 %	5,265,000,000	100 %	28.192.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Besaran rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti	22.63 %	32,24%		42.82 %	0	54.52 %	0	68.03 %	0	83.49 %	0	99.93 %	0	99.93 %		DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Besaran rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	1 %	49,78 %		55.77 %	0	65.14 %	0	75.62 %	0	86.86 %	0	99.97 %	0	99.97 %		DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Besaran rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	15.20 %	24,63%		36.43 %	0	50.58 %	0	65.91 %	0	82.42 %	0	98.93 %	0	98.93 %		DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang masuk DTKS	45 %	50 %	663.000.000	51 %	705,000,000	52 %	742,000,000	53 %	777,000,000	54 %	817,000,000	55 %	857,000,000	55 %	4.561.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	7.510.000.000	100 %	7,799,000,000	100 %	8,189,000,000	100 %	8,599,000,000	100 %	9,028,000,000	100 %	9,481,000,000	100 %	50.606.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan bina kesiapsiagaan bencana Cakupan	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS SOSIAL
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen tenaga kerja yang dibutuhkan	0 %	0 %	-	30 %	135,000,000	30 %	35,000,000	30 %	35,000,000	30 %	135,000,000	30 %	35,000,000	30 %	375.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih	83 %	84 %	328.000.000	85 %	1,159,000,000	85 %	1,250,000,000	85 %	1,330,000,000	87 %	1,385,000,000	90 %	1,360,000,000	90 %	6.812.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan	52 %	52 %	233.000.000	52 %	1,374,000,000	55 %	1,758,000,000	55 %	2,377,000,000	60 %	2,496,000,000	70 %	2,580,000,000	70 %	10.818.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Jumlah Perusahaan menjalankan regulasi secara tepat.	27 %	20 %	84.000.000	22 %	392,000,000	24 %	422,000,000	26 %	450,000,000	28 %	473,000,000	30 %	492,000,000	30 %	2.313.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	30 %	30 %	848.000.000	30 %	1,164,000,000	30 %	1,432,000,000	30 %	1,486,000,000	40 %	1,542,000,000	40 %	1,542,000,000	40 %	8.014.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase KDRT	0.11 %	0,11%	220.000.000	0.11 %	231,000,000	0.11 %	243,000,000	0.11 %	255,000,000	0.11 %	267,000,000	0.11 %	281,000,000	0.11 %	1.278.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kepala Keluarga Perempuan yang terberdayakan	1.12 %	1,75%	264.000.000	1,75 %	277,000,000	1.73 %	290,000,000	1.75 %	304,000,000	1.75 %	319,000,000	1.75 %	319,000,000	1.75 %	1.773.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan anak yang ada dalam aplikasi	0 %	0 %	-	20 %	150,000,000	30 %	150,000,000	40 %	150,000,000	50 %	150,000,000	50 %	150,000,000	50 %	750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten Layak anak	500 Nilai	500 Nilai	126.000.000	500 Nilai	132,000,000	500 Nilai	129,000,000	500 Nilai	146,000,000	500 Nilai	153,000,000	500 Nilai	161,000,000	500 Nilai	847.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	48 %	85 %	19.000.000	85 %	20,000,000	85 %	21,000,000	85 %	22,000,000	85 %	23,000,000	85 %	24,000,000	85 %	129.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase beras yang terpenuhi dengan beras produksi lokal	97.98 %	98,32%	115.000.000	98.66 %	300,000,000	98.99 %	315,000,000	99.33 %	330,000,000	99.67 %	345,000,000	100 %	360,000,000	100 %	1.765.000.000	DINAS PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi pangan perkapita pertahun	63.90 %	65%	615.000.000	67.50 %	1,275,000,000	71.00 %	1,352,000,000	74.50 %	1,430,000,000	78.50 %	1,508,000,000	83 %	1,588,000,000	83 %	7.768.000.000	DINAS PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan	40,29 %	50,76 %		60.6 %	0	70,44 %	0	80,29 %	0	90.13 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pangan altenatif (singkong, ubi jalar dan sagu) yang dikonsumsi masyarakat	5 %	7 %		8 %	0	10 %	0	12 %	0	14 %	0	15 %	0	15 %	-	DINAS PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan desa rawan pangan yang tertangani dengan tuntas	23.80 %	33,33%	110.000.000	52.38 %	425,000,000	61.9 %	465,000,000	76.19 %	510,000,000	90.47 %	545,000,000	100 %	580,000,000	100 %	2.635.000.000	DINAS PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peredaran pangan segar yang memiliki rekomendasi dan sesuai persyaratan yang dianjurkan	26.47 %	38,23%	170.000.000	50 %	305,000,000	61.76 %	338,000,000	73.52 %	371,000,000	88.23 %	400,000,000	100 %	435,000,000	100 %	2.019.000.000	DINAS PANGAN
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi	100 %	100 %	10.000.000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat penyelesaian masalah sengketa tanah yang diselesaikan	90 %	0 %	-	90 %	250,000,000	90 %	250,000,000	90 %	250,000,000	90 %	250,000,000	90 %	250,000,000	90 %	1.250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian ganti kerugian tanah dan sentunan tanah akibat pembangunan	100 %	0 %	-	100 %	5,000,000,000	100 %	5,000,000,000	100 %	5,000,000,000	100 %	5,000,000,000	100 %	5,000,000,000	100 %	25.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pemanfaatan tanah kosong	70 %	0 %	-	80 %	150,000,000	80 %	200,000,000	90 %	200,000,000	90 %	200,000,000	90 %	200,000,000	90 %	950.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tanah milik daerah/negara yang dikelola masyarakat atau pihak ketiga	80 %	0 %		80 %	15,000,000	80 %	15,000,000	80 %	15,000,000	90 %	15,000,000	90 %	15,000,000	90 %	75.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas tanah yang sudah terpetakan melalui Zona Nilai Tanah	0 %	0 %		25 %	100,000,000	50 %	100,000,000	75 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen lingkungan hidup yang terfasilitasi	60 %	65 %	100.000.000	70 %	550,000,000	75 %	225,000,000	80 %	250,000,000	85 %	250,000,000	90 %	250,000,000	100 %	1.625.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan (Kualitas air)	20 Nilai	52,6 Nilai		52.7 Nilai	0	52.8 Nilai	0	52.9 Nilai	0	52.10 Nilai	0	52.11 Nilai	0	65 Nilai		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Udara)	20 Nilai	92,19 Nilai		92.29 Nilai	0	92.39 Nilai	0	92.49 Nilai	0	92.59 Nilai	0	92.69 Nilai	0	95 Nilai		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Lingkungan Hidup (Luasan Tutupan Lahan)	20 Nilai	72,99 Nilai		73.14 Nilai	0	73.28 Nilai	0	73.45 Nilai	0	73.64 Nilai	0	73.84 Nilai	0	75 Nilai		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan	20 Nilai	72,50 Nilai	701.000.000	72.80 Nilai	1,610,000,000	73.10 Nilai	1,612,000,000	73.50 Nilai	1,627,000,000	74 Nilai	1,392,000,000	74.60 Nilai	1,147,000,000	75 Nilai	8.089.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase lokasi yang dikelola	50 %	0 %	-	60 %	1,140,000,000	63 %	1,040,000,000	81 %	680,000,000	90 %	680,000,000	100 %	680,000,000	100 %	4.220.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Penghasil LB3 Yang Berizin	56 %	67 %	129.000.000	78 %	535,000,000	89 %	237,000,000	100 %	239,000,000	0 %	0	0 %	0	100 %	1.140.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang mendapat persetujuan lingkungan yang dilayani	65 %	70 %	397.000.000	75 %	490,000,000	80 %	500,000,000	85 %	505,000,000	90 %	475,000,000	95 %	475,000,000	100 %	2.842.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase desa/kelurahan dengan resiko tinggi yang tertangani	30 %	0 %	-	50 %	1,150,000,000	60 %	1,105,000,000	65 %	1,075,000,000	70 %	1,075,000,000	80 %	1,075,000,000	90 %	5.480.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase penghargaan yang diberikan	0 %	0 %	-	40 %	500,000,000	50 %	500,000,000	60 %	500,000,000	75 %	500,000,000	90 %	500,000,000	100 %	2.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengaduan lingkungan yang tertangani dengan baik	0 %	5 %	80.000.000	10 %	200,000,000	15 %	200,000,000	20 %	250,000,000	25 %	275,000,000	25 %	275,000,000	25 %	1.280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Pengurangan Sampah	22 %	24 %	3.561.000.000	26 %	5,039,000,000	27 %	4,792,000,000	28 %	5,569,000,000	30 %	5,246,000,000	30 %	5,969,000,000	30 %	3.582.715.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Penanganan Sampah	75 %	74 %		73 %	0	72 %	0	71 %	0	70 %	0	70 %	0	70 %	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0.032 Rasio	0,027401 Rasio	45.257.794	0.027 Rasio	842,000,000	0.027 Rasio	845,000,000	0.027 Rasio	798,000,000	0.028 Rasio	995,000,000	0.028 Rasio	770,000,000	0.028 Rasio	4.295.257.794	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang diselesaian dengan lembaga terkait lainnya	60 %	50 %	550.000.000	60 %	460,000,000	60 %	460,000,000	65 %	460,000,000	65 %	460,000,000	65 %	460,000,000	70 %	2.850.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan	75 %	80 %	85.000.000	85 %	85,000,000	85 %	85,000,000	85 %	85,000,000	85 %	85,000,000	85 %	85,000,000	85 %	510.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data profil kependudukan	100 %	100 %	21.000.000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	126.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan desa yang tidak bermasalah tata batas desanya	33.73 %	100	0	100 %	0	100 %	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	1.600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan desa yang memiliki kerjasama antara desa	60 %			80 %	307,000,000	100 %	307,000,000	100 %	307,000,000	100 %	307,000,000	100 %	307,000,000	100 %	1.535.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki perdes atau dokumen lingkungan sebagai acuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	95 %	95 %	887.400.000	95 %	3,577,000,000	95 %	1,663,000,000	95 %	3,868,000,000	95 %	1,664,000,000	95 %	1,664,000,000	95 %	13.323.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga yang berprestasi dalam pemberdayaan desa	70 %	80 %	1.197.100.000	85 %	1,229,000,000	90 %	1,229,000,000	95 %	1,230,000,000	100 %	1,231,000,000	100 %	979,000,000	100 %	7.095.100.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2 anak	2 anak	188.000.000	2 anak	425,000,000	2 anak	262,000,000	2 anak	276,000,000	2 anak	289,000,000	2 anak	407,000,000	2 anak	1.847.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Akseptor KB	74,14 %	74,00 %	4.750.000.000	74 %	8,172,000,000	74 %	8,591,000,000	74 %	9,022,000,000	74 %	9,471,000,000	74 %	9,944,000,000	74 %	49.950.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	46,7 %	46,7 %	211.000.000	46,7 %	474,000,000	46,7 %	533,000,000	46,7 %	555,000,000	46,7 %	578,000,000	46,7 %	601,000,000	46,7 %	2.952.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100 %	100 %	3.434.207.000	100 %	11,152,000,000	100 %	19,343,000,000	100 %	3,481,000,000	100 %	3,481,000,000	100 %	3,760,000,000	100 %	44.651.207.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terminal dalam kondisi baik dan difungsikan	50 %	50 %		50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase desa yang masih sulit (1 kali seminggu) terakses jasa kenderaan roda empat	20 %	20 %		20 %	0	30 %	0	50 %	0	70 %	0	80 %	0	90 %		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase PAD transportasi	80 %	80 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase badan usaha pelayaran yang memiliki izin	100 %	5 %	200.000.000	100 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	500.000.000	100 %		100 %	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Pesentase lokasi pendaratan dan lepas landas helikopter yang memiliki izin	50 %	60 %	1.999.999.999	80 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	-	80 %	1.999.999.999	DINAS PERHUBUNGAN
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	95 %	1.210.000.000	96 %	1,320,500,000	97 %	1,384,025,000	98 %	1,450,725,000	99 %	1,520,761,000	100 %	1,293,848,000	100 %	8.179.859.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang sistem aplikasinya telah terintegrasi dengan OPD lainnya, Provinsi dan nasional	90 %	100 %	3.070.000.000	100 %	3,974,000,000	100 %	10,117,000,000	100 %	3,554,000,000	100 %	3,732,000,000	100 %	3,918,000,000	100 %	28.365.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pesentase desa/kelurahan yang telah terakses jaringan internet dengan baik dan lancar	60 %	65 %	-	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	71.32 %	71.32 %	71.000.000	73.64 %	78.000.000	77.52 %	86.000.000	81.40 %	95.000.000	85.27 %	104.000.000	93.02 %	114.000.000	100 %	548.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mandiri	10 %	0 %	20.000.000	15 %	22,000,000	15 %	24,000,000	15 %	26,000,000	20 %	29,000,000	25 %	32,000,000	75 %	153.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha	98.50 %	98.50 %	291.000.000	99.06 %	690,000,000	99.63 %	690,000,000	99.63 %	690,000,000	99.63 %	690,000,000	99.79 %	690,000,000	100 %	3.741.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi	60,92 %	60,92 %	772.000.000	63.66 %	849,000,000	63.86 %	934,000,000	64.22 %	1,027,000,000	64.58 %	1,130,000,000	64.49 %	1,243,000,000	65.30 %	5.955.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor PMDN/PMA yang mengajukan minat kemudian melanjutkan investasinya	75 %	75 %	162.000.000	76 %	170,000,000	76 %	178,000,000	77 %	187,000,000	77 %	196,000,000	78 %	196,000,000	78 %	1.089.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6.020 Trilyun	6.230 Trilyun	265.000.000	6.314 Trilyun	265,000,000	6.431 Trilyun	265,000,000	6.595 Trilyun	265,000,000	6.826 Trilyun	265,000,000	7.196 Trilyun	265,000,000	7.196 Trilyun	1.590.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan	80 %	80 %	264.000.000	80 %	264,000,000	80 %	264,000,000	80 %	264,000,000	80 %	264,000,000	80 %	264,000,000	80 %	1.584.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan realisasi investasi	149.766 Milyar	209.673 Milyar	342.000.000	293.542 Milyar	342,000,000	410.959 Milyar	342,000,000	575.342 Milyar	342,000,000	805.480 Milyar	342,000,000	966.576 Milyar	342,000,000	966.576 Milyar	2.052.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data penanaman modal yang tersaji melalui sistem informasi	87 %	87 %	100.000.000	87 %	100,000,000	87 %	100,000,000	88 %	100,000,000	88 %	100,000,000	89 %	100,000,000	89 %	600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL

2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda berprestasi tingkat kab, provinsi, nasional dan internasional	100 %	100 %	1.800.000.000	100 %	2,390,000,000	100 %	2,510,000,000	100 %	2,635,000,000	100 %	2,767,000,000	100 %	2,905,000,000	100 %	15.007.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan organisasi cabang olahraga	100 %	100 %	575.000.000	100 %	1,115,000,000	100 %	1,171,000,000	100 %	1,229,000,000	100 %	1,291,000,000	100 %	1,355,000,000	100 %	6.736.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikursertaan organisasi kepramukaan pada setiap kegiatan tingkat kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional	85 %	80 %	-	85 %	45,000,000	90 %	47,000,000	95 %	50,000,000	100 %	52,000,000	100 %	55,000,000	100 %	249.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD dan Kecamatan yang telah memiliki aplikasi data yang baik, terupdate dan terintegrasi dengan BPS	90 %	100 %	170.000.000	100 %	300,000,000	100 %	330,000,000	100 %	360,000,000	100 %	400,000,000	100 %	420,000,000	100 %	1.980.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan informasi yang disampaikan melalui persandian	90 %	100 %	214.000.000	100 %	230,000,000	100 %	241,000,000	100 %	252,000,000	100 %	264,000,000	100 %	270,000,000	100 %	1.471.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penggiat kebudayaan yang berumur 20 - 40 tahun dari total penggiat kebudayaan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	416,000,000	100 %	437,000,000	100 %	459,000,000	100 %	482,000,000	100 %	414,000,000	100 %	2.208.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan telah dilindungi pemda	100 %	100 %	-	100 %	78,000,000	100 %	230,000,000	100 %	244,000,000	100 %	166,000,000	100 %	175,000,000	100 %	893.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan dalam 1 Tahun	65,00 %	66,00 %	4.848.000.000	67,00 %	5,199,000,000	68,00 %	5,460,000,000	69,00 %	5,734,000,000	70,0 %	6,019,000,000	72,00 %	6,322,000,000	80,0 %	28.734.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Naskah Kuno Yang tersedia diperpustakaan Daerah	0 %	0 %	-	15 %	60,000,000	25 %	64,000,000	40 %	68,000,000	55 %	72,000,000	70 %	76,000,000	85 %	340.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik	30 %	49 %	16.000.000	55 %	70.000.000	70 %	75.000.000	80 %	79.000.000	85 %	83.000.000	90 %	72.000.000	100 %	395.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang sangat penting terlindungi dan terselamatkan	65 %	70 %	21.000.000	75 %	65,000,000	80 %	68,000,000	85 %	71,000,000	90 %	74,000,000	100 %	76,000,000	100 %	375.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase arsip yang bisa akses	0 %	0 %	0 %	60 %	25,000,000	60 %	26,000,000	65 %	30,000,000	65 %	28,000,000	65 %	29,000,000	65 %	138.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan dari total produksi daerah	100 %	100 %	481.000.000	100 %	3,726,000,000	100 %	3,276,000,000	100 %	3,590,000,000	100 %	3,559,000,000	100 %	3,619,000,000	100 %	18.251.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan tangkap yang melaksanakan penangkapan dengan legal (ramah lingkungan)	95 %	95 %		97 %	0	98 %	0	99 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %		DINAS PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap PAD	50 %	50 %		50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %		DINAS PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi perikanan budidaya dibanding total produksi daerah	100 %	100 %	1.811.000.000	100 %	3,102,000,000	100 %	3,438,000,000	100 %	3,902,000,000	100 %	4,460,000,000	100 %	5,129,000,000	100 %	21.842.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kontribusi sektor perikanan budidaya terhadap PAD	50 %	50 %		50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %		DINAS PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok/Nelayan budidaya perikanan payau menerapkan pengelolaan ramah lingkungan	100 %	100 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %		DINAS PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kelompok pengelola hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan	8 %	11 %	756.000.000	24 %	1,989,000,000	37 %	3,968,000,000	50 %	2,076,000,000	63 %	3,546,000,000	79 %	1,919,000,000	100 %	14.254.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan bina kelompok pengelola hasil perikanan	4 %	11 %		24 %	0	37 %	0	50 %	0	63 %	0	79 %	0	100 %	-	DINAS PERIKANAN
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase lama kunjungan wisata	23 %	25 %	400.000.000	30 %	2,450,000,000	40 %	2,573,000,000	50 %	2,701,000,000	60 %	2,720,000,000	70 %	2,978,000,000	70 %	13.822.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	23000 orang	23000 orang	-	30000 orang	1,300,000,000	32500 orang	1,365,000,000	35000 orang	1,433,000,000	37500 orang	1,505,000,000	40000 orang	1,580,000,000	198000 orang	7.183.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase ekonomi kreatif yang tertangani	100 %	100 %	-	100 %	590,000,000	100 %	620,000,000	100 %	650,000,000	100 %	683,000,000	100 %	717,000,000	100 %	3.260.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase penggiat ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	33 %	40 %	-	47 %	330,000,000	53 %	347,000,000	60 %	364,000,000	67 %	382,000,000	70 %	401,000,000	74 %	1.824.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Tanaman pangan	99 %	101 %	6.514.000.000	102 %	10,266,000,000	103 %	10,509,000,000	104 %	10,663,000,000	105 %	11,719,000,000	106 %	3,016,000,000	106 %	52.687.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Hortikultura	106 %	108 %		109 %	0	110 %	0	111 %	0	112 %	0	113 %	0	114 %		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Tanaman Perkebunan	109,72 %	110,00 %		111 %	0	112 %	0	113 %	0	114 %	0	115 %	0	116 %		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	NTP Peternakan	104,13 %	104,14 %		105 %	0	106 %	0	107 %	0	108 %	0	109 %	0	110 %		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas lahan Tanaman Jagung dan Padi yang mendapatkan bantuan Benih	52,48 %	88,89 %		89,40 %	0	90,12 %	0	90.86 %	0	91.75 %	0	93.56 %	0	93,56 %		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan budidaya pertanian yang mendapatkan bantuan pupuk	52,48 %	88,89 %		89,40 %	0	90,12 %	0	90,86 %	0	91.75 %	0	93.56 %	0	93.56 %		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi per hektar	4,7 Ton/Ha	5,2 Ton/Ha		5,3 Ton/Ha	0	5,4 Ton/Ha	0	5,5 Ton/Ha	0	5,6 Ton/Ha	0	5,7 Ton/Ha	0	5,7 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN

3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Jagung per hektar	5,70 Ton/Ha	5,8 Ton/Ha		5,90 Ton/ Ha	0	6,0 Ton/Ha	0	6,10 Ton/ Ha	0	6,20 Ton/ Ha	0	6,30 Ton/ Ha	0	6,30 Ton/ Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Kakao per hektar	1,1 Ton/Ha	1,2 Ton/Ha		1,3 Ton/Ha	0	1,4 Ton/Ha	0	1,5 Ton/Ha	0	1,6 Ton/Ha	0	1,7 Ton/Ha	0	1,7 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata-rata Produktivitas tanaman buah-buahan dan Sayuran unggulan per hektar	1,82 Ton/Ha	1,879 Ton/Ha		1.935 Ton /Ha	0	1.975 Ton /Ha	0	2,053 Ton /Ha	0	2,11 Ton/ Ha	0	2,17 Ton/ Ha	0	2,.17 Ton/ Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Cabe Per hektar	4 Ton/Ha	4,2 Ton/Ha		4,7 Ton/Ha	0	4,9 Ton/Ha	0	5,0 Ton/Ha	0	5,5 Ton/Ha	0	6,0 Ton/Ha	0	6,0 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Bawang MerahPer hektar	4 Ton/Ha	5 Ton/Ha		6,0 Ton/Ha	0	7,0 Ton/Ha	0	7,5 Ton/Ha	0	8,0 Ton/Ha	0	8,5 Ton/Ha	0	8,5 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Jeruk Per hektar	35,8 Ton/Ha	35,85 Ton/Ha		36,0 Ton/ Ha	0	36,5 Ton/ Ha	0	37,0 Ton/ Ha	0	37,5 Ton/ Ha	0	38,0 Ton/ Ha	0	38,0 Ton/ Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Durian per hektar	24,53 Ton/Ha	24,55 Ton/Ha		26 Ton/Ha	0	26,5 Ton/ Ha	0	27 Ton/Ha	0	27,5 Ton/ Ha	0	28 Ton/Ha	0	28 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pisang (Rumpun)	14,76 Ton/Ha	15 Ton/Ha		16 Ton/Ha	0	17 Ton/Ha	0	18 Ton/Ha	0	19 Ton/Ha	0	20 Ton/Ha	0	20 Ton/Ha		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ternak sapi yang berhasil berkembang biak melalui Inseminasi Buatan (IB)	25,29 %	27,18 %		39,3 %	0	42,19 %	0	43,81 %	0	45.42 %	0	49,68 %	0	49,68 %		DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok pertanian/perkebunan/hortikul tura yang teintegrasi dgn sektor lain dan dikelola ramah lingkungan	37,11 %	40,20 %		43,29 %	0	46,38 %	0	49,47 %	0	52,57 %	0	55,66 %	0	55,66 %		DINAS PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan lahan pertanian yang terakses irigasi, jalan usaha tani dan embung dengan kondisi baik	25,49 %	28,89 %	4.655.000.000	30,55 %	8,756,000,000	32,01 %	6,183,000,000	33,6 %	5,733,000,000	36,12 %	5,433,000,000	38,58 %	5,433,000,000	38,58 %	36.193.000.000	DINAS PERTANIAN

3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit ternak yang dapat tertangani dengan baik dan sembuh	76.46 %	80,71%	343.830.000	85,19 %	1,246,050,000	90,31 %	925,600,000	94,89 %	1,005,600,000	97.59 %	1,061,390,000	105,86 %	1,135,030,000	106,86 %	5.717.500.000	DINAS PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan luas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dapat diatasi akibat bencana pertanian (penyakit, dll)	100 %	100 %	1.269.000.000	100 %	2,179,000,000	100 %	2,203,000,000	100 %	2,203,000,000	100 %	2,203,000,000	100 %	2,203,000,000	100 %	12.260.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase toko usaha pertanian dan peternakan yang memiliki izin	100 %	100 %	129.000.000	100 %	110,000,000	100 %	125,000,000	100 %	110,000,000	100 %	110,000,000	100 %	140,000,000	100 %	724.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok Tani Yang sudah kuat kelembagaannya	5,87 %	9,87 %	8.259.000.000	13,87 %	2,481,000,000	17,88 %	2,462,000,000	21,88 %	2,672,000,000	25,88 %	2,623,000,000	29,89 %	2,760,000,000	29,89 %	21.257.000.000	DINAS PERTANIAN
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rasio pasar kabupaten per jumlah kecamatan	0,87 Rasio	0,87 Rasio	-	0,81 Rasio	5.500.000.000	0,76 Rasio	6.050.000.000	0,72 Rasio	6.655.000.000	0,68 Rasio	7.321.000.000	0,65 Rasio	8.053.000.000	0,65 Rasio	33.579.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah bahan pangan yang didistribusi untuk menstabilkan harga	100 %	100 %	264.000.000	100 %	375,000,000	100 %	375,000,000	100 %	375,000,000	100 %	375,000,000	100 %	375,000,000	100 %	2.139.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan bahan perdagangan yang aman untuk konsumen	50 %	50 %	-	75 %	1,000,000,000	80 %	1,100,000,000	85 %	1,210,000,000	90 %	1,331,000,000	95 %	1,464,000,000	95 %	6.105.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan fasilitasi kelompok usaha dalam memasarkan produknya	100 %	100 %	5.000.000	100 %	58,000,000	100 %	63,000,000	100 %	68,000,000	100 %	73,000,000	100 %	78,000,000	100 %	345.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	7.10 %	7.10 %	2.193.000.000	7,4 %	2,412,000,000	7,4 %	2,654,000,000	7,4 %	2,919,000,000	7,4 %	3,211,000,000	7,5 %	3,532,000,000	7,5 %	16.921.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase kelompok IKM yang telah memiliki izin usaha industri	15.71 %	15.71 %	32.000.000	16.06 %	90,000,000	16.41 %	90,000,000	16.75 %	120,000,000	17.09 %	120,000,000	17.42 %	150,000,000	67.08 %	602.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase luas lahan cadangan transmigrasi tersedia dan sesuai RTRW	75 %	90 %	-	100 %	485.000.000	0 %	40.000.000	0 %	0	0 %	45.000.000	0 %	0	0 %	570.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial menuju transmigrasi mandiri	82%	100%	12.130.000.000	100%	3.065.000.000	100%	105.000.000	100%	4.330.000.000	100%	4.330.000.000	100%	4.330.000.000	1 %	28.290.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rangking LPPD ditingkat nasional	94.08 %	95	1.718.610.778	96 %	1.804.541.317	96 %	1.894.768.383	96 %	1.989.506.802	96 %	2.088.982.142	96 %	2.193.431.249	96 %	11.689.840.671	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perda/Perbup yang diterbitkan dan diImplementasikan	100 %	100 %	-	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang di buat dan terlaksana dengan baik	0 %	20 %	-	20 %	0	20 %	0	20 %	0	20 %	0	20 %	0	20 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pembinaan kegiatan keagamaan	100 %	100 %	4.259.329.890	100 %	4.472.296.385	100 %	4.695.911.204	100 %	4.930.706.764	100 %	5.102.177.242	100 %	5.436.104.207	100 %	28.896.525.692	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan realisasi satu desa satu hafiz/hafiza (desa mayoritas muslim)	0 %	0 %	-	12,5%	-	13,46%	0	14.42%	0	15.38%	0	16.35%	0	16.35%	-	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD yang mengimput program kegiatan dalam E-Monev tepat waktu dan terupdate	100 %	100 %	5.351.203.646	100 %	5,467,000,000	100 %	5,569,000,000	100 %	5,676,000,000	100 %	5,788,000,000	100 %	5,906,000,000	100 %	33.757.203.646	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD yang mengimput program kegiatan pada E-Sirup tepat waktu dan terupdate	100 %	100 %	-	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase aspirasi atau permasalahan SDA yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	-	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	-	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**																	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang dihasilkan setiap tahun	60 %	100 %	15.090.584.777	65 %	15.995.000.000	70 %	16.812.000.000	75 %	17.902.000.000	80 %	18.535.000.000	90 %	16.694.000.000	90 %	101.028.584.777	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan pengawasan pelaksananaan pembangunan oleh Komisi-komisi	70 %	70 %		75 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	100 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan aspirasi masyarakat melalui reses yang dimput dalam E - Pokir tepat waktu	80 %	80 %		90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	SEKRETARIAT DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**		**PERENCANAAN**																	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang pemerintahan	80 %	80 %	841.000.000	85 %	870,000,000	90 %	897,000,000	90 %	924,000,000	90 %	951,000,000	90 %	980,000,000	90 %	5.463.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang pembangunan manusia	90 %	90 %	638.000.000	92 %	1,062,000,000	93 %	1,142,000,000	94 %	1,214,000,000	96 %	1,306,000,000	100 %	1,673,000,000	100 %	7.035.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang perekonomian	90 %	90 %	-	92 %	0	93 %	0	94 %	0	95 %	0	95 %	0	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang infrastruktur	80 %	80 %	-	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	**02**		**KEUANGAN**																	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP Predikat	WTP Predikat	158.744.000.000	WTP Predikat	156,289,000,000	WTP Predikat	164,682,000,000	WTP Predikat	172,875,000,000	WTP Predikat	181,471,000,000	WTP Predikat	190,487,000,000	WTP Predikat	1.024.548.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan baik dan ada dalam bentuk fisik	96 %	98 %	2.227.000.000	98 %	2,227,000,000	98 %	2,359,000,000	98 %	2,493,000,000	98 %	2,633,000,000	98 %	2,785,000,000	98 %	14.724.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	6.85 %	7.80%	2.064.000.000	7.80 %	2,195,000,000	7.82 %	2,281,000,000	7.84 %	2,017,000,000	7.85 %	2,151,000,000	7.87 %	2,247,000,000	7.91 %	12.955.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**																	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN berpendidikan SI, S2, S3 dibanding dengan total ASN	64,64 %	65,07 %	1.747.230.000	66 %	8,615,000,000	66 %	7,432,000,000	66 %	6,412,000,000	67 %	6,856,000,000	67 %	7,228,000,000	67 %	38.290.230.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang disiplin dan berkinerja baik	80 %	83 %	-	85 %	0	90 %	0	93 %	0	95 %	0	97 %	0	97 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15,26 %	15,26 %	458.920.000	28,78 %	3,470,000,000	42.29 %	9,222,000,000	55.80 %	12,804,000,000	69.32 %	9,078,000,000	82.83 %	9,127,000,000	82.83 %	44.159.920.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100 %	100 %	131.000.000	100 %	306,000,000	100 %	461,000,000	100 %	461,000,000	100 %	391,000,000	100 %	598,000,000	100 %	2.348.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	14 %	24 %		100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**																	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan pengelolaan keuangan OPD dan Kecamatan dengan hasil baik dan akuntabel	86 %	87 %	1.000.000.000	88 %	2.188.000.000	89 %	1.835.000.000	90 %	1.920.000.000	91 %	2.009.000.000	92 %	2.103.000.000	93 %	11.055.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pencapaian Monev Terpadu (MCP) KPK , OPD dan Desa setiap Tahun	76 %	70 %	2.145.389.000	72 %	1,858,377,000	74 %	1,910,412,000	76 %	1,965,049,000	78 %	2,022,418,000	80 %	2,082,655,000	82 %	11.984.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**		**KECAMATAN**																	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	7.100.000	100 %	7.500.000	100 %	7.800.000	100 %	8.200.000	100 %	8.700.000	100 %	9.100.000	100 %	48.400.000	KECAMATAN PAGUAT
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	6.300.000	100 %	6.600.000	100 %	6.900.000	100 %	7.300.000	100 %	7.600.000	100 %	8.000.000	100 %	42.700.000	KECAMATAN DENGILO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	10.500.000	100 %	91.100.000	100 %	91.600.000	100 %	102.200.000	100 %	102.800.000	100 %	103.500.000	100 %	501.700.000	KECAMATAN MARISA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	21.400.000	100 %	105.500.000	100 %	60.100.000	100 %	62.800.000	100 %	65.700.000	100 %	68.700.000	100 %	384.200.000	KECAMATAN BUNTULIA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	21.000.000	100 %	75.000.000	100 %	28.000.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	213.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	17.800.000	100 %	68.600.000	100 %	25.600.000	100 %	26.600.000	100 %	27.600.000	100 %	27.600.000	100 %	193.800.000	KECAMATAN PATILANGGIO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	35.000.000	100 %	36.000.000	100 %	38.000.000	100 %	204.000.000	KECAMATAN RANDANGAN

7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	101.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	113.000.000	100 %	113.000.000	100 %	114.000.000	100 %	645.000.000	KECAMATAN TALUDITI
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	10.500.000	100 %	91.100.000	100 %	93.600.000	100 %	106.200.000	100 %	108.800.000	100 %	111.500.000	100 %	521.700.000	KECAMATAN WANGGARASI
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	10.500.000	100 %	91.100.000	100 %	91.600.000	100 %	102.200.000	100 %	102.800.000	100 %	103.500.000	100 %	501.700.000	KECAMATAN LEMITO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	17.000.000	100 %	75.000.000	100 %	28.000.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	209.000.000	KECAMATAN POPAYATO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	19.000.000	100 %	99.000.000	100 %	100.000.000	100 %	111.000.000	100 %	112.000.000	100 %	113.000.000	100 %	554.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang memasukkan dan menginput hasil musrenbangdes pada sistem aplikasi perencanaan	100 %	100 %	11.000.000	100 %	131.000.000	100 %	88.000.000	100 %	88.000.000	100 %	89.000.000	100 %	18.000.000	100 %	425.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	90 %	90 %	2.890.900.000	90 %	2.900.900.000	90 %	2.910.900.000	95 %	2.920.900.000	98 %	2.930.900.000	98 %	2.940.900.000	98 %	17.495.400.000	KECAMATAN PAGUAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	14.500.000	85 %	15.000.000	90 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	96.000.000	KECAMATAN MARISA

7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	-	85 %	12,000,000	90 %	13,000,000	100 %	13,000,000	100 %	14,000,000	100 %	14,000,000	100 %	66.000.000	KECAMATAN BUNTULIA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	12.500.000	85 %	25,000,000	90 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	137.500.000	KECAMATAN DUHIADAA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	50.000.000	85 %	52,000,000	90 %	54,000,000	100 %	56,000,000	100 %	58,000,000	100 %	30,000,000	100 %	300.000.000	KECAMATAN PATILANGGIO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	90 %	20.000.000	95 %	20,000,000	100 %	24,000,000	100 %	26,000,000	100 %	28,000,000	100 %	30,000,000	100 %	148.000.000	KECAMATAN TALUDITI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	14.500.000	85 %	15.000.000	90 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	96.000.000	KECAMATAN WANGGARASI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	14.500.000	85 %	15.000.000	90 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	96.000.000	KECAMATAN LEMITO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	40.000.000	85 %	50,000,000	90 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	25,000,000	100 %	265.000.000	KECAMATAN POPAYATO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	12.600.000	85 %	13.200.000	90 %	13.800.000	100 %	14.400.000	100 %	15.200.000	100 %	15.800.000	100 %	85.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan proses musrenbangdes tepat waktu	80 %	80 %	-	85 %	13.100.000	90 %	13.800.000	100 %	14.500.000	100 %	15.200.000	100 %	16.000.000	100 %	72.600.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	153.800.000	90 %	161.500.000	90 %	169.600.000	95 %	178.000.000	98 %	186.900.000	98 %	195.800.000	98 %	1.045.600.000	KECAMATAN PAGUAT

7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	170.000.000	90 %	178,500,000	90 %	187,400,000	95 %	196,800,000	98 %	206,600,000	98 %	216,500,000	98 %	1.155.800.000	KECAMATAN DENGILO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	391.000.000	80 %	409,800,000	85 %	429,300,000	90 %	429,800,000	95 %	451,300,000	100 %	473,800,000	100 %	2.585.000.000	KECAMATAN MARISA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	104.000.000	95 %	281,000,000	95 %	294,000,000	97 %	308,000,000	97 %	323,000,000	97 %	341,000,000	97 %	1.651.000.000	KECAMATAN BUNTULIA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	104.000.000	95 %	206,000,000	95 %	216,000,000	97 %	226,000,000	97 %	237,000,000	97 %	249,000,000	97 %	1.238.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	56.300.000	95 %	59,100,000	95 %	62,000,000	97 %	65,100,000	97 %	68,400,000	97 %	68,400,000	97 %	379.300.000	KECAMATAN PATILANGGIO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	100 %	90 %	150.000.000	90 %	157,000,000	90 %	165,000,000	95 %	172,000,000	98 %	181,000,000	98 %	189,000,000	98 %	1.014.000.000	KECAMATAN RANDANGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	233.000.000	95 %	234,000,000	98 %	245,000,000	98 %	257,000,000	98 %	268,000,000	98 %	279,000,000	98 %	1.516.000.000	KECAMATAN TALUDITI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	391.000.000	75 %	409.800.000	80 %	429.300.000	85 %	429.800.000	90 %	451.300.000	95 %	473.800.000	95 %	2.585.000.000	KECAMATAN WANGGARASI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	391.000.000	75 %	409.800.000	80 %	429.300.000	85 %	429.800.000	90 %	451.300.000	95 %	473.800.000	95 %	2.585.000.000	KECAMATAN LEMITO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	350.000.000	75 %	206.000.000	80 %	216.000.000	85 %	226.000.000	90 %	237.000.000	95 %	249.000.000	95 %	1.484.000.000	KECAMATAN POPAYATO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	67.000.000	95 %	179,000,000	97 %	187,000,000	97 %	176,000,000	97 %	185,000,000	97 %	195,000,000	97 %	989.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminal yang dapat diselesaikan	75 %	75 %	71.000.000	80 %	94.000.000	85 %	98.000.000	90 %	104,000,000	95 %	109,000,000	100 %	114,000,000	100 %	989.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT

7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	11.400.000	85 %	12.000.000	90 %	12.600.000	100 %	13.200.000	100 %	13.900.000	100 %	43.700.000	100 %	106.800.000	KECAMATAN PAGUAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	12.600.000	85 %	13.200.000	90 %	13.900.000	100 %	14.600.000	100 %	15.300.000	100 %	16.000.000	100 %	85.600.000	KECAMATAN DENGILO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	12.600.000	85 %	18.300.000	90 %	18.500.000	95 %	18.800.000	100 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	107.300.000	KECAMATAN MARISA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	4.600.000	100 %	24.900.000	100 %	26.100.000	100 %	27.400.000	100 %	28.600.000	100 %	29.900.000	100 %	141.500.000	KECAMATAN BUNTULIA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	8.000.000	100 %	30.000.000	100 %	31.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	168.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	50.100.000	85 %	51.900.000	90 %	53.900.000	95 %	55.900.000	100 %	58.000.000	100 %	58.000.000	100 %	327.800.000	KECAMATAN PATILANGGIO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	40.000.000	100 %	42.000.000	100 %	44.100.000	100 %	45.304.000	100 %	47.567.000	100 %	49.945.000	100 %	268.916.000	KECAMATAN RANDANGAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	27.000.000	90 %	28.000.000	95 %	29.000.000	100 %	29.500.000	100 %	30.000.000	100 %	31.000.000	100 %	174.500.000	KECAMATAN TALUDITI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	18.000.000	80 %	18.300.000	85 %	18.500.000	90 %	18.800.000	95 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	112.700.000	KECAMATAN WANGGARASI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	18.000.000	80 %	18.300.000	85 %	18.500.000	90 %	18.800.000	95 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	112.700.000	KECAMATAN LEMITO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	44.000.000	100 %	30.000.000	100 %	31.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	204.000.000	KECAMATAN POPAYATO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	80 %	80 %	19.000.000	85 %	18.300.000	90 %	18.500.000	95 %	18.800.000	100 %	19.100.000	100 %	20.000.000	100 %	113.700.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR

7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklajuti rekomendasi dan hasil pembinaan dari kecamatan	100 %	100 %	9.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	84.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan idiologi pancasila kepada Ormas, OKP dan LSM	95 %	95 %	20.000.000	95 %	141.000.000	96 %	149.000.000	97 %	155.000.000	98 %	163.000.000	98 %	171.000.000	98 %	799.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang mendapatkan pembinaan	50 %	50 %	905.000.000	70 %	1.445.000.000	75 %	1.625.000.000	80 %	1.725.000.000	85 %	1.803.000.000	90 %	1.885.000.000	90 %	9.388.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS yang mendapatkan hibah dari pemerintah daerah dan memasukkan laporan tepat waktu dan akuntabel	64 %	69 %	2.940.000.000	72 %	3.087.000.000	75 %	3.241.000.000	80 %	3.404.000.000	83 %	3.574.000.000	85 %	3.572.000.000	85 %	19.818.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik yang terpantau	50 %	50 %	112.000.000	60 %	112.000.000	65 %	125.000.000	70 %	150.000.000	75 %	150.000.000	80 %	150.000.000	80 %	799.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang dapat ditangani	60 %	75 %	2.073.000.000	80 %	2.170.000.000	85 %	2.359.000.000	90 %	2.520.000.000	93 %	2.650.000.000	95 %	2.770.000.000	95 %	14.542.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X																				
X	**X X**																			
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	70.73 Nilai	70.73 Nilai	30.400.000.000	72.30 Nilai	31,920,000,000	75.40 Nilai	33,516,000,000	77.20 Nilai	35,192,000,000	79.00 Nilai	36,951,000,000	80 Nilai	38,799,000,000	80 Nilai	206.778.000.000	DINAS PENDIDIKAN

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70.73 Nilai	70 Nilai	0	72.20 Nilai	0	73.49 Nilai	0	75.80 Nilai	0	76.68 Nilai	0	80.30 Nilai	0	80.30 Nilai	0	DINAS PENDIDIKAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	85%	85%	0	87 %	0	87 %	0	90 %	0	91 %	0	93 %	0	93 %	0	DINAS PENDIDIKAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.50 Nilai	78.50 Nilai	33.921.000.000	80.5 Nilai	36,699,000,000	84.50 Nilai	38,534,000,000	86.50 Nilai	40,461,000,000	88.5 Nilai	42,484,000,000	90 Nilai	42,484,000,000	90 Nilai	234.583.000.000	DINAS KESEHATAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	40.22 Nilai	55 Nilai	0	60 Nilai	0	70 Nilai	0	75 Nilai	0	80 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	DINAS KESEHATAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	80%	80%	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS KESEHATAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.25 Nilai	80.25 Nilai	12.336.000.000	81.50 Nilai	12.953.000.000	83.3 Nilai	13.598.000.000	84.5 Nilai	14.512.000.000	86.25 Nilai	15.202.000.000	88.5 Nilai	15.931.000.000	88.5 Nilai	84.532.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	50 Nilai	55 Nilai	0	60 Nilai	0	70 Nilai	0	75 Nilai	0	80 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	79%	79%	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.74 Nilai	78.27 Nilai	7.840.000.000	82.19 Nilai	10,220,000,000	86.30 Nilai	8,786,000,000	90.61 Nilai	7,912,000,000	95.14 Nilai	8,150,000,000	100 Nilai	8,399,000,000	100 Nilai	51.307.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	73 Nilai	73,83 Nilai	0	76,04 Nilai	0	78,33 Nilai	0	81,46 Nilai	0	85,53 Nilai	0	87,24 Nilai	0	88,99 Nilai	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	0 %	80 %	0	85 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	67.9 Nilai	68 Nilai	4.894.000.000	69 Nilai	5,037,000,000	70 Nilai	5,884,000,000	71 Nilai	5,300,000,000	72 Nilai	5,514,000,000	73 Nilai	5,735,000,000	74 Nilai	32.364.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	60.14 Nilai		0	62 Nilai	0	63 Nilai	0	64 Nilai	0	65 Nilai	0	66 Nilai	0	66 Nilai	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %		0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	50 Nilai	50 Nilai	3.657.000.000	65 Nilai	3.711.000.000	75 Nilai	3.694.000.000	85 Nilai	3.695.000.000	100 Nilai	3.696.000.000	100 Nilai	3.697.000.000	100 Nilai	22.150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	50 Nilai	60 Nilai	0	70 Nilai	0	70 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	75 %	0	80 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	73.76 Nilai	73.76 Nilai	4.699.000.000	79.88 Nilai	4,651,000,000	83.76 Nilai	4,760,000,000	85.88 Nilai	4,850,000,000	87.5 Nilai	4,920,000,000	89.99 Nilai	5,045,000,000	89.99 Nilai	28.925.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	76.90 Nilai	80 Nilai	0	85 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	95 Nilai	0	95 Nilai	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76.90 %	80%	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	95 %	0	95 %	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.75 Nilai	76.80 Nilai	4.291.000.000	76.82 Nilai	5.121.000.000	76.85 Nilai	6.049.000.000	76.90	5.249.000.000	76.95 Nilai	5.521.000.000	77 Nilai	5.788.000.000	77 Nilai	32.019.000.000	DINAS SOSIAL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	80 Nilai	80.95 Nilai	0	81 Nilai	0	82 Nilai	0	83 Nilai	0	84 Nilai	0	85 Nilai	0	77 Nilai	0	DINAS SOSIAL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	85 %	86 %	0	87 %	0	88 %	0	89 %	0	90 %	0	90 %	0	95 %	0	DINAS SOSIAL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	73.5 Nilai	73.5 Nilai	3.831.000.000	74 Nilai	5.564.000.000	75 Nilai	4.611.000.000	75 Nilai	4.686.000.000	75 Nilai	4.926.000.000	75 Nilai	5.199.000.000	75 Nilai	28.817.000.000	DINAS PANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70 Nilai	72 Nilai	0	74 Nilai	0	76 Nilai	0	76 Nilai	0	76 Nilai	0	76 Nilai	0	80 Nilai	0	DINAS PANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS PANGAN

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75 Nilai	75 Nilai	4.894.000.000	75 Nilai	5.439.000.000	75 Nilai	6.213.000.000	75 Nilai	5.640.000.000	75 Nilai	5.861.000.000	75 Nilai	6.090.000.000	75 Nilai	34.137.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	83.57 Nilai	0	83.57 Nilai	0	83.57 Nilai	0	83.57 Nilai	0	83.57 Nilai	0	83.57 Nilai	0	83.57 Nilai	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	76 %	0	76 %	0	76 %	0	76 %	0	76 %	0	76 %	0	76 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.85 Nilai	76.85 Nilai	4.877.000.000	77 Nilai	4.900.000.000	77.85 Nilai	4.900.000.000	77.88 Nilai	4.900.000.000	80 Nilai	4.900.000.000	80 Nilai	4.932.000.000	80 Nilai	29.409.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	90 Nilai	92 Nilai	0	93 Nilai	0	93 Nilai	0	94 Nilai	0	95 Nilai	0	95 Nilai	0	95 Nilai	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	80 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	71.95 Nilai	71.95 Nilai	2.986.000.000	75.89 Nilai	2.989.000.000	75.89 Nilai	2.991.000.000	75.89 Nilai	2.993.000.000	75.89 Nilai	2.996.000.000	75.89 Nilai	2.998.000.000	75.89 Nilai	20.939.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	71.95 Nilai	71.95 Nilai	0	71.95 Nilai	0	71.95 Nilai	0	71.95 Nilai	0	71.95 Nilai	0	71.95 Nilai	0	71.95 Nilai	0	DINAS PERHUBUNGAN

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %		0	75 %	0	75 %	0	80 %	0	80 %	0	90 %	0	95 %	0	DINAS PERHUBUNGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75.25 Nilai	75.50 Nilai	4.665.000.000	80 Nilai	5.183.000.000	80 Nilai	5.161.000.000	80 Nilai	5.188.000.000	80 Nilai	5.166.000.000	80 Nilai	5.169.000.000	80 Nilai	30.532.000.000	DINAS PERIKANAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	75.25 Nilai	75.25 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	DINAS PERIKANAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	80 %	0	80 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS PERIKANAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.75 Nilai	76.80 Nilai	3.368.000.000	76.82 Nilai	5.403.000.000	76.85 Nilai	4.248.000.000	76.90 Nilai	4.353.000.000	76.95 Nilai	4.662.000.000	77 Nilai	4.973.000.000	77 Nilai	27.007.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	8.36 Nilai	0	75 Nilai	0	78 Nilai	0	80 Nilai	0	82 Nilai	0	85 Nilai	0	85 Nilai	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %	60 %	0	60 %	0	70 %	0	80 %	0	90 %	0	100 %	0	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	74.18 Nilai	74.20 Nilai	3.681.000.000	77.05 Nilai	6,272,000,000	80 Nilai	6,900,000,000	80.25 Nilai	7,590,000,000	80.50 Nilai	8,349,000,000	80.75 Nilai	9,184,000,000	90 Nilai	41.976.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	0 Nilai	0	65 Nilai	0	70 Nilai	0	75 Nilai	0	80 Nilai	0	85 Nilai	0	90 Nilai	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	99.93 %	99.95 %	0	99.96 %	0	99.97 %	0	99.98 %	0	99.99 %	0	100 %	0	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	74.35 Nilai	74.65 Nilai	3.275.621.000	78 Nilai	3.601.827.000	79 Nilai	3.804.416.000	80 Nilai	3.975.133.000	81 Nilai	4.164.779.000	82 Nilai	4.357.930.000	82 Nilai	23.179.706.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	0 Nilai	0	75 Nilai	0	80 Nilai	0	85 Nilai	0	90 Nilai	0	95 Nilai	0	100 Nilai	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	99.45 %	99.65 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75,79 Nilai	75,79 Nilai	6.133.760.000	76 Nilai	6.134.420.000	76 Nilai	6.134.950.000	77 Nilai	6.135.510.000	77 Nilai	6.136.110.000	80 Nilai	6.136.110.000	80 Nilai	36.810.860.000	DINAS PENANAMAN MODAL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai	81.08 Nilai	0	82 Nilai	0	83 Nilai	0	83 Nilai	0	83 Nilai	0	83 Nilai	0	83 Nilai	0	DINAS PENANAMAN MODAL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	69.2 Nilai	70%	3.950.000.000	73 Nilai	4.148.000.000	75 Nilai	4,355,000,000	80 Nilai	4,573,000,000	85 Nilai	4,801,000,000	90 Nilai	5,041,000,000	90 Nilai	26.867.500.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	69.2 Nilai	0%	0	73 Nilai	0	75 Nilai	0	80 Nilai	0	85 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	70 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	72 Nilai	72 Nilai	3.701.000.000	73 Nilai	4,270,000,000	74 Nilai	4,483,000,000	80 Nilai	4,707,000,000	85 Nilai	4,939,000,000	90 Nilai	5,183,000,000	90 Nilai	27.283.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	60 Nilai	60 Nilai	0	65 Nilai	0	65 Nilai	0	80 Nilai	0	85 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	75 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	85 %	0	85 %	0	85 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	76.8 Nilai	79.80 Nilai	15.591.000.000	82.5 Nilai	17,048,000,000	83.5 Nilai	16,428,000,000	84.5 Nilai	17,030,000,000	85.5 Nilai	17,805,000,000	86.5 Nilai	18,617,000,000	86.5 Nilai	102.519.000.000	DINAS PERTANIAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	79.55 Nilai	79.65 Nilai	0	79,75 Nilai	0	79,95 Nilai	0	79,85 Nilai	0	80,05 Nilai	0	81.05 Nilai	0	80 Nilai	0	DINAS PERTANIAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS PERTANIAN

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	74.3 Nilai	76.8 Nilai	4.172.900.000	76.82 Nilai	4.443.700.000	76.82 Nilai	4.321.600.000	76.85 Nilai	4.809.500.000	76.9 Nilai	4.707.300.000	76.95 Nilai	4.987.600.000	76.95 Nilai	27.442.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	74.3 Nilai	76.8 Nilai	0	76.82 Nilai	0	76.82 Nilai	0	76.85 Nilai	0	76.9 Nilai	-	76.95 Nilai	0	77 Nilai	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	80 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	95 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75.51 Nilai	75.55 Nilai	3.573.000.000	75.57 Nilai	3.842.000.000	80 Nilai	3,832,000,000	80 Nilai	3,867,000,000	80 Nilai	3,937,000,000	80 Nilai	3,993,000,000	80 Nilai	23.044.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	75.51 Nilai	75.55 Nilai	0	75.57 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	77.02 Nilai	77.02 Nilai	4.584.000.000	78 Nilai	4,614,000,000	80 Nilai	4,625,000,000	80 Nilai	4,635,000,000	80 Nilai	4,646,000,000	80 Nilai	4,699,000,000	80 Nilai	27.803.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	97.55 Nilai	97.57 Nilai	0	97.57 Nilai	0	97.58 Nilai	0	97.58 Nilai	0	97.59 Nilai	0	97.60 Nilai	0	97.60 Nilai	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	79.6 Nilai	85.50 Nilai	14.220.000.000	83.50 Nilai	14,166,000,000	84.50 Nilai	14,191,000,000	85.50 Nilai	14,216,000,000	86.50 Nilai	14,246,000,000	87.50 Nilai	14,281,000,000	87.50 Nilai	85.320.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70 Nilai	74 Nilai	0	76 Nilai	0	78 Nilai	0	79 Nilai	0	80 Nilai	0	82 Nilai	0	82 Nilai	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	77.17 Nilai	80.50 Nilai	4.785.000.000	82.20 Nilai	4,785,000,000	84.50 Nilai	4,785,000,000	86.20 Nilai	4,785,000,000	88 Nilai	4,785,000,000	90.10 Nilai	4,785,000,000	90.10 Nilai	28.710.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	83.63 Nilai	83.63 Nilai	0	83.63 Nilai	0	83.63 Nilai	0	83.63 Nilai	0	83.63 Nilai	0	83.63 Nilai	0	83.63 Nilai	0	INSPEKTORAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	0 %	0 %	0	50 %	0	60 %	0	70 %	0	75 %	0	75 %	0	75 %	0	INSPEKTORAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	69.70 Nilai	69.70 Nilai	4.246.000.000	69.80 Nilai	4,608,000,000	69.90 Nilai	4,839,000,000	70 Nilai	5,081,000,000	70.10 Nilai	5,081,000,000	70.20 Nilai	5,335,000,000	70.20 Nilai	29.190.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	83.29 Nilai	83.29 Nilai	0	83.5 Nilai	0	83.55 Nilai	0	83.6 Nilai	0	83.65 Nilai	0	83.7 Nilai	0	83.75 Nilai	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	75 %	0	77 %	0	80 %	0	82 %	0	85 %	0	87 %	0	90 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	65 Nilai	67 Nilai	6.147.000.000	90 Nilai	6.555.000.000	95 Nilai	7.278.000.000	95 Nilai	7.642.000.000	95 Nilai	190.368.000.000	95 Nilai	199.432.000.000	95 Nilai	417.422.000.000	KECAMATAN PAGUAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	1.05 Nilai		0	1.20 Nilai	0	1.30 Nilai	0	1.30 Nilai	0	1.50 Nilai	0	1.70 Nilai	0	1.70 Nilai	0	KECAMATAN PAGUAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	64.75 %		0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	-	90 %	0	KECAMATAN PAGUAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	78 Nilai	79 Nilai	2.805.000.000	80 Nilai	2.945.000.000	82,8 Nilai	3.092.000.000	83 Nilai	3.247.000.000	84 Nilai	3.409.000.000	85 Nilai	3.571.000.000	85 Nilai	19.069.000.000	KECAMATAN DENGILO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	5.55 Nilai	5.63 Nilai	0	5.70 Nilai	0	5.75 Nilai	0	5.90 Nilai	0	5.92 Nilai	0	5.95 Nilai	0	5.95 Nilai	0	KECAMATAN DENGILO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	79 %	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	KECAMATAN DENGILO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	66.50 Nilai	70 Nilai	2.462.000.000	72 Nilai	2,719,000,000	73 Nilai	2,790,000,000	74.25 Nilai	2,884,000,000	75 Nilai	3,044,000,000	76 Nilai	3,166,000,000	76 Nilai	17.065.000.000	KECAMATAN MARISA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70.25 Nilai	83.47 Nilai	0	84 Nilai	0	84.4 Nilai	0	85 Nilai	0	85.67 Nilai	0	86 Nilai	0	88 Nilai	0	KECAMATAN MARISA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	77 %	0	80 %	0	82 %	0	84 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	KECAMATAN MARISA

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	61.90 Nilai	70 Nilai	2.188.000.000	75 Nilai	2,438,000,000	78 Nilai	2,492,000,000	80 Nilai	2,534,000,000	85 Nilai	2,700,000,000	90 Nilai	2,794,000,000	90 Nilai	15.146.000.000	KECAMATAN BUNTULIA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	83.36 Nilai	80 Nilai	0	70 Nilai	0	72 Nilai	0	74 Nilai	0	74 Nilai	0	74 Nilai	0	80 Nilai	0	KECAMATAN BUNTULIA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	78 %	0	80 %	0	82 %	0	84 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	KECAMATAN BUNTULIA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	60 Nilai	60 Nilai	2.648.000.000	70 Nilai	2.816.000.000	75 Nilai	3.059.000.000	80 Nilai	2.924.000.000	85 Nilai	3.103.000.000	90 Nilai	3.204.000.000	90 Nilai	17.754.000.000	KECAMATAN DUHIADAA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	0 Nilai		0	70 Nilai	0	75 Nilai	0	80 Nilai	0	85 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	KECAMATAN DUHIADAA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %		0	70 %	0	75 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	KECAMATAN DUHIADAA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	72.53 Nilai	75 Nilai	2.427.000.000	77 Nilai	2,598,000,000	79 Nilai	2,753,000,000	82 Nilai	2,890,000,000	83 Nilai	3,034,000,000	84 Nilai	3,039,000,000	84 Nilai	16.741.000.000	KECAMATAN PATILANGGIO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	23.42 Nilai		0	72 Nilai	0	75 Nilai	0	76 Nilai	0	78 Nilai	0	79 Nilai	0	80 Nilai	0	KECAMATAN PATILANGGIO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %		0	80 %	0	82 %	0	83 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	KECAMATAN PATILANGGIO

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	55 Nilai	55 Nilai	2.140.000.000	65 Nilai	2,023,000,000	68 Nilai	2,122,000,000	72 Nilai	2,477,000,000	74 Nilai	2,601,000,000	80 Nilai	2,728,000,000	80 Nilai	14.091.000.000	KECAMATAN RANDANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	29.67 Nilai	62 Nilai	0	65 Nilai	0	68 Nilai	0	72 Nilai	0	74 Nilai	0	80 Nilai	0	90 Nilai	0	KECAMATAN RANDANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	78 %		0	82 %	0	84 %	0	86 %	0	88 %	0	90 %	0	90 %	0	KECAMATAN RANDANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	71.8 Nilai	80 Nilai	3.290.000.000	80 Nilai	3,396,000,000	80 Nilai	3,505,000,000	85 Nilai	3,617,000,000	85 Nilai	2,724,000,000	90 Nilai	2,828,000,000	90 Nilai	19.360.000.000	KECAMATAN TALUDITI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	29.83 Nilai		0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	85 Nilai	0	85 Nilai	0	90 Nilai	0	90 Nilai	0	KECAMATAN TALUDITI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	79 %		0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	KECAMATAN TALUDITI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	64.50 Nilai	70 Nilai	2.462.000.000	72 Nilai	2,723,000,000	73 Nilai	2,797,000,000	74.3 Nilai	2,926,000,000	75 Nilai	3,068,000,000	76 Nilai	3,217,000,000	76 Nilai	17.193.000.000	KECAMATAN WANGGARASI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	10.56 Nilai	70 Nilai	0	80 Nilai	0	82 Nilai	0	84 Nilai	0	85.67 Nilai	0	86 Nilai	0	86 Nilai	0	KECAMATAN WANGGARASI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	77 %	0	78 %	0	80 %	0	82 %	0	83 %	0	83.25 %	0	84 %	0	KECAMATAN WANGGARASI

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	66.50 Nilai	70 Nilai	2.462.000.000	72 Nilai	2,462,000,000	73 Nilai	2,719,000,000	74.25 Nilai	2,790,000,000	75 Nilai	2,884,000,000	76	3,044,000,000	76 Nilai	16.361.000.000	KECAMATAN LEMITO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	70.75 Nilai	70.75 Nilai	0	84 Nilai	0	84.4 Nilai	0	85 Nilai	0	85.67 Nilai	0	86 Nilai	0	88 Nilai	0	KECAMATAN LEMITO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	77 %	0	78 %	0	80 %	0	82 %	0	83 %	0	83.25 %	0	84 %	0	KECAMATAN LEMITO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	63.79 Nilai	70 Nilai	2.746.000.000	75 Nilai	2,816,000,000	78 Nilai	3,059,000,000	80 Nilai	2,924,000,000	85 Nilai	3,103,000,000	90 Nilai	3,204,000,000	90 Nilai	17.852.000.000	KECAMATAN POPAYATO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	56.49 Nilai	75 Nilai	0	80 Nilai	0	83 Nilai	0	85 Nilai	0	87 Nilai	0	88 Nilai	0	90 Nilai	0	KECAMATAN POPAYATO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	75 %	78 %	0	80 %	0	83 %	0	85 %	0	87 %	0	88 %	0	90 %	0	KECAMATAN POPAYATO
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	64.98 Nilai	70 Nilai	2.541.000.000	75 Nilai	2,747,000,000	78 Nilai	2,881,000,000	80 Nilai	3,022,000,000	85 Nilai	3,169,000,000	90 Nilai	3,324,000,000	90 Nilai	17.684.000.000	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	64 Nilai	64,22 Nilai	0	74 Nilai	0	84 Nilai	0	85 Nilai	0	85 Nilai	0	86 Nilai	0	88 Nilai	0	KECAMATAN POPAYATO TIMUR
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	77 %	0	78 %	0	80 %	0	82 %	0	84 %	0	86 %	0	88 %	0	KECAMATAN POPAYATO TIMUR

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	63 Nilai	66 Nilai	2.439.000.000	70 Nilai	2,611,000,000	75 Nilai	2,738,000,000	80 Nilai	2,879,000,000	85 Nilai	3,020,000,000	90 Nilai	3,168,000,000	90 Nilai	16.855.000.000	KECAMATAN POPAYATO BARAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	65 Nilai	73.73 Nilai	0	75 Nilai	0	78 Nilai	0	81 Nilai	0	84 Nilai	0	86 Nilai	0	88 Nilai	0	KECAMATAN POPAYATO BARAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	76 %	78 %	0	80 %	0	82 %	0	84 %	0	85 %	0	87 %	0	90 %	0	KECAMATAN POPAYATO BARAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	75.5 Nilai	75.5 Nilai	3.946.000.000	77 Nilai	4,114,000,000	80 Nilai	4,116,000,000	80 Nilai	4,129,000,000	80 Nilai	4,131,000,000	80 Nilai	4,133,000,000	80 Nilai	24.569.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	75 Nilai	75 Nilai	0	75 Nilai	0	75 Nilai	0	75 Nilai	0	75 Nilai	0	75 Nilai	0	75 Nilai	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %	70 %	0	75 %	0	75 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	58.40 Nilai	58.40 Nilai	34.854.000.000	61.25 Nilai	38,801,000,000	63.15 Nilai	40,741,000,000	65.55 Nilai	43,028,000,000	67.25 Nilai	44,917,000,000	69.35 Nilai	44,917,000,000	69.35 Nilai	247.258.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	58.95 Nilai	59 Nilai	0	62.98 Nilai	0	64.50 Nilai	0	66.35 Nilai	0	68.50 Nilai	0	70.25 Nilai	0	72,45 Nilai	0	SEKRETARIAT DPRD
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	60 %	63 %	0	65 %	0	67 %	0	68 %	0	70 %	0	70 %	0	72 %	0	SEKRETARIAT DPRD

X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang mendapatkan nilai LAKIP BB - AA	77.2 Nilai	77.2 Nilai	29.032.267.767	78 Nilai	28.710.784.993	78 Nilai	29.986.988.243	79 Nilai	31.332.251.655	79 Nilai	32.744.778.238	80 Nilai	34.227.931.150	80 Nilai	186.035.002.046	SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	62 Nilai			65 Nilai	0	65 Nilai	0	65 Nilai	0	71 Nilai	0	71 Nilai	0	71 Nilai	0	SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan OPD	0 %			80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penerapan PMRB di kabupaten Pohuwato	23,81%	35,71%	-	65 Nilai	0	65 Nilai	0	65 Nilai	0	71 Nilai	0	71 Nilai	0	71 Nilai	0	SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan tugas keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	100 %	-	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk mengetahui apakah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai atau tidak, maka perlu dirumuskan dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU ini menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan penyelenggaran pemerintahan baik dalam satu tahun maupun pada akhir masa jabatan.

Rumusan IKU diambil dari hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. IKU tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan oleh OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang juga dilaksanakan OPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2020 merupakan tahun dasar, tahun 2021 merupakan tahun transisi dan indikatornya masih angka proyeksi, tahun 2022 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2026 merupakan tahun ke lima RPJMD.

Indikator penyelenggaran pembangunan daerah mencakup indikator Kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 8.1. Indikator ini merupakan indikator pencapaian tujuan yang menjadi pengukur ketercapaian kinerja kepala daerah. selanjutnya tabel 8.2. disajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pencapaian sasaran yang akan menjadi tolok ukur kinerja pimpinan OPD.

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026

NO	indikator	Satuan	Kndisi Awal (2020)	Transisi 2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
					I	II	II	IV	V
1	IPM	Nilai	65,37	65,88	66,25	66,73	67,22	67,85	68,20
2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	50,55	63,22	65,77	69,2	73,22	76,75	79,5
3	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	%	60,23	62,55	67,53	70,11	74,33	77,65	80,17
4	Pertumbuhan ekonomi	%	-0,18	2,5	3,7	4,5	5,5	5,8	6,5
5	PDRB ADHK	Rp (000.000.000)	4.712	4.932	5.201	5.805	6.421	7.021	7.025
6	PDRB ADHB	Rp (000.000.000)	7.002	7.365	7.655	8.155	8.650	9.050	9.765
7	Gini Ratio	%	0.412	0,413	0,411	0,408	0,399	0,312	0,299
8	Angka Kemiskinan	%	17,62	17,68	17,01	16,50	16,00	15,61	14,21
9	Nilai Refomasi Birokrasi	%	60,50	65,00	70,00	70,50	80,00	85,00	85,00
10	Indeks Ketertiban umum	%	80,55	82,31	84,27	86,55	88,22	90,12	93,36

Sumber : Baperlitbang 2021

Pada tabel 8.1 nampak terdapat 11 indikator kinerja utama (IKU) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan setiap tahun sebagaimana disajikan pada tabel 5.2 bab V. IKU tersebut diatas menjadi pengukur pencapaian kenerja Bupati dan wakil bupati. Sumber data digunakan berasal dari hasil BPS Kabupaten Pohuwato setiap tahun, hasil riset/survei dilakukan pemda kerjasama perguruan tinggi dan hasil perhitungan oleh Baperlitbang/Bappeda.

Selanjutnya pada tabel 8.2 terdapat 16 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan setiap tahunnya. IKU ini menjadi pengukur kinerja pimpinan perangkat daerah setiap tahunnya. Sumber

data berasal dari BPS Kabupaten Pohuwato, Hasil riset dan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh OPD masing-masing.

Tabel 8.2

Indikator Kinerja Utama Sasaran Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kinerja Akhir 2026
1	Indeks Kesehatan	%	60,02	63,21	65,17	68,90	72,13	76,23	80,11
2	Angka Stunting	%	7,43	8,10	7,99	6,50	6,11	5,99	5,50
3	Indeks Pendidikan	%	64,33	64,99	65,85	68,01	73,11	76,42	81,22
4	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	80,22	80,22	83,67	85,77	89,11	92.75	97,22
5	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	50,23	50,23	55,60	62,43	67,65	72,65	77,11
6	Indeks Infrastruktur Pemukiman	%	50,55	55,72	60,62	65,55	70,25	75,55	80,21
7	Indeks Kualitas Lingkungan	%	62,44	65,75	70,27	75,44	80,32	85,52	90,11
8	Rata-rata Konsumsi Perkapita (ADHB)	Rp.(000)	21.320	21.525	22.800	23.400	24.100	25.000	25.500
9	Pengeluaran Perkapita	Rp.(000)	10.500	10.800	11.100	12.350	13.100	13.950	14.600
10	Inflasi	%	0,18	1,12	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
11	Menurunnya angka pengangguran	%	3,00	3,00	2,85	2,80	2,75	2,65	2,50
12	Nilai Realisasi Investasi	Rp (000.000)	150.000	209.673	293.542	410.959	575.342	805.480	966.576
13	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	63,16	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,5	80,11	85,21	90,22	93.76	94,42	96,55
15	Cakupan penegakan perda keamanan dan ketertiban masyarakat	%	70,66	72,33	75,21	77,22	80,33	84,78	90,21
16	Cakupan Pembinaan kegiatan pengamalan nilai spritual	%	95	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Sumber : Baperlitbang 2021

Selanjutnya IKK pencapaian program pada masing-masing OPD yang digunakan untuk mengukur keberhasilan outcome setiap program telah disajikan pada bab VI tabel 6.2.

BAB IX
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PohuwatoTahun 2021 – 2026 merupakan dokumen yang telah menjabarkan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati serta juga telah diselaraskan dengan program-program prioritas Nasional. Di dalamnya telah terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan serta program unggulan yang telah diharmoniskan outputnya dengan nomen klatur program yang terdapat dalam SIPD

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan RKPD hingga tahun 2026. Jika Pilkada serentak tahun 2024 akan terlaksana, maka seluruh arahan perencanaan dan penganggaran pada masa transisi tersebut akan mengacu dan dilaksanakan sesuai arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari kementerian dalam negeri.

9.2. Kaidah Pelaksanaan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 menjadi acuan utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Oleh sebab itu perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026.
2. Seluruh Renstra OPD harus berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026, selanjutnya dari Renstra OPD tersebut menjadi acuan

Renja OPD yang merupakan dokumen tahunan dalam bentuk implementasi program dan kegiatan yang berorientasi mewujudkan target-target RPJMD

3. Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pohuwato dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Gorontalo
4. Seluruh Pimpinan OPD beserta jajarannya wajib menjamin konsistensi Renstra OPD 2021 – 2026 dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026
5. Program prioritas daerah yang berkorelasi dengan prioritas provinsi dan nasional jika terdapat kemungkinan tidak mampu dialokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema antaranya melalui CSR (Corporate Social Responcibility), kerjasama dan kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Dalam hal pelaksanaan RPJMD jika sudah tercapai target programnya, maka perlu dirumuskan kembali target kinerja yang baru yang selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Marisa, Agustus 2021
BUPATI POHUWATO

SAIPUL A. MBUINGA